



**PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

PALANGKA RAYA
Kota Cantik



KATA PENGANTAR

Tepat pada Tanggal 24 September 2018, Saya bersama Saudari Wakil Walikota Umi Mastikah diperkenankan untuk memimpin Kota Palangka Raya selama lima tahun ke depan. Hal ini merupakan langkah awal bagi kami memenuhi harapan seluruh warga untuk terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi kota yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua, sebagaimana visi dan misi kami yang tertuang pada Perubahan RPJMD ini.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT dan atas rahmat dan karunia-Nya pula, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Substansi RPJMD adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota dalam kurun waktu lima tahun ke depan kepada warga Kota Palangka Raya. Penyusunan Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta menunjang implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Tujuan penyusunan Perubahan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kota Palangka Raya seutuhnya selama lima tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya, Renstra dan Renja Perangkat Daerah dalam merencanakan Program Prioritas dan Kegiatan-kegiatan setiap tahunnya yang menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya.

Harapan kami dalam mengemban amanah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya adalah mengajak semua pemangku kepentingan secara bersama-sama berbuat untuk membenahi dan menyejahterakan warga Kota Palangka Raya secara lahir dan batin. Dengan bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas Insya Allah kita dapat wujudkan cita-cita, visi dan misi Kota Palangka Raya.

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

b. bahwa dalam rangka menunjang Implementasi Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

36. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
37. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
38. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR
2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 6 dan angka 7 di ubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
 4. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas

dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Palangka Raya.

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah.
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palangka Raya adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Palangka Raya untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen

perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.

17. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
18. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

26. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
 27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Jabatan Kepala Daerah berikutnya.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan yang bersifat parsial terhadap dokumen RPJMD, dan tidak mempengaruhi terhadap perubahan capaian sasaran, serta tidak mengubah target capaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan dan target indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat indikatif sehingga apabila terjadi penyesuaian dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2021 sampai dengan tahun 2023 berpedoman pada peraturan daerah ini.

3. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 JULI 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 JULI 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01, 22/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023

I. UMUM

RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi. Selain itu, RPJMD tersebut memuat Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Palangka Raya.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun

pertama pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR

EXECUTIVE SUMMARY

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merujuk pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Ayat (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila: huruf c terjadi perubahan yang mendasar; Ayat (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila: huruf b sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun. Ayat (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Ayat (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 344 yang berbunyi tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 70 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

Lebih lanjut dalam Pasal 71 dijelaskan apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Tindak lanjut dari perubahan Organisasi Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, berimplikasi pada :

1. Penambahan Tujuan Daerah, Perubahan Nomenklatur Sasaran Daerah, dan Perubahan Nomenklatur Sasaran Perangkat Daerah tertuang dalam Bab 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
2. Perubahan Kinerja Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah tertuang dalam Bab 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
3. Perubahan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tertuang dalam Bab 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Dalam penjelasan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah pada ketentuan peralihan Pasal 8 dijelaskan: Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.



DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR DIAGRAM	xi
BAB I PENDAHULUAN	I - 2
1.1 Latar Belakang	I - 2
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 6
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 7
1.5 Sistematika Penulisan	I - 8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis	II - 1
2.1.1 Geografi	II - 1
2.1.2 Aspek Demografis	II - 5
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II - 6
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	II - 6
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB	II - 6
2.2.1.2 Inflasi	II - 13
2.2.1.3 PDRB Perkapita	II - 14
2.2.1.4 Angka Kemiskinan	II - 14
2.2.1.5 Tingkat pengangguran terbuka	II - 15
2.2.1.6 Indeks Gini	II - 15
2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II - 16
2.2.2 Kesejahteraan Sosial	II - 16
2.2.2.1 Pendidikan	II - 16
2.2.2.2 Kesehatan	II - 17
2.2.2.3 Ketenagakerjaan	II - 21
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II - 21
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	II - 21
2.3.1.1 Pendidikan	II - 21
2.3.1.2 Kesehatan	II - 25
2.3.1.3 Pekerjaan Umum	II - 29
2.3.1.4 Perhubungan	II - 31
2.3.1.5 Lingkungan Hidup	II - 34
2.3.1.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II - 36
2.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II - 37





2.3.1.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II - 39
2.3.1.9 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	II - 40
2.3.1.10 Penanaman Modal	II - 41
2.3.1.11 Kebudayaan dan Pariwisata	II - 42
2.3.1.12 Kesatuan Bangsa dan Politik	II - 43
2.3.1.13 Satuan Polisi Pamong Praja	II - 45
2.3.1.14 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	II - 47
2.3.1.15 Ketahanan Pangan	II - 48
2.3.1.18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II - 49
2.3.1.19 Komunikasi dan Informatika	II - 50
2.3.1.20 Persandian dan Statistik	II - 58
2.3.2 Urusan Pilihan	II - 59
2.3.2.1 Pertanian Tanaman Pangan	II - 59
2.3.2.2 Kehutanan dan Perkebunan	II - 59
2.3.2.3 Peternakan dan Perikanan	II - 60
2.3.2.4 Kepariwisata	II - 62
2.3.2.5 Perdagangan	II - 67
2.3.2.6 Perindustrian	II - 68
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II - 69
2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah	II - 69
2.4.2 Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur	II - 70
2.4.3 Perkembangan Investasi	II - 71
2.4.4 Sumber Daya Manusia	II - 71
2.4.5 Iklim Berinvestasi	II - 72
2.4.6 Pertanian	II - 73
2.4.7 Peternakan	II - 74
2.4.8 Perikanan	II - 74
2.4.9 Industri	II - 75
2.4.10 Angka Kriminalitas	II - 76
2.4.11 Sumber Daya Manusia	II - 76
2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah 2013-2017 dan Tahun 2018 – 2019	II - 77
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III - 1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III - 1
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III - 1
3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah	III - 1
3.1.1.2 Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III - 9
3.1.2 Analisis Neraca Daerah	III - 15
3.1.2.1 Aset Daerah	III - 22
3.1.2.2 Kewajiban	III - 23
3.1.2.3 Ekuitas Dana	III - 23
3.1.1.4 Analisis Rasio	III - 24
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017	III - 25
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	III - 28
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III - 33





3.2.3 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	III - 34
3.2.4 Kerangka Pendanaan	III - 36
3.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III - 37
3.3.1 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III - 43
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH....	IV - 1
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah	IV - 1
4.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	IV - 1
4.1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	IV - 7
4.1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan	IV - 10
4.1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Ekonomi	IV - 14
4.2 Isu Strategis	IV - 19
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V - 1
5.1 Visi	V - 1
5.2 Misi	V - 2
5.3 Tujuan dan Sasaran	V - 4
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM	
PEMBANGUNAN DAERAH	VI - 1
6.1 Strategi	VI - 6
6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	VI - 19
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM	
PERANGKAT DAERAH	VII - 1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII - 1
BAB IX PENUTUP	IX - 1





DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019.....	II - 3
Tabel 2.2	Jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kota Palangka Raya Tahun 2019	II - 3
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019	II - 6
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2014–2019	II - 10
Tabel 2.5	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2015–2019	II - 12
Tabel 2.6	Inflasi di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018	II - 14
Tabel 2.7	PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya (juta rupiah) Tahun 2014-2018	II - 14
Tabel 2.8	Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2019	II - 15
Tabel 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018	II - 15
Tabel 2.10	Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018	II - 16
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018	II - 16
Tabel 2.12	Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017	II - 17
Tabel 2.13	Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018	II - 17
Tabel 2.14	Angka Usia Harapan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 18
Tabel 2.15	Angka Kematian Ibu di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 19
Tabel 2.16	Angka Kematian Bayi di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 20
Tabel 2.17	Angka Kematian Balita di Kota Palangka Raya tahun 2014-2019	II - 20
Tabel 2.18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 21
Tabel 2.19	Angka Partisipasi Kasar Kota Palangka Raya, Tahun 2014-2019	II - 22
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Murni Kota Palangka Raya, 2014-2019	II - 22
Tabel 2.21	Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Palangka Raya 2014-2019	II - 23
Tabel 2.22	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 25
Tabel 2.23	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 25





Tabel 2.24	Rasio Dokter dan Tenaga Medis per satuan Penduduk di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 26
Tabel 2.25	Indikator DBD Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019 .	II - 27
Tabel 2.26	Angka Kesakitan Malaria Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 28
Tabel 2.27	Angka Prevalensi TB Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 29
Tabel 2.28	Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km) Tahun 2014-2019	II - 30
Tabel 2.29	Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2014-2019	II - 30
Tabel 2.30	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2014-2018.....	II - 31
Tabel 2.31	Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2019.....	II - 31
Tabel 2.32	Data Angkutan Sungai Berdasarkan Jumlah Penumpang Melalui dermaga, Jumlah Barang Masuk dan Keluar, Jumlah Penumpang Masuk dan Keluar di Kota Palangka Raya	II - 32
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 33
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018	II - 34
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2019	II - 35
Tabel 2.36	Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 35
Tabel 2.37	Bencana Kebakaran Hutan/Lahan Tahun 2015-2019..	II - 36
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2019	II - 37
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018	II - 37
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019	II - 38
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2014-2018.....	II - 39
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2019.....	II - 39
Tabel 2.43	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017	II - 40
Tabel 2.44	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2019	II - 40
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017	II - 41





Tabel 2.46	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019	II – 42
Tabel 2.47	Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018	II – 43
Tabel 2.48	Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2019	II – 43
Tabel 2.49	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017	II – 44
Tabel 2.50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019	II – 44
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2017	II – 45
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2019	II – 47
Tabel 2.53	Capaian kinerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II – 48
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017	II – 48
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019	II – 49
Tabel 2.56	Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2017	II – 50
Tabel 2.57	Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019	II – 50
Tabel 2.58	Daftar Nama Perangkat Daerah Yang sudah Membentuk PPID	II – 51
Tabel 2.59	Data Akses Jaringan SOPD yang Terintegrasi	II – 52
Tabel 2.60	Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya Tahun 2017	II – 54
Tabel 2.61	Layanan Telepon Selular	II – 54
Tabel 2.62	Surat Kabar	II – 56
Tabel 2.63	Penyiaran Televisi	II – 57
Tabel 2.64	Radio Swasta	II – 57
Tabel 2.65	Radio Pemerintah	II – 57
Tabel 2.66	Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2014-2019	II – 59
Tabel 2.67	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ribuan Ton) Tahun 2017-2019	II – 60
Tabel 2.68	Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II – 61
Tabel 2.69	Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II – 61
Tabel 2.70	Kinerja Sektor Perdagangan Tahun 2014-2019	II – 68
Tabel 2.71	Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2014-2019	II – 68
Tabel 2.72	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2014-2019 (Milyar Rupiah)	II – 70





Tabel 2.73	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2018	II - 72
Tabel 2.74	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2014-2019 (Jutaan Rupiah)	II - 73
Tabel 2.75	Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya, 2014-2019	II - 73
Tabel 2.76	Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2018	II - 74
Tabel 2.77	Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 75
Tabel 2.78	Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019	II - 75
Tabel 2.79	Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya	II - 76
Tabel 2.80	Rasio Ketergantungan Tahun 2014-2019 Kota Palangka Raya	II - 77
Tabel 2.81	Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 dan Untuk Capaian Tahun 2013 - 2017	II - 80
Tabel 2.82	Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017 dan Untuk Capaian Tahun 2018 - 2019	II - 103
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 2
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 3
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 3
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi PAD Pemerintahan Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 4
Tabel 3.5	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 5
Tabel 3.6	Perkembangan Realisasi Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 5
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2013 s/d Tahun 2017 Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 6
Tabel 3.8	Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 8
Tabel 3.9	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Palangka Raya	III - 9
Tabel 3.10	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya 2015-2017	III - 11
Tabel 3.11	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 13





Tabel 3.12	Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2017	III - 16
Tabel 3.13	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017	III - 24
Tabel 3.14	Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017	III - 25
Tabel 3.15	Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Palangka Raya 2018-2023 (Rp)	III - 29
Tabel 3.16	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017	III - 30
Tabel 3.17	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 31
Tabel 3.18	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Palangka Raya	III - 32
Tabel 3.19	Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya 2015 - 2017	III - 33
Tabel 3.20	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya 2015-2017	III - 34
Tabel 3.21	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015–2017	III - 35
Tabel 3.22	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015–2017 ...	III - 36
Tabel 3.23	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2018 - 2023	III - 40
Tabel 3.24	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2018-2023	III - 44
Tabel 3.25	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	III - 45
Tabel 4.1	Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di Kota Palangka Raya Tahun 2007 – 2016	IV - 6
Tabel 4.2	Pendapatan Per Kapita antar Sektor dalam Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2016	IV - 14
Tabel 4.3	Kategori Kelurahan berdasarkan Tipologi Kawasan	IV - 28
Tabel 4.4	Indikator TPB/SDGs Yang Akan Diintegrasikan Ke Dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023.....	IV - 36
Tabel 4.5	Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah	IV - 44
Tabel 4.6	Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Sapi Pedaging Kota Palangka Raya	IV - 45
Tabel 5.1	Keterkaitan antara visi dan misi Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023	V - 2
Tabel 5.2	Kesesuaian dan konsistensi antara Misi RPJMD Kota Palangka Raya dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2023	V - 3





Tabel 6.1	Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Berada Dalam Kota Palangka Raya	VI - 2
Tabel 6.2	Kawasan Strategis Kota Palangka Raya	VI - 3
Tabel 6.3	Analisis SWOT Kota Palangka Raya	VI - 9
Tabel 6.4	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	VI - 13
Tabel 6.5	Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	VI - 19
Tabel 6.6	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kota Palangka Raya	IV - 20
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kota Palangka Raya	VII - 2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Piroritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan	VII - 3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	VIII - 2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023	VIII - 4





DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	I - 6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Palangka Raya	II - 2
Gambar 3.1	Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah	III - 4
Gambar 3.2	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah	III - 38
Gambar 6.1	Peta Kawasan Strategis Kota Palangka Raya	VI - 4
Gambar 6.2	Peta Pusat Kegiatan Kota Palangka Raya	VI - 5
Gambar 6.3	Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional	VI - 7
Gambar 6.4	Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi	VI - 8





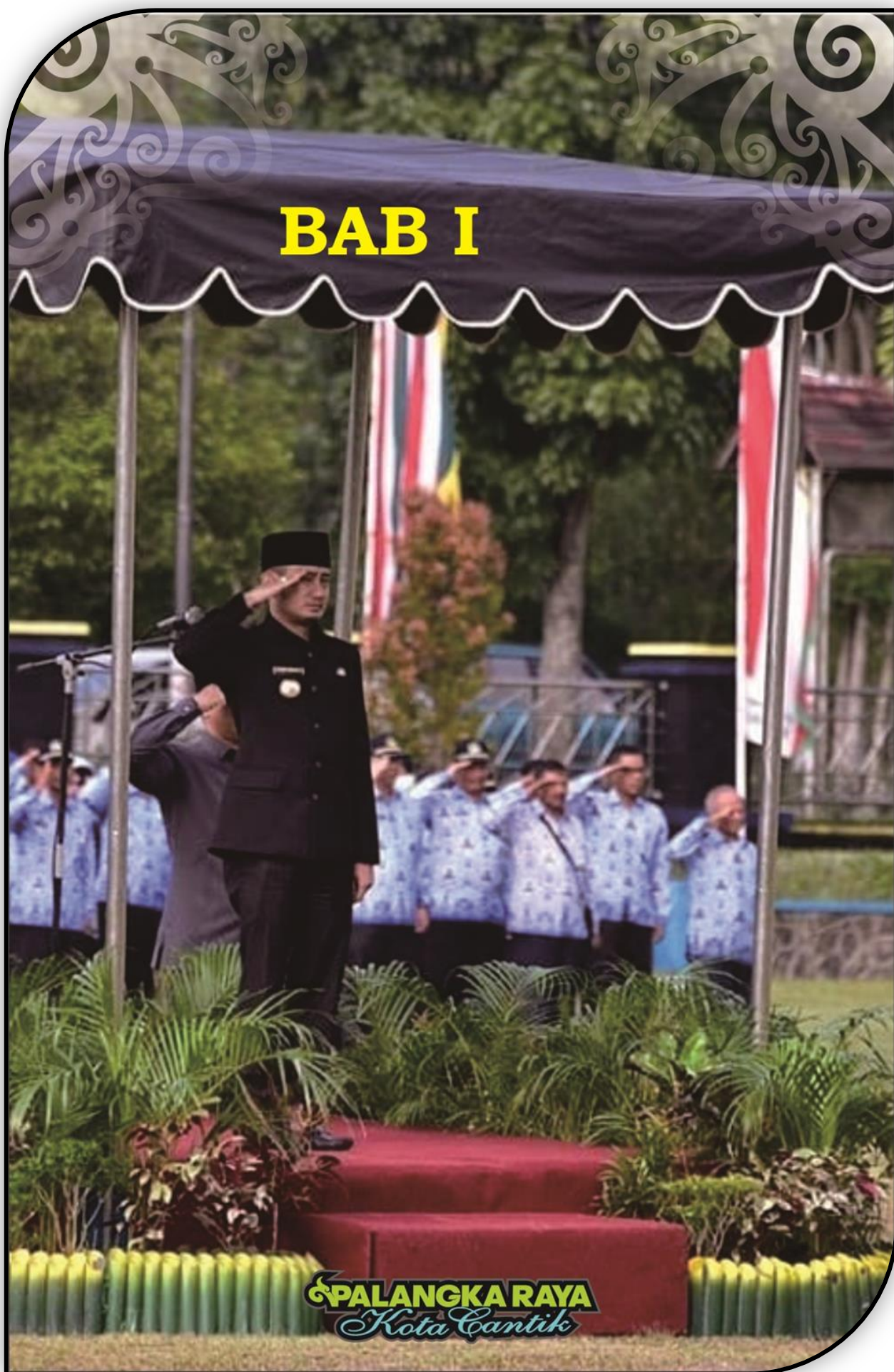
DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 4.1	Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya, 2017	IV - 2
Diagram 4.2	Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Palangka Raya	IV - 7
Diagram 4.3	Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Palangka Raya	IV - 11
Diagram 4.4	Analisis Permasalahan Ekonomi Makro Kota Palangka Raya	IV - 16



BAB I



PALANGKA RAYA
Kota Cantik



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PALANGKA RAYA NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 70 ayat (2) disebutkan bahwa bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 342 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan sebagai berikut:

1. Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar
2. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun
3. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.





Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam pasal 8 disampaikan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang telah digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi, kabupaten/kota dan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku tetap digunakan dan dilakukan penyesuaian secara bertahap mulai tahun 2020.

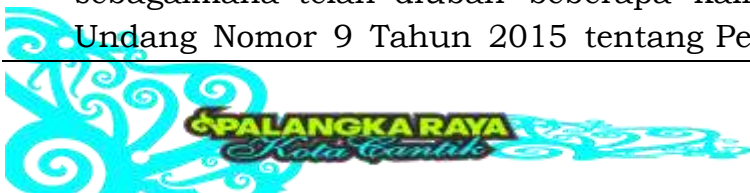
Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi lingkungan strategis daerah, isu strategis internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. RPJMD nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

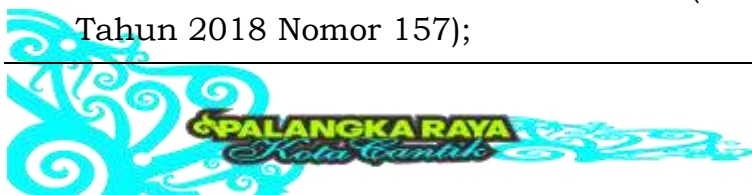
Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-





- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



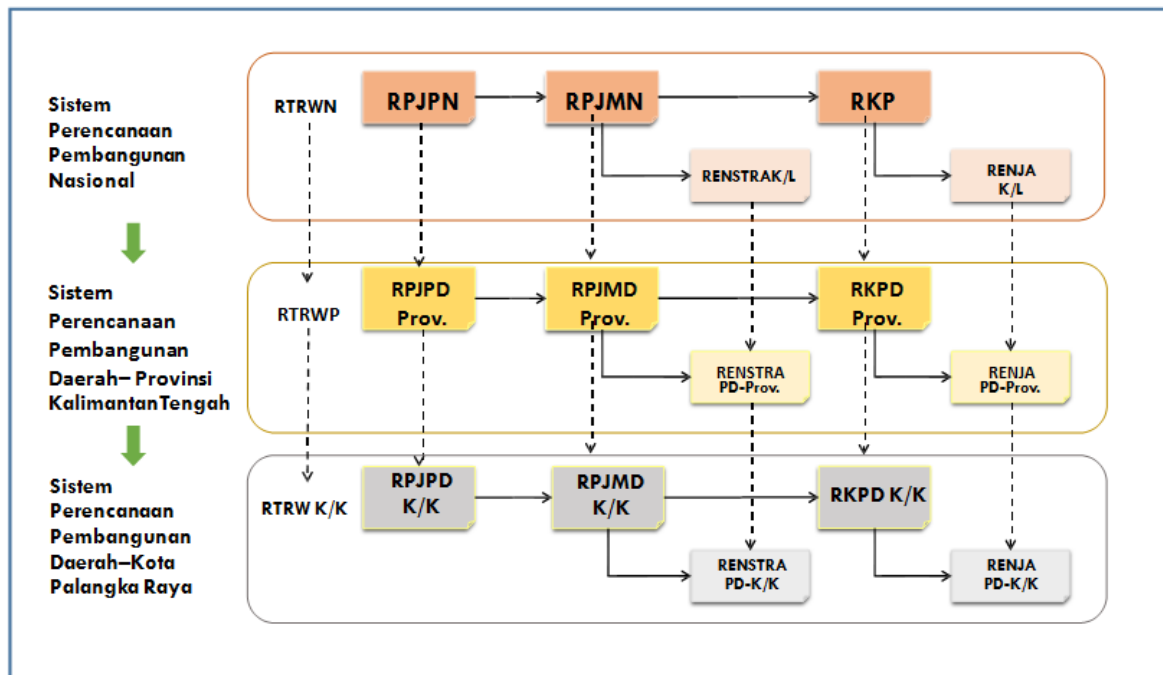


17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPJMD memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah. Hubungan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah



Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa:

1. RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok – pokok RPJPD Kota Palangka Raya 2008-2028.
2. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kota Palangka Raya dituangkan dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
3. RKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk melaksanakan RPJMD dari tahun ke tahun. Sasaran dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah harus dilaksanakan melalui RKPD ke RKPD tahun berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah.



4. Penyusunan Perubahan RPJMD didasarkan pada RTRWP Kalimantan Tengah. RPJMD harus selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK). Hal ini dimaksudkan agar keselarasan perencanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan rencana penataan ruang wilayah. Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional dengan memerhatikan kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
5. Penyusunan perubahan RPJMD Kota Palangka Raya harus berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Kalimantan Tengah dengan memerhatikan capaian target nasional terhadap target daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan organisasi perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 tahun yang akan datang sehingga secara nyata dan bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kota Palangka Raya.

Adapun tujuan dari perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah tahun 2018-2023;
2. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis tahun 2018-2023 yang akan dijabarkan dalam Rencana Kerja dan pelaksanaan program-program prioritas.
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta RAPBD Tahun 2018-2023.
4. Sebagai tolok ukur dalam melaksanakan evaluasi kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah.





1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5 Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Masa Lalu
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.3 Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu-isu Strategis

BAB V MISI, VISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

- 6.1 Strategi
- 6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan RPJMD 2019-2023

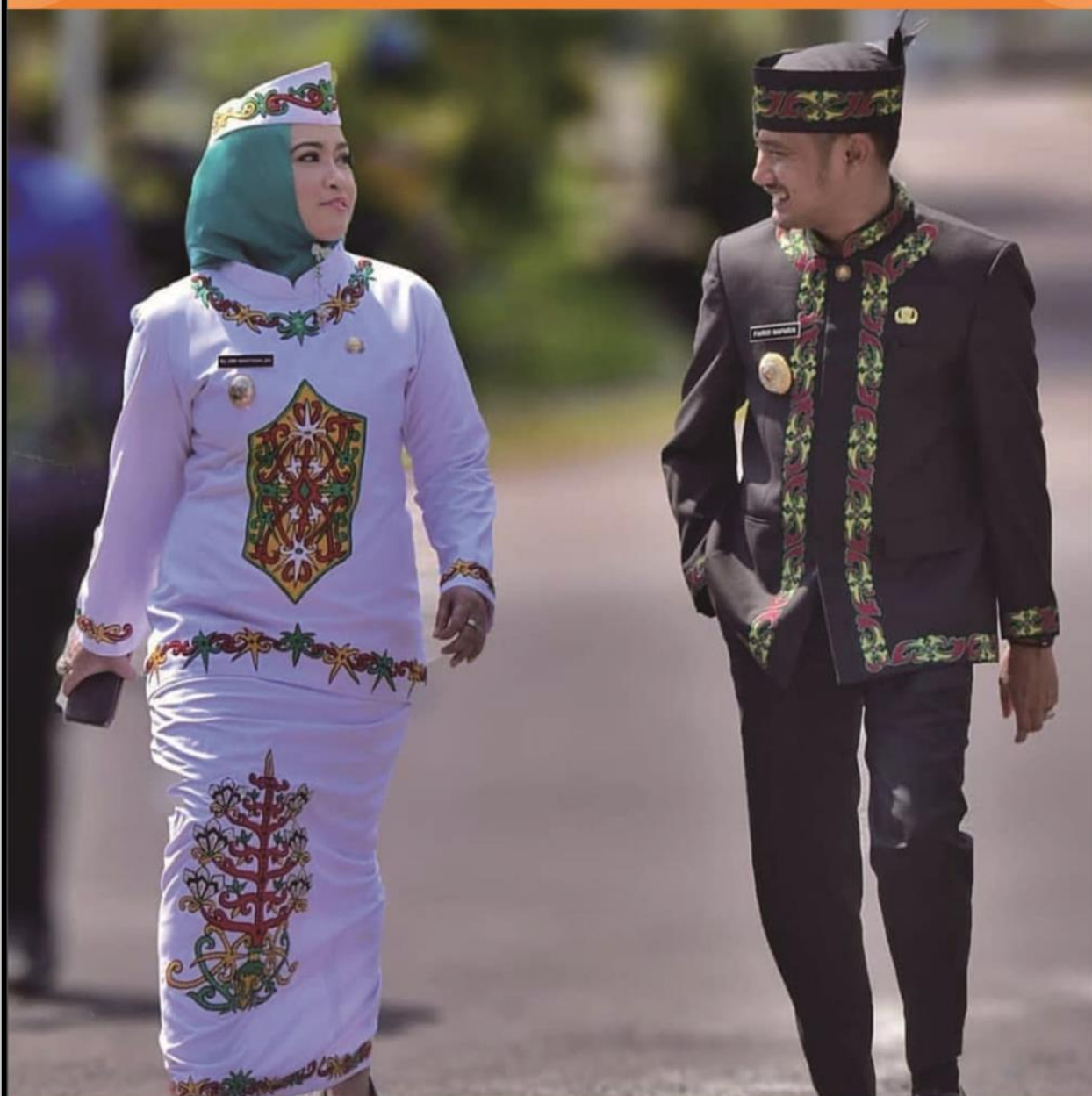
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP



BAB II



PALANGKA RAYA
Kota Cantik



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Geografi

Letak Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30` - 114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73, Nomor 74, dan Nomor 75 Tahun 2013 luas wilayah Kota Palangka Raya adalah 2.853,12 Km² (285.312,40 Ha). Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau

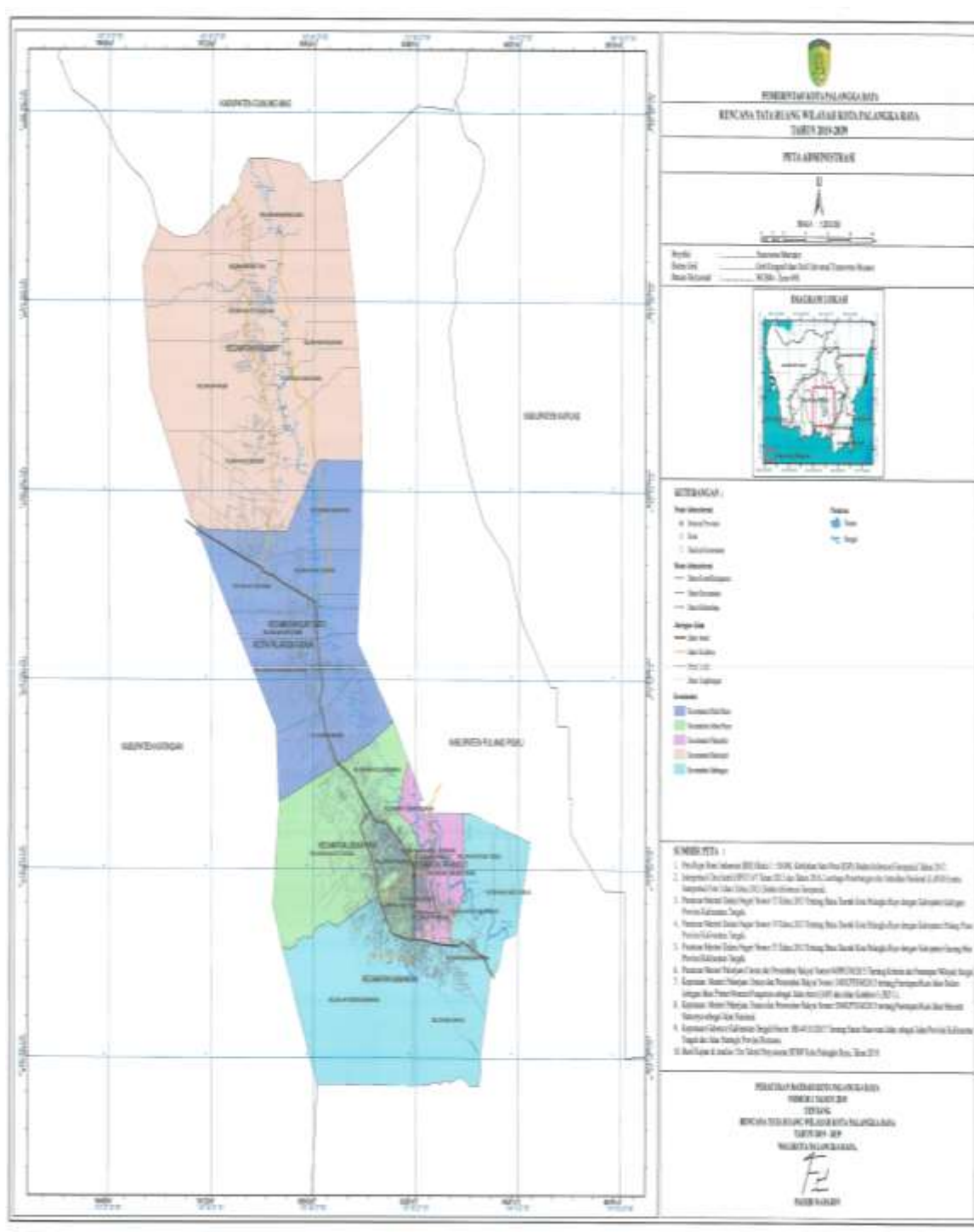
Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 119,73 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 640,73 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,54 Km², Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,14 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan luas wilayah 1.101,99 Km².



Gambar 2.1



Sumber : Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039



Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Palangka Raya Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas area (Km ²)	%
1.	Pahandut	119,73	4,20
2.	Sabangau	640,73	22,46
3.	Jekan Raya	387,54	13,58
4.	Bukit Batu	603,14	21,14
5.	Rakumpit	1.101,99	38,62
Luas		2.853,12	100

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

a. Klimatologi

Suhu udara Kota Palangka Raya selama tahun 2019 berkisar antara 26,70 OC sampai dengan 28,10 OC. Jumlah hari hujan yang terjadi sebanyak 156 hari dalam setahun, lebih sedikit bila dibandingkan dengan tahun 2018 (176 hari). Rata-rata curah hujan pertahun 233,08 mm dan kelembaban udara rata-rata 80,58 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan di Kota Palangka Raya Tahun 2019

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Hari Hujan
1.	Januari	281,80	22
2.	Februari	481	18
3.	Maret	395,50	20
4.	April	274,90	18
5.	Mei	69,70	14
6.	Juni	25,90	8
7.	Juli	7,50	3
8.	Agustus	60,50	5
9.	September	55,10	5
10.	Oktober	180,10	12
11.	Nopember	133,10	12
12.	Desember	361,30	21

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

b. Geologi dan Tanah

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (Histosols). Berdasarkan taksonomi tanah dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.

Berdasarkan jenis tanah di Kota Palangka Raya terdiri dari podsol dengan luas 10.078 ha, regosol dengan luas 89.955 ha, organosol dengan luas 141.088 ha, aluvial dengan luas 24.635 ha, litosol dengan luas 180 ha, podsolik kuning dengan luas 179 ha serta sungai dan danau dengan luas 4.286 ha. Formasi geologi yang ada di wilayah Kota Palangka Raya tersusun atas formasi Aluvium (Qa) (tersusun dari bahan liat kaolinit dan debu bersisipan pasir, gambut, kerakal dan bongkahan lepas, merupakan





endapan sungai dan rawa) dan formasi Batuan Api (Trv) (tersusun dari batuan breksi gunung api berwarna kelabu kehijauan dengan komponennya terdiri dari andesit, basalt dan rijang). Selain kedua formasi tersebut, wilayah Kota Palangka Raya juga termasuk ke dalam formasi Dahor (TQd) (tersusun atas sebagian besar pasir kuarsa dengandasar lempung, pada beberapa tempat terdapat sisipan konglomerat yang komponennya berupa batuan malihan, granit dan lempung).

c. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah di Kota Palangka Raya memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang. Pola pengembangan wilayah Kota Palangka Raya memperhatikan aspek kecenderungan pengembangan pembangunan, fungsi-fungsi kawasan, karakteristik alam, proyek pertumbuhan penduduk, kecenderungan investasi.

Pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Palangka Raya sampai dengan tahun 2029 terdiri dari kawasan Hutan Pendidikan dan Penelitian dengan luas kawasan 36.153 ha; Kawasan Lindung Sungai dan Danau dengan luas kawasan 11.808 ha; Taman Wisata terdiri dari Nyaru Menteng, Bukit Tangkiling, Marang dengan luas kawasan masing-masing 861 ha, 414 ha, 1873 ha, 3.648 ha; Hutan PLG dengan luas kawasan 3.648 ha; Kawasan Sosial Forestry dengan luas kawasan 3.590 ha; Kawasan Hutan Produksi dengan luas kawasan 7.064 ha; Kawasan Pengembangan Produksi dengan luas kawasan 84.353 ha; Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lain dengan luas kawasan 117.187 ha.

Luas Kawasan Hutan Kota Palangka Raya berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2019 Kota Palangka Raya tentang RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2019-2039 yang mengacu kepada SK.6025/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017 yang diperbaharui dengan SK.8108/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 namun luasan dalam dokumen terakhir ini Kota Palangka Raya tidak mengalami perubahan hanya beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengalami perubahan. Adapun luasannya sebagai berikut Hutan Lindung 10.112,12 Ha; Cagar Alam 282,24 Ha; Hutan Konservasi 1760,17 Ha; Taman Nasional 62.760,02 Ha; Taman Wisata Alam 443,95 Ha; Hutan Produksi 74.574,54 Ha; Hutan Produksi Konversi 80.380,28 Ha; Tubuh Air 2.420,16 Ha; dan Areal Penggunaan Lainnya 51.578,91 Ha dengan Total Luasan 285.312,40 Ha. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yaitu penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui program Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) dimana Kota Palangka Raya diidentifikasi luasannya 30.285,44 Ha.



Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Palangka Raya dilakukan melalui proses delineasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan delineasi kawasan lindung. Selain itu dalam prosesnya juga memperhatikan berbagai aspek yang dinilai memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan menciptakan struktur dan pola tata ruang wilayah kota yang terpadu yaitu: mempertimbangkan kecenderungan perkembangan pembangunan dan pengembangan Kota Palangka Raya saat ini, memperhatikan wilayah administratif Kota Palangka Raya yang terdiri dari lima kecamatan dengan batas-batasnya serta cakupan luas wilayah dari masing-masing kecamatan tersebut, memperhitungkan keberadaan sistem-sistem pelayanan dan fungsi-fungsi kawasan yang ada di Kota Palangka Raya, mempertimbangkan kondisi karakteristik alam dan geografis yang dimiliki serta aspek kependudukan, memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2028, memperhatikan kecenderungan investasi di bidang pertambangan dan pertanian di Kota Palangka Raya.

2.1.2. Aspek Demografis

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang dibagi dalam 30 (tiga puluh) Kelurahan yaitu:

1. Kecamatan Pahandut

Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.

2. Kecamatan Jekan Raya

Dibagi dalam 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.

3. Kecamatan Sabangau

Dibagi dalam 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.

4. Kecamatan Bukit Batu

Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

5. Kecamatan Rakumpit

Dibagi dalam 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Jumlah penduduk Kota Palangka Raya tahun 2019 sebanyak 266.020 orang yang terdiri dari 135.256 orang laki-laki dan 130.764 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,70% penduduk Kota Palangka Raya tinggal di Kecamatan ini. Kepadatan penduduk Kecamatan Pahandut adalah 743 orang setiap Km². Jumlah rumah tangga di Kota Palangka Raya tahun 2018 sebanyak 74.726





rumah tangga dimana tiap rumah tangga mempunyai rata-rata anggota rumah tangga sebanyak tiga hingga empat orang.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk (Orang)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Pahandut	45.057	45.674	88,731	103,2
Sabangau	10.810	10.199	21,009	109,1
Jekan Raya	70.958	69.215	140,173	102,5
Bukit Batu	6.713	6,154	12,867	106,0
Rakumpit	1.718	1,522	3,240	112,9
Palangka Raya	135.256	130.764	266.020	103,4

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori. Sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori, disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Berikut uraian perkembangan di setiap lapangan usaha periode 2014-2019.

1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Subkategori kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Subkategori Perikanan. Subkategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan meliputi Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. Industri ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Kontribusi kategori Pertanian Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB Kota Palangka Raya pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku relatif rendah yaitu sebesar 447,4 miliar rupiah atau hanya sebesar 2,45 persen. Subkategori usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian merupakan salah satu kontributor dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, mencapai 0,24 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 0,071 persen, laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,17 persen.





2) Pertambangan dan Penggalian

Kategori Pertambangan dan Penggalian dirinci menjadi 4 subkategori, antara lain: subkategori Pertambangan Minyak, Gas, dan Panas Bumi, subkategori Pertambangan Batubara dan Lignit, sublapangan usaha Pertambangan Bijih Logam, dan subkategori Pertambangan dan Penggalian lainnya. Di Palangka Raya hanya ada subkategori yang terakhir. Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya relatif rendah tetapi cenderung meningkat selama 5 (lima) tahun terakhir Kontribusinya hanya sebesar 139,7 miliar rupiah atau sekitar 1,24 persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 239,7 miliar rupiah atau sekitar 1,31 persen pada tahun 2019.

3) Industri Pengolahan

Kontribusi Kategori Industri Pengolahan terhadap pembentukan PDRB Kota Palangka Raya tahun 2019 mencapai 9,96 persen. Dengan laju pertumbuhan lima Tahun terakhir paling rendah pada Tahun 2015 sebesar 1,55 persen, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 7,60 persen, pada tahun 2019 laju pertumbuhan di sektor ini mengalami penurunan sebesar 3,60 persen.

4) Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 62,2 miliar rupiah atau sekitar 0,34 persen terhadap perekonomian Palangka Raya pada tahun 2019, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Laju pertumbuhan di sektor pengadaan listrik dan gas pada terendah pada tahun 2017 sebesar 6,20 persen dan tertinggi pada tahun 2015 sebesar 31,01 persen. Laju pertumbuhan di sektor ini pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 10,52 persen.

5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, termasuk kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan air dan sungai, danau, mata air, hujan dan lain-lain, tidak termasuk pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Kontribusi dari kategori ini pada tahun 2019 adalah sebesar 0,17 dari PDRB Kota Palangka Raya.

Laju pertumbuhan di sektor ini lima tahun terakhir terendah pada tahun 2015 sebesar -5,10 persen dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 7,10 persen dan pada tahun 2019 ini mengalami penurunan sehingga laju pertumbuhannya sebesar 6,08 persen.



6) Konstruksi

Pada tahun 2019, kontribusi kategori konstruksi mencapai 2.020,2 Miliar rupiah atau sebesar 11,07 persen terhadap total PDRB Kota Palangka Raya dan menduduki peringkat ketiga. Laju pertumbuhan sektor konstruksi lima tahun terakhir terendah pada tahun 2018 sebesar 3,37 persen dan tertinggi pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan sebesar 11,15 persen. Sedangkan pada tahun 2019 laju pertumbuhan sektor ini mencapai 5,56 persen.

7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama 5 tahun terakhir, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor dominan penunjang pembentukan PDRB Kota Palangka Raya . Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 3259,9 Miliar rupiah atau sekitar 17,86 persen. Laju pertumbuhan di sektor ini lima tahun terakhir terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,48 persen dan tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 10,99 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 9,43 persen.

8) Transportasi dan Pergudangan

Pada kategori Transportasi dan Pergudangan terdapat 6 (enam) subkategori namun hanya 4 (empat) yang ada di Kota Palangka Raya, yaitu Angkutan Darat; Angkutan Sungai dan Penyeberangan; Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir. Kontribusi kategori ini mencapai 1.720,30 Miliar rupiah atau sekitar 9,43 persen terhadap PDRB Palangka Raya pada tahun 2019. Laju pertumbuhan kategori ini lima tahun terakhir terendah pada tahun 2015 yaitu sebesar 7,88 persen dan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 10,54 persen. Laju Pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 6, 10 persen.

9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2019, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Palangka Raya sebesar 903,20 miliar rupiah atau 4,95 persen. Laju pertumbuhan pada sektor ini lima tahun terakhir terendah pada tahun 2018 sebesar 7,39 persen, tertinggi pada tahun 2016 sebesar 11,56 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2019 sebesar 8,66 persen.

10) Informasi dan Komunikasi

Kategori Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang ekonomi. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini sangat vital dan menjadi indikator kemajuan suatu bangsa, terutama jasa telekomunikasi. Peranan kategori ini terhadap perekonomian di Palangka Raya selama tahun 2015-2019 relatif stabil. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kota Palangka Raya tahun 2019 sebesar 245 Miliar dengan persentase sebesar 1,34 persen.





Laju pertumbuhan di sektor ini rata rata lima tahun terakhir yaitu 6,93 dengan laju pertumbuhan terendah pada tahun 2015 sebesar 3,63 persen, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 8,74 persen.

11) Keuangan dan Asuransi

Kegiatan ekonomi pada kategori Jasa Keuangan dan Asuransi memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar 6,85 persen atau senilai 1.249,90 Miliar rupiah. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi kategori ini mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 11,44 persen pada tahun 2017. Laju pertumbuhan terendah sebesar 1,89 pada tahun 2015. Laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2019 dengan sebesar 4,69 persen.

12) Real Estat

Kategori Real Estat memberikan kontribusi yang relatif tetap bagi PDRB Palangka Raya dengan peranan sekitar 3 persen periode tahun 2015-2019. Sumbangan kategori ini di tahun 2019 sebesar 581,30 miliar rupiah. Laju pertumbuhan ekonomi kategori ini fluktuatif dan cenderung melambat. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi kategori ini sebesar 9,23 persen, Pada tahun 2017 pertumbuhan sektor ini sebesar 4,49 persen dan merupakan capaian terendah selama periode lima tahun ini.

13) Jasa Perusahaan

Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 10,24 persen untuk tahun 2015-2019. Pada Tahun 2019 kontribusi di sektor ini sebesar 13,20 Miliar atau sebesar 0,07 persen dari PDRB Kota Palangka Raya dengan laju pertumbuhan di tahun 2019 sebesar 9,95 persen.

14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan bersifat pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2015-2019 peranannya menunjukkan peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 2630,4 Miliar atau sebesar 23,30 persen di tahun 2015 persen menjadi sebesar 3927,8 Miliar atau 21,51 persen di tahun 2019. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuasi.

15) Jasa Pendidikan

Pada tahun 2019 jasa pendidikan menyumbang sebesar 5,73 persen terhadap total perekonomian Palangka Raya. Kontribusinya relatif stabil, Adapun laju pertumbuhannya pada tahun 2019 sebesar 7,35 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang mampu tumbuh pada angka 8,67 persen.





16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kategori ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Selama tahun 2015-2019 peranannya relatif stabil berkisar 2 persen. Laju pertumbuhannya pada tahun 2019 sebesar 8,85 persen.

17) Jasa lainnya

Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2017 relatif kecil yaitu 175,7 miliar rupiah. Kontribusinya sejak 2013-2017 relatif stabil di kisaran 1 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,44 persen. Pada tahun 2018 pertumbuhan sektor ini 0,14 persen dari tahun 2017. Kontribusi Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Palangka Raya tahun 2019 relatif kecil yaitu 227,60 miliar rupiah. Kontribusinya sejak 2015-2019 relatif stabil di kisaran 2 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya selalu positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,44 persen.

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan PDRB Kota Palangka Raya Menurut Lapangan Usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2014–2019

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	283,2	320,3	350,2	368,6	405,6	447,4
Pertambangan dan Penggalian	120,6	139,7	164,5	191,3	218,1	239,7
Industri Pengolahan	1.156,2	1.253,9	1.419,5	1.589,7	1.713,9	1.818,3
Pengadaan Listrik dan Gas	19,3	34,2	40,1	47,9	55,1	62,2
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,8	20,1	22,8	24,7	28,0	30,3
Konstruksi	1.029,9	1.222,2	1.455,8	1.651,9	1.835,2	2.020,2
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.713,4	1.895,3	2.176,9	2.466,0	2.890,8	3.259,9
Transportasi dan Pergudangan	798,7	939,6	1.091,4	1.267,4	1.514,8	1.720,3
Penyediaan Akomodasi dan	445,2	521,5	626,0	723,9	808,2	903,2





Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
Makan Minum						
Informasi dan Komunikasi	163,3	172,2	184,9	208,0	232,4	245,0
Jasa Keuangan dan Asuransi	755,8	798,8	905,7	1.078,5	1.168,6	1.249,9
Real Estate	280,6	339,2	391,3	436,8	516,6	581,3
Jasa Perusahaan	6,5	7,6	8,7	10,1	11,6	13,2
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	2.187,9	2.630,4	2.788,9	3.135,5	3.582,6	3.927,8
Jasa Pendidikan	523,0	606,9	708,9	806,7	944,5	1.046,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214,0	255,2	302,5	349,3	405,5	454,9
Jasa Lainnya	112,3	132,5	155,0	175,7	201,0	227,6
T o t a l	9.829,6	11.289,3	12.792,9	14.532,2	16.532,5	18.258,6

*) Angka Sementara/ Preliminary Figures

**) Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2020

Struktur perekonomian Palangka Raya didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya yaitu: Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Konstruksi; dan Transportasi dan Pergudangan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Palangka Raya.

PDRB Palangka Raya pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu mencapai 21,04 persen (angka ini menurun dari 23,50 persen di tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 18,03 persen (naik dari 17,44 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 11,12 persen (relatif stabil dari 11,01 persen di tahun 2013). Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,92 persen (naik dari 10,20 persen di tahun 2013) dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 8,48 persen. Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Transportasi dan Pergudangan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, berkisar antara 8 sampai 11 persen.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Palangka Raya pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan,





Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, yaitu mencapai 21,52 persen (angka ini menurun dari 21,67 persen di tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 17,86 persen di tahun 2019 (naik dari 17,48 persen di tahun 2018), disusul oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 11,07 persen (Relatif stabil dari 11,10 persen di tahun 2018). Pada tahun 2019 sektor lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,96 persen (menurun dari 10,37 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Transportasi dan pergudangan pada tahun 2019 sebesar 9,43 persen (mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 9,16 persen).

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, sektor Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, sektor lapangan usaha industri pengolahan mengalami penurunan sebesar 0,41. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi.

Saat ini kategori lapangan usaha yang dominan di Palangka Raya adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, meski peranannya masih dibawah dari peranan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib tetapi diyakini peranannya akan meningkat mengingat Palangka Raya sebagai Pusat Kota Pemerintahan dengan berbagai sarana dan infrastruktur serta lokasi strategis menjadi motor penggerak dalam percepatan perekonomiannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Palangka Raya Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2014–2019

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertanian,Kehutana n,dan Perikanan	2,88	2,84	2,74	2,54	2,45	2,45
Pertambangan dan Penggalian	4,50	1,24	1,29	1,32	1,32	1,31
Industri Pengolahan	2,95	11,11	11,10	10,94	10,37	9,96
Pengadaan Listrik dan Gas	18,84	0,30	0,31	0,33	0,33	0,34
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,45	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17
Konstruksi	8,21	10,83	11,38	11,37	11,10	11,06
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	6,17	16,79	17,02	16,97	17,49	17,85





Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018*	2019**
Transportasi dan Pergudangan	8,24	8,32	8,53	8,72	9,16	9,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,95	4,62	4,89	4,98	4,89	4,95
Informasi dan Komunikasi	11,46	1,52	1,45	1,43	1,41	1,40
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,18	7,08	7,08	7,42	7,07	6,85
Real Estate	6,44	3,00	3,06	3,01	3,13	3,18
Jasa Perusahaan	5,65	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	6,71	23,30	21,80	21,58	21,67	21,51
Jasa Pendidikan	12,60	5,38	5,54	5,55	5,71	5,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,13	2,26	2,37	2,40	2,45	2,49
Jasa Lainnya	7,03	1,17	1,21	1,21	1,22	1,25
T o t a l	6,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka Sementara/ Preliminary Figures

**) Angka Sangat Sementara/ Very Preliminary Figures

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2020

2.2.1.2. Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 2014-2019 mengalami peningkatan dan juga penurunan. Inflasi di Palangka Raya pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 2,43. Pada Tahun 2016 mengalami penurunan kembali menjadi 1,91 atau menurun 2,29 namun di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 3,11 atau meningkat sebesar 1,2 kembali meningkat pada tahun 2018 sebesar 3,68 dan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,70, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 2.6 Inflasi di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
6,63	4,20	1,91	3,11	3,68	2,70

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

2.2.1.3. PDRB Perkapita

Nilai PDRB per kapita Palangka Raya atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 39,0 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 58,2 juta rupiah (lihat tabel 2.7), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7 PDRB Per Kapita Kota Palangka Raya (juta rupiah) Tahun 2014-2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
PDRB (miliar rupiah)	9.825,9	11.289,0	12.792,9	14.514,0	16.496,72	18.258,6
Penduduk (jiwa)	252,105	259.865	259.865	275.667	283.612	142.876
PDRB per kapita (juta rupiah)	39,0	43,4	47,8	52,7	58,2	-
Pertumbuhan PDRB per kapita	10,34	11,46	9,99	9,3	9,3	-

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

2.2.1.4. Angka Kemiskinan

Garis kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2018 naik menjadi Rp. 353.853,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 345.417,- per kapita per bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,47% atau 9,78 ribu orang penduduk miskin dan Tahun 2019 naik menjadi Rp. 379.420,- per kapita per bulan dari sebelumnya Rp. 353.853,- per kapita per bulan. Sebaliknya persentase penduduk miskin turun menjadi 3,35% atau 9,69 ribu orang penduduk miskin, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.8 Angka Kemiskinan Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

Tahun	Garis kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (ribu orang)
2019	379.420	3,35	9,69
2018	353.853	3,47	9,78
2017	345.417	3,62	9,90
2016	324.082	3,75	9,96
2015	307.796	3,91	10,25
2014	299.328	3,81	9,68

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas tahun 2018 sebanyak 214.601 orang dengan 135.185 orang termasuk angkatan kerja. Dari jumlah tersebut terdapat 127.325 orang yang bekerja yang terdiri dari 80.869 laki-laki dan 46.456 orang perempuan. Dengan demikian tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palangka Raya sebesar 62,99 persen dan tingkat pengangguran sebesar 5,81 persen.

Tabel 2.9 Tingkat pengangguran terbuka Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
3,36	6,30	6,30	7,26	5,81	-

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2019

2.2.1.6. Indeks Gini

Pembangunan ekonomi maupun sosial yang dilakukan pemerintah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi sumber perbedaan pendapatan antara lain adalah kesempatan, kualitas pendidikan, dan berbagai modal dasar lainnya dalam menggapai kehidupan yang lebih baik. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “rasio gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah.

Secara umum Indeks Gini Kota Palangka Raya memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin “tidak merata” dari tahun ke tahun. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.



Tabel 2.10 Indeks Gini Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,365	0,338	0,330	0,379	0,37	-

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2019

2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi masyarakat (paritas daya beli).

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 sebesar 79,21. IPM Kota Palangka Raya mengalami kenaikan tahun 2018 meningkat pada angka 80,34 dan pada Tahun 2019 kembali meningkat sebesar 80,77. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.11 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
78,50	78,62	79.21	79.69	80,34	80.77

Sumber: BPS Kota Palangka Raya Tahun 2020

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Pendidikan

Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

1) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Dari Tabel 2.12 dapat diketahui bahwa capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya tahun 2014-2019 telah melampaui target. Perkembangan capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya tahun 2014-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan





capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2.12 Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
98,68	99,28	99,47	99,56	99,73	99,89

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

2) Rata-rata Lama Sekolah

Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

Secara umum Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Palangka Raya pada tahun 2018 mencapai 11,42 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (11,03 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Palangka Raya baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 11 SLTA atau putus sekolah di kelas 2 SLTA. Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 mencapai 11,51 tahun atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (11,42 tahun). Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kota Palangka Raya baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 11 SLTA atau putus sekolah di kelas 2 SLTA. Berikut data rata-rata lama sekolah tahun 2014-2019 :

Tabel 2.13 Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
10,73	10,74	11,02	11,03	11,42	11,51

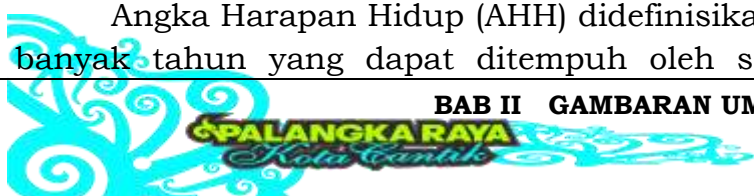
Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka Tahun 2020

2.2.2.2. Kesehatan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang kesehatan ditunjukkan oleh indikator angka usia harapan hidup, persentase balita gizi buruk, angka kematian bayi (AKB), dan angka kematian ibu (AKI).

1) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka





harapan hidup menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup, dianggap sebagai indikator umum bagi taraf hidup. Tingginya umur harapan hidup menunjukkan taraf hidup suatu negara atau daerah yang juga tinggi, begitu juga sebaliknya jika umur harapan rendah maka taraf hidup suatu daerah tersebut juga rendah. Selain indikator bagi taraf hidup, angka harapan hidup juga memperlihatkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah bahkan negara. Semakin tinggi angka harapan hidup mencerminkan semakin tingginya derajat kesehatan di suatu wilayah karena seseorang yang hidup panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. Angka harapan hidup juga merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana sebagai representasi dari dimensi kesehatan pada suatu daerah.

Angka Usia Harapan Hidup penduduk di Kota Palangka Raya dalam kurun 2014 hingga tahun 2019, dapat disimak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.14 Angka Usia Harapan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

2014	2015	2016	2017	2018	2019
72,95	72,97	73,05	73,13	73,16	73,19

Sumber: BPS Kalimantan Tengah Palangka Raya, 2020

Angka harapan hidup di Kota Palangka Raya dalam lima tahun terakhir menunjukan peningkatan signifikan kecil. Lambatnya kenaikan angka harapan hidup tersebut menggambarkan bahwa memang tidak mudah untuk menaikkan satu tahun dari indikator ini. Perlu upaya keras di bidang kesehatan secara menyeluruh untuk meningkatkannya, apalagi jika angka yang dicapainya sudah tinggi. Angka Harapan Hidup yang digunakan adalah berdasarkan dari perhitungan pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya. Berdasarkan perhitungan angka harapan hidup masyarakat Kota Palangka Raya tahun 2019 dari BPS Kota Palangka Raya adalah 73,19 tahun dengan target RPJMD pada tahun 2019 adalah 73,20 tahun. Hal ini memang menunjukkan bahwa capaian AHH Kota Palangka Raya belum mencapai target yang telah ditentukan .

2) Kasus Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan energi dan protein juga mikronutrien dalam jangka waktu lama. Tingginya angka kemiskinan berpengaruh kepada status gizi.

Mereka yang berada pada garis kemiskinan merupakan orang-orang yang berada pada situasi rawan pangan. Menurut hasil RISKESDAS tahun 2018, di Kota Palangka Raya terdapat Gizi Buruk pada BALITA sebesar 5,12%, dan Gizi Kurang pada BALITA sebesar 16,40%. Sedangkan pada BADUTA, terdapat Gizi Buruk sebesar 7,20% dan Gizi Kurang sebesar 20,89%. Kondisi tersebut diperparah adanya kasus stunting, menurut hasil





RISKESDAS tahun 2018, BADUTA dengan kategori sangat pendek mencapai 18,64% dan kategori pendek sebesar 22,79%.

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu didefinisikan sebagai jumlah ibu yang meninggal akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas setiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu (AKI) merupakan indikator yang sangat penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat. Indikator ini menjadi primadona dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 mencapai 38,48/100.000 KH yang berarti setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 di Kota Palangka Raya terdapat 38 atau 39 kematian ibu. Angka ini menurun dibanding tahun 2018 (79,07/100.000 KH). Pada tahun 2019 terdapat 2 (dua) ibu meninggal, dengan penyebab kematian adalah perdarahan dan kanker payudara.

Tabel 2.15 Angka Kematian Ibu di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capaian	72,6	52,99	19,65	19,15	79,07	38,48
Target	50	45	35	25	15	75

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

Peningkatan angka kematian ibu mencerminkan mutu pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu bersalin dan melahirkan, memerlukan perhatian dari pengelola program dan pemerintah daerah. Sistem pelayanan kesehatan rujukan harus diperkuat, sarana dan prasarana PONEC di beberapa puskesmas ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, juga peningkatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya melahirkan di sarana pelayanan kesehatan bagi ibu hamil resiko tinggi. Sistem kemitraan dengan dukun bayi perlu digalang kembali, supaya proses pendampingan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat ditingkatkan.

4) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal setiap 1000 kelahiran hidup. Menurunnya angka kematian bayi merupakan indikator yang paling penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat karena indikator ini mencerminkan pelayanan kesehatan dasar yang paling awal dan juga menentukan kualitas pelayanan kebidanan yang juga sangat menentukan kualitas generasi yang akan datang.

Angka kematian bayi di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 tercatat 0,96/1000KH yang berarti setiap seribu kelahiran hidup pada tahun 2019 di Kota Palangka Raya terdapat 1 kematian bayi. Angka tersebut lebih rendah dibanding angka kematian bayi tahun 2018 yaitu 1,78/1000 KH.





Jumlah kematian bayi di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 adalah 5 bayi. Penyebab masing-masing kematian bayi antara lain adalah : Asfiksia, Sepsis, Premature, Hyperbilirubin dan diare.

Tabel 2.16 Angka Kematian Bayi di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capaian	11,1	3	1,18	1,34	1,78	0,96
Target	13	12	10,5	9	7	7

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

Peningkatan angka kematian bayi dari tahun sebelumnya, disebabkan beberapa hal, antara lain belum efektifnya PWS KIA, petugas puskesmas tidak aktif menjemput bola ke RS dan klinik swasta dan belum meratanya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi diberbagai wilayah. Angka kematian bayi tersebut merupakan AKB yang telah tercatat namun ada kemungkinan bertambah karena sistem pencatatan dan pelaporan yang kurang intensif dari RS dan Klinik Swasta.

5) Angka Kematian Balita (AKABA)

Kematian Balita adalah kematian yang terjadi pada bayi/anak usia 0-59 bulan (bayi+anak balita) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka Kematian Balita di Kota Palangka Raya yang tercatat pada tahun 2019 mencapai 0,96/1000 KH, sedangkan pada tahun 2018 mencapai angka 2,17/1000 KH. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya penurunan angka kematian balita yang berarti kinerja program dalam peningkatan angka kematian balita harus terus ditingkatkan.

Tabel 2.17 Angka Kematian Balita di Kota Palangka Raya tahun 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capaian	0,73	4	1,96	1.34	2,17	0,96
Target	10	10	8	8	7	6

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

Walaupun angka kematian balita pada tahun 2019 lebih rendah dari target SDGs pada tahun 2018 AKABA sebesar 32/1000 KH, namun perlu mendapatkan perhatian karena sistem pelaporan kasus kematian balita masih belum terkelola dengan baik di puskesmas. Selain itu, keterampilan tenaga kesehatan dan kompetensi teknis dalam pelayanan kesehatan anak yang berkualitas juga perlu mendapat perhatian serta penyuluhan kepada ibu balita tentang pola asuh perlu ditingkatkan. AKABA memiliki



kemungkinan akan bertambah karena kasus kematian balita sering tidak dilaporkan ke puskesmas oleh masyarakat setempat dan adanya kemungkinan kesalahan (mistake) data.

2.2.2.3. Ketenagakerjaan

Kinerja fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang Ketenagakerjaan ditunjukkan oleh indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey, di Kota Palangka Raya pada tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Perkembangan Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Capaian	59,01	65,72	65,72	62,40	62,99	64,45

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2020

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar di Kota Palangka Raya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Palangka Raya disajikan pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.19 Angka Partisipasi Kasar Kota Palangka Raya, Tahun 2014-2019**

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	98,56	98,58	98,61	53,71	59,73	-
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,8	117,4	103,15	103,85	105,9	110,56
3	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	107,0	105,9	101,22	102,56	83,66	88,52
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	100,6	103,3	105,76	-	98,85	97,14

Sumber: Kota Palangka Raya dalam Angka, 2020

b. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Murni di Kota Palangka Raya untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun-tahun tertentu terjadi peningkatan dan penurunan.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni Kota Palangka Raya, 2014 – 2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	98,56	98,58	98,61	53,73	97,00	-
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,56	91,37	96,94	87,97	99,14	99,92
3.	Angka Partisipasi Murni (APM)	95,41	99,17	98,79	70,32	71,66	73,85





No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	SMP/MTs						
4.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	93,10	94,56	PROV	PROV	PROV	PROV

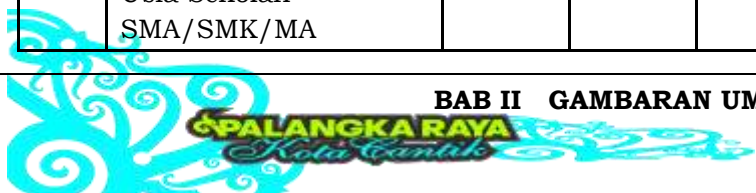
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2020

c. Indikator kinerja Bidang Pendidikan Lainnya

Selanjutnya untuk indikator kerja pada bidang pendidikan lainnya seperti Angka putus sekolah, Angka kelulusan, Rasio Ketersediaan Sekolah, Angka Pendidikan yang di tamatkan, Rata-Rata Lama Sekolah, Rasio Guru Terhadap Murid, Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV, Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru, Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi, Angka kelulusan dan indikator lainnya dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.21 Indikator Kinerja Bidang Pendidikan Kota Palangka Raya 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Angka Putus Sekolah						
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,07	0,07	0,0034	0,19	0,05	-
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,11	0,11	0,090	0,02	0,09	-
3	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,40	0,11	0,09	PROV	PROV	PROV
B	Angka Kelulusan						
1	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	99,56	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,81	98,95	99,66	98,88	100	99,60
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,47	95,89	98,16	PROV	PROV	PROV
C	Rasio Ketersediaan Sekolah						
1	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	4,9	4,6	4,8	0,43	-	-
2	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS	5,9	4,4	4,5	0,46	-	-
3	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA	5,8	3,08	3,40	PROV	PROV	PROV





No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
D	Angka Pendidikan yang di tamatkan						
1	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	100	100	100	99,56	100	-
2	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	70,20	73,78	89,15	98,88	98,93	-
3	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA	96,90	97,7	98,8	PROV	PROV	PROV
4	Rata-Rata Lama Sekolah						
E	Rasio Guru Terhadap Murid						
1	Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA	107,2	54,10	108,43	PROV	PROV	PROV
2	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS	102,90	75,19	104,98	16,06	552,97	798
3	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	93,07	58,76	95,15	17,04	462,47	591
4	Rasio Guru terhadap Murid PAUD	22,23	104,72	106,81	40,63	754,54	552
F	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah (per 1000 Penduduk)						
1	SD/MI	4,9	4,6	4,8	0,43	-	0,58
2	SMP/MTs	5,9	4,4	4,5	0,46	-	0,48
3	SMA/SMK/MA	5,8	3,08	3,40	-	-	-
G	Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV	90,17	91,21	93,25	84,70	95,64	
H	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	6,24	89,85	65,94	67	65	57.93
I	Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	15	25	11	20	-	-
J	Angka kelulusan						
1	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	99,56	100	100
2	Angka Kelulusan SMP/MTs	98,81	98,95	99,66	98,88	98,93	99,60
3	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,47	95,89	98,16	PROV	PROV	PROV
4	Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya	16	16	16	PROV	PROV	PROV

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, 2020





2.3.1.2 Kesehatan

a) Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Rasio puskesmas terhadap penduduk pada tahun 2019 mencapai 3,88/100.000 penduduk atau setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 3 atau 4 puskesmas, masih belum sesuai target 5/100.000 penduduk, ini berarti secara kuantitas sarana kesehatan masih harus di tambah seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Palangka Raya yang terus meningkat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk	4,09	3,97	3,85	3,73	3,99	3,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

b) Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk

Indikator dari program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah rasio rumah sakit terhadap penduduk. Rasio rumah sakit persatuan penduduk adalah ketersediaan rumah sakit setiap 100.000 orang penduduk. Pada tahun 2019 rasio rumah sakit per 100.000 penduduk di Kota Palangka Raya adalah 0,35 per 100.000 penduduk (RS yang dimiliki Pemerintah Kota).

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, yaitu rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum milik pemerintah yang ada di wilayah Kota Palangka Raya pada tahun 2019 RSUD Kota Palangka Raya, RSUD Doris Sylvanus, dan RS TNI/POLRI (RS TNI AD dan RS Bhayangkara).

Jumlah rumah sakit swasta di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sesuai izin operasional yang ada di Dinas Kesehatan adalah 1 rumah sakit khusus yaitu RSIA Yasmin dan 4 rumah sakit milik swasta yaitu RS Muhammadiyah, RS Betang Pabelum, RS Siloam Hospital dan RS Permata Hati.

Tabel 2.23 Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk Palangka Raya Tahun 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	0,4	0,4	0,19	0,37	0,36	0,35

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020



c) Rasio Tenaga Medis, Bidan, dan Perawat per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar 19,04, rasio dokter spesialis sebesar 3,17 per 100.000 penduduk, rasio dokter gigi sebesar 5,29 per 100.000 penduduk, rasio perawat sebesar 69,81 per 100.000 penduduk dan rasio bidan sebesar 44,43 per 100.000 penduduk. Hal tersebut masih belum sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2013 tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011–2025 , Rasio dokter dan tenaga medis di Kota Palangka Raya jika dilihat dari segi kuantitas seharusnya dilakukan penambahan namun jika dilihat dari penyebarannya, distribusi dokter dan tenaga medis lebih terpusat ke daerah perkotaan dibandingkan daerah terpencil, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24 Rasio Tenaga Medis, Bidan, dan Perawat Per Satuan Penduduk di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	13,5	16,71	15,02	13,8	12,68	19,04
2	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	0,409	0,8	0,75	1,87	1,45	3,17
3	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	3,68	5,57	4,8	4,48	3,62	5,29
4	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	67,5	64,65	87,8	67,59	71,37	69,81
5	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	116,32	61,48	73,15	73,57	77,89	44,43

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

d) Demam Berdarah Dengue (DBD)

DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan oleh vektor nyamuk Aedes Aegypti. Penyakit DBD cenderung meningkat dan menyebar luas dan seringkali disertai kejadian luar biasa (KLB), sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat karena menyebar dengan cepat dan dapat menyebabkan kematian. Penderita DBD di Kota Palangka Raya dalam beberapa tahun terakhir disertai dengan kematian, sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 2.25 Indikator DBD Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

No	Indikator DBD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Standar
1	Angka Kesakitan / 100.000 penduduk	97,8	111,8	84,7	59,8	128,98	34,20	50
2	Angka kematian (%)	0,4	1,1	0,9	2,6	1,97	3,09	<1%
3	Angka Bebas Jentik (%)	85,6	85,1	-	-	-	-	95%

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa kasus DBD pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 34,20/100.000 penduduk dengan 97 kasus jika dibandingkan pada tahun 2018 mencapai 128,98/100.000 penduduk dengan 356 kasus DBD, tahun 2017 mencapai 59,8/100.000 penduduk dengan 160 kasus DBD, dan tahun 2016 mencapai 84,7/100.000 penduduk.

Namun Angka Kematian (CFR) kasus DBD pada tahun 2019 meningkat yaitu 3,09% diatas standar yang telah ditetapkan yaitu <1%. Masalah justru pada kegiatan Pemantauan Jentik Berkala (PJB) sejak tahun 2016 tidak lagi dilaksanakan, sehingga monitoring terhadap pertumbuhan serta penyebaran nyamuk DBD tidak bisa dipantau. Namun pada tahun 2017 beberapa puskesmas melaksanakan PJB bersumberkan dana BOK, dengan ABJ rata-rata mencapai 33,3%. PJB juga membantu kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di lingkungan masyarakat. Dengan angka Bebas Jentik yang rendah, memicu suatu lingkungan harus segera diadakan PSN, baik melalui partisipasi dengan masyarakat, maupun dengan mengendalikan pemberantasan nyamuk melalui fogging yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Kemudahan transportasi dan tingkat mobilitas penduduk mempengaruhi penyebaran penyakit DBD karena di Kota Palangka Raya sebaran kasus umumnya terjadi di daerah perkotaan. Peran serta masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) sangatlah rendah. Pengelolaan sampah belum berjalan sesuai ketentuan, hal ini terlihat dari sampah anorganik yang belum terkelola dengan baik akan berpotensi sebagai perindukan vektor. Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat sangatlah diperlukan, dengan metode yang tepat, sistematis, dan dengan frekuensi yang lebih gencar sehingga menciptakan suatu gebrakan di masyarakat dalam PSN, diharapkan akan berhasil menurunkan kasus DBD secara signifikan.



e) Malaria

Jumlah kasus malaria di Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebanyak 815 suspek, RDT 745, Mikroskopi 70, API pada angka 0/1.000 pddk. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kasus malaria impor sejak tahun 2018. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 telah mengalami penurunan dimana kejadian malaria di Kota Palangka Raya merupakan kasus malaria impor. Jumlah penderita malaria di Kota Palangka Raya merupakan kasus malaria import. Jumlah penderita malaria di Kota Palangka Raya yang berobat kesarana kesehatan seperti puskesmas dan puskesmas pembantu pada tahun 2017 sebanyak 1.764 (suspect) dan hasil laboratorium sebanyak 5 positif. Sediaan darah positif mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016 (hasil laboratorium sebanyak 32 positif). Malaria impor merupakan kasus malaria positif yang penularannya terjadi luar wilayah. Annual Parasite Incidence (API) di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 adalah 0.02 per 1000 penduduk. API ini bertujuan untuk mengetahui pola penyebaran kasus malaria impor diberbagai wilayah Kota Palangka Raya sehingga dapat dilihat breeding site untuk deteksi dalam pencegahan kasus malaria. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.27 di bawah ini:

Tabel 2.26 Angka Kesakitan Malaria Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk	0,35	0,35	0,22	0,06	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

f) TB Paru

Tuberculosis atau sering disebut TB adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang terinfeksi basil TB. Umumnya menyerang organ paru, namun dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Bersama dengan Malaria dan HIV/AIDS, TB menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDGs.

Penemuan penderita merupakan langkah pertama dalam kegiatan program penanggulangan TB. Upaya penemuan penderita dilakukan secara pasif dengan promosi aktif, artinya penjarangan penderita dilakukan di unit pelayanan kesehatan pada saat penderita datang untuk berobat didukung dengan penyuluhan aktif. Keberhasilan pengobatan TB Paru diukur antara lain melalui penemuan dan pengobatan penderita dan tingkat kesembuhan penderita yang diobati dengan menggunakan strategi DOTS.

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah Case Detection Rate (CDR) yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang





diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Target minimal CDR yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah 70%.

Tabel 2.27 Angka Prevalensi TB dan Angka Penemuan Kasus (CDR) Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Penemuan Kasus (Case Detection Rate) TB Di Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018	48	28,39	25	30,91	86,72	53,78
2	Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk	79,07	19,28	33	29,89	71,43	77,85

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, 2020

Pada tahun 2019, Case Detection Rate (CDR) TB Paru di Kota Palangka Raya mencapai 53,78% yang berarti berada dibawah target nasional 70%. Jika dibandingkan tahun 2018 maka terjadi penurunan CDR yaitu 86,72%. Tabel diatas memperlihatkan trend angka keberhasilan (success Rate/SR) pengobatan TB Paru di Kota Palangka Raya. SR pada tahun 2019 mencapai 77,85% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 mencapai 71,43%, tahun 2017 mencapai 29,89%, tahun 2016 mencapai 33% dan tahun 2015 mencapai 19,28%. Angka keberhasilan (success Rate/SR) pengobatan TB Paru di Kota Palangka Raya tahun 2019 masih di bawah target nasional yaitu 85%. Ada beberapa penyebab yang dimungkinkan, salah satunya adalah terjadinya resistensi obat TB Paru pada pasien. Resistensi obat disebabkan beberapa hal antara lain; pasien tidak mematuhi anjuran dokter/petugas kesehatan, tidak teratur menelan OAT sesuai panduan, menghentikan pengobatan secara sepihak sebelum waktunya, dan gangguan penyerapan obat TB Paru.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan yang paling dibutuhkan di Kota Palangka Raya karena ada banyak ketergantungan pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Penyediaan infrastruktur dasar yang merata di seluruh Kota Palangka Raya merupakan hal mutlak untuk mewujudkan kota yang madani, dengan pengelolaan pembangunan fisik kota yang meliputi sistem transportasi yang memiliki interkoneksi antar wilayah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan, air bersih, listrik dan telekomunikasi bagi masyarakat Kota Palangka Raya perlu diidentifikasi dalam bentuk indikator antara lain: perkembangan pembangunan jalan, perkembangan pembangunan jaringan irigasi, perkembangan pembangunan infrastruktur sosial dan kebersihan.





Kondisi umum jalan raya Kota Palangka Raya terdiri dari jaringan jalan regional di Kalimantan Tengah yang menunjukkan ruas-ruas utama yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan kota-kota regional ke barat dan selatan. Jalur utama dari pusat kota adalah arah Sampit sampai ke Pangkalanbun, arah Kuala Kapuas sampai ke Kalimantan Selatan. Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Palangka Raya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal tetapi juga lalu lintas eksternal. Lalu lintas eksternal adalah lalu lintas yang masuk dan keluar Kota Palangka Raya.

Prasarana jalan hingga tahun 2017 tercatat sepanjang 911,83 km dengan jenis permukaan aspal sepanjang 472,93 km, tidak diaspal sepanjang 433,334 km, lainnya 5,564 km. Bila dilihat dari jenis kondisi total panjang jalan pada tahun 2017 tercatat dengan panjang 911,83 km, jalan dengan kondisi baik sepanjang 206,23 km, sedang 285,63 km, rusak 215,90 km, rusak berat 204,27 km. Prasarana jalan hingga tahun 2019 tercatat sepanjang 911,83 km dengan jenis permukaan aspal sepanjang 491,45 km, tidak diaspal sepanjang 414,82 km, lainnya 5,57 km. Bila dilihat dari jenis kondisi total panjang jalan pada tahun 2019 tercatat dengan panjang 911,83 km, jalan dengan kondisi baik sepanjang 253,31 km, sedang 267,74 km, rusak 197,31 km, rusak berat 193,47 km. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Permukaan (Km) Tahun 2014-2019

Tahun	Jenis Permukaan				Jumlah
	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	
2019	491,45	25,22	389,60	5,57	911,83
2018	479,18	27,78	339,30	5,57	911,83
2017	472,93	20,340	412,994	5,564	911,83
2016	469,03	21,09	416,14	5,57	911,83
2015	450,56	27,90	430,75	2,62	911,83
2014	333,30	38,77	509,09	30,67	911,83

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2020

Tabel 2.29 Panjang Jalan Kota Palangka Raya Menurut Jenis Kondisi (Km), 2014 - 2019

Tahun	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2019	253,31	267,74	197,31	193,47	911,83
2018	223,74	281,842	198,54	207,71	991,83
2017	206,03	285,63	215,90	204,27	911,83
2016	180,06	276,51	241,34	213,92	911,83
2015	195,73	207,77	197,94	310,39	911,83
2014	122,26	135,68	404,81	249,09	911,83

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2020





Capaian kinerja lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.30 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Km)	47,2	50,07	53,92	55,16	55,447
2	Jembatan dalam kondisi baik	0	0	6,03	3,03	0
3	Drainase dalam Kondisi Baik	43	46	49	49,30	51
4	Rasio Kerusakan Jalan per Tahun	52,80	49,93	46,08	44,88	44,553
5	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik	40,78	51,88	62,66	74,54	74,54
6	Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik (Km)	61,04	61,15	61,30	61,39	61,41

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2019

Tabel 2.31 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya 2019

No	Indikator	2019
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	57,144%
2	Drainase dalam kondisi baik	54,57%
3	Irigasi dalam kondisi baik	76,01%
4	Ketaatan terhadap RTRW	71%

Sumber: Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya, 2020

2.3.1.4 Perhubungan

Pemerintah Kota Palangka Raya berupaya meningkatkan berbagai sarana, fasilitas, seperti transportasi udara, darat dan sungai. Terdapat maskapai penerbangan nasional yang ada di Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya yaitu Garuda, Lion Air, City Link, Batik Air, Wing Air, yang melayani rute Kota Palangka Raya-Jakarta dan Kota Palangka Raya-Surabaya setiap hari, serta 1 (satu) maskapai penerbangan Susi air yang melayani penerbangan perintis dari Kota Palangka Raya ke ibu kota kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Jumlah kedatangan dan keberangkatan pesawat di Bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya pada tahun 2016, masing-masing sebanyak 3.976 kali dan 3.975 kali. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2015. Kedatangan penumpang terjadi peningkatan dari 330.523 di tahun 2015 naik menjadi 414.518 pada tahun 2016. Namun Terhitung Mulai 1 Januari 2019, Bandara Tjilik Riwut memasuki masa transisi pengelolaan yang sebelumnya dikelola oleh UPBU Tjilik Riwut, mulai dikelola oleh Angkasa Pura II.





Pada tahun 2014 Angkutan darat kendaraan bermotor yang ada di Kota Palangka Raya sebanyak 117.687 buah, yang terdiri dari Sedan, Jeep (pribadi/personal) 16.784 buah, Sedan, Jepp, Wagon (umum/public) 322 buah, Bus, Mini Bus (pribadi/personal) 82 buah, Bus, Mini Bus (umum/public) 51 buah, Truck, Pick Up (pribadi/personal) 6.519 buah, Truck, Pick Up (umum/public) 690 buah, Kendaraan Khusus, Alat Berat/Berat (pribadi/personal) 5 buah, Kendaraan Khusus, Alat Berat/Berat (umum/public) tidak ada, serta Sepeda Motor Roda Dua sebanyak 93.234 buah. Pada tahun 2017 sebanyak 153.169 buah, yang terdiri dari kendaraan roda empat sebanyak 22.804 buah, moda angkutan barang/orang 25.906 buah, truk barang umum 5.576 buah, mobil box 321 buah, mobil tangki 2.051 buah, mobil peti kemas tidak ada, serta kendaraan roda dua sebanyak 95.925 buah. Sedangkan Angkutan darat untuk kendaraan pribadi di Kota Palangka Raya baik Roda 4 dan Roda 2 pada tahun 2019 sebanyak 72.676 Unit. Moda Angkutan Barang/Orang sebanyak 45.4345 Unit, Truk Barang Umum sebanyak 6.418 Unit, Moda Angkutan Umum sebanyak 21. 217 Unit, Bus sebanyak 8 Unit, Angkutan Kota 367 Unit, Taksi sebanyak 20.747 Unit dan Ojek sebanyak 95 Unit.

Lalu lintas kapal keluar masuk dan barang di Pelabuhan Rambang, Dermaga Kereng Bangkirai, dan Dermaga Sabangau Kota Palangka Raya tahun 2016, masing-masing 526 dan 117, sedangkan barang yang masuk tahun 2016 adalah 1.190 ton. Jumlah penumpang melalui dermaga di Pelabuhan Rambang, Dermaga Kereng Bangkirai, dan Dermaga Sabangau Kota Palangka Raya tahun 2019 adalah 16.036 orang, sedangkan barang yang masuk tahun 2019 adalah 617 ton. Sistem transportasi sungai merupakan transportasi yang bersifat tradisional dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Kota Palangka Raya sejak dahulu. Kelurahan disebagian wilayah Kota Palangka Raya sebagian berada di tepi sungai sehingga transportasi sungai masih menjadi pilihan oleh sebagian penduduk menjalankan aktifitas perekonomian.

Berikut data angkutan sungai berdasarkan jumlah penumpang melalui dermaga, jumlah barang masuk dan keluar, jumlah penumpang masuk dan keluar di Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2019. Untuk lebih jelasnya data tersebut dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.32 Data Angkutan Sungai Berdasarkan Jumlah Penumpang Melalui dermaga, Jumlah Barang Masuk dan Keluar, Jumlah Penumpang Masuk dan Keluar di Kota Palangka Raya

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Orang	-	-	5.567	16.467	17.056	16.036
2	Jumlah Barang Melalui	Ton	-	-	1.212	1.415	1.450	1.340





No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Dermaga							
3	Jumlah Barang Masuk	Ton	-	-	1.200	789	813	617
4	Jumlah Barang Keluar	Ton	-	-	12	626	637	723
5	Jumlah Penumpang Masuk	Unit	-	-	2.732	7.990	8.657	7.468
6	Jumlah Penumpang Keluar	Unit	-	-	2.835	8.477	8.399	8.568

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Adapun Indikator Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji)	11.516	10.445	10.541	10.099	10.491	10.086
2.	Rasio Ijin Trayek (%)	0,181	0,164	0,169	0,095	0,081	0,087
3.	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	0,160	1,30	1,10	1,13	1,20	1,25
4.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	59.350	37,630	63.651	63.651	98.462	-
5.	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Jam)	20	20	20	20	20	20
6.	Jumlah Orang Melalui Dermaga/ Bandara/ Terminal Per Tahun	-	-	428.455	485.879	543.046	600.213



No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7.	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 penduduk) (%)	-	-	-	54,04 %	56,06%	83.21%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, 2020

2.3.1.5 Lingkungan Hidup

Pada tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan lingkungan hidup baik penanganan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, Pemerintah Kota Palangka Raya melaksanakan 15 program dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas kapasitas daya dukung lingkungan dan kehutanan yang terdiri dari 10 program prioritas dan 5 program yang merupakan operasional atau *supporting* program prioritas.

Permasalahan mendesak dibidang lingkungan hidup dan penataan ruang daerah antara lain: kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan. Demikian pula budaya hidup di pinggiran sungai akan cenderung kumuh memperbesar kecenderungan musibah banjir; lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan hutan; ketidak disiplin terhadap penggunaan ruang dan banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB.

Tutupan lahan berkaitan erat dengan penggunaan lahan. Data liputan lahan yang juga dapat diasumsikan sebagai data penggunaan lahan diturunkan data penjabarannya hingga didapatkan klasifikasi tutupan lahan oleh vegetasi permanen. Indikator Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase jumlah ijin lingkungan	164	242	220	54	124
	Jumlah Ijin HO	240	582	573	152	373
2.	Presentase Penegakan Hukum Lingkungan	100	90	87	25	100
3.	Peningkatan Mutu Udara/ISPU	79	49	85	100	100
	Penurunan udara/ISPU	289	180	310	365	365
4.	Rasio pelaksanaan pengelolaan Tahura terhadap jumlah total luas kawasan hutan raya	0	0	0	10	50
5.	Persentase jumlah sampah	2	2	0	2	0.06





No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	yang dikelola					
6.	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam konservasi lingkungan terhadap jumlah masyarakat kota	-	-	-	1	0.93
7.	Persentase jumlah sekolah peduli lingkungan terhadap jumlah seluruh sekolah kota	2	3.6	4.8	5.7	7.72
	Jumlah sekolah peduli lingkungan	3	9	12	14	19
8.	Persentase luas daerah yang masuk di konversi	-	-	-	6.39	3.62

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya Tahun 2019

No	Indikator	2019
1	Persentase Layanan Persampahan Skala Perkotaan	16.6%
2	Persentase Pengelolaan Potensi Sumber Daya Hutan	20%
3	Persentase Kesadaran suatu Usaha/kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup	89,73%
4	Cakupan Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA yang dilakukan	5 Lokasi
5	Peningkatan Pengendalian Konservasi SDA	3 Sungai
6	Ketersediaan data / Informasi SDA dan LH	2 Dokumen
7	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	76.67
8	Peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	2 Lokasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya

Tabel 2.36 Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2019

Tahun	Banjir	Kebakaran	Tanah Longsor	Angin Puyuh	Disambar Petir	Jumlah
2019	Belum Release	Belum Release	Belum Release	Belum Release	Belum Release	-
2018	16	-	-	-	-	16
2017	-	-	-	-	-	0
2016	-	16	-	-	-	16
2015	2	124	-	5	-	131
2014	10	23	-	2	-	35

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, Tahun 2020





Banjir yang kerap terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti (1) Meluapnya arus Sungai Kahayan dan Sungai Sabangau; (2) Kondisi topografi Kota Palangka Raya yang relatif datar; (3) Jaringan drainase yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan konsep penanganan banjir. Meskipun banjir menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan, namun pembangunan jaringan drainase belum cukup menjadi perhatian. Pemerintah Kota Palangka Raya belum memiliki kajian dan *masterplan* sistem drainase serta *database* pendukung di bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir; (4) Belum terdapat upaya pengelolaan kelebihan air, seperti membuat kolam retensi, biopori, maupun sumur- sumur resapan. Sedangkan bencana kebakaran biasanya terjadi di kawasan perkotaan dan kawasan hutan.

Kota Palangka Raya sering mengalami bencana kebakaran hutan / lahan diwilayahnya, sehingga berdampak kepada pencemaran udara atau disebut juga dengan kabut asap. Beberapa upaya telah dilakukan baik berupa himbauan, tindakan pemadaman, pemberian sanksi / hukuman pidana bagi pelaku pembakaran hutan/lahan diwilayah Kota Palangka Raya. Adapun data bencana kebakaran hutan / lahan, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.37 Bencana Kebakaran Hutan / Lahan Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	Perkiraan Luas Hutan/Lahan Terbakar (Ha) Pada Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rakumpit	156	-	-	-	100
2	Bukit Batu	93	-	0,5	1	133,5
3	Jekan Raya	487	66,1	10,5	77	379
4	Pahandut	98	2,5	19	5	105
5	Sabangau	274	7	-	22	158

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya Tahun 2020

2.3.1.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tolok ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis potensi kependudukan adalah melalui jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Komponen jumlah penduduk digunakan untuk menganalisis proporsi sebaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan laju pertumbuhan pertumbuhan berdasarkan kewilayahan. Sedangkan, komponen distribusi kepadatan penduduk digunakan untuk melakukan analisis kecenderungan distribusi kepadatan penduduk per wilayah kecamatan, aksesibilitas fasilitas publik, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Jumlah penduduk yang besar menunjukkan laju pertumbuhan yang tinggi di suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan sosial ekonomi. Pada satu sisi, kepadatan penduduk yang tinggi di suatu wilayah menunjukkan potensi sosial ekonomi wilayah yang besar, kemudahan aksesibilitas fasilitas publik yang ada dan tingginya aktivitas sosial ekonomi penduduk. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:





Tabel 2.38 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Rasio Penduduk BerKTP Per Satuan Penduduk (%)	56	51	60	60	100	69
2.	Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%)	78	89	95	95	100	98,34
3.	Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)	65	56,88	65	65	72	67,78
4.	Kepemilikan KTP (%)	66	64	70	70	100	69,79
5.	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	37	46	56	56	100	98,34

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya 2019

2.3.1.7 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan baik dilakukan secara langsung oleh Perangkat Daerah teknis maupun program yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Kota Palangka Raya dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pelatihan keterampilan, untuk peningkatan kapasitas perempuan secara khusus untuk mendorong peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga sejalan dengan kegiatan pengembangan ekonomi kerakyatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan tidak hanya di Kota Palangka Raya, akan tetapi diintegrasikan dengan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan dan kelurahan. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio KDRT	6	Tad	Tad	0	0,02
2	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	33,37	Tad	Tad	Tad	Tad
3	Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan	40,50	40,25	42,25	43,25	42,03
4	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	6	100	100	100	100
5	Persentase	23	62,49	337	19,45	3,21





No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
	Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah					
6	Partisipatif Perempuan di Lembaga Swasta	tad	1.145	0,27	Tad	-
7	Jumlah Forum Anak	35	36	12	Tad	12
8	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	4	31	0	Tad	8
9	Indeks Pemberdayaan Gender	93,80	94,30	Tad	Tad	-

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, 2020

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019

No	Indikator	2019
1	TFR (Total Fertility Rate)	2,24
2	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14,25
3	Rata-Rata Usia Kawin Pertama di bawah 20 tahun	21
4	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Ummet Need)	9,18
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16,28
6	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	82,86
7	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90
8	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	40
9	Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	3,47
10	Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76,00
11	Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	76,00
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	11,1
13	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	62
14	Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	0,7
15	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	1
16	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	1
17	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu	100
18	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu	100





Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, 2020

2.3.1.8 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana merupakan salah satu program dari Pemerintah Pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terus meningkat. Keluarga Berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program Keluarga Berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan.

Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Untuk capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya, Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	2,4	2,3	1,87	2,0	0,30
2	Persentase Akseptor KB	40,55	92,96	85,5	86,89	87,03
3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	40.565	43.715	37.098	40,054	87,86
4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera	11.186	11.136	10.25	9.960	10.986
5	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	2,4	Tad	1	1	1

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya, 2020

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Palangka Raya Tahun 2019

No	Indikator	2019
1	TFR (Total Fertility Rate)	2,24
2	Cakupan PUS yang ingin ber-KBtidak terpenuhi (Unmeet Need) %	14,25
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %	21
4	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	9,18
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	16,28
6	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	82,86

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya, 2020





2.3.1.9 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Palangka Raya mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Untuk melihat capaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43 Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran <ul style="list-style-type: none">– Skala Nasional– Skala Lokal	4 30	21 210	29 240	6 305
2	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none">– Koperasi– UMKM	5 -	23 -	28 -	6 15.865
3	– Jumlah Koperasi Sehat <ul style="list-style-type: none">– Jumlah Koperasi Berkualitas	4 3	26 210	29 240	6 305
4	Persentase Koperasi Aktif	3	88,19	88,28	253
5	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan	30	360	30	70 120

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, Tahun 2017

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator	2018	2019
1.	Pertumbuhan Omset Usaha Mikro Kecil dan Menengah	18%	19,2 %
2.	Presentase Usaha Mikro yang menjadi UKM	20%	23,5 %

Sumber: LKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Palangka Raya, 2019



2.3.1.10 Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM - PTSP) Kota Palangka Raya berorientasi kepada kepentingan masyarakat guna menyediakan mekanisme pencatatan pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih akurat yang bertanggung jawab, transparan dan apa adanya.

Untuk tahun 2014, target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 400,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 394.130.000.000,- atau sebesar 98,53 %. Untuk tahun 2015 target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 440,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.171.850.000.000,- atau sebesar 266 %. Untuk tahun 2016 target yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp. 484,00 M dengan capaian realisasi sebesar Rp. 616.120.000.000,- atau sebesar 127,3 %. Sedangkan untuk tahun 2017 mengalami penurunan hasil nilai investasi dengan target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 532.40 M dan hanya memenuhi nilai realisasi sebesar Rp. 259.260.000.000,- atau 48,7 %.

Untuk capaian kinerja indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lainnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.45 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	PMDN = 394.130 PMA = 19.097.090	PMDN =Rp. 1,171 T PMA = US\$ 9.989.000	PMDN=Rp.61 6,12M PMA = US\$-	259,26 M
2.	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	PMDN =99,99PMA = 99,88	PMDN = 68% PMA = 26%	PMDN = - PMA = -	Tad
3.	Jumlah investor PMA/PMDN	PMDN = 6 PMA =22	PMDN =68 PMA =26	PMDN = 101 PMA = -	PMDN= 73 PMA = -
4.	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan)	0% perusahaan menyampaikan akan LKPM nya secara berkala	24% perusahaan menyampaikan akan LKPM nya secara berkala	17,82% perusahaan menyampaia kan LKPM nya secara berkala	44,69% perusahaan menyampaikan akan LKPM nya secara berkala

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2017



Tabel 2.46 Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019

No	Indikator	2018	2019
1.	Jumlah Investor (PMDN)	303	1.677
2.	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	2.597,66	1.281,63
3.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (%)	16,50	3,04
4.	Presentasi Perijinan Yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi (%)	7,69	30
5.	Survey Kepuasan Masyarakat (Point)	81,01	81,45

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Tahun 2019

2.3.1.11 Kebudayaan dan Pariwisata

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu pembangunan sektoral yang dapat melibatkan masyarakat dalam jumlah besar. Hal tersebut berdampak pada bidang ketenagakerjaan dimana akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah secara keseluruhan. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Berikut beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Palangka Raya :

1. Destinasi Wisata Budaya/ Sejarah, antara lain :

Monumen Tugu Soekarno, Museum Balanga, Pesanggrahan Isen Mulang, Sandung Ngabe Sukah, Rumah Betang, Rumah Tjilik Riwut, Betang Mandala Wisata, Sandung Bawi Kuwu, Desa Wisata Sei Gohong, Museum Balanga.

2. Destinasi Wisata Buatan, antara lain :

Perahu Wisata Susur Sungai, Jembatan Kahayan, Kum – Kum, Kawasan Bundaran Besar, Arboretum Nyaru Menteng, Bumi Perkemahan Tuah Pahoe, Kolam Renang dan Golf Isen Mulang, Kawasan Souvenir Shop Jalan Batam, Wisata Outbond dan Outdoor Anak Himba.

3. Destinasi Wisata Alam:

Taman Nasional Sebangau, Batu Banama, Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling, Kawasan Hutan Ulin Mungku Baru, Pulau Kaja, Danau Tahai, Danau Kereng Bangkirai.

4. Destinasi Wisata Religi:

Sandung Ngabe Sukah, Sandung Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit, Makam Kubah Kuning, Bukit Karmel, Pura Sali Paseban Batu, Balai





Basara Hindu Kaharingan, Balai Basara Tampung Penyang, Balai Basarah Kereng Bangkirai.

Secara umum Kota Palangka Raya memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan pariwisata terutama dikarenakan posisi geografis dan kondisi alamnya. Potensi pariwisata yang ada dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Untuk melihat capaian kinerja dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47 Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kunjungan wisata (orang)	110.455	43.875	390.152	341.203	310.855
2	Jumlah Obyek Wisata yang dikembangkan dan Dilestarikan (ODTW)	0	9	8	0	3
3	Jumlah Sarana/Prasarana Fasilitas Pendukung Pariwisata	17	21	80	23	11
4	Jumlah Promosi (Kali)	8	9	32	5	3
5	Jumlah SDM Pariwisata (Orang)	89	68	301	40	53

Sumber: LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Tahun 2018

Tabel 2.48 Capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya Tahun 2019

No	Indikator	2019
1	Rata Rata Lama Tinggal Wisatawan	1.06 Hari
2	Kunjungan Wisata per Tahun	Wisnus 389.235 Wisman 3.865

Sumber: LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, Tahun 2019

2.3.1.12 Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional badan, mengendalikan, membina, mengatur, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan teknis dibidang kesatuan bangsa, integrasi bangsa dan perlindungan masyarakat secara terpadu bersama-sama dengan instansi terkait sesuai kebijakan



yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melihat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	12	11	12
2.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	30	50	65	90
3.	Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga	98/666	92/666	582/666	582/666
4.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,11	0,004	0,12	0,12
5.	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	12	12	11	12
6.	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	30	50	65	90
7.	Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga	98/666	92/666	582/666	582/666
8.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,11	0,004	0,12	0,12

Sumber: LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota Palangka Raya Tahun 2017

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019

No	Indikator	2018	2019
1.	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	0	4
2.	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	8	32
3.	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama	0	6
4.	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan	0	99%
5.	Tingkat partisipasi pemilih	66%	77,5%
6.	Indeks Toleransi	16	43

Sumber: LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya Tahun 2019



2.3.1.13 Satuan Polisi Pamong Praja

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah terkait dengan perangkat daerah di Kota Palangka Raya selama periode 2014-2018 ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2014 - 2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	6,78	8,84	7,42	7,63
2.	Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol. PP	12,04	8,07	8,07	22,39
3.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	tad	tad	0,12	46,79
4.	Rasio Poskamling per Jumlah RT	tad	tad	852/666	297/666
5.	Jumlah demo yang dikendalikan (kegiatan)	5	3	0	0
6.	Persentase Penegakkan PERDA (%)	50,00	61,53	82,78	97,67
7.	Persentase jumlah kasus/pengaduan yang ditangani (%)	90,00	92,00	93,33	94,44
8.	Persentase Penanganan konflik di masyarakat (%)	90,00	92,00	92,54	94,44
9.	Cakupan patroli petugas Satpol.PP (Wilayah)	4	4	4	4
10.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100	100	100	100

Sumber: LAKIP Satpol PP Kota Palangka Raya, 2017

- Indikator kinerja 1: Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk hanya mencapai 7,63 dan ini mengalami penurunan realisasi kinerja dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan variabel jumlah penduduk yang semakin bertambah sedangkan jumlah Polisi Pamong Praja berkurang. Pada tahun 2017 terdapat jumlah Personil 195 orang (PNS dan PTT) sebanyak 67 orang PNS dan 128 orang PTT berbanding dengan jumlah penduduk sebanyak 255.450 jiwa, dengan capaian Kinerja Tahun 2017 sebesar 89,66 %.
- Indikator kinerja 2: Persentase Jumlah Satpol PP yang Mengikuti Diklat Dasar Pol PP bernilai 22,39 dan ini mengalami penurunan realisasi kinerja jika berdasarkan pada target tahun 2017 yang bernilai 29,47. Karena jumlah yang mengikuti diklat Satpol PP sebanyak 15 orang berbanding dengan jumlah PNS sebanyak 67 orang, sehingga terdapat nilai realisasi 22,39 dengan Capaian Kinerja 75,97 %.
- Indikator kinerja 3: Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk pada tahun 2017 bernilai 46,97 tapi jika dibandingkan dengan target tahun 2017 yang bernilai 0,01 hal ini memiliki perbedaan yang sangat jauh dan itu sangat tidak relevan dengan fakta lapangan. Jika berdasarkan hal tersebut diatas capaian realisasi dianggap 100%.



- d) Indikator kinerja 4: Rasio Jumlah Poskamling per Jumlah RT pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan nilai 297/666. Penurunan target kinerja yang terjadi pada tahun 2017 sangat drastis sehingga target realisasi tidak dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan rasio yang ditetapkan RPJMD sebanyak 1084/666.
- e) Indikator kinerja 5: Jumlah demo yang dikendalikan (kegiatan) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya selama Tahun 2017 bernilai 0. Walaupun jumlah demo yang terjadi di wilayah Kota Palangka Raya berjumlah 6 kali. Namun demo masih dapat ditangani oleh pihak kepolisian. Hal ini dikarenakan jumlah pendemo berbanding terbalik dengan jumlah aparat kepolisian. Maka dari hal itulah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya tidak pernah dilibatkan secara langsung. Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam posisi siaga jika aparat kepolisian meminta secara khusus untuk membantu pengamanan demo. Kategori : Tidak Berhasil.
- f) Indikator kinerja 6: Persentase Penegakkan PERDA mengalami kenaikan realisasi kinerja di tahun 2017, hal ini disebabkan karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya melakukan kegiatan patroli dan penertiban serta pengecekan terhadap pelanggaran Perda, prioritas utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya adalah menegakan Peraturan Daerah yang antara lain (1) Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan PKL; (2) Perda Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir; (3) Perda Kota Palangka Raya Nomor 09 tahun 2012 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila dan Anak Jalanan; dan (4) Perda Kota Palangka Raya Nomor 03 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dari kegiatan Patroli/Penertiban, pengecekan dan peninjauan pelanggaran Perda ditambah jumlah pengaduan masyarakat berjumlah sebanyak 86 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 84 kasus, Nilai capaian indikator untuk Penegakan Peraturan Daerah bernilai 97,67 dari target 77,60. Dengan capaian kinerja sebesar 125,86%.
- g) Indikator kinerja 7: Persentase jumlah kasus pengaduan yang ditangani berjumlah 36 kasus pengaduan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2017. Kasus yang dapat ditangani 34 kasus, sehingga realisasi bernilai 94,44 dan ini mengalami penurunan dari target. Berdasarkan rasio target yang ditetapkan pada tahun 2017 yang bernilai 97,57, maka nilai capaian indikator ini adalah 96,79%.
- h) Indikator kinerja 8: Persentase Penanganan konflik di masyarakat berdasarkan surat pengaduan yang masuk ke Satpol PP selama Tahun 2017 tercatat 18 kasus, Konflik masyarakat yang terjadi hal ini disebabkan laporan pengaduan masyarakat berhubungan dengan masalah polusi udara yaitu adanya ternak hewan baik unggas maupun ternak yang bias dipelihara di tengah masyarakat yang menyebabkan bau tidak enak dan suara yang mengganggu, dan hal ini ditangani baik melalui sosialisasi perda maupun tindakan langsung seperti pelaku membongkar sendiri, penutupan maupun penyegelan, sehingga kasus



- ini bisa ditangani walaupun masih ada kasus yang belum selesai tertangani. Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja bernilai 94,44 dari target 97,70. Dan ini menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengalami penurunan dari target yang diharapkan. Maka capaian Kinerja pada tahun 2017 sebesar 96,66%.
- i) Indikator kinerja 9: Cakupan patroli petugas Satpol PP di wilayah Kota Palangka Raya pada Tahun 2017 hanya bisa mengcover 4 kecamatan dari 5 Kecamatan, kecamatan yang belum bisa tercover itu adalah Kecamatan Rakumpit. Hal ini dikarenakan medan tempuh yang jauh dan adanya beberapa wilayah yang harus menggunakan transportasi air untuk mencapai beberapa Kelurahan yang ada di Kecamatan Rakumpit tersebut. Adapun 4 (empat) wilayah yang tercover patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya meliputi Kecamatan Pahandut, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Sebangau. Maka realisasi cakupan untuk Patroli.
 - j) Indikator kinerja 10: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) Pada Tahun 2017 sebesar 46 kasus yang penyelesaian melalui Tipiring melalui Pengadilan. Sehingga nilai realisasi yang didapat pada Tahun 2017 adalah 100, dengan target yang dicapai tersebut Satpol PP memiliki nilai capaian 100 %. Jika melihat kondisi yang ada di wilayah Kota Palangka Raya dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang terjadi hal ini bisa menjadikan salah satu indikator tingkat K3 yang aman dan kondusif.

Tabel 2.51|2 Capaian Kinerja Satpol PP Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2019

No	Indikator	2018	2019
1.	Persentase Penegakan Perda	90%	90%
2.	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0,6	1,2
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10000 Penduduk	7,84	8,04
4.	Persentase penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	90%	90%
5.	Rasio Jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0	1
6.	Rasio Pos Kamling per Jumlah RT	0,44	0,45

Sumber: LKIP Satpol PP Kota Palangka Raya, 2019

2.3.1.14 Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan taget kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJPD Kota Palangka Raya. Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2017 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 sesuai dengan agenda Walikota Palangka Raya *road to WTP* 2017. Tahun 2018 Pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Palangka Raya





mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun untuk nilai evaluasi kinerjanya masih berada dalam kategori CC. Dan pada tahun 2019 Pencapaian kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Palangka Raya tetap dengan nilai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan evaluasi kinerjanya masih dalam kategori CC.

Tabel 2.53 Capaian kinerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

No	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
2	Nilai Evaluasi Kinerja	C	C	CC	CC	CC	CC
3	Produk Hukum Daerah (Legislasi)	13 (3 Perda 10 Perwali)	4	12	10	21	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya, Tahun 2020

2.3.1.15 Ketahanan Pangan

Dalam kurun waktu 2014-2019 ketersediaan pangan antara 25.319,88 ton/tahun dalam bentuk beras. Dari aspek jumlah menunjukkan bahwa pangan yang ada telah mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Palangka Raya yang memerlukan pangan dalam bentuk beras sebesar antara 23.018,07-23.765,59 ton/tahun. Dengan demikian kalau dilihat dari kebutuhan dan ketersediaan beras yang ada masih ada kelebihan beras sebesar antara 2301,81- 2376,56 ton/tahun. Melihat kondisi yang demikian itu maka Kota Palangka Raya tidak kekurangan beras, tetapi beras yang beredar justru sebagian besar bukan berasal dari Kota Palangka Raya atau didatangkan dari luar misalnya dari Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kalimantan Selatan bahkan dari Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan karena produksi di Kota Palangka Raya belum mampu mencukupi kebutuhan pangan utama masyarakat. Kontradiktif dengan luasnya Kota Palangka Raya, kurangnya produksi beras tersebut disebabkan karena untuk menanam padi dan memeliharanya memerlukan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh petani. Sebagai kota yang berkembang cepat, tentu memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah dengan areal pertanian yang pemanfaatan untuk sektor lain misalnya jasa, perdagangan tentu berakibat makin sempitnya lahan pertanian. Untuk melihat capaian kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2014-2017 dan 2018 - 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1.	Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)	33,759	102,49	35.638	35.638
2.	Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%)	tad	82	91,6	91,6





3.	Persentase Konsumsi(Kg/Kapita/Tahun)	tad	35	41	41
4.	Konsumsi Energi	tad	2000	2118,6	2118,6
5.	Konsumsi Protein	tad	25	66	66
6.	Pangan Utama (Ton)	33,759	26.639	35.638	35.638
7.	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr)	2,770	2.748	2.938	2.938
8.	Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	88,42	89.91	97,25	97,25

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2017

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2019

No	Indikator	2018	2019
1	Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pertanian	2,95	2,65
2	Terpenuhinya dokumen / Data NTP	-	12 Dokumen
3	Keterlibatan Dalam Kegiatan Pekan Daerah	-	15 Orang
4	Nilai Tukar Petani	97,76	96,65
5	Tercapainya petani/pekebun yang mendapat pelatihan / sosialisasi	60	120
6	Meningkatnya luas perkebunan rakyat	2.769,12	3.675,36
7	Meningkatnya produktivitas (Sawit)	525,68	1.018,69
8	Tercapainya skor PPH	90,6	85,5
9	Meningkatnya kompetensi penyuluh	-	8 Orang
10	Tersedianya sarana dan prasarana inseminasi buatan	1.200 dosis	700 dosis
11	Produksi daging sapi	1.102.940	1.240.300

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2020

2.3.1.16 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah perpustakaan yang berada di Kota Palangka Raya pada tahun 2014 sebanyak 50 perpustakaan, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 49, pada tahun 2016 tetap sebanyak 49 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 50 perpustakaan. Dari tahun 2014-2016 koleksi buku perpustakaan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Jumlah pengunjung Perpustakaan pada tahun 2014-2016 mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2017 mengalami sedikit penurunan.

Indikator capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dari Tahun 2014 – 2017 diukur dengan 5 (Lima) substansi antara lain : (1) Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dibina, (2) Jumlah Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah, (3) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun, (4) Pengelolaan arsip secara baku, dan (5) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan. Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:





Tabel 2.56 Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2014 – 2017

No	Indikator	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Perpustakaan yang dikelola dan dibina	50	49	49	50
2	Jumlah Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	14.018	18.851	23.546	18.124
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	1.848	16.907	16.931	16.626
4	Pengelolaan arsip secara baku	2,86	100	12,12	22,23
5	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	tad	103 orang	100 orang	28 orang

Sumber: LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, 2017

Pada tahun 2018 – 2019 capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya dapat diukur dengan substansi, antara lain : (1) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan (2) Persentase pengelolaan arsip secara baku/baik. Untuk melihat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.57 Capaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2019

No	Indikator	2018	2019
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan	73,11%	100%
2	Persentase pengelolaan arsip secara baku/baik	22,22%	100%

Sumber: LKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya, Tahun 2019

2.3.1.17 Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informasi layanan komunikasi dan informasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan intelektual masyarakat dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal perkembangan teknologi yang semakin pesat, keberadaan layanan komunikasi dan informasi ini dapat mendukung kemajuan usaha diberbagai sektor bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Pada Tahun 2017 Jumlah Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi adalah 4 OPD dari 36 OPD / Kecamatan atau sebesar 11% dari Target 40%. Artinya Indikator Kinerja diatas dikategorikan kurang berhasil, untuk melihat capaian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Tahun 2019 Jumlah Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi adalah 30 PD dari 36 PD / Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dan berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya.





Kinerja Pelayanan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangannya seperti yang tertuang dalam Revisi RPJMD dengan mengacu pada indikator kinerja sesuai dengan target SDG's dan Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut disampaikan detail data capaian kinerja pelayanan yang dikategorikan per bidang di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya:

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Berdasarkan Nomenklatur baru pada Tahun 2017 Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi baru bergabung pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya. Sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 telah membuka kran Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka dibentuklah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembuka yang ada di setiap SOPD dan Kecamatan sebagai penyedia informasi publik. Daftar nama perangkat daerah yang sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.58 Daftar Nama Perangkat Daerah Yang sudah Membentuk PPID

No	Nama Perangkat Daerah
1	Sekretariat DPRD Kota Palangka Raya
2	Inspektorat Kota Palangka Raya
3	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya
5	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Palangka Raya
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya
9	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya
10	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya
11	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya
12	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
14	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya
15	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya
17	Dinas Sosial Kota Palangka Raya
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya
19	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya
20	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya
21	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya
22	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya
25	Badan Kepegawaian, Pendidikan, Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya
27	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Sumber : Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik





2. Bidang Penyelenggaraan E-Government

a) Akses Jaringan OPD yang terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 18 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan E- Government. Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah :

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam pembangunan dan berbagai layanan pemerintahan dan kemasyarakatan;
- 2) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Tabel 2.59 Data Akses Jaringan OPD yang Terintegrasi

No	Nama PD/Dinas/Badan	Koneksi Internet		Keterangan	Waktu Pemasangan
		Service Provider	Mbps		
1	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Icon +	55	---	Tahun 2017
2	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	---	---	Intranet	Tahun 2017
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	---	---	Intranet	Tahun 2017
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	---	---	Intranet	Tahun 2018
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	---	---	Intranet	Tahun 2018
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	---	---	Intranet	Tahun 2018
7	Sekretariat DPRD	---	---	Intranet	Tahun 2018
8	Inspektorat	---	---	Intranet	Tahun 2018
9	Sekretariat Daerah	---	---	Intranet	Tahun 2018
10	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya	---	---	Intranet	Tahun 2019
11	Dinas Perhubungan	---	---	Intranet	Tahun 2019
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	---	---	Intranet	Tahun 2019
13	Dinas Sosial	---	---	Intranet	Tahun 2019
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	---	---	Intranet	Tahun 2019
15	Satuan Polisi Pamong Praja	---	---	Intranet	Tahun 2019
Jumlah Perangkat Daerah yang telah terintegrasi dengan akses jaringan		15 Perangkat Daerah			
Jumlah Seluruh Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah			





Sumber: Bidang Penyelenggaraan E-Government Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Jumlah Akses Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi adalah 15 Perangkat Daerah dari 36 Perangkat Daerah atau sebesar 41 % dari Target 40%. Adapun kendala yang dihadapi adalah:

- Bangunan kantor yang terpisah sehingga belum semua dapat diintegrasikan.
- Kurangnya dana pada Tahun 2019 untuk Kegiatan Prasarana Jaringan sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
- Belum adanya komitmen seluruh Perangkat Daerah akan Akses Jaringan Terpusat yang dikelola pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya

b) Jaringan Komunikasi

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat dalam program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan layanan jasa akses telekomunikasi sangat diperlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat.

Perkembangan jaringan komunikasi di Kota Palangka Raya terhadap teknologi informasi yang tinggi ini dengan banyaknya jaringan komunikasi yang dibedakan menjadi seluler dan telepon stationer. Jumlah operator jaringan seluler (telpon genggam) di Kota Palangka Raya sebanyak 7 Operator sedangkan operator jaringan telepon stationer sebanyak 1 operator. Di Kota Palangka Raya jaringan komunikasi yang ada diantaranya AXIS, 3 (Tri), Indosat, Star One, Telkomsel, XL, Flexy.

Jaringan komunikasi seluler tersebut tidak semua dapat dimanfaatkan di 5 (lima) Kecamatan di Kota Palangka Raya hanya jaringan Indosat (Mentari) dan Telkomsel (HALO, Simpati dan AS) yang dapat dimanfaatkan di 4 (empat) Kecamatan (Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, Bukit Batu) dan Kecamatan Rakumpit sebagian wilayah yang terjangkau oleh operator.

Sedangkan jaringan komunikasi dalam bentuk telepon dengan operator dari Telkom Indonesia yang dapat dimanfaatkan di 2 (dua) Kecamatan (Kecamatan Pahandut, Jekan Raya). Dengan banyaknya jaringan komunikasi di Kota Palangka Raya membuka peluang usaha dari berbagai sektor baik dari sektor Perbankan, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, jasa karena memberikan kemudahan dalam melakukan interaksi dimasyarakat, kita bisa tepat berkomunikasi tanpa harus memperhitungkan ruang dan waktu.



Tabel 2.60 Data Menara Telekomunikasi Kota Palangka Raya Tahun 2017

No	Operator	Jumlah Menara
1.	PT. TELKOMSEL	137
2.	PT. INDOSAT	10
3.	PT. EL AXIATA	6
4.	PT. HUTCHINSON Cp Tel. (Three)	16
5.	PT. TELKOM (FLEXY)	1
6.	Menara Bersama	52
7.	Menara Tidak Aktif	7
Jumlah		229

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, 2017

Ket : data tahun 2018 – 2019 dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika

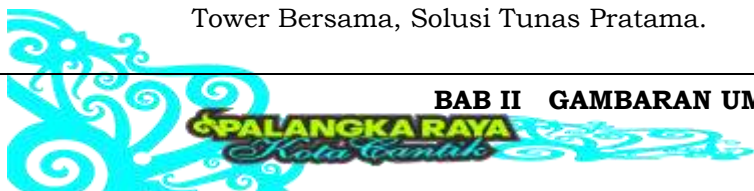
Tabel 2.61 Layanan Telepon Selular

No.	Uraian	Kecamatan	Tahun			
			2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kelurahan terlayani	Pahandut	5	6	6	6
		Jekan Raya	4	4	4	4
		Sabangau	4	5	5	5
		Rakumpit	2	2	2	2
		Bukit Batu	5	5	5	5
2	Jumlah Kelurahan yang belum terlayani	Pahandut	1	0	0	0
		Jekan Raya	0	0	0	0
	(Kategori Susah Sinyal)	Sabangau	2	1	1	1
		Rakumpit	5	5	5	5
		Bukit Batu	2	2	2	2
3	Jumlah BTS* BTS adalah perangkat terpasang dan beroperasi pada satu tiang menara	Pahandut	46	57	75	80
		Jekan Raya	129	174	185	190
		Sabangau	13	14	14	14
		Rakumpit	2	2	2	2
		Bukit Batu	12	14	17	17
4	Jumlah Provider** Provider adalah perusahaan pemilik menara telekomunikasi	Pahandut	10	10	10	10
		Jekan Raya	10	10	10	10
		Sabangau	5	5	5	5
		Rakumpit	3	3	3	3
		Bukit Batu	7	7	7	7

Sumber : DKISP Kota Palangka Raya Tahun 2017

Nb. * = BTS adalah peralatan milik operator terpasang pada sebuah menara telekomunikasi, Operator yang ada di Kota Palangka Raya adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, Axis, H3I, Flexi (Tidak Aktif)

** = Provider yang terdapat di Kota Palangka Raya adalah Telkom, Telkomsel, H3i, Protelindo, Mitratel, Indosat, XL Axiata, CMI (Retower Asia), Tower Bersama, Solusi Tunas Pratama.





3. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Dengan adanya Media Center “Isen Mulang” yang bertempat di Dinas Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya Jalan Yos Sudarso No.2, sebagai pengelola Media Center dapat memposisikan diri sebagai “Pusat Informasi dan Komunikasi Publik Kota Palangka Raya” yang menampung berbagai aspirasi masyarakat, mengembangkan wawasan melalui informasi yang bermanfaat, maupun fasilitas lain yang akan dikembangkan.

a. Domain dan Sub Domain

Web Site yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Palangka Raya diantaranya :

Domain :

- www.Palangkaraya.go.id



Sub Domain ada 36 :

Jumlah Sub Domain yang aktif dan update s/d 31 Desember 2019 berjumlah 20 (dua puluh), yaitu :

1. Dinas Pendidikan (disdik.palangkaraya.go.id)
2. Dinas Kesehatan (dinkes.palangkaraya.go.id)
3. Dinas sosial (dinsos.palangkaraya.go.id)
4. Dinas perhubungan (dishub.palangkaraya.go.id)
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (disdalduk.palangkaraya.go.id)
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar.palangkaraya.go.id)
7. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP.palangkaraya.go.id)
8. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian (kominfo.palangkaraya.go.id)
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (disperidag.palangkaraya.go.id)
10. Inspektorat (inspektorat.palangkaraya.go.id)



11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (bkpp.palangkaraya.go.id)
12. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (bappeda.palangkaraya.go.id)
13. Dinas Lingkungan Hidup (dlh.palangkaraya.go.id)
14. Dinas Pemadam dan Kebakaran (dpkp.palangkaraya.go.id)
15. Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah (bpkad.palangkaraya.go.id)
16. Badan Penelitian dan Pengembangan (balitbangkota.palangkaraya.go.id)
17. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (kesbangpol.palangkaraya.go.id)
18. Satpol PP (satpolpp.palangkaraya.go.id)
19. Sekretariat DRPD (sekretariatdprd.palangkaraya.go.id)
20. Kecamatan Jekan Raya (kec-jekanraya.palangkaraya.go.id)

Sumber: Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, DKISP Kota Palangka Raya, Tahun 2019

Dengan adanya website milik pemerintah dapat dengan mudah memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat tanpa dibatasi dengan ruang dan waktu, namun informasi yang disampaikan tersebut tentunya harus Up to date.

b. Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat Kabar yang ada dibedakan media nasional dan lokal dikalangan masyarakat Kota Palangka Raya. Media Nasional yang beredar antara lain:

Tabel 2.62 Surat Kabar

Media Lokal	Media Nasional
1. Palangka Pos 2. Kalteng Pos 3. Tabengan 4. Dayak Pos 5. Radar Palangka 6. Palangka Expres 7. Borneo News	1. Kompas 2. Jawa Pos 3. Republika 4. Seputar Indonesia (Sindo) 5. Banjarmasin Post

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

Kesemuanya itu memberikan informasi yang terjadi didalam dan diluar negeri sehingga masyarakat dapat memilih dengan bijak informasi yang diperlukan untuk informasi baik bisnis maupun sosial, ditambah dengan adanya penyediaan surat kabar elektronik yang telah dapat dinikmati oleh warga melalui perangkat internet/mobile, dari media lokal, nasional ataupun mancanegara.



c. **Penyiaran Televisi Nasional dan Lokal**

Terdapat beberapa stasiun televisi, baik lokal, nasional maupun TV Kabel yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya:

Tabel 2.63 Penyiaran Televisi

Televisi Nasional		Televisi Lokal	Televisi Kabel
- TVRI, - TV ONE, - METRO TV, - RCTI, - SCTV, - MNCTV, - G TV,	- ANTV, - TRANS TV - TRANS 7, - RTV - NET TV - iNEW TV	- TVRI Kalteng	- PT.Citra Ilham Mandiri, - PT Provision Mandiri Netlink, - PT. Permata Citra Kahayan.

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya
Penyiaran Radio Nasional dan Lokal

Terdapat sejumlah stasiun radio lokal maupun nasional yang salurannya dapat ditangkap di Kota Palangka Raya melalui antena diantaranya:

Tabel 2.64 Radio Swasta

No.	Nama Radio/Perusahaan	Alamat
1.	PT. Masa Depan Bumi (Kalaweit FM)	Jl. Pinus Raya No. 8
2.	Stars FM	Palangka Raya
3.	PT. Radio Evella Rosisonia	Jl.Cut Nyak Dien No. 19
4.	PT. Radio Suara Sangkakala	Jl. RTA. Milono Km. 3,5
5.	PT. Radio Dian Mandiri Barigas	Jl. Aries No. 233
6.	PT. Radio Borneo Citra Vocalia Rasisonia	Jl. Punai No. 14
7.	PT. Radio Cindranada Awigra	Jl. Sam Ratulangi No. 85
8.	PT. Radio Garantung	Jl. Tjilik Riwut Km. 6
9.	PT. Radio Duta Suara Indah Pratama	Jl. Sam Ratulangi No. 85
10.	PT. Radio Suara Navaria Gemilang	Jl. Raden Saleh IV No. 3B
11.	Kalteng Pos FM	Jl. Cilik Riwut Km. 2,5
12.	Canisa FM	Jl. Pangrango No. 6

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya

Tabel 2.65 Radio Pemerintah

Nama Radio	Frekwensi
- RRI PRO I Palangka Raya - RRI PRO II Palangka Raya - RRI PRO III Palangka Raya - RRI PRO IV Palangka Raya	- FM 89,2 MHz - FM 92,4 MHz - FM 95,1 MHz - FM 95,9 MHz

Sumber: DKISP Kota Palangka Raya





d. Jumlah Pameran atau Expo

Dimulai dari peringatan HUT Koperasi dan Hari Jadi Kota Palangka Raya dan Pemerintah Kota Palangka Raya yang dilaksanakan di beberapa tempat yang berbeda di Lapangan Mantikei, Gedung Tambun Bungai, Gedung KONI berkembang menjadi Palangka Raya Fair yang merupakan agenda tahunan Pemerintah Kota Palangka Raya. Kegiatan Pameran ini bertujuan memberikan informasi hasil pembangunan, pengembangan ekonomi kerakyatan untuk peluang investasi atau permodalan bagi pengembangan UMKM, sarana promosi agribisnis dan industri, menarik investor untuk menanamkan investasi di Kota Palangka Raya.

Pada Tahun 2013 Kota Palangka Raya melaksanakan Palangka Raya Fair dengan mengundang pelaku usaha yang ada di Palangka Raya dengan konsep menggunakan stand untuk pelaku usaha dan pasar rakyat untuk masyarakat umum. Akan tetapi total pameran yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya hanya sebanyak 1 kegiatan dan angka ini terus sama dari tahun 2010 sampai 2019.

2.3.1.18 Persandian dan Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, bergabungnya bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, sehingga pengelolaan data statistik sektoral yang semula masuk ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pembangunan (Bappedalitbang) otomatis akan dilaksanakan pada dinas yang baru.

Penyediaan informasi dan data yang akurat, relevan dengan cakupan yang lengkap merupakan kebutuhan yang kita tempatkan pada prioritas yang utama. Oleh karena itu merupakan tantangan bagi kita untuk terus menggali dan menyediakan informasi/data yang menyangkut potensi wilayah untuk kepentingan pembangunan maupun pembinaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara nomor 10 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah Informasi di lingkungan instansi pemerintah merupakan aset Negara, perlu di kelola secara khusus untuk mencegah terjadinya kebocoran, baik sebagai akibat kelalaian sendiri maupun karena adanya ancaman pihak lain yang tidak memiliki otorisasi.

Adapun informasi yang dikelola sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian dari informasi publik yang dikecualikan sebagaimana di atur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tata Kelola Informasi Berklasifikasi dilakukan guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, keaslian, dan ketersediaan informasi, sehingga informasi dapat menjadi bahan pengambilan keputusan yang tepat bagi pimpinan organisasi atau institusi.





2.3.2. Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian Tanaman Pangan

Luas panen padi ladang tahun 2014 sebesar 50 ha meningkat menjadi 56 ha di tahun 2015 dan menurun kembali menjadi 15 ha pada tahun 2016 dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 4 ha, sampai dengan Tahun 2018 kembali menurun menjadi 1,25 ha. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija, hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) dan sebagian tanaman padi gogo. Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong, lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya. Luas panen padi ladang, padi sawah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.66 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya 2014 - 2019

Tahun	Padi Ladang	Padi sawah	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2019	-	52,80	219	12	0,80
2018	1,25	13,75	56	16,50	4
2017	4	0,25	73	39	1
2016	15	0	183	31	3
2015	56	3	149	48	4
2014	50	8	77	43	11
Jumlah	126,25	77,8	757	189,5	23,8

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, 2019

2.3.2.2. Kehutanan dan Perkebunan

Untuk perkebunan, luas areal tanaman perkebunan besar negara, perkebunan swasta dan perkebunan rakyat tahun 2016 sebagian meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral terutama dalam penanaman modal di perkebunan, jenis tanaman perkebunan karet luas arealnya dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2016, luas areal karet sebanyak 5.008,00 ha di banding tahun 2014 seluas 4.518,50 ha.

Pada tahun 2015 terdapat 8 (delapan) perusahaan perkebunan besar swasta kelapa sawit dengan luas lokasi secara keseluruhan berjumlah sekitar 71.000 ha, dimana semuanya sudah berstatus memiliki izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Sedangkan kehutanan, makin berkurangnya kawasan hutan di Kota Palangka Raya tercermin dengan menurunnya hasil produksi kayu bundar dan kayu olahan dari tahun ke tahun. Untuk memperbaiki keseimbangan ekosistem hutan ditetapkan kawasan seluas ±1.635 ha yang terletak di belakang pusat pemerintahan Kota Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Taman yang terbesar di dunia.



Tabel 2.67 Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ribu Ton) Tahun 2017 - 2019

Kecamatan	Karet			Kelapa			Kelapa Sawit		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1. Pahandut	25,25	0,025	0,025	10,98	0,009	0,009	4,69	0,005	0,005
2. Sabangau	280,0	0,280	0,280	10,45	0,008	0,008	18,80	0,019	0,019
3. Jekan Raya	65,0	0,065	0,065	27,27	0,025	0,025	26,40	0,201	0,201
4. Bukit Batu	380,0	0,380	0,380	68,83	0,065	0,065	68,30	0,375	0,375
5. Rakumpit	2.150	2,217	2,217	7,96	0,005	0,005	432,62	0,419	0,419
Jumlah	2.900,25	2,967	2,967	126,34	0,112	0,112	549,81	1,019	1,019

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2020

Pada sektor kehutanan yang kewenangannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan data dan informasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa di Kota Palangka Raya terdapat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) sebanyak 4 (empat) unit usaha seluas \pm 54.489 Ha yang dipegang oleh PT. Kalteng Green Resources, PT. Langgeng Bakti Persada, PT. Borneo Subur Argo, dan PT. Tayoung Engreen. Kemudian terdapat 2 (dua) unit Izin Perhutanan Sosial seluas 534 Ha dengan anggota 153 Kepala Keluarga (HKM Karya Mahaga Lewu Bukit Tunggal, KTH Usaha Maju Bersama Petuk Katimpun).

2.3.2.3. Peternakan dan Perikanan

Jumlah populasi ternak pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2014, sektor peternakan yang dilaksanakan diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dipinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan diluar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras. Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2016 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 17.498 ekor sedangkan untuk jenis unggas, ayam broiler merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya. Untuk Peternakan ternak babi pada tahun 2017 dan 2018 masih tetap merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 18.368 ekor untuk tahun 2017 dan 18.919 untuk tahun 2018. Pada Tahun 2019 jenis ternak dengan populasi tertinggi pada ternak babi yaitu mencapai 22.248 ekor. Berikut tabel populasi ternak Kota Palangka Raya:



Tabel 2.68 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda
2019	2139	37	1.511	-	22.248	8
2018	2.026	34	1.309	-	18.919	-
2017	1.958	12	1.247	-	18.368	11
2016	1.883	12	1.134	-	17.498	11
2015	1.793	13	1.007	-	13.036	-
2014	1.741	7	1.148	-	13.036	5

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

Kota Palangka Raya sangat banyak jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk dikembangkan dan mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.

Secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow, dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman, Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan, perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi perikanan darat. Produksi perikanan tangkap di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.69 Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

Tahun	Sungai	Danau	Rawa
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	1.268,0	1.156,0	944,0
2018	1.422,5	1528,1	1247,4
2017	1.098	1080,8	937,2
2016	824,0	970,1	817,5
2015	815,4	911,1	771,0
2014	667,0	823,0	647,0

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020



2.3.2.4. Kepariwisataan

Kota Palangka Raya merupakan daerah yang mempunyai tempat wisata, upacara adat keagamaan, tari keagamaan, nyanyian keagamaan dan wisata kuliner. Tersebar di lima kecamatan yang dikelompokkan berdasarkan destinasi wisata sesuai kategorinya :

A. Destinasi Wisata Budaya / Sejarah, antara lain :

1. Monumen Tugu Soekarno;

Tugu Soekarno terletak di dekat Istana Isen Mulang dan bundaran besar yang juga didesain oleh Sukarno dan hanya berjarak 50 meter dari bibir Sungai Kahayan;

2. Museum Balanga;

Museum yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Km 2,5 dengan luas kurang lebih 5 (lima) Ha. Museum ini berada didalam kota Palangka Raya dan mudah untuk dikunjungi karena dibuka setiap hari dari jam 08.00 – 12.00 WIB, dan ada petugas pemandu. Museum Belanga ini berkiprah sebagai lembaga pelestarian, pendokumentasian, serta penyajian berbagai koleksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku dayak, seperti etnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan megic. Di museum ini tersimpan juga berbagai alat tradisonal yang biasa dipakai oleh suku Dayak pada jaman dahulu seperti—Mihing— (sebuah penangkap ikan tradisional), baju sakarut atau baju Karungkong Sulau, atau juga baju Basurat yang biasa dipakai pada upacara ritual, senjata-senjata suku Dayak seperti Mandau, Sumpitan, Duhung, dan sebagainya. berbagai koleksi peninggalan budaya suku Dayak dan segala yang berkaitan dengan sejarah kehidupan suku Dayak seperti etnografika, barang-barang warisan leluhur dayak yang banyak memiliki kekuatan magis;

3. Pesanggrahan Isen Mulang;

Terletak di jalan S. Parman, Kota Palangka Raya dan termasuk pernah dikunjungi dan di inapi oleh Bapak Presiden RI yang pertama sampai dua kali disini, yakni Bapak Soekarno.

4. Sandung Ngabe Sukah;

Makam yang berbentuk rumah kecil persegi panjang beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin atau beton, tempat menyimpan tulang belulang orang yang telah meninggal;

5. Rumah Betang;

Rumah panjang, rumah besar merupakan rumah adat Dayak;

6. Rumah Tjilik Riwut;

Rumah peninggalan Tjilik Riwut, seperti pakaian, buku-buku peninggalan beliau, foto-foto semasa beliau hidup, dan koleksi pribadi lainnya seperti medali penghargaan, dan Mandau senjata khas Dayak. Untuk menjaga ketahanan buku-buku peninggalannya, beberapa buku tua tidak diperbolehkan untuk dibaca.





7. Mandala Wisata;

Mandala Wisata adalah sebuah Rumah Betang yang bangunannya terletak di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mandala Wisata dibangun oleh Pemkot Palangkaraya di atas tanah milik pemerintah yang ada di Jl. D.I Panjaitan untuk keperluan pariwisata di kota Palangkaraya. Selain bangunan rumah itu sendiri, ada benda lain yang merupakan bagian dari Rumah Betang Mandala Wisata. Misalnya terdapat Sandung, yaitu tempat penyimpanan tulang-belulang dari nenek moyang yang sebelumnya telah meninggal. Sebelum dimasukkan kedalam Sandung, tubuh nenek moyang yang sudah meninggal tersebut akan menjalani acara adat tradisional yang disebut dengan tiwah. Tentu saja tidak ada tulang didalam Sandung yang ada di Rumah Betang Mandala Wisata, karena itu hanya replika. Selanjutnya ada juga benda yang disebut dengan Patahu. Ini adalah bagian dari Sandung yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi dengan arwah nenek-moyang. Rumah Betang Mandala Wisata juga menyimpan pahatan berupa Sapundu. Sapundu ini terbuat dari kayu dan dipahat dengan bentuk yang menggambarkan karakter dari nenek moyang yang tulangnya tersimpan didalam Sandung.

8. Sandung Bawi Kuwu;

Sandung terletak di Jalan Bawi Kumbu, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bawi Kuwu merupakan anak dari pembekal desa yang tinggal di tepi sungai Rungan, Kelurahan Mungku Baru yang sekarang bernama Ratu Kumala. Bawi Kuwu dilarang untuk keluar rumah oleh orang tuanya, sehingga ia mendapat sebutan “Bawi Kuwu” yang bagi masyarakat Suku Dayak berarti “gadis pingitan”. Menurut sejarah, Bawi Kuwu meninggal karena dimakan oleh buaya dan tulangnya disemayamkan di sandung ini. Tiang sandung yang terletak di Kelurahan Mungku Baru ini merupakan salah satu indikasi adanya permukiman pada masa lalu di tepi sungai Rungan.

9. Desa Wisata Sei Gohong;

Sei Gohong berarti Sungai Gohong erat kaitanya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan, selain itu Sungai Gohong dapat menjadi tempat yang bagus untuk menikmati indahnya alam di sepanjang sungai Gohong maka anda bisa menyewa kapal kecil yang disebut Kalotok untuk menyusuri indahnya alam Kalimantan Tengah atau jika anda ingin melihat secara langsung orang utan di habitatnya maka anda bisa mengunjungi pulau Kaja yang berada tidak jauh dari dermaga Teluk Kaja di Desa Sei Gohong.



10. Museum Balanga

Museum Balanga merupakan museum yang terletak di ibukota Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya, tepatnya di jalan Tjilik Riwut KM 2,5. Dulunya museum ini merupakan Gedung Monumen Dewan Nasional (GMDN) yang dibangun pada tahun 1963 dan diresmikan pada tanggal 6 April 1973 dengan nama “Balanga”. Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan GVH Vooger meresmikan museum tersebut menjadi Museum Negeri Provinsi Kalimantan Tengah “Balanga”, yang kemudian menjadi UPT. Museum Kalimantan Tengah “Balanga” di bawah pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah.

Museum Balanga memiliki tugas sebagai pengembangan yang bersifat pendidikan Suku Dayak di Kalimantan Tengah, antara lain mengumpulkan dan mendokumentasi benda-benda budaya (artefaks) dan sumber daya alam, melakukan pengadaan dan mengkonversikan benda-benda budaya untuk dipamerkan, serta menyajikan benda-benda budaya agar bisa menarik minat masyarakat agar berkunjung ke museum ini, sehingga bisa berfungsi sebagai tempat pendidikan yang bersifat budaya, penelitian dan juga studi wisata.

B. Destinasi Wisata Alam, antara lain :

1. Taman Nasional Sabangau;

Terletak di antara Sungai Katingan dan Sungai Sebangau ini memiliki luas sekitar 568.700 Ha. Salah satu ekosistem hutan rawa gambut terdapat sekitar 166 jenis flora, 106 jenis burung, 36 jenis ikan dan 35 jenis mamalia dengan spesies kunci orang utan yang diperkirakan berjumlah 2.500-4.500 ekor;

2. Batu Banama;

Terdapat situs Kaharingan, Pura Agung Sali Paseban/ Satya Dharma;

3. Taman Wisata Alam Bukit Tangkiling;

Pemandangan alam dan melihat satwa liar yang dilindungi seperti buaya dan rusa. Luas keseluruhan kawasan wisata ini adalah 2.594 Ha dengan rincian Cagar Alam seluas 2.061 Ha dan Taman Wisata Alam seluas 533 Ha;

4. Kawasan Hutan Ulin;

Kawasan ini tumbuh pohon kayu ulin yang sudah sangat sulit ditemukan di wilayah Kota Palangka Raya;

5. Pulau Kaja;

Pulau Kaja merupakan bagian dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pulau ini merupakan rumah bagi 40 ekor orangutan yang sedang dipersiapkan untuk dilepas ke hutan belantara. Pulau Kaja berada dalam pengawasan Borneo Orangutan Survival, sebuah organisasi non-profit yang berusaha mengkonservasi orangutan di kawasan Borneo.





6. Danau Tahai;

Obyek wisata Danau Tahai terletak di Desa Tahai, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, berjarak sekitar 29 Km dari Pusat Kota Palangkaraya. Untuk mencapai ke lokasi sangat mudah, yaitu hanya memakan waktu sekitar 30 menit baik dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, dengan kondisi jalan aspal yang cukup bagus.

7. Danau Kereng Bangkirei

Dermaga Kereng Bangkirei merupakan salah satu objek tempat wisata di Palangkaraya yang juga merupakan gerbang masuk utama ke Taman Nasional Sebangau. Objek wisata yang satu ini sob cukup populer dan banyak diminati oleh wisatawan yang berkunjung di Palangkaraya. Tempat ini memiliki penataan area yang cantik berpadu dengan panorama alam sekitarnya menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke dermaga.

C. Destinasi Wisata Buatan, antara lain :

1. Perahu Wisata Susur Sungai;

Perahu wisata yang diberi nama Rahai'i Pangun ini. Terdapat 4 (empat) rute wisata yaitu rute pemancingan (lokasi danau tundai, sungai rungan dan sekitarnya), atraksi burung elang (lokasi sungai kahayan), orang utan (lokasi pulau kaja tangkiling). Surapati (lokasi pulau monyet).

2. Jembatan Kahayan, diantaranya taman pinggir sungai Kahayan yaitu Pasuk Kameluh.

3. Kum-Kum, terdapat beberapa jenis binatang seperti buaya, beruang, monyet dan burung;

4. Kawasan Bundaran Besar;

5. Arboretum Nyaru Menteng, kawasan pelestarian plasmanutfeh ekosistem hutan rawa, terdapat klinik orang utan;

6. Bumi Perkemahan Tuah Pahoe;

7. Kolam Renang dan Golf Isen Mulang;

Merupakan salah satu kolam renang yang berada di Kota Palangka Raya. Kolam renang ini sering dimanfaatkan oleh warga Kota Palangka Raya untuk olahraga renang dan rekreasi air. Kolam renang isen mulang memiliki kolam desain dengan baik, aman, terawat, air jernih serta dilengkapi fasilitas yang lengkap seperti kantin, kamar ganti dan kamar mandi. Kolam renang Kota Palangka Raya juga ramah anak, sehingga warga bisa mengajak serta anak untuk berenang. Kolam renang ini terbuka untuk umum dengan harga tiket masuk yang murah dan terjangkau.

8. Kawasan Souvenir Shop Jalan Batam;

9. Wisata Outbond dan Outdoor Anak Himba;



D. Destinasi Wisata Religi, antara lain :

1. Sandung Ngabe Sukah;

Di Kota Palangka Raya terdapat Sandung Ngabe Sukah, terletak di Kecamatan Pahandut merupakan makam pendiri Kota Palangka Raya yang berbentuk rumah kecil (sandung). Sandung merupakan sebuah bangunan kecil persegi panjang beratap, bertiang terbuat dari kayu ulin/beton, tempat menyimpan tulang belulang orang yang telah meninggal (setelah ditiwahkan). Sandung ini didirikan di Bukit Pahandut, di belakang rumah Ngabe Sukah (seorang tokoh yang disegani di Desa Pahandut, dan sebagai kepala desa yang pertama, di bawah Kademangan Sawang, sekitar tahun 1928). Terletak di jalan Dr. Murjani membelakangi jalan Darmosugondo (arah pelabuhan Rambang).

2. Sandung Bawi Kuwu Tumbang Rakumpit;

Sandung ini terletak di Jalan Bawi Kumbu, Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Bawi Kuwu merupakan anak dari pembekal desa yang tinggal di tepi sungai Rungan, Kelurahan Mungku Baru yang sekarang bernama Ratu Kumala. Bawi Kuwu dilarang untuk keluar rumah oleh orang tuanya, sehingga ia mendapat sebutan “Bawi Kuwu” yang bagi masyarakat Suku Dayak berarti “gadis pingitan”. Sandung ini ditempatkan diatas tiang dengan ukuran panjang 3 meret dan berdiameter 0,58 meret. Tiang yang terlihat saat ini bukanlah tiang yang asli, melainkan tiang baru yang dibangun untuk menutupi tiang asli berbahan kayu ulin. Pada tiang terdapat ukiran relief berbentuk buaya dan pada bagian atas tiang ditempatkan sebuah sandung berbentuk miniatur rumah kecil untuk persemayaman orang yang telah meninggal. Tiang sandung atau disebutnya juga dengan tiang pantar dimaksudkan sebagai lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju ke Negeri Lewu Liau.

3. Makam Kubah Kuning;

4. Bukit Karmel;

Bukit karmel adalah salah satu tempat wisata yang sangat banyak juga di kunjungi oleh wisatawan dari lokal maupun manca negara, di bukit karmel ini wisatawan langsung, tempat ini sangat di kenal kekhusyuannya bagi umat kristiani, banyak wisatawan yang berkunjung ke sini tidak hanya ingin jalan-jalan namun berdoa di tempat ini. bukit karmel ini terletak di jl bukit karmel banturung, palangkaraya. atau setengah jam dari pusat kota. Bukit doa karmel Tangkiling di bangun serta diatur pada bln. Oktober 1998. Letak bukit doa ini di jalan bukit karmel Banturung, Palangka Raya Kalimantan Tengah.

5. Pura Sali Paseban Batu;

Pura Sali Paseban Batu, merupakan pura yang menjadi pemersatu antara umat Hindu Bali dengan Umat Hindu Kaharingan. Di wilayah ini, setidaknya terdapat 52 kepala keluarga asli Bali yang turut menjaga keberadaan pura. Hubungan antara kedua suku yang





berbeda ini begitu erat bilamana ada kegiatan persembahyangan yang berlangsung.

- 6. Balai Basara Hindu Kaharingan;**
- 7. Balai Basara Tampung Penyang;**
- 8. Balai Basara Kereng Bangkirei.**

Selain itu ada 2 (Dua) Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, antara lain :

1. Penganugerahan Tingkat Nasional yakni Indonesia Sustainable Tourism Awards (ISTA) dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;

Kota Palangka Raya berhasil meraih juara 2 penghargaan Green Silver Kategori Manfaat Ekonomi melalui destinasi wisata Kelurahan Kereng Bangkirai yang merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan dalam upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Palangka Raya dalam mewujudkan Kota Palangka Raya maju, rukun dan sejahtera dalam upaya peningkatan smart ekonomi sebagaimana visi dan misi Walikota Palangka Raya.

2. Rekor Dunia MURI dalam Pagelaran Kecapi Dayak Pemain Terbanyak;

Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya melalui leading sektor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), yakni pagelaran kecapi Dayak dengan pemain terbanyak. Ini adalah pemecahan rekor muri permainan kecapi terbanyak yang dilaksanakan, di Jalan Yos Sudarso, Minggu, 4 Agustus 2019. pemecahan rekor ini bisa sukses berkat dukungan 385 pemain kecapi dayak. Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian perayaan HUT Kota Palangka Raya pada 17 Juli lalu. Kegiatan pemecahan rekor ini dimulai dengan lagu, yang disusul dengan permainan kecapi bersama dan hiburan. Selain pemecahan rekor MURI, pada kesempatan ini juga dilaksanakan launching lagu Kota Palangka Raya oleh Mutant Borneo.

2.3.2.5. Perdagangan

Kota Palangka Raya memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka pengembangan ekonomi wilayah dan merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, walaupun sebagian besar barang/jasa yang diperdagangkan didatangkan dari daerah luar daerah. Pengembangan dan pembinaan terhadap sektor perdagangan dan jasa ditujukan untuk meningkatkan dan menjamin lancarnya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis. Posisi strategis sebagai transit perdagangan barang dan jasa, pengembangan infrastruktur difokuskan pada pembangunan pasar-pasar tradisional semi modern dan pembangunan depo sembako yang dilakukan di beberapa tempat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dan barang-barang strategis lainnya untuk memenuhi





kebutuhan masyarakat di samping untuk menstabilkan harga pasar dan menekan laju inflasi.

Sektor perdagangan merupakan sektor yang sangat dominan di Kota Palangka Raya, baik dilihat dari pangsaanya maupun tingkat pertumbuhannya. Dilihat dari unit usaha yang ada, jumlahnya terus mengalami penurunan, namun demikian nilai perdagangan yang dihasilkan justru terus mengalami peningkatan. Hasil akhir yang kemudian terlihat adalah meningkatnya produktivitas untuk setiap perusahaan. Kinerja perdagangan yang terus membaik tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh kota ini untuk terus meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan, seperti pasar dan daerah pertokoan yang terus ditata dan dibenahi.

Tabel 2.70 Kinerja Sektor Perdagangan Tahun 2014 - 2019

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unit Usaha	592	541	694	1435	1731	1916
PDRB (Rp juta)	1.713,372	1.905,227	2.220,715	9.479.165,6	10.154.119,2	10.881.804,9
PDRB per perusahaan (Rp juta)	2,894.20	3,521.67	3,199.87	6,31	8,41	9,95
Peran sektor Perdagangan dalam PDRB (%)	17.43	16.88	17.36	9,94	10,99	9,43
Pertumbuhan per tahun (%)	6.17	3.78	10.43	6,99	7,12	7,17

Sumber: Dinas Perdagangan, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian

2.3.2.6. Perindustrian

Pada tahun 2016 terdapat 1.065 unit usaha industri kecil dan 3.620 tenaga kerja. Dan tahun 2018 terdapat 1.813 unit usaha industri kecil dan 5.456 tenaga kerja Jumlah ini meliputi indutri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka (IKA) dan industri logam mesin dan kimia. Adapun perkembangan jumlah perusahaan industri kecil di Kota Palangka Raya dapat dilihat dalam tabel 2.59 berikut.

Tabel 2.71 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya tahun 2014-2019

Tahun	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Industri Aneka	Industri Logam Mesin dan Kimia	Jumlah
2014	520	271	228	1019
2015	367	460	230	1057
2016	370	464	231	1065
2017	684	138	851	1673
2018	752	143	936	1831
2019	Belum Release	Belum Release	Belum Release	-

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020





Kerajinan Rakyat

Pemerintah Kota Palangka Raya juga telah berusaha memajukan industri kecil atau kerajinan rakyat dengan menerapkan program-program pengembangan usaha industri kecil. Program-program pengembangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewiraswastaan, proses produksi barang, kualitas, desain produk serta ketrampilan pemasaran. Banyak sudah corak jenis-jenis hasil produksi industri kecil dari Kota Palangka Raya yang asli maupun motif baru yang telah dapat dikenal di dunia. Kerajinan rakyat dengan sumber bahan baku lokal diarahkan menjadi sektor unggulan pengembangan ekonomi lokal.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu kota, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Variabel-variabel yang diukur dalam pengukuran tingkat daya saing pada penelitian ini adalah variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia dan membandingkannya dengan kebijakan (fungsi kawasan strategis, struktur wilayah dan sektor unggulan) masing-masing kabupaten/kota.

Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kota Palangka Raya merupakan kota dengan IPM tertinggi sebesar 80,77.

Dalam analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, Kota Palangka Raya bersama Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Barito Utara memiliki rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Dari sisi hubungan antara nilai IPM dengan pertumbuhan, Kota Palangka Raya bersama Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Lamandau memiliki rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.





Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sebesar Rp 10.881.805 juta rupiah. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,17% pada tahun 2019.

Tabel 2.72 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2014-2019 (Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB Perkapita	
	Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)	Atas Dasar Harga Konstan (Rp.)
2014	-	-
2015	11.289,3	8.286,0
2016	12.792,9	8.859,5
2017	14.532,2	9.479,2
2018	16.532,5	10.154,1
2019	18.258,6	10.881,8

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, Tahun 2020

2.4.2 Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

Fokus infrastruktur bisa digambarkan dari sarana dan prasarana perhubungan, aspek tata ruang dan aspek pendukung seperti bank, pertokoan, perhotelan serta lingkungan hidup. Ketimpangan pengembangan wilayah yang terjadi antara bagian Utara (Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu), Selatan (Kecamatan Sabangau) yang relatif tertinggal terhadap bagian Tengah Kota Palangka Raya (Kecamatan Jekan Raya dan Pahandut), diantaranya disebabkan oleh keterkaitan yang rendah antara satu kawasan dengan kawasan lainnya serta keterisolasian wilayah akibat minimnya dukungan transportasi (darat).

Sarana pengembangan daya saing didukung pula oleh keberadaan institusi pendukung seperti perbankan. Jumlah bank tercatat 11 unit kantor bank yang terpusat di dalam Kota Palangka Raya. Bank yang beroperasi diantaranya adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Bank Nasional Indonesia, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Bank Mega, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank BTPN dan Bank Rakyat Indonesia.

Tahun 2016 jumlah restoran, rumah makan, cafe yang beroperasi di Palangka Raya sebanyak 162 rumah makan yang kebanyakan lebih banyak terpusat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya, sedangkan di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Sabangau, Bukit Batu, Rakumpit tidak terlalu banyak restoran, rumah makan, cafe. Restoran, rumah makan, cafe tersebut menghadirkan berbagai macam menu/masakan Internasional, European Food, Steak, masakan nasional/nusantara, masakan cepat saji, masakan daerah (Banjar, Jawa, Sulawesi, Padang, Batak, Sunda dan berbagai daerah lainnya), masakan khas Kalimantan Tengah (Dayak), Chinese Food.



Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 74 buah hotel dan akomodasi lainnya dimana 6 diantaranya adalah hotel bintang. Dari jumlah tersebut dua buah hotel berstatus bintang 4, satu bintang 3 dan dua lainnya hotel bintang 2. Saat ini telah tersedia 2 buah hotel bintang 4. Hotel tersebut antara lain Swiss-Belhotel Danum, 1 (satu) hotel merupakan hotel berbintang 4 (empat) yaitu Aquarius Boutique Hotel, 2 (dua) hotel merupakan hotel berbintang 3 (tiga) yaitu Hotel Luwansa dan Rungan Sari Resort dan 4 (empat) hotel merupakan hotel berbintang 2 (dua) Hotel Batu Suli, Hotel Dandang Tingang, Hotel Amaris, Grand Global Hotel serta hotel yang lain merupakan hotel berkelas melati yang berjumlah 40 hotel. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 dimungkinkan terjadi penambahan jumlah hotel dan penginapan yang dibangun di tempat atau jalan strategis di Kota Palangka Raya. Hal ini seiring dengan perkembangan perekonomian yang semakin membaik di Kota Palangka Raya maka tingkat kebutuhan akan hotel dan penginapan juga meningkat.

2.4.3 Perkembangan Investasi

Dalam konsep ekonomi investasi merupakan sumber terpenting dari pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi akan tercipta barang dan jasa di satu sisi dan tercipta lapangan kerja pada sisi lainnya. Lapangan kerja yang tercipta tentu menciptakan penghasilan yang selanjutnya akan menjadi pendorong konsumsi yang akan kembali mendorong pengusaha untuk berinvestasi kembali. Investasi dapat berupa investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks perekonomian makro aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. Dalam konteks kinerja mikro pemerintah daerah, investasi ini tercatat pada kinerja nilai investasi yang baru saja ditamamkan. Artinya untuk mendeteksi tingkat investasi di suatu daerah dapat menggunakan data PMTB dan data investasi yang keduanya dapat saling melengkapi, walaupun sesungguhnya nilai investasi yang ditamamkan itu sudah masuk dalam komponen PMTB.

PMTB di Kota Palangka Raya dalam 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Peran PMTB dalam pembentukan PDRB bahkan lebih tinggi dari angka nasional yang rata-rata hanya mencapai angka 30% dari Produk Domestik Bruto. Sebagaimana diuraikan di atas PMTB adalah sumber pembentuk pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi untuk menciptakan output pada perekonomian dicerminkan oleh nilai ICOR.

2.4.4. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat





dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.73 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Partisipasi Angkatan Kerja Kota Palangka Raya Tahun 2018

No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Partisipasi Angkatan Kerja		Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran	
1	Tidak/Belum Tamat SD	4.806	-	4.806
2	Sekolah Dasar	15.438	234	15.672
3	Sekolah Menengah Pertama	21.000	543	21.543
4	Sekolah Menengah Atas	35.522	2.480	38.002
5	Sekolah Menengah Kejuruan	17.636	228	17.864
6	Diploma/Universitas	4.046	937	4.983
7	Universitas	28.877	3.438	32.315
	Jumlah	127.325	7.860	135.185

Sumber: Statistik Palangka Raya, 2019

2.4.5. Iklim Berinvestasi

Sistem pelayanan publik kepada masyarakat di bidang perizinan-non perizinan dan penanaman modal, saat ini telah memiliki sistem pelayanan satu atap dan diharapkan akan dapat memangkas birokrasi pelayanan yang cukup panjang, sehingga mampu mengurangi ekonomi biaya tinggi. Saat ini terdapat 10 jenis perizinan yang sudah dilayani meliputi: Izin Gangguan (HO), Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol (IPTMB), Tanda Daftar Pariwisata, Izin Pengumpulan Uang dan Barang, Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Trayek (Angkot, Taxi Bandara). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2014 - 2019 (Jutaan Rupiah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.74 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010 serta Pertumbuhannya Tahun 2014 - 2019 (Jutaan Rupiah)

Tahun	PMTB ADHB	PMTB ADHK	Pertumbuhan PMTB ADHK
2014	4.243.270,32	3.202.153,84	11,32
2015	4.752.045,03	3.482.260,27	8,75
2016	5.397.309,79	3.703.586,24	6,26
2017	5.847.502,23	3.920.682,53	5,86
2018	6.364.703,41	4.156.688,33	6,02
2019	6.790.021,34	4.301.377,86	3,48

Sumber: BPS Kota Palangka Raya 2020

2.4.6. Pertanian

Luas panen padi ladang tahun 2014 sebesar 50 ha meningkat menjadi 56 ha di tahun 2015 dan menurun kembali menjadi 15 ha pada tahun 2016 dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 4 ha, sampai dengan Tahun 2018 kembali menurun menjadi 1,25 ha. Tanaman utama yang banyak diusahakan adalah palawija, hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) dan sebagian tanaman padi gogo. Komoditi palawija yang banyak diusahakan adalah jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu sayur-sayuran lainnya seperti kacang panjang, mentimun, terong, lombok, tomat, pare, bayam, sawi dan kangkung darat. Untuk tanaman buah-buahan meliputi rambutan, cempedak, nangka, jeruk, durian, mangga dan pepaya. Luas panen padi ladang, padi sawah, jagung, ubi kayu dan ubi jalar dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.75 Luas Panen Padi Ladang, Padi sawah, Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar (Ha) di Kota Palangka Raya 2014 - 2019

Tahun	Padi Ladang	Padi sawah	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
2019	-	52,80	219	12	0,80
2018	1,25	13,75	56	16,50	4
2017	4	0,25	73	39	1
2016	15	0	183	31	3
2015	56	3	149	48	4
2014	50	8	77	43	11
Jumlah	126,25	77,8	757	189,5	23,8

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, 2019





2.4.7. Peternakan

Jumlah populasi ternak pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2014, sektor peternakan yang dilaksanakan diarahkan pada usaha peningkatan populasi dan produksi ternak, serta hasil ikutannya yang merupakan sumber protein hewani, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dipinggiran Kota Palangka Raya dikembangkan ternak berupa babi, ayam buras dan bebek sedangkan di Kelurahan diluar Kota Palangka Raya dikembangkan ternak sapi potong, kambing dan ayam buras. Peternakan ternak babi sampai dengan tahun 2016 merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 17.498 ekor sedangkan untuk jenis unggas, ayam broiler merupakan jenis unggas yang terbanyak populasinya. Untuk Peternakan ternak babi pada tahun 2017 dan 2018 masih tetap merupakan jenis ternak dengan tingkat populasi tertinggi yaitu mencapai 18.368 ekor untuk tahun 2017 dan 18.919 untuk tahun 2018. Pada Tahun 2019 jenis ternak dengan populasi tertinggi pada ternak babi yaitu mencapai 22.248 ekor. Berikut tabel populasi ternak Kota Palangka Raya:

Tabel 2.76 Populasi Ternak di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi	Kuda
2019	2139	37	1.511	-	22.248	8
2018	2.026	34	1.309	-	18.919	-
2017	1.958	12	1.247	-	18.368	11
2016	1.883	12	1.134	-	17.498	11
2015	1.793	13	1.007	-	13.036	-
2014	1.741	7	1.148	-	13.036	5

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

2.4.8. Perikanan

Potensi perikanan di perairan umum Kota Palangka Raya sangat banyak jenisnya seperti Betok, Biawan, Belida, Baung, Sepat. Budidaya ikan dalam karamba dilakukan di sungai, danau, dan kolam dimana perkembangannya cukup menggembirakan. Budidaya keramba merupakan usaha perikanan yang cocok untuk dikembangkan dan secara alami mudah disesuaikan dengan perairan dan musim.

Di Kota Palangka Raya terdapat lebih kurang 104 buah danau, dengan total luas sekitar 636,10 Ha. Danau-danau tersebar di berbagai wilayah Kota Palangka Raya. Pada Kecamatan Bukit Batu terdapat 45 buah danau (281,5 Ha), Kecamatan Rakumpit 42 buah(167,6 Ha), Kecamatan Sabangau 10 buah (62 Ha), Kecamatan Pahandut 4 buah (90 Ha), dan Kecamatan Jekan Raya 3 buah (35 Ha).





Danau tersebut memiliki keunikan dan karakteristik sendiri. Namun secara umum, danau-danau yang ada di Kota Palangka Raya merupakan danau oxbow, dimana secara hidrologis sumber airnya atau suplai airnya berasal dari limpasan sungai utama (Sungai Kahayan dan Sungai Rungan). Ikan yang umumnya terdapat dalam danau-danau tersebut seperti Baung, Kapar, Gabus, Karandang, Tahuman, Peang, Papuyu, Biawan, Lais. Oleh karenanya, danau-danau tersebut cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi pengembangan perikanan air tawar dengan jenis-jenis ikan lokal. Pengembangan perikanan air tawar merupakan salah satu sektor unggulan ekonomi lokal Kota Palangka Raya. Hasil produksi perikanan, perikanan budidaya produksinya nampak lebih besar dibanding dengan produksi perikanan darat. Produksi perikanan tangkap di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.77 Produksi Perikanan Tangkap di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

Tahun	Sungai	Danau	Rawa
(1)	(2)	(3)	(4)
2019	1.268,0	1.156,0	944,0
2018	1.422,5	1528,1	1247,4
2017	1.098	1080,8	937,2
2016	824,0	970,1	817,5
2015	815,4	911,1	771,0
2014	667,0	823,0	647,0

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020

2.4.9. Industri

Pada tahun 2016 terdapat 1.065 unit usaha industri kecil dan 3.620 tenaga kerja. Pada tahun 2017 terdapat 1.673 unit usaha industri kecil dan 5.085 tenaga kerja. Pada tahun 2018 terdapat 1.831 usaha industri kecil dan 5.456 tenaga kerja. Jumlah ini meliputi indutri hasil pertanian dan kehutanan, industri aneka (IKA) dan industri logam mesin dan kimia.

Tabel 2.78 Jumlah Perusahaan Industri Kecil di Kota Palangka Raya Tahun 2014-2019

Tahun	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	Industri Aneka	Industri Logam Mesin dan Kimia	Jumlah
2014	520	271	228	1019
2015	367	460	230	1057
2016	370	464	231	1065
2017	684	138	851	1673
2018	752	143	936	1831
2019	Belum Release	Belum Release	Belum Release	-

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020





2.4.10. Angka Kriminalitas

Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator, antara lain :

1. Angka kriminalitas;
2. Jumlah demonstrasi;
3. Lama proses perijinan;
4. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah;
5. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha; dan

Untuk menghitung angka kriminalitas dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.79 Angka Kriminalitas Kota Palangka Raya

No	Jenis Kriminal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus narkoba	481	225	42	72	62	-
2.	Jumlah kasus pembunuhan	105	117	6	21	-	-
3.	Jumlah kasus penganiayaan	24	6	tad	tad	3	-
4.	Jumlah kejahatan seksual	-	7	5	19	16	-
5.	Jumlah kasus penipuan	4	1	5	6	22	-
6.	Jumlah kasus pencurian	25	25	78	42	151	-
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	-	-	-	-	1	-
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	639	381	136	160	455	-
9.	Jumlah penduduk	252.105	259.865	267.757	275.667		266.020
10.	Angka kriminalitas yang tertangani	25,34	14,66	5,08	5,8	6	5.90

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2018

2.4.11. Sumber Daya Manusia

a. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

Salah satu indikator kependudukan yang penting adalah Rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan menggambarkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) terhadap penduduk usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun). Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dampak keberhasilan



pembangunan kependudukan di suatu daerah. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Hasil analisis rasio ketergantungan dapat disajikan dalam contoh tabel sebagai berikut:

Tabel 2.80 Rasio Ketergantungan Tahun 2014-2019 Kota Palangka Raya

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	65.488	66.708	67.796	98.652	69.995	Belum Release
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	6.417	6.757	7.138	13.075	8.039	Belum Release
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) dan (2)	71.905	73.465	74.934	111.727	69.995	Belum Release
4.	Jumlah penduduk usia 15-64	180.200	186.400	192.823	242.117	205.578	Belum Release
5.	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	39,90	39,41	38,86	46,14	38	Belum Release

Sumber: BPS Palangka Raya Dalam Angka

Dari tabel terlihat bahwa angka ketergantungan Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa ketergantungan usia tidak produktif terhadap usia produktif di Kota Palangka Raya masih besar. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar tidak menjadi beban bagi pembangunan sumber daya manusia.

2.5. Evaluasi Kinerja Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2014 - 2017 dan Tahun 2018 - 2019

Dalam merumuskan perencanaan sasaran, arah kebijakan, hingga program prioritas setiap tahapan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah daerah perlu melihat kembali setiap hal yang pernah dilaksanakan pada RPJMD Kota Palangka Raya periode sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui evaluasi dan analisis terhadap pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah sebagaimana yang telah disepakati dan ditetapkan dalam RPJMD tersebut. Selain itu, evaluasi setiap tahapan pembangunan akan menyelaraskan setiap program dan kegiatan menuju ke arah satu koridor pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya serta menunjang pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah nasional.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui indikator-indikator mana saja yang telah tercapai, mana yang belum tercapai, apa saja kendala dan hambatannya, dan apa yang harus disempurnakan, dihapus/diganti agar pencapaian target pembangunan lebih optimal. Selain itu melalui evaluasi ini juga akan menghasilkan identifikasi permasalahan baru yang timbul



dalam pembangunan, faktor-faktor inefisiensi anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diantisipasi sejak dini dan dirumuskan respon yang sesuai dalam penyusunan perencanaan pembangunan ke depan. Dengan demikian maka fokus dari evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan bagi perbaikan-perbaikan strategi, kebijakan dan program/kegiatan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Palangka Raya 2018-2023, agar ke depan kinerja perencanaan pembangunan lebih berdayaguna dan relevan dengan tujuan pembangunan daerah.

Evaluasi terhadap RPJMD secara umum adalah melihat pencapaian target kinerja indikator makro yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan terutama bidang yang menyangkut kesejahteraan masyarakat secara umum. Indikator makro yang menjadi target RPJMD periode sebelumnya (2013-2018), antara lain pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka serta Indikator makro yang menjadi target RPJMD periode selanjutnya (2018-2023).

Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator-indikator makro pembangunan daerah, realisasi indikator hingga tahun 2016 menunjukkan trend peningkatan. Sebagai salah satu fokus utama pembangunan yakni pertumbuhan ekonomi yang pada tahun 2017 sebesar 6,96 lebih besar daripada tahun 2016 mencapai 6,92 persen dimana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai 5,32 persen. Meskipun mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan perekonomian Kota Palangka Raya belum mencapai target tahun 2015 (7,5 persen). Meskipun begitu, pertumbuhan ekonomi mencatat pertumbuhan yang positif dan cukup stabil serta memiliki potensi positif dalam pergerakan perekonomian baik secara regional maupun global.

Sementara itu, beberapa target pembangunan daerah tidak tercapai sesuai harapan RPJMD seperti capaian inflasi sebesar 3,11 persen (target sebesar 5,65 persen) 2017, angka kemiskinan sebesar 3,62 persen (target sebesar 2,53 persen) 2017, tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,26 persen kondisi tahun 2017), dan lain sebagainya.

Perencanaan yang optimal bukan semata dinilai berdasarkan pada target pembangunan daerah terhadap masing-masing indikator yang dipaksakan serendah-rendahnya atau setinggi-tingginya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat mengoptimalkan segala potensi sumber daya daerah sebagai modal dasar pencapaian pembangunan dan memiliki visi realistis secara maksimal dalam mencapai suatu target kinerja. Oleh karena itu, pada perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 perlu dilakukan penajaman, penyempurnaan, revisi, hingga penggantian strategi, kebijakan, sampai pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RPJMD periode sebelumnya untuk lebih mendorong kinerja pembangunan daerah yang tepat sasaran guna mewujudkan Visi “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”.





Salah satu hal yang cukup mendasar terkait dengan ketidaktercapaian target kinerja tersebut adalah lemahnya pengendalian dan evaluasi, baik dari sisi institusi, mekanisme maupun sumber daya manusia. Sebenarnya tim pengawalan pencapaian target indikator kinerja telah banyak dibentuk, antara lain Tim Pengawalan Pertumbuhan Ekonomi, Tim Pengendalian Inflasi, Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tim Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlhut), dan sebagainya. Namun tim-tim tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Guna efektifitas pencapaian target kinerja RPJMD tahun 2018-2023, akan dilakukan perbaikan dalam pengendalian dan evaluasi, sebagaimana tertuang dalam kaidah pelaksanaan RPJMD.

Program/kegiatan yang mengacu pada empat strategi prioritas nasional yakni *pro poor*, *pro growth*, *pro job*, dan *pro environment*, perlu terus dilanjutkan pada perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Berdasarkan data capaian di atas, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 belum melebihi target, harapan kondisi perekonomian saat ini secara tidak langsung dapat menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran sebagaimana yang ditargetkan dapat terpenuhi. Selain itu, secara umum memang laju inflasi, kemiskinan, maupun pengangguran tidak mencapai target, akan tetapi jika dilihat pada level nasional maka capaian pembangunan tersebut sudah dapat dikatakan luar biasa dari segi kuantitas nilai. Namun perlu ditekankan kembali, dari segi kualitas harus terus diperhatikan pula sebagai penjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya.

Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menghasilkan suatu bentuk capaian pembangunan daerah. Dengan melihat capaian pembangunan maka dapat terlihat secara nyata kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga capaian pembangunan dapat menjadi suatu dasar data dan informasi dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, melihat permasalahan daerah, kemudian permasalahan tersebut dipecahkan dengan tepat melalui kebijakan daerah.

Selain strategi prioritas nasional, fokus utama dalam evaluasi pembangunan adalah pencapaian indikator sasaran perencanaan pembangunan Kota Palangka Raya yang dapat terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.81 Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2017

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI											
1.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1. INDIKATOR MAKRO EKONOMI – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
1.1	Pertumbuhan Ekonomi	7,55	7,57	7,65	7,73	7,90	7,53	6,96	7,19	6,92	6,96	<
1.2	Laju Inflasi (%)	6,45	6,25	6,05	5,85	5,65	6,45	6,63	4,20	1,91	3,11	>
1.3	PDRB per Kapita (juta)	5.793.42 3,26	5.949.00 0	6.109. 000	6.273. 000	6.442. 000	9.825, 9	11.289 ,0	12.792,9	14.51 4,0	9.825, 9	<
1.4	Angka Kemiskinan (%)	3,90	3,56	3,22	2,87	2,53	3,94	3,81	3,91	3,75	3,62	<
1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		0,31	0,30			5,03	3,36	6,30	6,30	7,26	
1.6	Indeks Gini	0,32	0,31	0,30	0,29	0,28	0.362	0,365	0,338	0,330	0,379	<
1.7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,30	80,00	80,36	80,72	81,08	78,02	78,50	78,62	79.21	79.69	<
1.1.	Kesejahteraan Sosial											
1.1.1.	Pendidikan											
1.1.1.1.	Angka Melek Huruf	97,55	97,77	97,98	98,20	98,43	99,55	98,68	99,28	99,47	99,56	
1.1.1.2.	Angka Rata-rata Lama Sekolah	-	-	-	-	-	10,69	10,73	10,74	11,02	11,03	
1.1.1.3.	Angka Partisipasi Murni											
1.1.1.4.	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	94	94,4	94,9	95,5	96,2	94,00	98,56	98,58	98,61	53,73	





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.1.5.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	92,56	94,05	95,54	97,03	98,52	92,56	92,56	91,37	96,94	87,97	=
1.1.1.6.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	98,09	98,23	98,40	98,65	98,89	98,09	95,41	99,17	98,79	70,32	=
1.1.1.7.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	90,36	92,29	94,22	96,15	98,08	90,36	93,10	94,56	PROV	PROV	
1.1.1.8.	Angka partisipasi kasar											
1.1.1.9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	98,33	98,45	98,60	98,70	98,80	98,33	98,56	98,58	98,61	53,71	=
1.1.1.10.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	126,84	127,5	128,3 2	128,7 5	129,5	126,8 4	106,8	117,4	103,1 5	103,8 5	=
1.1.1.11.	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	108,02	110,75	115,8 9	120	130	108,0 2	107,0	105,9	101,2 2	102,5 6	<
1.1.1.12.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA	102,60	106,08	109,5 8	113,0 8	116,5 8	102,6 0	100,6	103,3	105,7 6	PROV	
1.1.1.13.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	100	100	100	100	100	92,56	100	100	100	99,56	<
1.1.1.14.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTS	56,1	68,15	75,80	85,78	95,30	98,09	70,20	73,78	89,15	98,88	>
1.1.1.15.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMA/SMK/MA		98,2	98,4	99,3		98	96,90	97,7	98,8	PROV	=
1.1.2.	Kesehatan											
1.1.2.1.	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	53,9	50	45	35	25	53,9	72,6	52,99	19,65	19,15	<
1.1.2.2.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan (%)	80	80	80	80	80	-	91,4	86,59	90,27	-	>
1.1.2.3.	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	13,5	13	12	10,5	9	13,3	11,1	3	1,18	1,34	>
1.1.2.4.	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	10,7	10	10	8	8	14,6	0,73	4	1,96	1,34	>





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.1.2.5.	Angka usia harapan hidup	-	-	-	-	-	72,85	72,95	72,97	73,05	73,13	
1.1.2.6.	Jumlah Balita Gizi Buruk	2	0	0	0	0	-	0,02	0,02	0,02	-	
1.1.2.7.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%)	17,6	20	25	30	35	-	-	13,8	0,7	-	<
1.1.2.8.	Cakupan Pelayanan Balita (%)	83,8	90	90	90	90	-	-	100	70,8	-	<
1.1.2.9.	Cakupan Rumah Sehat (%)	65	85	87	89	91	-	-	31,8	76	-	<
1.1.2.10.	Persentase Penduduk yang Mempunyai Akses Terhadap Air Minum Berkualitas (%)	65	67	68	73	78	-	-	5,59	93,3	83,40	<
1.1.2.11.	Cakupan UCI (%)	67	68	70	75	80			70	40		<
1.1.2.12.	Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	41	40	39	38	37		97,8	111,8	84,7	59,8	
1.1.2.13.	Angka Kesakitan Malaria (API) per 1000 Penduduk	3	3	3	3	3		0,35	0,35	0,22	0,06	
1.1.2.14.	Pervalensi Penderita HIV-AIDS per-100.000 Penduduk	6,6	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5			0,15	0,21		
1.1.2.15.	Prevalensi TB-BTA(+) per-100.000 Penduduk	26	30	50	70	90	-	79,07	19,28	33	29,89	
1.1.2.16.	Non-Polio AFP Rate Anak Usia <15 Tahun per-100.000 Penduduk	3	2	2	2	2			7	0		
1.1.2.17.	Cakupan Penemuan Pneumonia Balita (%)	10	2	2	2	2		5,2	3,68	1,58		
1.1.2.18.	Tingkat Kepuasan Pelanggan (%)	88	100	100	100	100		92,32	tad	Na.		
1.1.2.19.	Tingkat Kepatuhan Petugas Terhadap Standart Pelayanan Kesehatan (%)	89	100	100	100	100		84,09	tad	Na.		
1.2.	Pertanahan											
1.2.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	25,68	35	45	55	65		-	20,49	-	-	
1.3.	Ketenagakerjaan											





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.3.1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	-	-	-	-	-	-	59,01	65,72	65,72	62,40	
1.3.2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi setiap tahun	208	48	80	100	120	-	tad	48	80	-	<
1.3.3.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat setiap tahun	1.216	96	120	160	180	-	tad	80	64	-	<
1.3.4.	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap	535	500	500	500	500	-	tad	119	361	-	<
1.3.5.	Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5.12	5,11	5,10	5,09	5,08	-	tad	5,10	5,09	-	=
1.4.	Seni Budaya dan Olahraga											
1.4.1.	Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali)	1	2	3	4	5	-	-	-	-	-	
1.4.1.1.	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali)	6	7	8	9	10	-	-	-	-	-	
1.4.1.2.	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah)	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-	
1.5.	Pemuda dan Olahraga											
1.5.1.	Jumlah Organisasi Olahraga	63	64	65	66	67	-	-	-	-	-	
1.5.2.	Jumlah Gelanggang/ Balai Remaja	15	17	19	21	23	-	-	-	-	-	
1.5.3.	Jumlah Lapangan Olahraga	60	63	66	69	72	-	-	-	-	-	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												
1.	Kebudayaan											
1.1	Jumlah Atraksi Budaya yang Memadukan Keragaman (Kali)	-	2	3	4	-	-	-	2	1	-	<
1.2	Jumlah Penyelenggaraan Olah Raga Seni/Budaya (Kali)	-	7	8	9	-	-	-	1	1	-	<





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.3	Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penerapan Nilai Baru ke dalam Budaya (Produk Hukum Daerah)	-	1	1	2	-	-	-	0	0	-	<
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
2.	Pemuda dan Olahraga											
2.1	Jumlah Organisasi Olahraga	-	64	65	66	-	-	-	8	15	-	<
2.2	Jumlah Gelanggang/Balai Remaja	-	17	19	21	-	-	-	0	1	-	<
2.3	Jumlah Lapangan Olahraga	-	63	66	69	-	-	-	0	72	-	<
ASPEK PELAYANAN UMUM												
FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB												
DINAS PENDIDIKAN												
1.	Pendidikan											
1.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD	NA	74	74	76	78	tad	94,60	94,65	94,72	54,00	<
1.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	129,9	130,9	131,9	132,9	133,9 9	129,9 0	100,8 4	108,40	108,7 8	88	<
1.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS	107,01	108,7 5	110,4 9	112,2 3	113,9 7	107,0 1	99,52	101,06	101,8 5	71	<
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	100,57	102,4 6	104,3 5	106,2 4	108,1 3	100,5 7	102,6 0	102,83	102,9 6	PROV	
1.5	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,07	0,065	0,060	0,058	0,058	0,070	0,07	0,07	0,003 4	0,19	>
1.6	Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,11	0,105	0,100	0,095	0,093	0,110	0,11	0,11	0,090	0,02	>
1.7	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	0,40	0,38	0,36	0,34	0,32	0,40	0,40	0,11	0,09	PROV	
1.8	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56	=
1.9	Angka Kelulusan SMP/MTS	98,75	98,85	98,95	99,65	99,75	98,75	98,81	98,95	99,66	98,88	<
1.10	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,4	96,7	97,6	98,15	98,76	95,4	95,47	95,89	98,16	PROV	
1.11	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	7,23	7,35	7,58	7,75	7,98	7,23	4,9	4,6	4,8	0,43	
1.12	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTS	5,6	5,8	6,2	6,5	6,8	5,6	5,9	4,4	4,5	0,46	





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.13	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA	4,23	4,56	4,87	5,5	5,8	4,23	5,8	3,08	3,40	PROV	
1.14	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56	
1.15	Angka Pendidikan yang Ditamatkan SMP/MTs	56,10	68,15	75,80	85,78	95,30	56,10	70,20	73,78	89,15	98,88	>
1.16	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMA/SMK/MA	98	98,2	98,4	99,3	99,7	98	96,90	97,7	98,8	PROV	
1.17	Rata-Rata Lama Sekolah	10,80	10,80	10,80	10,80			10,73	10,74	11,02	11,03	
1.18	Rasio Guru terhadap Murid SMA/SMK/MA	12,28	12,45	12,78	13,10	13,59	12,28	107,2	54,10	108,4 3	PROV	
1.19	Rasio Guru terhadap Murid SMP/MTS	12,04	12,16	12,34	12,68	12,88	12,04	102,9 0	75,19	104,9 8	16,06	>
1.20	Rasio Guru terhadap Murid SD/MI	8,82	9,25	9,55	9,73	9,85	8,82	93,07	58,76	95,15	17,04	>
1.21	Rasio Guru terhadap Murid PAUD	14,27	14,30	14,45	14,55	14,75	14,27	22,23	104,72	106,8 1	40,63	>
1.22	Rasio Ketersediaan Sekolah Penduduk Usia Sekolah (per 1000 Penduduk)											
	- SD/MI	7,23	7,35	7,58	7,75	7,98	7,23	4,9	4,6	4,8	0,43	<
	- SMP/MTs	5,6	5,8	6,2	6,5	6,8	5,6	5,9	4,4	4,5	0,46	<
	- SMA/SMK/MA	4,23	4,56	4,87	5,5	5,8	4,23	5,8	3,08	3,40	-	
1.23	Persentase Guru Berkualifikasi S1/DIV	90,17	92,5	94,7	96,8	98,67	90,17	90,17	91,21	93,25	84,70	<
1.24	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	50,14	52,45	54,36	56,5	58,7	50,14	6,24	89,85	65,94	67	>
1.25	Jumlah Guru yang telah Mengikuti Program Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi	30	40	50	60	70	30	15	25	11	20	<
1.26	Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,56	
1.27	Angka Kelulusan SMP/MTs	98,75	98,85	54,36	99,65	99,75	98,75	98,81	98,95	99,66	98,88	
1.28	Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	95,4	96,7	50	98,15	98,76	95,4	95,47	95,89	98,16	PROV	
1.29	Jumlah SMK Berdasarkan Jenisnya	17	17	100	21	23	17	16	16	16	PROV	





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
DINAS KESEHATAN												
2.	Kesehatan											
2.1	Angka Usia Harapan Hidup	72,9	73	73	73	73	72,9	73	72,95	78,62	72,91	>
2.2	Presentase Kelurahan yang Terkena KLB dan telah Dilaksanakan Epidemiologi <24 Jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100		=
2.3	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per 100.000 Penduduk	4,3	5	5	5	5	4,3	4,09	3,97	3,85	3,73	<
2.4	Rasio Rumah Sakit per 100.000 Penduduk	0	0	0	0,004	0,04	19,59	0,4	0,4	0,19	0,37	>
2.5	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (%)	63	100	100	100	100	1,64	1,64	1,84	40,2	-	<
2.6	Cakupan Pelayanan Kesehatan bagi Usia Lanjut (USILA) (%)	30	40	45	45	50	-	59,6	47,99	-	-	>
2.7	Presentase Kelurahan yang Melaksanakan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) (%)	38	40	40	50	50	-	31,8	47,99	18,4	-	<
2.8	Rasio Dokter per 100.000 Penduduk	15	19,3	23,8	28,3	32,8	15	13,5	16,71	15,02	13,8	<
2.9	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk	0	0	0	0	1,4	-	0,409	0,8	0,75	1,87	>
2.10	Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk	4,8	6	7,3	8,5	9,8	-	3,68	5,57	4,8	4,48	<
2.11	Rasio Perawat per 100.000 Penduduk	75,8	79,8	83,8	87,8	74,3	-	67,5	64,65	87,8	67,59	<
2.12	Rasio Bidan per 100.000 Penduduk	69,7	70,85	72	73,15	91,8	-	116,3 2	61,48	73,15	73,57	<
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
3.	Pekerjaan Umum											
3.1	Jumlah Gedung Kantor Pemerintah Kota	3	19	35	51	61	-	tad	10	13	-	<
3.2	Jumlah Tempat Ibadah	1.011	1.014	1.016	1.018	1.020	tad	tad	5	1.021	-	
3.3	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik (%)	33	47,20	50	52	55		47,2	50,07	53,92	55,16	





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
3.4	Panjang Jalan Dilalui Roda 4 (Km)	5	0	0	5	10	505,1 38	662,7 5	601,43 7	5,3	-	>
3.5	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik (Km)	300,22	300,2 2	300,2 2	307	311		Tad	331,06 7	491,6 58	-	>
3.6	Jalan Lingkungan Kondisi Baik (Km)	400	408	416	425	434	104,0 16	122,2 6	195,73 1	334,8 4	-	<
3.7	Jumlah Jembatan (Buah)	0	0	0	1	2		0	0	2	-	=
3.8	Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota (M ²)	0	0	0	100	150	tad	0	0	0	-	=
3.9	Drainase dalam Kondisi Baik (Km)	1632,1 4	1642, 14	1659, 14	167,1 4	1704, 14		tad	1.655,1 4	1.680, 38	-	=
3.10	Panjang Trotoar (Km)	0	0	0	2	6		tad	0	0	-	=
3.11	Rasio Kerusakan Jalan per Tahun	0,42	0,42	0,35	0,29	0,23		tad	0,36	0,45	-	=
3.12	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik (Ha)	2050	2550	3050	3.500	3950	2.050	2.552	3.218	4.023	-	>
3.13	Panjang Pengendali Banjir dalam Kondisi Baik (Km)	17	20	26	33	41		61,04	61,15	61,30	61,39	=
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN												
4.	Perumahan											
4.1	Rumah Layak Huni yang Terbangun	294	-	-	2	2		tad	tad	tad	-	
4.2	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Setiap Tahun	15.026	15.126	15.250	15.360	15.450	-	15.154	15.400	15.550	-	=
4.3	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun	45.000	45.100	45.200	45.300	45.400	87	45.144	45.350	tad	tad	=
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
5.	Penataan Ruang											
5.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	30,98	0,35	0,39	0,34	tad	=
=	Ruang Publik yang Berubah	25	20	15	10	5		20	Tad	tad	-	





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	Peruntukannya (%)											
5.3	Jumlah Bangunan ber IMB (Bangunan)	25.141	27.141	29.141	31.141	33.141		26.754	28.763	50.341	-	
5.4	Jangkauan Wilayah Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (%)	60 % dari Jangka uan Wilayah	64% dari jangkau an wilayah	68% dari jangk auan wilaya h	72% dari jangk auan wilaya h	76% dari Jangk aue n Wilaya h		64	Tad	0,02	-	<
5.5	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu)	5.147	5.647	6.147	6.647	7.147		5.647	5.914	7.057	-	=
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
6.	Perencanaan Pembangunan											
6.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA	1	0	0	0	1	tad	Tad	0	tad	tad	=
6.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah Ditetapkan dengan PERDA	1	1	0	0	1	-	1	0	0	-	=
6.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah Ditetapkan dengan PERKADA	1	2	3	3	1	4	5	6	7	8	=
6.4	Persentase Program dalam RPJMD terhadap Program dalam RKPD	100	100	100	100	100	-	100	100	100	-	=
6.5	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan yang telah Ditetapan dengan PERDA (RTRWK, RP3KP)	0	1	2	2	0	-	tad	0	0	-	=
DINAS PERHUBUNGAN												





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
7.	Perhubungan											
7.1	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum (uji)	12.256	18.86 0	19.60 0	20.25 6	23.25 6	12.25 6	11.51 6	10.445	10541	10.09 9	<
7.2	Rasio Ijin Trayek (%)	0,187	0,184	0,176	0.169	0,162	0,187	0,181	0,164	0,169	0,095	=
7.3	Pemasangan Rambu-Rambu (%)	0,114	0,160	0,210	0,246	0,320	0,114	0,160	1,30	1,10	1,10	
7.4	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Orang)	59.250	59.350	60.15 6	61.16 0	59.25 0	59.25 0	59.35 0	37,630	63.65 1	63.65 1	
7.5	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) (Menit)	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
8.	Lingkungan Hidup											
8.1	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal (%)	84,6	100	100	100	100	84,6	80	80	90	90	<
8.2	Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan (HO) (Ijin Usaha)	200	220	240	260	280	200	362	582	573	152	>
8.3	Presentase Penegakan Hukum Lingkungan	90	100	100	100	100	90	100	90	87	25	<
8.4	Jumlah Pengambilan Sampel (Kali/Tahun)	4	8	14	20	26	4	4	13	6	6	<
8.5	Peningkatan Mutu Udara/ISPU (Hari/Tahun)	321	365	365	365	365	321	289	180	310	365	<
8.6	Persentase Sampah yang Tertangani	61,18	70	75	80	85	61,18	Tad	65	48,72	-	<
8.7	Jumlah TPS terhadap Penduduk (Unit)	4	8	14	20	26	4	tad	Tad	121	-	
8.8	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (Unit)	321	365	365	365	365	321	1	1	1	-	<
8.9	Jumlah PKL yang Dibina per Tahun	61,18	70	75	80	85		587	650	700	-	
BADAN PERTANAHAN												
9.	Pertanahan											
9.1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	3,35	5,35	7,35	9,35	11,35	tad	tad	5,16	4,5	-	<





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
9.2	Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Negara	75	75	75	75	76	tad	tad	53	75	-	
9.3	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	100	tad	tad	9	0	-	<
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil											
10.1	Rasio Penduduk BerkTP Per Satuan Penduduk (%)	97	100	100	100	100	tad	56	51	60	tad	<
10.2	Rasio Bayi yang Memiliki Akte Kelahiran (%)	95	100	100	100	100	tad	78	89	95	tad	<
10.3	Rasio Pasangan Berakte Nikah (%)	85	100	100	100	100	tad	65	56,88	65	tad	<
10.4	Kepemilikan KTP (%)	99	100	100	100	100		66	64	70	tad	<
10.5	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	90	100	100	100	100	tad	37	46	56	tad	<
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
11.1	Rasio KDRT	4,5	4,3	4,1	3,8	3,6	tad	6	Tad	Tad	0	
11.2	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur	33,37	33,35	33,2	33,0	33,0	tad	33,37	Tad	Tad	Tad	
11.3	Partisipatif Angkatan Kerja Perempuan	48	51	55	59	63	tad	40,50	40,25	42,25	43,25	
11.4	Penyelesaian Pengaduan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan	85	100	100	100	100	85	6	100	100	100	
11.5	Persentase Partisipatif Perempuan di Lembaga Pemerintah	62,45	62,47	62,49	62,50	62,52	62,54	23	62,49	337	19,45	
11.6	Partisipasif Perempuan di Lembaga Swasta	238	244	248	252	256	tad	tad	1.145	0,27	Tad	
11.7	Jumlah Forum Anak	1	31	36	36	36	1	35	36	12	Tad	
11.8	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	53	43	31	21	10	53	4	31	0	Tad	
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
12.1	Rata-Rata Jumlah Anak per Keluarga	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,8	2,4	2,3	1,87	2,0	
12.2	Persentase Akseptor KB	78,6	79	80	83	86	88	40,55	92,96	85,5	86,89	=
12.3	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	100	100	100	100	100	31.25 3	40,56 5	43.715	37.09 8	40,05 4	<
12.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	11.236	11.186	11.136	11.086	11.036	10.986	11.18 6	11.136	10.25	9.960	<
12.5	Jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	NA	1	2	3	4	-	2,4	Tad	1	1	
DINAS SOSIAL												
13.	Sosial											
13.1	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial yang telah Mengikuti Diklat Sertifikasi Bidang Kesejahteraan Sosial (Org)	4	7	10	13	16		Tad	0	3	-	
13.2	Penurunan Jumlah PMKS	10.500	8.500	6.500	4.500	2.500	1.839	Tad	2000	2.842	-	<
13.3	Persentase PMKS Skala Kota Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya.	20	35	55	70	90	-	Tad	55	20	30	
13.4	Rasio Penyandang ODK, LU serta PKH yang Menerima Jaminan Sosial	40/120	55/120	75/120	90/120	110/120	-	Tad	20/120	90/120	-	=
13.5	Rasio Panti Sosial yang Mendapat Pembinaan Pemerintah (Panti Sosial yang Dibina/Jumlah Panti sosial)	2/26	6/26	10/26	14/26	18/26	-	Tad	10/26	14/26	-	=
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH												
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
15.1	Jumlah KUKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran - Skala Nasional - Skala Lokal	20 150	24 180	28 210	32 240	36 270		4 30	21 210	29 240	- -	<





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
15.2	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Daerah	10	15	20	25	30		5	23	28	-	=
15.3	- Jumlah Koperasi Sehat - Jumlah Koperasi Berkualitas	40 15	44 18	48 21	52 24	56 27		4 3	26 21	29 24	- -	=
15.4	Persentase Koperasi Aktif	65	68	71	74	77	tad	3	88,19	88,28	-	>
15.5	Jumlah UMKM dan Koperasi yang Mengikuti Diklat Kewirausahaan	300	330	360	390	420		30	360	30	70	<
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
16.	Penanaman Modal											
16.1	Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN	PMDN = Rp. 384.13 0.000.0 00 PMA = US\$ 1.450.0 00	PMDN =Rp. 400.00 0.000.0 00 PMA = US\$ 1.500.0 00	PMDN =Rp.4 40.00 0.000. 0000 PMA = US\$ 1.650. 000	PMDN = Rp. 484.0 00.00 0.000 PMA = US\$ 1.815. 000	PMDN = Rp. 532.4 00. 000. PMA = 000P MA = US\$ 1.815. 00 0	tad	PMDN = 394.1 30 PMA = 19.09 7.090	PMDN =Rp. 1.171.0 85.000. 000 PMA = US\$ 9.989.0 00	PMDN =Rp.6 16,12 M PMA = US\$-	-	<
16.2	Persentase Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN/PMA	PMDN =0,00% PMA = - 3,02%	PMDN= 4,13% PMA= 3,45%	PMDN = 10,00 % PMA = 10.00 %	PMDN = 10.00 % PMA = 10.00 %	PMDN = 10,19 % PMA = 10,00 %		PMDN =99,9 9PMA = 99,88	PMDN = 68% PMA = 26%	PMDN = - PMA = -	-	
16.3	Jumlah investor PMA/PMDN	PMDN = 7 PMA = 26	PMDN = 9 PMA = 28	PMDN = N = 10PM	PMDN = 15 PMA= 35	PMDN = 20 PMA =	PMDN = 7 PMA = 26	PMDN = 6 PMA = 22	PMDN =68 PMA = 26	PMDN = 101 PMA = -	PMDN = 73 PMA = -	<





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
				A = 30		40						
16.4	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara Berkala (Per 3 dan 6 Bulan)	Kurang dari 15% Perush yang telah menya mpaika n LKPM-nya secara berkala	60% perusa haan menya mpaia k an LKPM nya secara berkala	75% Perus ahaan menya mpaik an LKPM nya secara berkal a	85% perus ahaan menya mpaia kan LKPM nya secara berkal a	95% Perus h menya m paika n LKPM nya secara berkal a		0%	24%	17,82 % perus ahaan menya mpaia kan LKPM nya secara berkal a	-	<
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA												
17.	Kebudayaan											
17.1	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya (Tempat Kesenian)	2	3	4	5	6	tad	0	2	5	-	
17.2	Jumlah Grup Kesenian yang Dikelola	91	96	101	106	111		98	103	103	-	=
17.3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan (BCB/Benda Cagar Budaya)	4	7	11	16	22		3	6	6	-	<
17.4	Jumlah Penyelenggara Festival Seni Budaya (Kali)	1	5	9	13	17		2	4	4	-	<
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
18.	Kepemudaan dan Olahraga											
18.1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Dibina	30	32	34	36	38	tad	tad	4	3	-	<
18.2	Prestasi Pemuda Pelajar Tingkat Regional (Orang)	90	90	90	90	90		tad	1	5	-	<
18.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	12	13	15	17	19	tad	tad	7	9	-	<





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
19.1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	10	30	50	70	90	10	12	12	11	12	<
19.2	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	10	30	50	70	90	10	30	50	65	90	=
19.3	Rasio Pos Kamling per Jumlah Rukun Tetangga	92/666	340/666	588/666	836/666	1.084/666		98/666	92/666	582/666	-	<
19.4	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		0,11	0,004	0,12	tad	
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
20.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	5,87	6,39	7,07	7,77	8,51	8.71	6,78	8,84	7,42	7,63	=
20.2	Persentase Jumlah Kasus/Pengaduan yang Ditangani	88.65	90,65	92,92	95,22	97,57		tad	92,00	93,33		
20.3	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (Kecamatan)	3	4	4	5	5	4	4	4	4	4	<
20.4	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran PERDA	48.44	54,94	62,16	69,75	77,60		50	61,53	82,78	97,67	>
20.5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	=
20.6	Persentase Menurunnya Konflik di Masyarakat	89	91	93,2	95,4	97,7		90	92	92,54	94,44	<
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
20.7	Jumlah Sarana Prasarana Diklat (Gedung)	0	0	0	1	0			0	0		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH												





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
20.8	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	Tidak Wajar (Disclai mer)	WDP	WTP	WTP	WTP	-	WDP	WDP	WDP	WTP	<
20.9	Nilai Evaluasi Kinerja	D	C+	C+	A	A	-		C	C (42,79)	C	<
20.10	Produk Hukum Daerah (Legislasi)	4	10	16	24	32	-	13 (3 Perda 10 Perwali)	4	12	-	<
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN												
21.	Ketahanan Pangan											
21.1	Ketersediaan Pangan Utama dan Bahan Makanan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)	30.007	32.177	33.78 5	35.47 4	37.24 7	tad	33,75 9	102,49	35.63 8	-	>
21.2	Skor PPH/Pola Pangan Harapan (%)	77	80	82	85	87		Tad	82	91,6	-	
22.3	Persentase Konsumsilkan(Kg/Kapita/Tahun)	36,50	38,10	39,50	41,00	43,00		Tad	35	41	-	
21.4	Konsumsi Energi	1.794	1.864	1.934	2.005	2.076		Tad	2000	2118, 6	-	>
21.5	Konsumsi Protein	57,2	0,16	0,16	0,16	0,16		Tad	25	66	-	>
21.6	Pangan Utama (Ton)	30.007	31.827	33.64 7	35.46 7	37.28 7		33,75 9	26.639	35.63 8	-	=
21.7	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr)	2.665	2.732	2.799	2.866	2.933		2,770	2.748	2.938	-	=
21.8	Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	86	86	87	88	89		88,42	89.91	97,25	-	>
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN												
22.	Statistik											
22.1	Tersedianya Buku Kota dalam Angka	1	2	3	4	5	1	1	1	4		=
22.2	Tersedianya Buku PDRB Kota	1	2	3	4	5	1	1	1	4		=
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN												





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urutan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpretasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
23.	Kearsipan											
23.1	Pengelolaan Arsip Secara Baku (%)	2,86	2,86	2,86	2,86	5,71	2,86	2,86	3,03	12,12	-	>
23.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	11	15	19	24	28	11	56	100	100	-	>
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN												
24.	Komunikasi dan Informatika											
24.3	Tersedianya Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Aplikasi E-Gov	0 Posting / Tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 10 subdom ain	1.080 posting / tahun 1 website resmi pemerintah kota dan 15 subdom ain	1.080 posting/ tahun 1 website resmi pemerintah kota dan 20 subdom main	1.080 posting/ tahun 1 website resmi pemerintah kota dan 20 subdom main	1080 posting/ tahun 1 Website Resmi Pemerintah Kota dan 25 subdom main	-	24	36	350 Posting 1 Website Resmi 50	-	<
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN												
25.	Perpustakaan											
25.1	Jumlah Perpustakaan	49	50	51	52	53	49	49	49	49	50	<
25.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	1.320	1.848	2.376	3.158	3.600	1.320	1.895	16.190 7	19.93 1	19.62 6	>
25.3	Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	12.499	13.999	15.19 9	16.74 9	18.34 9	12.44 9	14.01 8	18.280	23.45 8	18.12 4	>
FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN												
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN												
1.	Pertanian											
1.1	Produktivitas Bahan Pangan Utama											





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	Lokal Lainnya per Hektar (Ton/Ha)											
	- Padi	2,05	2,08	2,07	2,07	2,08	109	22,56	1,60	2,20	-	<
	- Jagung	2,256	2,259	2,259	2,26	2,26	1.372	22,6	2,26	2,26	-	<
	- Kedelai	1,2	1,21	1,22	1,22	1.225	6	0	1,20	0	-	<
	- Ubikayu	8	8,047	8,06	8,07	8,086	941	120,1 9	3,50	12,07	-	>
	- Ubi Jalar	7,56	7,63	7,76	7,88	8,00	309	70,86	8,33	7	-	
	- Kacang Tanah	1	1,037	1,046	1,100	1,130	8	12	1,00	1,2	-	<
	- Sayuran	1,980	1,981	1,982	1,983	1,984	tad	3,193	4,04	1,99	-	
	- Buah-buahan	3,452	3,454	3,455	3,456	3,457	tad	2,735	3,455	3,46	-	>
1.2	Populasi Ternak (Ekor)											=
	- Sapi	1.036	1.813	1.904	2.000	2.105	2.065	1.958	1.958	1.958	1.958	<
	- Kerbau	3	39	40	42	43	37	12	12	12	12	<
	- Kambing	2.793	3.072	3.226	3.384	3.553	2.787	1.148	1.007	1.134	1.247	<
	- Babi	14.420	15.57 4	16.82 0	18.16 6	19.61 9	14.51 0	18.36 8	18.368	18.36 8	18.36 8	<
	- Ayam Buras	197.43 3	211.2 64	221.8 27	232.9 18	244.5 62	106.6 87	71.21 8	76.876	82.25 7	-	<
	- Ayam Broiler	1.183.3 04	1.230. 636	1.353. 700	1.489. 070	1.637. 977	42.00 0	72.00 0	81.000	1.429 .070	1.640. 377	<
	- Ayam Ras Layer	42.000	50.00 0	60.00 0	70.00 0	80.00 0	1.336. 591	1.277. 500	2.063.8 25	100.0 00	125.0 00	>
	- Itik	4.811	5.052	5.305	5.570	5.849	5.536	4975	424	5.576	5.851	<
1.3	Produksi Peternakan (Kg/Tahun)											
	- Daging Sapi	674.52 0	993.1 50	1.171. 950	1.289. 100	1.401. 450	834,6 30	859,5 99	772,63 2	927.8 64	1.020. 600	<
	- Daging Kerbau	2.184	14.55 0	16.05 0	17.70 0	19.50 0	1,68	1,68	2,856	6.720	7.560	<
	- Daging Kambing	12.647	19.27	21.20	23.32	25.65	15,70	12,68	12,590	15.45	21.07	<





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
			2	4	8	6	8	5		8	9	
	- Daging Babi	116.76 0	240.9 00	265.0 20	291.5 40	320.7 00	tad	216,9 36	232.41 6	218.7 00	284.7 00	<
	- Daging Ayam Buras	272.10 8	465.9 53	512.5 48	563.8 03	620.1 83	194,7 04	32,31 4	159,13 0	262.5 93	tad	<
	- Daging Ayam Broiler	3.504.0 00	4.336. 575	4.880. 233	5.368. 257	5.905. 083	3.504. 000	3.128, 028	262.59 3	4.582 .020	-	<
	- Daging Itik	28.744	37.35 9	41.09 5	45.20 5	49.72 6	32,45 5	20,52 9	12,590	27.63 1	tad	<
	- Telur Ayam Ras	551.88 0	562.0 17	574.1 75	585.6 59	597.3 72	551.8 80	911,9 54	1.616.9 42	1.825 .000	2.129. 167	>
	- Telur Ayam Buras	360.33 3	365.7 38	371.2 24	376.7 92	382.4 44	360.3 33	32,31 4	540.73 0	540.7 30	-	>
	- Telur Itik	21.072	23.807	24.16 4	24.25 6	24.62 0	21.07 2	30,23 0	34.338	34.33 8	34.92 0	>
1.4	Kontribusi Sektor Tanaman Bahan Pangan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	-	6.159, 02	6.282, 19	6.497 84	--	tad	15.40 4.000, 00	tad	6.407, 84	-	<
1.5	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	-	6.159, 02	56.15 1,30	57.27 4,33	-	tad	182.1 20.00 0,00	tad	57.27 4,33	tad	
1.6	Penanganan dan Penanggulangan Penyakit Hewan/Ternak	-	55.050, 30		--	-	-					
	- Jumlah Hewan yang Divaksin (Ekor)	-	5.300	5.600	5.900	-	-	6,147	5.839	7.688	-	>
	- Surveillance Avian Influenza (Sampel Unggas)	-	450	500	500	-	-	462	518	500	-	>
	- Sampel Produk Asal Ternak	-	65	100	150	-	-	65	75	70	-	<
DINAS PERIKANAN												
5.	Kelautan dan Perikanan											





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
5.1	Produksi Perikanan (Ton/Tahun)											
	- Perikanan Budidaya	-	8.545	9.673,43	11.029,32	-	tad	9.203,65	9.670,60	11.179	-	=
	- Perikanan Tangkap	-	2.230	2.840	2.910	-	tad	2.140,00	2.497,5	2.611,6	-	<
5.2	Persentase Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	-	38,10	39,50	41,00	-	tad	33	tad	41	-	=
5.3	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	-	31.468,95	32.098,33	32.740,29	-	tad	32.553,00	tad	32.740,29	-	=
5.4	Restocking Danau (Jumlah)		4	6	8	-		3		1	-	<
5.6	Jumlah Rumah Tangga Perikanan (Rtp)	--	879	904	910	-		873		8	-	<
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN												
6.	Perdagangan											
6.1	- Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) - Retribusi Sektor Perdagangan terhadap PAD (juta)		----- 10,92 988	11,32 1.026	11,72 1.064		tad	16,66 1224,96	18,84 1.346	12,18 3.544	-	>
6.2	Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen		54	58	62	-	-	55	50	60,48	-	=
7.	Perindustrian											
7.1	Jumlah Kelompok Usaha IKM Pendukung Pariwisata Industri Riil		2	3	1	-	-	1	3	1	-	<
7.2	Jumlah Industri Kecil dan Menengah		10	10	10	-	-	10	12	8	-	=
7.3	Kontribusi Pertumbuhan Sektor Industri terhadap PDRB (%)		4,55	4,72	4,89	-	-	4,58	12,55	11,11	-	>
7.4	Jumlah IKM yang Difasilitasi Mengikuti Pameran		109	123	137	-	-	14	123	138	-	=
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
8.	Bencana Alam											





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
8.1	Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	-	100	100	100	-	-	tad	100	0	-	<
8.2	Presentase Korban Bencana Skala Kota yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	-	100	100	100	-	-	tad	0	0	-	<
ASPEK DAYA SAING DAERAH												
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah												
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH												
1.1	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-	72.655 .800.3 00	95.15 0.000. 000	124.7 00.00 0.000	-	-	90.69 8.979. 552,8 3	120.31 2.811.4 18,24	121.7 00.47 5.927, 31	-	>
1.2	Persentase PAD terhadap APBD	-	8,00	9,00	10,00	-	-	9,57%	11,00	10,36 %	-	>
1.3	Persentase Ketergantungan atas DAU	-	56,00	55,00	54,00	-	-	62,18 %	100,00	56,01 %	-	>
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN												
2.	Pertanian											
2.1	Nilai Tukar Petani (%)	-	105	108	110	-	tad	101.2 9	108	108	-	=
2.2	Jalan Usaha Tani (Kelompok Tani)	-	25	35	43	-	-	11	tad	43	-	<
2.3	Jumlah Embung (buah)	-	4	8	13	-	-	2	tad	13	-	<
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur												
DINAS PERHUBUNGAN												
1.	Perhubungan											





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1.1	Jumlah Angkutan Darat (%)	-	40	40	40	-	-	-	40	40	-	=
DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
4.	Lingkungan Hidup											
4.1	Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan	-	5	6	7	-	-	3	9	12	-	=
4.2	Jumlah Taman Hijau	-	2	4	6	-	-	2	3	5	-	<
4.3	Jumlah TSAK (Tim Serbu Api Kelurahan)	-	30	37	44	-	-	29	37	31	-	<
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN												
5.	Komunikasi dan Informatika											
5.1	Ketersediaan Daya Listrik (%)	-	93,82	95,22	96,72	-	-	tad	tad	96,72	-	=
5.2	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik	-	99,2	99,4	99,6	-	-	tad	tad	99,6	-	=
1.	Fokus Iklim Berinvestasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA												
1.1	Jumlah Demo yang Dikendalikan	-	8	6	4	-	-		-	0	-	
1.2	Angka Kriminalitas	-	229	172	116		5,07	25,34	14,66	5,08	5,8	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU												
1.3	Persentase Perijinan Sesuai SOP	-	75%	85%	90%	-	80,04 %	80,04 %		14,28	-	<
1.4	Jumlah Perda yang Mendukung Investasi	-	0	2	2	-	-	3	1	0	-	<
1.5	Aplikasi Perizinan dan Penanaman Modal (Banyaknya Sistem Aplikasi)	-	3	3	3	-	--	1	1	1	-	<
DINAS TENAGA KERJA												
2.	Ketenagakerjaan											





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja					Interpertasi belum tercapai (<) , Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
	Jumlah lulusan S1/S2/S3											
2.2	Rasio Ketergantungan	--	0,36	0,28	0,21	-	40,45	39,90	39,41	38,86	46,14	<





Tabel 2.82 Pencapaian Indikator Sasaran RPJMD Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018-2019

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian													
	INDIKATOR MAKRO EKONOMI – BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH													
	Pertumbuhan PDRB	6,96	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20	7,12	7,17					
	Laju inflasi	4,00	3,90	3,85	3,80	3,7	3,65							
	Indeks Gini	0,330	0,327	0,325	0,322	0,320	0,318	0,37	-					
	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,47	3,45	3,43	3,40	3,38	3,35	3,47	3,35					
	IPM		79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80,34	80,77					
	Angka usia harapan hidup	73,13	73,20	73,25	73,30	73,33	73,35	73,16	73,19					
	Persentase PAD terhadap pendapatan	14,05	14,15	14,25	14,35	14,40	14,50							
	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,1	90,2	90,4	90,6	90,8	90,6	85,5					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Nilai tukar petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	96,76	96,65					
	ASPEK PELAYANAN UMUM													
	Layanan Urusan Wajib Dasar Pendidikan													
	APK PAUD	59,73	59,80	59,90	60	60,50	60,75	59,73	71,49					
	APM PAUD	37,37	37,40	37,80	40	40,20	40,50	37,37	44,75					
	APS PAUD	373,70	374,01	378,01	400,00	402,01	405,01	373,63	543,9					
	APK SD/MI	111,10	115	117	120	125	128	111,10	114					
	APM SD/MI	97,13	97,15	97,18	97,20	98	98,10	97,13	97,16					
	APS SD/MI	971,30	971,50	971,80	972,01	980,00	981,01	971,31	999					
	Menurunnya Angka Putus Sekolah SD/MI	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,021	0,01					
	Menurunnya Angka Putus Sekolah SMP/MTS	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,080	0,07					
	APK SMP/MTs	103,90	104,1	104,1	104,5	104,7	105	103,90	114,16					
	APM SMP/MTs	94,56	94,60	94,80	95	95,10	95,20	96,68	94,61					
	APS SMP/MTs	945,60	946,01	948,01	950,00	951,01	952,01	966,77	943					
	Angka kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Angka kelulusan SMP/MTs	99,98	99,99	100	100	100	100	98,93	99,60					
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	47,71	47,73	47,75	47,77	47,79	48	-	58,28					
	Rasio Ketersediaan Sekolah per Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	44,18	44,28	44,50	44,72	44,74	44,80	-	48,68					
	Rasio guru terhadap murid PAUD	754,54	754,60	754,80	754,90	755	755	754,54	552					
	Rasio guru terhadap murid SD/MI	462,47	462,60	462,75	462,85	462,90	463	462,47	591					
	Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	552,97	553	553,20	553,50	553,75	554	552,97	798					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Persentase guru berkualifikasi S1/DIV	95.71	95.71	95.80	96	97	99	95,64	92,51					
	Persentase Guru yang telah Mengikuti Uji Kompetensi Guru	75	75	80	85	90	95	65,00	57,93					
	Kesehatan													
	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran hidup	1,78	7	7	6	5	4	1.78	0.96					
	Angka Kematian Ibu per -100.000 Kelahiran hidup	79,07	75	70	65	60	55	79.07	38,48					
	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup	2,17	6	5	4	3	3	2,17	0,96					
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	55.5	57	59	61	63	65	57	57,14					
	Drainase dalam kondisi baik	51	53	55	57	59	61	-	54,57					
	Irigasi dalam kondisi baik	74,54	76	77	78	79	80	-	76,01					
	Ketaatan terhadap RTRW	0	71	72	73	74	75	-	71					
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman													
	Rasio rumah layak huni	0.13667	0.13729	0.13776	0.13823	0.13870	0.13870	0.13667	0,13682					
	Rasio permukiman layak huni	0.14066	0.14129	0.14178	0.14227	0.14275	0.14275	0.14066	0,14082					
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	0.06379	0.06406	0.06422	0.06445	0.06468	0.06468	0.06379	0,06384					
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0.06379	0.06406	0.06422	0.06448	0.06468	0.06468	0.06379	0,06384					
	Rasio pemukiman yang tertata	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0.97153	0,97169					
	Rasio lingkungan pemukiman	0.00031	0.00049	0.00067	0.00085	0.0010	0.0010	0.0003	0,005					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	kumuh					4	4	1						
	Rasio luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0.25412	0.83325	1.41238	1.99151	2.57064	2.57064	0.25412	0,2733					
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0.00542	0.00525	0.00508	0.00491	0.00475	0.00475	0.00542	0,00542					
	Rasio Rumah ber IMB	18.293	18.293	18.2931	18.29314	18.29314	18.29314	18.293	18.293					
	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													
	Persentase Penegakan Perda	90%	90%	92%	92%	94%	96%	90%	90%					
	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3	0,6	1,2					
	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7,84	8,04	8,24	8,43	8,63	8,82	7,84	8.04					
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90%	90%	91%	93%	95%	97%	90%	90%					
	Dukungan kegiatan kewaspadaan dini daerah Kota Palangka Raya	0	30	35	40	45	50	0	4					
	Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan	8	20	30	40	50	60	8	32					
	Rasio jumlah Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0	1	2	3	4	5	0	0					
	Rasio Pos Kamling Per Jumlah RT	0,44	0,45	0,47	0,48	0,5	0,51	0,44	0,45					
	Persentase Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	64	64	68	72	76	80							
	Persentase korban bencana yang	100	80	76	72	64	60							





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat													
	Persentase jumlah infrastruktur yang direhabilitasi dan direkonstruksi	-	-	60	72	76	80							
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%		100%					
	Cakupan pelayanan penyelamatan kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%							
	Cakupan pelayanan pencegahan kota	50%	55%	60%	65%	70%	75%							
	Jumlah pertemuan terkait kerukunan umat beragama		46	46	50	55	60	0	6					Kesbangpol
	Persentase capaian kinerja pencegahan, pemulihan		92%	94%	96%	97%	99%	0%	99%					Kesbangpol
	Tingkat partisipasi memilih	66%	70%	73%	-	-	75%	66%	77,5%					Kesbangpol
	Indeks Toleransi	16	43	10	10	10	10	16	43					Kesbangpol
	Sosial													
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	500	100	100	100	100	500		8874					
	Persentase PMKS yang tertangani	41115	8223	8223	8223	8223	8223		8723					
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	41115	8223	8223	8223	8223	8223		8223					
	Persentase Rumah Tangga yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	275	55	55	55	55	55	90	30					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	26	5	5	5	5	6		6					
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	2	1	1	1	1	1		0					
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100	0					
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	250	50	50	50	50	50		289					
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
	Tenaga Kerja													
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	208	48	80	100	120	200		208					
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	1.216	96	120	160	180	200		1413					
	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan wirausaha	60	20	20	20	20	20		76					
	Jumlah pencari kerja yang	500	1000	1500	2000	2500	3000		714					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	terdaftar yang ditempatkan													
	Jumlah tenaga kerja yang terserap	535	500	500	500	2535	3035		1524					
	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	5,12%	5,11%	5,10%	5,09%	5,08%	5,07%		5,81%					
	Rasio ketergantungan	0,43	0,36	0,28	0,21	0,16	0,10		0,64					
	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	5 kasus	0	2	3	4	5		9					
	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS tiap tahun	6.342	6.500	6.900	7.300	7.700	8.342		83.200					
	Jumlah pemeriksaan perusahaan	377 perush	0	100	150	200	300		0					
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	100	100					
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14,49	14,71	15,15	15,63	16,13	16,67	14,49	14,25					
	Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	20	21	22	22	22	22	20	21					
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) %	8	7,82	7,43	7,60	6,70	6,37	8	8,72					
	Persentase Penggunaan	14,3%	16,33	16,8%	17,15%	17,39	17,56	14,3%	16,28					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) %		%			%	%		%					
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	71,48	73,82	76,16	78,86	81,98	85,50	71,48	83,71					
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90	90	90	90	90	90	90	90					
	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	30	35	40	50	60	70	35	40					
	Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5,92	5,68	5,44	5,17	4,91	4,67	5,92	3,47					
	Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75,5	76,5	77,5	78,5	80	81,5	75,5	76,00					
	Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,5	76,5	77,5	78,5	80	81,5	75,5	76,00					
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	10	11,5	12,5	14,5	15,5	17,5	10	11,1					
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	4,17%	10%	30%	50%	75%	100%	4,17%	62%					
	Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1	1 : 1,43	-					
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan	1	1	1	1	1	1	1	1					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk													
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0,6347	1	1	1	1	1	0,6347	1					
	Pangan													
	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,1	90,2	90,4	90,6	90,8	90,6	85,5					
	Lingkungan Hidup													
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	70	70	70	70	70	70							
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	75	75	75	75	75	75							
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	25	25	25	25	25	25							
	Penegakan Hukum Lingkungan	71%	71%	71%	71%	71%	71%							
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	B	B	A	A	B	B					
	Rasio Penduduk ber KTP per satuan Penduduk	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	0.50	-					
	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	0.40	-					
	Rasio Pasangan yang berakte Nikah	0.40	0.50	0.55	0.65	0.85	1.00	0.40	-					
	Ketersediaan databade kependudukan skala Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	75%	80%	85%	90%	95%	100%	75%	69,79%					
	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	75%	80%	85%	90%	95%	100%	75%	98,34%					
	Pemberdayaan Masyarakat													
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Jekan Raya	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	0,72	96,45					
	Persentase PKK aktif Kec. Jekan Raya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Persentase Posyandu aktif Kec. Jekan Raya	50%	60%	70%	80%	90%	100%	-	-					
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Bukit Batu	1	1	1	1	1	1	-	-					
	Persentase PKK aktif Kec. Bukit Batu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Persentase Posyandu aktif Kec. Bukit Batu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Pahandut	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	0,72	1					
	Persentase PKK aktif Kec. Pahandut	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase Posyandu aktif Kec. Pahandut	60%	70%	80%	90%	100%	100%	60%	100%					
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Rakumpit	0.72	0.77	0.83	0.88	0.94	1	-	1					
	Persentase PKK aktif Kec.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Rakumpit													
	PersentasePosyandu aktif Kec.Rakumpit	60%	70%	80%	90%	100%	100%	-	-					
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Sabangau	0.64	0.71	0.78	0.85	0.92	1	-	-					
	Persentase PKK aktif Kec. Sabangau	100%	100%	100%	100%	100%	100%		--					
	PersentasePosyandu aktif Kec. Sabangau	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	IKM Kecamatan	B	B	B	B	B	A	B	B					
	Perhubungan													
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10.099	10.099	10.299	10.399	10.499	10.599	10.099	10,086					
	Jumlah Orang melalui dermaga/terminal per tahun	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	104,029	176,266					
	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	54,77	54,77	54,05	52,96	52.59	52,23	54,77	92.73					
	Komunikasi dan Informatika													
	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	C	C	C	B	B	-	B					
	Persentase akses jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	25%	40%	45%	60%	80%	100%	25%	41%					
	Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	70%	75%	85%	95%	100%	-	70%					
	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di	27%	40%	60%	70%	80%	100%	27%	40%					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Tingkat Kecamatan													
	Persentase informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan melalui media	-	20%	40%	60%	80%	100%	-	21%					
	Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan perangkat daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	-	56%	75%	85%	95%	100%	-	56%					
	Persentase penanganan pengaduan pelayanan publik	20%	20%	40%	60%	80%	100%	20%	22%					
	Persentase Sub Domain yang dikelola	40%	45%	65%	75%	80%	100%	40%	51%					
	Statistik													
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	ada	ada	ada	ada	-	-					
	Buku Statistik Kota Palangka Raya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					
	Persandian													
	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	42%	42%	45%	60%	70%	100%	42%	42%					
	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	-	-	10%	25%	35%	50%	-	-					
	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah													
	Presentase Koperasi Aktif	22%	24%	28%	30%	32%	34%	83%	89,1					
	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,5%	2,7%	3%	3,5%	3,7%	4%	-	2,92					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Presentase UKM BPR/LKM Aktif	44,7%	46%	47%	49%	52%	55%	-	54,8					
	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	94%	95%	96%	97%	98%	99%	-	23,5					
	Penanaman Modal													
	Jumlah Investor (PMDN)	303	50	50	75	75	75	303	1677					
	Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	2.597,6 6	200	225	255	295	350	2.597, 66	1.281, 63					
	Laporan Kegiatan Penanaman Modal	16,50%	25%	35%	45%	60%	65%	16,50 %	3,04%					
	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Informasi	7,69%	75%	80%	83%	85%	90%	7,69%	30%					
	Survey Kepuasan Masyarakat	81,01	81,98	82,96	83,95	84,95	85,96	81,01	81,45					
	Kepemudaan Olah Raga													
	Persentase Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam pembangunan	16	16	20	25	30	35	24	40					
	Jumlah Prestasi Olah Raga	na.	-	5	7	9	15	-	5					
	Perpustakaan													
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perpustakaan	73,11	2	2,3	2,5	2,5	3	73,11	2					
	Kearsipan													
	Persentase Pengelolaan Arsip secara baku/baik	22,22 %	13,88 %	13,89%	13,89%	13,89 %	22,23 %	22,22 %	13,88 %					
	Kebudayaan													
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	2	2	2	-	4					
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	6	1	2	1	1	1	-	-					
	Layanan Urusan Pilihan													





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Pariwisata													
	Kunjungan Wisata	Wisnus: 169.531 dan Wisman: 3.253	Wisnus : 197.40 0 dan Wisman: 2.600	Wisnus: 207.300 dan Wisman: 2.700	Wisnus: 217.200 dan Wisman: 2.800	Wisnus: 227.10 0 dan Wisman: 2.900	Wisnus: 237.00 0 dan Wisman: 3.000	Wisnus: 305.88 0 dan Wisman: 4.975	Wisnus: 389.23 5 dan Wisman: 3.865					
	Lama kunjungan wisata	-	1	1.2	1.4	1.6	1.8	1,06	1,4					
	Pertanian													
	produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya per hektar (ton/ha)	2,56	2,56	2,58	2,58	2,58	2,58	2,95	2,65					
	Populasi ternak sapi (ekor)	2.036	2.118	2.203	2.290	2.406	2.525	2.036	2.117					
	Produksi daging sapi (ton)	1.102,2	1.157,3	1.215,2	1.275,9	1.339,7	1.406,7	1.102.940	1.240.320					
	Nilai Tukar Petani	104,86	104,75	104,78	104,78	104,78	104,78	96,76	96,65					
	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	1.125,4 0	1.125, 4	63.282	63.282	63.500	63.505	528,68	1.108, 69					
	Persentase kelompok tani yang dibina	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	75%	77%					
	Hewan tervaksin	6.000 dosis	6.500 dosis	7.000 dosis	7.500 dosis	8.000 dosis	8.500 dosis	8.044 dosis	7.460 dosis					
	Surveillance Avian Influenza	600 sampel	600 sampel	625 sampel	650 sampel	675 sampel	700 sampel	550 sampel	347 sampel					
	Sampel Produk Asal Ternak	150 sampel	150 sampel	175 sampel	200 sampel	225 sampel	250 sampel	70 sampel	60 sampel					
	Perdagangan													
	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) (IKU)	10,52 %	10,92 %	11,32 %%	11,72 %	12,12 %	12,52 %	10,52 %	18,18 %					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Peningkatan Kontribusi Retribusi Sektor Perdagangan Terhadap PAD (juta)	950 jt	988 jt	1.026 jt	1.064 Jt	1.102 Jt	1.140 Jt	-	-					
	Meningkatnya Persentase Penyelesaian Pengaduan Konsumen (Kasus)	50 %	54 %	58 %	62 %	66 %	70 %	50%	58%					
	Peningkatan jumlah alat UTP yang ditera Ulang (Unit)	200	210	220	230	240	250	200	220					
	Perindustrian													
	Pertumbuhan usaha Industri Kecil Menengah (Unit)	228	10	10	10	10	10	228	308					
	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Industri (%) (IKU)	4,38	4,55	4,72	4,89	5,06	5,23	4,38	10,88 %					
	Persentase tenaga terlatih dalam industri Kecil dan Menengah (orang)	35 %	41,53 %	43,38 %	45,56 %	48,20 %	51,40 %	35 %	45,94 %					
	Kelautan dan Perikanan													
	Produksi perikanan Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	16,772.79	19,025.00	21,278.21	23,531.42	25,784.65	28,037.86	16,772.79	19.699,24					
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3,150.00	3,200.00	3,250.00	3,300.00	3,350.00	3,400.00	3,150.00	4.757,17					
	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan	2	4	6	8	10	12	2	-					
	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	35.27	37.03	38.89	40.83	42.87	45.01	-	-					
	Penunjang Urusan													
	Perencanaan Pembangunan													
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan	Ada	Ada	-	-	-	Ada	Ada	Ada					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	PERDA/PERKADA													
	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	Ada	-	-	-	-	-	Ada					
	Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.03%					
	Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95,03%					
	Keuangan													
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu					
	Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	3,26 %	5 %	7 %	8 %	9 %	10 %							
	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	66,72 %	70 %	72 %	75 %	75 %	78 %	66,72 %	80,24 %					
	Persentase Jumlah Piutang Pajak Daerah Tertagih	NA	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	-	-					
	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan													
	Jumlah PNS yang mengikuti diklat/ bimtek	2.012 Orang	2.148	2.284	2.420	2.556	2.692	-	-					
	Presentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10%	11%	12%	13%	14%	15%	-	-					
	Presentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	65%	70%	75%	80%	85%	90%	65%	83,18 %					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Penelitian dan pengembangan													
	Persentase hasil penelitian yang dapat diimplementasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-					
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
	Pengawasan													
	Persentase Tindak Lanjut Temuan	73%	74%	75%	76%	77%	78%	73%	68,27 %					
	Nilai Akuntabilitas Kinerja SOPD memperoleh B	30%	75%	80%	85%	90%	90%	-	-					
	Level Kapabilitas APIP	3DC	3	3	3	3	3	3 DC	3 DC					
	Sekretariat Dewan													
	Persentase Produk Hukum Daerah (Legislasi)	113 %	80 %	85%	85 %	90 %	95 %	113 %	116,7 %					
	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	-	Ada					
	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					
	Terintegrasinya Program-Program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Pembentukan Perda dan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada					





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja	Target Kinerja						Capaian Kinerja						Interpertasi belum tercapai (<), Sesuai (=) Melampaui (>)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD													
	Sekretariat Daerah													
	Nilai LPPD	T	T	T	T	ST	ST	T	ST					



BAB III

PALANGKA RAYA
Kota Cantik



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan daerah mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan Neraca Daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif. Transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari APBD.

Dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan baik dari aspek non fisik maupun fisik.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Menganalisis kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

3.1.1.1 Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini sebagaimana terlihat dari target dan realisasi pendapatan daerah pada tabel 3.1. Pada tahun 2013, target Pendapatan daerah sebesar Rp893 milyar lebih dapat direalisasikan sebesar Rp874 milyar lebih atau sebesar 97,93%, sedangkan pada tahun 2014 mengalami peningkatan





target sebesar Rp996 milyar lebih dengan realisasi sebesar Rp966 lebih atau 97%. Sementara pada tahun 2017, realisasi mencapai 90,92%. Adapun perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

Tahun Anggaran	Target Setelah Perubahan APBD	Realisasi	%	Bertambah / Berkurang
2013	893.297.073.526,99	874.843.237.105,33	97,93%	(18.453.836.421,66)
2014	996.411.010.135,43	966.552.779.722,04	97,00%	(29.858.230.413,39)
2015	1.068.188.557.149,04	1.071.993.346.767,59	100,36%	3.804.789.618,55
2016	1.122.153.114.464,56	1.128.683.869.407,74	100,58%	6.530.754.943,18
2017	1.202.983.055.518,61	1.093.772.266.097,00	90,92%	(109.210.789.421,61)
Jumlah	5.283.032.810.794,63	5.135.845.499.099,70	97,21%	(147.187.311.694,93)

Total target Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya selama periode tahun 2013-2017 sebesar Rp5.283 trilyun lebih dengan realisasi sebesar Rp5.135 trilyun lebih atau sebesar 97,21%. Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Dari data diatas terlihat bahwa selama kurun waktu 2013-2017, realisasi PAD meningkat dari Rp63.534.338.407 pada tahun 2013, menjadi Rp150.888.509.403,00 pada tahun 2017. Pada kurun waktu yang sama, dana perimbangan meningkat dari Rp. 638.529.004.050,00 pada tahun 2013, menjadi Rp825.888.624.000,00 pada tahun 2017. Namun pendapatan lain-lain yang sah, menurun dari Rp172.779.894.648 menjadi Rp126.686.928.213 pada tahun 2017.

Salah satu ukuran kemandirian Pemerintah Daerah adalah dengan melihat proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Selama tahun 2013-2017, proporsi PAD cenderung meningkat yaitu pada tahun 2013 sebesar 7,26% meningkat menjadi 13,80% pada tahun 2017, dan pada tahun 2013 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 13,80%. Proporsi PAD dikisaran 10% menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya masih dapat meningkatkan kemampuan penerimaan PAD kepada Pemerintah Pusat dan atau proporsi dari sisi finansial masih sangat tinggi. Perkembangan proporsi dapat dilihat pada tabel 3.3 dan Gambar 3.1 berikut ini:



Tabel 3.2 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

Tahun	PAD			Dana Perimbangan			Lain-Lain Pendapatan		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2013	63.468.520.300	63.534.338.407	100,10%	643.476.478.423	638.529.004.050	99,23%	186.352.074.804	172.779.894.648	92,72%
2014	100.334.949.600	88.001.254.976	87,71%	696.758.314.543	689.110.637.755	98,90%	199.317.745.992	189.440.886.991	95,04%
2015	113.072.837.545	122.314.716.629	108,17%	723.111.818.000	707.089.412.100	97,78%	232.003.901.604	242.589.218.039	104,56%
2016	128.008.255.307	119.961.089.336	93,71%	804.226.094.256	786.324.243.634	97,77%	189.918.764.901	222.398.536.437	117,10%
2017	194.035.762.592	150.888.509.403	77,76%	882.260.364.714	825.888.624.000	93,61%	126.686.928.213	126.686.928.213	100,00%

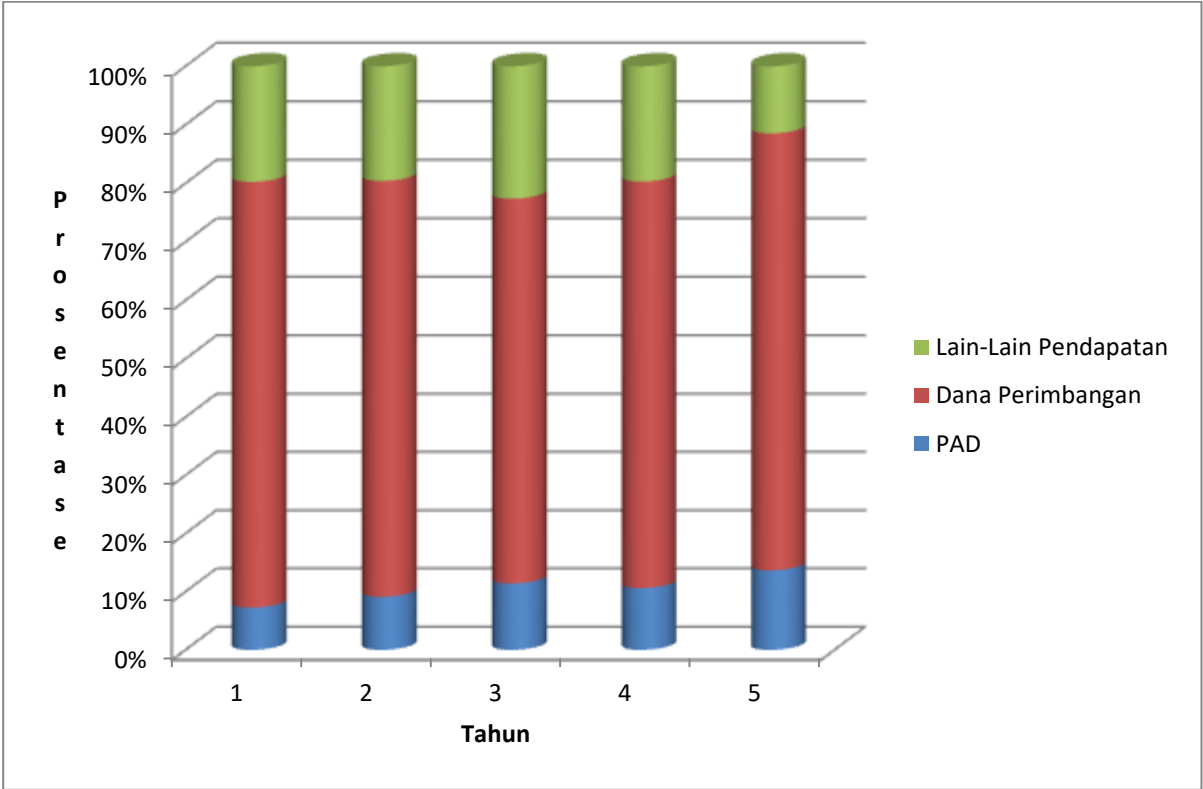
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

Tahun	PAD		Dana Perimbangan		Lain-Lain Pendapatan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
2013	63.534.338.407	7,26%	638.529.004.050	72,99%	172.779.894.648	19,75%
2014	88.001.254.976	9,10%	689.110.637.755	71,30%	189.440.886.991	19,60%
2015	122.314.716.629	11,41%	707.089.412.100	65,96%	242.589.218.039	22,63%
2016	119.961.089.336	10,63%	786.324.243.634	69,67%	222.398.536.437	19,70%
2017	150.888.509.403	13,80%	825.888.624.000	75,51%	126.686.928.213	11,58%





Gambar 3.1 Perkembangan Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah



Dari gambar di atas, terlihat pula bahwa komponen Dana Perimbangan masih sangat dominan dalam Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, yaitu mencapai diatas 70% setiap tahunnya, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah, berkisar antara 11-22%. Secara rinci realisasi pendapatan daerah per komponen sumber penerimaan selama kurun waktu 2013-2017 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah; terdiri dari Pajak Daerah, retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Realisasi selama kurun waktu 2013-2017 sebagaimana tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi PAD Pemerintahan KotaPalangka Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pajak Daerah	43.622.345	61.975.699	74.420.149	79.162.092	87.965.894
2	Retribusi daerah	10.831.917	13.930.313	15.166.185	15.486.756	12.737.916
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	959.030	989.084	1.388.938	2.146.124	3.430.179
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	8.121.045	11.106.156	31.339.442	23.166.115	46.754.519
Jumlah PAD		63.534.338	88.001.254	122.314.716	119.961.089	150.888.509





b. Dana Perimbangan; terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Realisasi dana perimbangan selama kurun waktu 2009-2013 sebagaimana terlihat pada tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5. Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Dana Alokasi Umum	539.535.616	589.449.668	599.588.799	657.826.439	646.270.544
2	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	43.773.450	42.229.350	61.088.040	82.298.801	135.472.963.
3	Dana Insentif Daerah (DID)					
4	Lain-lain					
	Jumlah	583.309.066	631.679.018	660.676.839	740.125.240	781.743.507

c. Lain-lain Pendapatan Daerah; terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari Provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi, dan lain-lain pendapatan. Secara rinci realisasinya dapat dilihat pada tabel 3.6. berikut:

Tabel 3.6 Perkembangan Realisasi Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.779.894	189.440.886	242.589.218	222.398.536	126.686.928
1.3.1	Hibah	-	2.864.000	42.450.340	53.326.807	2.000.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-		
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	10.186.642	45.585.820	
1.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.489.706	810.910.789	530.131.760	677.323.007	110.401.317
	Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus	90.290.188	105.485.808	138.865.515	101.293.842	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	-	-	8.250.000.000		150.000.000
	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	-	-	-
1.3.6	Kekurangan Penyaluran dana DAK Tahun Sebelumnya					14.135.611
	JUMLAH	874.843.237	966.552.779	1.071.993.346	1.128.683.869	1.103.464.061



Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Dari keseluruhan komponen dan sumber pendapatan daerah, komponen dana perimbangan merupakan proporsi terbesar dalam pendapatan daerah. Sumber terbesar dari komponen ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Komponen kedua terbesar adalah Lain-lain pendapatan yang sah, dengan sumber terbesar berasal dari Pos Bantuan Keuangan dari Provinsi. Sedangkan terakhir adalah komponen PAD, dengan sumber terbesar dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Secara umum rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai berikut ini:

Tabel 3.7. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDAPATAN	874.843.237.105,33	966.552.779.722,04	1.071.993.346.767,59	1.128.683.869.407,74	1.103.464.061.616,54	0,09
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.534.338.407,34	88.001.254.976,36	122.314.716.629,08	119.961.089.336,31	150.888.509.403,46	0,25
1.1.1.	Pajak daerah	43.622.345.363,94	61.975.699.970,72	74.420.149.941,09	79.162.092.387,89	87.965.894.034,00	0,21
1.1.2.	Retribusi Daerah	10.831.917.077,00	13.930.313.946,74	15.166.185.712,44	15.486.756.669,25	12.737.916.296,00	0,06
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	959.030.316,10	989.084.541,24	1.388.938.535,61	2.146.124.917,60	3.430.179.688,00	0,35
1.1.4.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	8.121.045.650,30	11.106.156.517,66	31.339.442.439,94	23.166.115.361,57	46.754.519.385,46	0,71
1.2.	DANA PERIMBANGAN	638.529.004.050,00	689.110.637.755,00	707.089.412.100,00	786.324.243.634,00	825.888.624.000,00	0,08
1.2.1.3	Pendapatan Dana Alokasi Umum	539.535.616.000,00	589.449.668.000,00	599.588.799.000,00	657.826.439.000,00	646.270.544.000,00	0,07
1.2.1.4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	43.773.450.000,00	42.229.350.000,00	61.088.040.000,00	82.298.801.392,00	135.472.963.000,00	0,36
1.2.3.5	Dana Insentif Daerah (DID)						-
1.2.2.1	Lain-lain pendapatan daerah yang sah		-			44.145.117.000,00	0,07
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	172.779.894.647,99	189.440.886.990,68	242.589.218.038,51	222.398.536.437,43	126.686.928.213,08	-
1.3.1.	Hibah	-	2.864.000.000,00	42.450.340.382,70	53.326.807.912,42	2.000.000.000,00	-
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-			0,16
1.3.3.	Pendapatan Lainnya	-	-	10.186.642,00	45.585.820,00		-





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.4.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	82.489.706.647,99	81.091.078.990,68	53.013.176.013,81	67.732.300.705,01	110.401.317.213,08	-
	Dana Penyesuain dan Otonomi Khusus	90.290.188.000,00	105.485.808.000,00	138.865.515.000,00	101.293.842.000,00		-
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah Lainnya	-	-	8.250.000.000,00		150.000.000,00	0,09
	Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	-	-	-	0,25
1.3.6.	Kekurangan Penyaluran dana DAK Tahun Sebelumnya					14.135.611.000,00	0,21
	JUMLAH	874.843.237.105,33	966.552.779.722,04	1.071.993.346.767,59	1.128.683.869.407,74	1.103.464.061.616,54	0,06

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017





Tabel 3.8 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya

No.	Uraian	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	0,22	0,1	0,11	0,05	-0,02	0,09
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,26	0,39	0,39	-0,02	0,26	0,25
1.1.1.	Pajak daerah	0,26	0,42	0,2	0,06	0,11	0,21
1.1.2.	Retribusi daerah	0,1	0,29	0,09	0,02	-0,18	0,06
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,19	0,03	0,4	0,55	0,6	0,35
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	0,6	0,37	1,82	-0,26	1,02	0,71
1.2.	Dana Perimbangan	0,16	0,08	0,03	0,11	0,05	0,08
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	0,17	0,09	0,02	0,1	-0,02	0,07
1.2.2.	Dana alokasi umum	0,4	-0,04	0,45	0,35	0,65	0,36
1.2.3.	Dana alokasi khusus	-	-	-	-	-	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,48	0,1	0,28	0,28	-0,43	0,07
1.3.1	Hibah	-1	-	13,82	0,26	-0,96	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	0,27	-0,02	-0,35	0,28	0,63	0,16
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	-	0,17	0,32	-0,27	-1	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017



3.1.1.2. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada dasarnya belanja daerah dalam APBD diarahkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara umum, pelaksanaan pembangunan sesuai prioritas daerah yang disinergikan dengan program-program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kalimantan Tengah, serta dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, selama kurun waktu 2013-2017, belanja daerah pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, seperti terlihat dalam tabel 3.9.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja Tidak Langsung meningkat dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 613 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 551 milyar, menjadi anggaran sebesar Rp. 726 Milyar. Dengan realisasi sebesar Rp. 532 milyar pada tahun 2017. Sementara, Belanja Langsung meningkat dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp. 337 Milyar dengan realisasi sebesar Rp. 298 milyar, menjadi anggaran sebesar Rp. 742 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 667,705 milyar pada tahun 2013 total belanja meningkat dari tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 950 milyar dengan realisasi sebesar Rp. 849 milyar, menjadi anggaran sebesar Rp. 1.213 Triliun dengan realisasi sebesar Rp 1.139 Triliun pada tahun 2017.

Tabel 3.9 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Palangka Raya

No	Uraian	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
2.1.	BELANJA LANGSUNG	41,17%	51,19%	57,91%
2.1.1.	Belanja Pegawai	3,82%	4,27%	6,30%
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	19,94%	22,83%	29,93%
2.1.3.	Belanja Modal	17,41%	24,09%	21,68%
2.3.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	58,83%	48,81%	42,09%
2.3.1.	Belanja Pegawai	55,83%	40,53%	38,35%
2.3.2.	Belanja bunga	0,17%	0,13%	0,13%
	Belanja Subsidi			
2.3.3.	Belanja Hibah	1,93%	2,06%	3,00%
2.3.4.	Belanja Bantuan Sosial	0,40%	0,45%	0,60%
	Belanja Bagi Hasil			
2.3.5.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	0,14%	0,19%	0,00%
2.3.6.	Belanja Tidak Terduga	0,36%		
	JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Palangka Raya 2013-2017



Tabel 3.9 menunjukkan terjadi kenaikan belanja langsung pada tahun 2016 dari angka 51,19% dan pada tahun 2017 menjadi angka 57,91%, artinya terdapat kenaikan sebesar 5,72% dari tahun 2016. Jika dibandingkan pada tahun 2015, maka angka belanja langsung ini mengalami kenaikan sebesar 16,74%. Kenaikan belanja pegawai menunjukkan makin meningkatnya efisiensi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola realisasi belanja bagi pegawai daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya proporsi belanja pegawai di Kota Palangka Raya rata masih berada pada kisaran angka 5%. Peningkatan efisiensi pada belanja pegawai di Kota Palangka Raya ini bisa disebabkan oleh makin efisiennya pemberian honor pegawai dan moratorium (penghentian sementara) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdampak pada *rightsizing* struktur pegawai. Disamping itu, juga terjadi penurunan proporsi pada belanja barang dan jasa. Penurunan ini juga menunjukkan kinerja yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola keuangan daerah untuk realisasi belanja pegawai. Disisi lain, terjadi kenaikan proporsi belanja modal pada tahun 2017 sebesar 4,27% dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 15,74%. Pada sektor belanja tidak langsung, terjadi penurunan pada tahun anggaran 2016 sebesar 10% dibandingkan dengan tahun 2017 dan mengalami penurunan sekitar 6% dari tahun 2017.

c. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Pada Tabel 3.11 menyajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur yang menunjukkan tidak terjadi kenaikan yang signifikan baik pada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada tahun 2016 dari angka Rp544.767.212.914,71,- (62,85%) turun sedikit menjadi Rp559.385.428.088,00 (61,72%) di tahun 2017, Jika dibandingkan pada tahun 2015, maka angka belanja langsung ini mengalami kenaikan sebesar 1,62%. Hal yang perlu dicermati pada sektor belanja langsung adalah kenaikan pada belanja pegawai pada tahun anggaran 2016 sebesar 1,21% dari tahun 2015 dan angka ini mengalami kenaikan sebesar 12,03% dari tahun 2017. Kenaikan belanja pegawai ini menunjukkan makin meningkatnya efisiensi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola realisasi belanja bagi pegawai daerah. Hal ini juga dapat dilihat dari rendahnya proporsi belanja pegawai di Kota Palangka Raya masih berada pada kisaran angka 5%. Peningkatan efisiensi pada belanja pegawai di Kota Palangka Raya ini bisa disebabkan oleh makin efisiennya pemberian honor pegawai dan moratorium (penghentian sementara) pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berdampak pada *rightsizing* struktur pegawai. Disamping itu juga terjadi penurunan proporsi pada belanja barang dan jasa. Penurunan ini juga menunjukkan kinerja yang baik bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mengelola keuangan daerah untuk realisasi belanja pegawai.



Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya 2015-2017

No	Uraian	2015	%	2016	%	2017	%
A	Belanja Tidak Langsung	558.244.115.036,00	83,77%	544.767.212.914,71	85,39%	559.385.428.088,00	83,12%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	494.021.138.412,00	74,13%	480.631.396.075,00	75,34%	426.104.705.742,00	63,31%
2	Belanja Tambahan Penghasilan	59.143.239.124,00	8,88%	58.164.953.712,00	9,12%	49.502.455.455,00	7,36%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	2.660.000.000,00	0,40%	2.689.400.000,00	0,42%	5.249.000.000,00	0,78%
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	2.419.737.500,00	0,36%	3.281.463.127,71	0,51%	3.256.925.000,00	0,48%
B	Belanja Langsung	108.155.898.849,60	16,23%	93.209.551.880,80	14,61%	113.624.066.181,00	16,88%
1	Belanja Honorarium PNS	12.831.660.688,00	1,93%	6.450.000,00	0,00%	25.755.972.714,00	3,83%
2	Belanja Uang Lembur	320.730.000,00	0,05%	568.695.200,00	0,09%	644.966.200,00	0,10%
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	52.200.000,00	0,01%	202.800.000,00	0,03%	211.250.000,00	0,03%
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.092.562.500,00	0,46%	3.813.848.400,00	0,60%	4.033.505.838,00	0,60%
5	Belanja premi asuransi kesehatan	204.568.659,80	0,03%	44.555.500,00	0,01%	419.720.558,00	0,06%
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	11.211.862.588,00	1,68%	13.083.022.339,00	2,05%	12.975.100.336,00	1,93%
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	1.198.956.900,00	0,18%	1.294.340.000,00	0,20%	1.980.817.200,00	0,29%
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.543.562.500,00	0,23%	1.926.422.200,00	0,30%	1.988.393.010,00	0,30%
9	Belanja perjalanan dinas	30.224.140.933,00	4,54%	48.406.559.169,98	7,59%	49.251.533.001,00	7,32%
10	Belanja perjalanan pindah tugas			14.859.000,00	0,00%		
11	Belanja Pemulangan Pegawai						
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	47.475.654.080,80	7,12%	23.848.000.071,82	3,74%	16.362.807.324,00	2,43%
	TOTAL	666.400.013.885,60		637.976.764.795,51		673.009.494.269,00	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017





d. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran.

Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, atau belanja sejenis lainnya.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar setiap periodik oleh Pemerintah Daerah dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas Pemerintah Daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, seperti honorarium guru dan tenaga medis serta belanja sejenis lainnya. Analisis realisasi pengeluaran dimaksud seperti dalam tabel berikut:



Tabel 3.11 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Palangka Raya

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	551.499.546.587,60	555.827.568.794,41	30.758.740.239,70	68.436.379.726,44	532.465.661.995,24
	Belanja Gaji dan Tunjangan			494.021.138.412,00	480.631.396.075,00	426.104.705.742,00
	Belanja pemungutan Pajak Daerah			2.419.737.500,00	3.281.463.127,71	3.256.925.000,00
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				2.689.400.000,00	5.249.000.000,00
	Belanja Bunga	1.781.151.504,62	1.721.646.151,61	1.549.725.044,60	1.503.096.079,05	1.479.540.227,07
	Belanja bantuan sosial	3.611.480.000,00		4.427.061.071,00	5.321.006.151,00	6.718.276.025,00
	Belanja Hibah	38.922.514.090,00	24.823.394.865,00	21.166.888.932,00	24.389.142.135,00	33.383.829.802,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.184.890.625,98	1.495.963.151,80	1.079.482.548,10	2.310.751.128,39	1.249.044.744,13
	Belanja Tidak Terduga		9.426.000,00	2.535.582.644,00		4.000.000.000,00
B	Belanja Langsung	298.352.769.378,72	392.076.337.596,70	1.021.305.089.218,36	1.117.483.590.971,32	574.048.156.989,33
	Belanja Honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis					
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				202.800.000,00	211.250.000,00
	Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya)				45.223.478.983,45	43.355.954.803,00





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
	Belanja Sewa gedung kantor				867.156.000,00	1.676.159.247,00
	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor				1.366.721.450,00	1.106.072.436,00
C	Pembiayaan Pengeluaran			11.003.475.843,00	12.207.816.376,66	21.181.423.066,66
	Pembayaran Pokok Utang			1.503.475.843,00	1.883.423.066,66	1.383.423.066,66
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah			9.500.000.000,00	10.324.393.310,00	9.798.000.000,00
	TOTAL (A+B)			540.248.026.802,60	532.334.071.072,81	497.373.699.862,73

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017



3.1.2. Analisis Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis data neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- a Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek
- b Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam

memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya.

Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset
- b. Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

3) Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah.

- a. Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama, hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur piutang = $365 : \text{perputaran piutang}$

Dimana :

- Perputaran piutang = $\frac{\text{pendapatan daerah}}{\text{rata-rata piutang pendapatan daerah}}$

- Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = $\frac{(\text{saldo awal piutang} + \text{saldo akhir piutang})}{2}$

- b. Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut.

Rata-rata umur persediaan = $365 : \text{perputaran persediaan}$

Dimana :

Perputaran persediaan = $\frac{\text{nilai persediaan yang digunakan dalam satu tahun}}{\text{rata-rata nilai persediaan}}$. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = $\frac{(\text{saldo awal persediaan} + \text{saldo akhir persediaan})}{2}$



Tabel 3.12 Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 – 2017

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
ASET					
ASET LANCAR	103.535.341.632,08	123.549.111.565,71	162.078.406.103,12	26.854.112.701,87	
Kas	83.596.912.617,92	92.994.908.044,79	103.670.682.417,83		
Kas di Kas Daerah	83.475.003.160,45	92.557.677.717,77	98.961.439.579,97		
Kas di Bendahara Penerimaan	-	861.500,00	-		
Kas Dibendahara Penerimaan-Kas Lainnya	-	-	22.961.066,00		
Kas di Bendahara Pengeluaran	121.909.457,47	63.718.110,16	-	145.666,00	
Kas di Bendahara JKN			4.333.988.330,00	6.277.938.028,50	
Kas di Bendahara FKTP					5.127.867.898,50
Kas Dana Bansos Pendidikan			352.293.441,86		1.356.168.168,21
Investasi Jangka Pendek	-	372.650.716,86	4.333.988.330,00		
Piutang	16.903.078.772,16	25.257.360.122,92	47.143.406.593,07	78.537.181.256,07	90.127.353.522,17
Piutang Pajak	1.067.137.064,78	20.686.274.632,15	32.569.997.181,68	1.003.382.887,00	
Piutang Pajak Hotel	-	80.663.000,00			
Piutang Pajak Restoran	-	1.141.846.425,00	-		
Piutang Pajak PJU	-	1.127.855.825,00	-		
Piutang PBB	124.851.016,00	13.990.600,00	-		
Estimasi Piutang PBB tak tertagih	15.372.676.691,38	2.422.643.178,77	-		





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Piutang Pajak Galian C	-	2.305.015.007,77	-		
Piutang Pajak Hiburan	#REF!	15.477.428,00	-		
Piutang Pendapatan				78.537.181.256,0	
Piutang Retribusi	230.183.000,00	102.150.743,00	962.059.300,00		
Piutang Retribusi Kebersihan	-	925.932.887,00	962.059.300,00		
Piutang sewa	-	5.296.843.398,00	-		
Piutang Sewa Blok Pasar	-	123.549.111.565,71	-		
Piutang Sewa Tanah	-		-		
Piutang Bagi Hasil	-		12.685.417.224,39		
Piutang Bagi Hasil Provinsi	-	21.407.589.600,79			
Piutang Bagi Hasil PBB	-	21.407.589.600,79	-		
Piutang Bagi Hasil Cukai Rokok	-	9.488.248.588,56	-		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	4.343.734.322,23	-		
Piutang Lain-Lain	108.231.000,00	6.075.606.690,00	925.932.887,00	1.003.382.887,00	953.467.160,64
Piutang PDAM	-	1.500.000.000,00	-		
Piutang Kelotok	-	21.407.589.600,79	-		
Piutang Sapi Gaduhan	-		-		
Penyisihan Piutang				(21.543.169.585,19)	(23.783.005.064,67)
Beban Bayar dimuka				134.821.933,95	325.834.105,15





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Persediaan	3.035.350.242,00	5.296.843.398,00	29.187.429.795,00	37.786.951.331,4	83.275.740.343,6
Jumlah Aset Lancar	103.535.341.632,08	23.549.111.565,71	162.078.406.103,12	130.152.878.195,42	157.383.643.644,66
<u>INVESTASI JANGKA PANJANG</u>		21.407.589.600,79	26.888.944.946,20	40.733.549.197,91	57.699.012.484,91
Investasi Permanen	15.648.737.818,00				57.699.012.484,91
Penyertaan modal Pemerintah Daerah	18.120.901.765,00	21.407.589.600,79	26.888.944.946,20	40.733.549.197,91	57.699.012.484,91
Penyertaan Modal Pada PDAM dan PDIM (metde ekuitas)	(2.472.163.947,00)				
Penyertaan Modal Pada PDIM	-				
Penyertaan Modal Pada Bank Pembangunan Kal-Teng	-		-		
Penyertaan Modal Pada JAMKRIDA	-		-		
Jumlah Investasi Permanen	15.648.737.818,00	21.407.589.600,79	26.888.944.946,20	40.733.549.197,91	57.699.012.484,91
ASET TETAP				2.252.530.459.909,30	2.593.863.728.290,64
Tanah	145.336.130.531,00			1.024.658.885.756,22	1.174.995.791.796,22
Peralatan dan Mesin	190.396.707.044,88	193.972.112,00	1.000.125.634.909,00	269.851.310.352,06	292.490.360.983,71
Alat-alat Berat	-	11.581.528.578,41	-		
Alat-alat Angkutan	-	13.101.291.289,65	240.532.213.493,88		
Alat Bengkel	-	24.876.791.980,06	-		





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Alat Pertanian dan Peternakan	-		-		
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	-	2.544.488.762.125,83	-		
Alat Studio dan Alat Komunikasi	-		-		
Alat Ukur	-		-		
Alat-alat Kedokteran	-		-		
Alat Laboratorium	-		-		
Alat Keamanan	-		-		
Gedung dan Bangunan	454.960.824.400,97		-	564.353.600.029,07	609.732.980.605,0
Bangunan Gedung	-		-		
Bangunan Monumen	-		573.594.419.057,58		
Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	880.922.166.770,00		-	1.149.598.378.103,68	1.207.360.679.176,81
Jalan dan Jembatan	-		-		
Bangunan Air (Irigasi)	-		1.054.680.253.158,00		
Instalasi	-		-		
jaringan	-		-		
Aset Tetap Lainnya	24.232.153.993,00		-	109.000.729.336,00	190.662.347.295,18
Buku dan Perpustakaan	-		-		
Barang Bercorak Kesenian dan	-		51.727.522.884,00		





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Kebudayaan					
Hewan/ternak dan Tumbuhan	-		-		
Sarana prasarana kantor/sekolah	-		-		
Kontruksi Dalam Pengerjaan	847.570.000,00		-	30.720.314.722,40	73.327.601.941,75
Kontruksi Dalam Pengerjaan	-		-		
Jumlah Aset Tetap	1.696.695.552.739,85		3.377.975.800,00	2.252.530.459.909,30	
DANA CADANGAN			-		10.020.173.607,00
Dana Cadangan	-		(65.035.044.520,47)		
Jumlah Dana Cadangan	-		2.859.002.974.781,99		10.020.173.607,00
ASET LAINNYA			-		
Tagihan Penjualan Angsuran (DUM)	143.738.112,00		-		
Tagihan Jangka Panjang				13.823.441.667,54	18.716.498.023,00
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Daerah	11.581.528.578,41				
Aset Tidak Berwujud				2.604.370.501,00	1.689.993.287,82
Lain-lain Aset	3.146.472.573,47				104.559.732.356,14
Jumlah Aset Lainnya	14.871.739.263,88		13.787.043.766,16	95.462.267.317,20	
TOTAL ASET	1.830.751.371.453,81	2.544.488.762.125,83	3.131.829.024.230,58	2.537.002.385.788,37	2.944.702.578.184,01





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
<u>KEWAJIBAN</u>					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.816.921.173,67	3.394.985.446,07			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga		372.650.716,86	163.858.776,56	6.945.621,00	7.475.738,00
Kewajiban Bunga dan Jasa Bank	193.392.552,73	180.594.846,42	1.383.423.066,66	1.382.513.081,72	1.264.831.784,27
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				1.383.423.066,66	1.383.423.066,66
Kewajiban hutang luar negeri jangka pendek	1.623.528.620,94	1.503.475.843,79			
Utang Beban			513.055.505,00	492.212.002,79	1.852.396.706,69
Utang Jangka Pendek Lainnya		1.338.264.039,00	2.341.930.000,00	1.695.419.000,00	24.768.687.769,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.816.921.173,67	3.394.985.446,07	4.402.267.348,22	4.960.512.772,17	29.856.549.198,62
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri	19.487.975.710,47	17.984.499.866,68	16.601.076.800,02	15.217.653.733,36	
Utang Bunga dan Jasa Bank					
Utang Jangka panjang Lainnya					
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	19.487.975.710,47	17.984.499.866,68		15.217.653.733,36	13.834.230.666,70
JUMLAH Kewajiban	21.304.896.884,14	21.379.485.312,75	21.003.344.148,24	20.178.166.505,53	43.690.779.865,32
EKUITAS	1.809.446.474.569,34	2.523.109.276.813,08	3.110.825.680.082,34	2.516.824.219.282,84	2.901.011.798.318,69
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.830.751.371.453,81	2.544.488.762.125,83	3.131.829.024.230,58	2.537.002.385.788,37	2.944.702.578.184,01





3.1.2.1 Aset Daerah

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) Aset Lancar, (2) investasi jangka panjang (3) aset tetap, (4) dana cadangan dan, (5) aset lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas dan dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) tahun periode akuntansi. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 memiliki aset lancar yang mencapai nilai Rp. 157.383.643.644,66 yang terdiri dari (I) Kas di Bendahara FKTP senilai Rp. 5.127.867.898,50 Kas di Bendahara Dana Bansos Pendidikan senilai Rp. 1.356.168.168,21; (II) Piutang pendapatan senilai Rp90.127.353.522,17 berupa Penyisihan Piutang senilai Rp.(23.783.005.064,67); Piutang lainnya senilai Rp.60.527.000,00 Bagian lancar tuntutan perbendaharaan senilai Rp.20.818.152,00 Bagian lancar piutang; Beban Dibayar Dimuka senilai Rp.325.834.105,15 (III) Persediaan senilai Rp. 83.275.740.343,66.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017, memiliki investasi jangka panjang mencapai nilai Rp. 57.699.012.484,91 yang terdiri dari (I) Investasi non permanen sebesar Rp. 0,00 dan (II) Investasi permanen sebesar Rp.57.699.012.484,9.

c. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 memiliki aset tetap yang mencapai nilai Rp.2.593.863.728.290,64 yang terdiri dari (i) Tanah senilai Rp.1.174.995.791.796,22; Peralatan dan Mesin Rp. 292.490.360.983,71; Gedung dan Bangunan Rp609.732.980.605,05; Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp1.207.360.679.176,81; Aset Tetap Lainnya Rp190.662.347.295,18; Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp. 73.327.601.941,75; dan Akumulasi Penyusutan Rp. (954.706.033.508,08)

d. Dana cadangan

Dana cadangan dimaksudkan untuk menyediakan anggaran yang memerlukan waktu penyediaan anggaran dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran. Dana cadangan Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 10.020.173.607,0.

e. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak berwujud atau aset yang dalam kondisi tidak bisa dipergunakan (rusak). Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 memiliki aset lainnya yang terdiri dari Tagihan Jangka





Panjang Rp18.716.498.023,00; Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp0,00 ; Aset Tidak Berwujud Rp. 1.689.993.287,82 Aset Lain-lain Rp104.559.732.356,14 dan Kas yang dibatasi penggunaannya Rp769.796.489,84.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul sebagai akibat dari pemenuhan terhadap kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan tugas atau tanggung jawab dimasa lalu yang mengalami defisit. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp43.690.779.865,32 yang terdiri dari Kewajiban jangka pendek sebesar Rp29.856.549.198,62 dan Kewajiban Jangka Panjang Rp13.834.230.666,70.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 memiliki Ekuitas Dana adalah sebesar Rp4.703.630.210.438,04 yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017, Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp2.901.011.798.318,69 dengan perincian sebagai berikut : (i) Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp161.817.407.979,00 (ii) Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp80.086.524,00 (iii) Cadangan Piutang Rp24.063.790.568,90 (iv) Cadangan Persediaan Rp15.662.409.549,00 (v) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran utang jangka Pendek Rp(66.762.546.597,00).
- b. Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017, ekuitas dana investasi berjumlah sebesar Rp4.568.767.926.646,14 yang terdiri dari: (i) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp65.441.893.284,70 (ii) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp4.377.998.569.847,94 (iii) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp125.327.463.513,50.
- c. Ekuitas Dana Cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017, dana cadangan berjumlah sebesar Rp1.135.768,00.



3.1.2.4 Analisis Rasio

Rasio Likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas adalah rasio lancar (*Current Ratio*) dan rasio quick (*Quick Ratio*). Rasio Likuiditas Kota Palangka Raya pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio lancar Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh utang atau kewajiban jangka pendeknya. Namun perlu diperhatikan juga, nilai rasio Pemerintah Kota Palangka Raya yang tiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya. Nilai ratio *quick* neraca keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya per 31 Desember 2017 sebesar 153,74 dan pada tahun 2012 264,9. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Kota Palangka Raya setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Untuk lebih jelasnya rasio likuiditas Pemerintah Kota Palangka Raya periode tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.13 berikut ini:

Tabel 3.13 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
1	Rasio Likuiditas						
1.1	Rasio Lancar (current ratio)	56,98	6,94	36,82	26,24	5,27	26,4493
2	Rasio Solvabilitas						
2.1	Rasio Hutang Lancar terhadap total Aset	0,0116	0,0084	0,0067	0,0080	0,0148	0,0099
2.2	Rasio Hutang terhadap modal	0,0118	0,0085	0,0068	0,0080	0,0151	0,0100
3.	Rasio Aktivitas						
3.1	Rasio Perputaran Aktiva	0,0347	0,0346	0,0391	0,0473	0,0513	0,0414
3.2	Rasio Perputaran Aktiva Tetap	0,0374	0,0371	0,0428	0,0533	0,0582	0,0457

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio solvabilitas Pemerintah Kota Palangka Raya





selama periode 2013-2017 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Palangka Raya cukup kuat untuk membayar manakala melakukan pinjaman ke kreditor. Untuk lebih jelasnya rasio solvabilitas Pemerintah Kota Palangka Raya tahun 2013-2017 sebagai tercantum dalam tabel 3.13 di atas.

Untuk menganalisis neraca Kota Palangka Raya periode tahun 2013-2017 digunakanlah beberapa analisis rasio seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata
1	Rasio Likuiditas						
1.1	Rasio Lancar (current ratio)	56,98	6,94	36,82	26,24	5,27	26,4493
2	Rasio Solvabilitas						
2.1	Rasio Hutang Lancar terhadap total Aset	0,0116	0,0084	0,0067	0,0080	0,0148	0,0099
2.2	Rasio Hutang terhadap modal	0,0118	0,0085	0,0068	0,0080	0,0151	0,0100
3.	Rasio Aktivitas						
3.1	Rasio Perputaran Aktiva	0,0347	0,0346	0,0391	0,0473	0,0513	0,0414
3.2	Rasio Perputaran Aktiva Tetap	0,0374	0,0371	0,0428	0,0533	0,0582	0,0457

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2013-2017

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Namun dalam penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan Tahun 2013-2017 ini, data yang digunakan terkait dengan APBD tahun 2013-2017 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK, sedangkan untuk APBD Tahun 2017 belum diaudit oleh BPK, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau dua bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK.





a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Selama Periode Tahun Anggaran 2013-2017, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan professional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, antara lain:

1. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan OPD penghasil.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumberdaya pegawai yang professional dan bermoral, serta mengembangkan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

b. Kebijakan Belanja Daerah

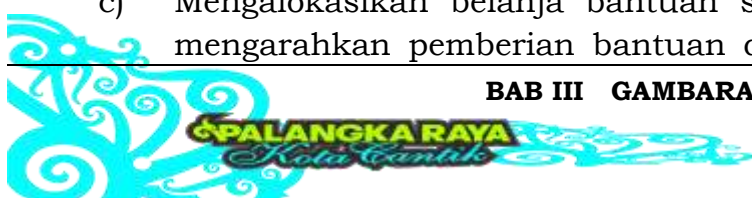
Belanja yang dianggarkan berdasarkan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, serta prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah tahun 2013-2017, disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program





dan kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013-2017 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran IPM dan SDGs, sehingga diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM dan MDGs guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2013-2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang professional, efisien dan efektif, antara lain:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Palangka Raya yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah.
2. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari volume APBD tiap tahunnya.
3. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk fungsi kesehatan secara bertahap sebesar 10% dari volume APBD tiap tahunnya.
4. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur minimal 10% dari total PKB, PBBKB, dan BBNKB sesuai Pasal 8 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah.
5. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kelurahan.
6. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur diarahkan pada wilayah serta produksi kelurahan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam.
8. Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*) dan pelayanan dasar OPD yang termasuk didalamnya pembiayaan terhadap belanja penunjang penyelenggaraan pemerintahan di setiap perangkat daerah.
9. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif pada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi pada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - c) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk mengarahkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau





barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d) Alokasi belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- e) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang bersifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- f) Mengalokasikan belanja bagi hasil pada Kabupaten/Kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil yang dilaksanakan secara profesional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah.
- g) Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten/kota dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, (b) pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemenuhan belanja yang mengalami defisit anggaran sebagai akibat dari proporsi pendapatan yang lebih kecil yang dibandingkan dengan kebutuhan belanja. Disamping itu arah kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada pemenuhan belanja investasi yaitu dengan peningkatan penyertaan modal BUMD serta penyediaan dana cadangan untuk pelaksanaan Pemilukada tahun 2018.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan keuangan tersebut di atas yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, maka untuk mengetahui kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, hendaknya diketahui pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan tahun sebelumnya.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa proporsi penggunaan realisasi belanja daerah dibandingkan dengan anggaran belanja daerah mengalami fluktuasi dikisaran antara 86-94% tiap tahunnya. Sementara itu analisis proporsi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut:





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Tabel 3.15 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Palangka Raya 2013-2017 (Rp)

No	Uraian	Data Tahun Dasar	Tingkat Pertumbuhan	Tahun Anggaran				
		(Rp)		2013	2014	2015	2016	2017
	Belanja Tidak Langsung	485.194.190.758,00	0,02	579.029.183.970,64	611.488.391.411,04	652.482.347.973,62	606.797.957.055,12	559.385.428.088,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	426.104.705.742,00	0,07	526.704.885.598,48	572.571.657.034,54	617.516.220.579,98	570.402.349.991,48	505.882.852.488,19
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	5.249.000.000,00	0,48					
3	Belanja Bunga	1.479.540.227,07	0,02	3.000.000.000,00	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
4	Belanja bagi hasil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja bantuan sosial	6.718.276.025,00	0,23	2.284.750.000,00	8.432.500.000,00	5.158.362.330,00	5.965.262.000,00	7.632.982.000,00
	Belanja Hibah	33.383.829.802,00	0,26	42.742.500.000,00	25.584.607.300,00	22.109.045.000,00	25.231.625.000,00	39.100.548.855,68
B	Pembiayaan Pengeluaran	21.181.423.066,66		8.819.870.365,00	9.680.000.000,00	13.000.000.000,00	12.324.393.310,00	21.800.000.000,00
1	Pembayaran Pokok Utang	1.383.423.066,66	0,01	3.619.870.365,00	1.680.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	9.798.000.000,00	0,02	5.200.000.000,00	8.000.000.000,00	11.000.000.000,00	10.324.393.310,00	9.800.000.000,00
3	Pembantuan Dana Cadangan			0	0	0	0	10.000.000.000,00
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	506.375.613.824,66	0,11	587.849.054.335,64	621.168.391.411,04	665.482.347.973,62	619.122.350.365,12	581.185.428.088,00

Sumber: Realisasi APBD Kota Palangka Raya 2013-2017





Tabel 3.16 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017

N O	URAIAN	2013 Realisasi (Rp)	%	2014 Realisasi (Rp)	%	2015 Realisasi (Rp)	%	2016 Realisasi (Rp)	%	2017 Realisasi (Rp)	%	Rata-rata Kenaikan (%)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	551.499.546	0,20	555.827.568	0,01	30.758.740	-0,94	68.436.379	1,2	559.385.428	7,17	1,53
1	Belanja Pegawai	505.999.510	19,85	524.340.249	0,04	-				505.882.852		9,95
2	Belanja Bunga	1.781.151	-0,13	1.721.646	-0,03	1.549.725	-0,10	1.503.096.	0,0	1.520.000	0,01	-0,05
3	Belanja Subsidi			-		-		-		-		
4	Belanja Hibah	38.922.514	0,79	24.823.394	-0,36	21.166.888	-0,15	59.226.626	1,8	39.100.548	- 0,34	0,35
5	Belanja Bantuan Sosial	3.611.480	-0,52	3.436.888	-0,05	4.427.061	0,29	5.395.906	0,2	7.632.982	0,41	0,07
6	Belanja Bagi Hasil	-		-		-		-		-		
7	Belanja Bantuan Keuangan	1.184.890	-0,19	1.495.963	0,26	1.079.482	-0,28	2.310.751	1,1	1.249.044	- 0,46	0,09
8	Belanja Tidak Terduga	-		-		2.535.582		-		-		
B	BELANJA LANGSUNG	298.352.769	0,24	392.076.337	0,31	1.021.305.0 89	1,60	1.117.483.59 0	0,1	656.024.392	- 0,41	0,37
1	Belanja Pegawai	-		36.501.269		558.943.11 4	14,31	595.877.862	0,1	77.870.257	- 0,87	4,51
2	Belanja Barang dan Jasa	125.018.156	0,18	163.656.757	0,31	256.697.37 3	0,57	235.919.509	-0,1	293.465.219	0,24	0,24



Selanjutnya dari Tabel 3.16 dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel 3.17 sebagai berikut:

Tabel 3.17 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(Rp)	(Rp)	
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2013	560.992.523.628,48	959.476.114.651,16	58,47%
2	Tahun Anggaran 2014	615.781.110.973,20	1.079.951.957.055,35	57,02%
3	Tahun Anggaran 2015	666.400.013.885,60	1.160.810.814.476,97	57,01%
4	Tahun Anggaran 2016	866.778.071.706,40	1.198.127.787.074,42	72,34%
5	Tahun Anggaran 2017	784.429.240.533,23	1.121.400.056.668,06	69,95%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017

Berdasarkan uraian dan penyajian tabel diatas selanjutnya diuraikan kesimpulan analisis kebijakan penggunaan anggaran belanja antara lain:

- Proporsi belanja tidak langsung dalam APBD Pemerintah Kota Palangka Raya setiap tahunnya rata-rata masih di atas 50,00 % dari total belanja daerah.
- Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dalam APBD setiap tahunnya rata-rata masih 62,95% dari total belanja daerah, sementara arah yang diinginkan secara nasional mengenai proporsi belanja untuk lebih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan di luar belanja untuk aparatur.
- Faktor penyebab yang melatar belakangi masih dominannya proporsi belanja tidak langsung antara lain karena di dalam belanja tidak langsung teralokasi belanja bantuan sosial, belanja hibah, serta belum diterapkannya sistem penganggaran dengan menggunakan Standar Analisa Belanja (SAB), belum efektifnya pola pengintegrasian antara target capaian pada Standard Pelayanan Minimum dengan penganggarnya. Selain itu, masih belum optimalnya pemanfaatan potensi serta rendahnya realisasi PAD menyebabkan masih sebagian besar alokasi DAU diserap untuk memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung khususnya pada belanja wajib, sehingga alokasi belanja langsung menjadi sangat terbatas.

Berikutnya dilakukan analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan meningkat serta prioritas utama.



Tabel 3.18 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Pemerintah Kota Palangka Raya

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
A	Belanja Tidak Langsung	529.244.550.959,60	520.126.254.696,15	476.192.276.796,07	-5,08%
	Belanja Gaji dan Tunjangan	494.021.138.412,00	480.631.396.075,00	426.104.705.742,00	-7,03%
	Belanja pemungutan Pajak Daerah	2.419.737.500,00	3.281.463.127,71	3.256.925.000,00	17,43%
	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.660.000.000,00	2.689.400.000,00	5.249.000.000,00	48,14%
	Belanja Bunga	1.549.725.044,60	1.503.096.079,05	1.479.540.227,07	-2,29%
	Belanja bantuan sosial	4.427.061.071,00	5.321.006.151,00	6.718.276.025,00	23,23%
	Belanja Hibah	21.166.888.932,00	24.389.142.135,00	33.383.829.802,00	26,05%
	Belanja Bantuan Keuangan		2.310.751.128,39		0,00%
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00			0,00%
B	Pembiayaan Pengeluaran	11.003.475.843,00	12.207.816.376,66	21.181.423.066,66	42,23%
	Pembayaran Pokok Utang	1.503.475.843,00	1.883.423.066,66	1.383.423.066,66	-0,64%
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	9.500.000.000,00	10.324.393.310,00	9.798.000.000,00	1,79%
	TOTAL (A+B)	540.248.026.802,60	532.334.071.072,81	497.373.699.862,73	-4,02%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2013-2017. Diolah



3.2.2 Analisis Pembiayaan

Tabel 3.19 Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya 2015 - 2017

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.040.448.839.067,43	1.128.683.869.407,74	1.093.772.266.097,85
	Dikurangi realisasi:			
2	Belanja Daerah	1.098.222.522.067,43	1.185.919.970.697,76	1.100.218.633.601,40
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	12.207.816.376,66	21.181.423.066,66
A	Defisit riil	(67.773.683.000,00)	(69.443.917.666,68)	(27.627.790.570,21)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	72.878.856.090,44	103.670.682.417,83	34.226.764.751,15
5.	Pencairan Dana Cadangan		-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	,-

Berdasarkan tabel analisis di atas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai pada table 3.20 berikut:



Tabel 3.20 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya 2015-2017

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)
A	Defisit riil			
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	107,53%	149,29%	123,89%
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	7,53%	49,29%	23,89%

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

3.2.3. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan mengolah data realisasi anggaran pada tabel berikut:



Tabel 3.21 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015–2017

No	Uraian	2015		2016		2017	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	94.744.640.952,15	100%	103.670.682.417,83	100%	34.226.764.751,15	100%
2	Pelampauan Penerimaan PAD	9.241.879.084,14	9,75%	(8.047.165.971,06)	-7,76%	(43.147.253.188,07)	-126,06%
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(16.022.405.900,00)	-173,37%	(17.901.850.622,00)	222,46%	(56.371.740.714,00)	130,65%
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	10.585.316.434,41	-66,07%	32.479.771.536,24	-181,43%	-	0,00%
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	0,00%	-	0,00%	-	
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	-	,	-		-	
7	Kegiatan Lanjutan	-		-		-	



3) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.22 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2015–2017

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	83.596.912.617,92	26.854.112.701,87	-
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan		6.945.621,00	7.475.738,00
3	Kegiatan lanjutan			
	Sisa lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	83.596.912.617,92	26.847.167.080,87	7.475.738,00

3.2.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana arahan Presiden mengenai pembiayaan, disebutkan bahwa “*Harus diciptakan inovasi baru, sinergitas baru yang melibatkan swasta. Jangan semuanya bergantung pada APBN. Tapi dilibatkan yang*



namanya BUMN, dilibatkan dunia usaha yang sebanyak-banyaknya, terutama swasta". Karena kapasitas fiskal yang terbatas, tidak bisa bergantung pada pemerintah saja.

Salah satu sumber pembiayaan adalah pinjaman daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Masyarakat (Obligasi daerah).

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Keuangan daerah dalam APBD Kota Palangka Raya dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Palangka Raya yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Pendanaan rencana kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2018-2023 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode 2013–2017 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program dan kegiatan pada periode tahun 2018-2023. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi pendapatan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
 - 1) Penerapan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - 2) Bertambahnya objek dan wajib pajak dan restribusi;
 - 3) Adanya perubahan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek PBB-P2 dan BPHTB.
- b. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari pemerintah pusat, terjadi kecenderungan kenaikan dana perimbangan setiap tahun, dengan uraian sebagai berikut:
 - 1) Peningkatan DAU cukup kecil karena adanya pengalihan kewenangan terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta mempertimbangkan pendapatan negara;
 - 2) Pemerataan dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan setiap tahun.
- c. Sesuai peraturan perundangan-undangan, pemerintahan daerah dapat mengakibatkan defisit.



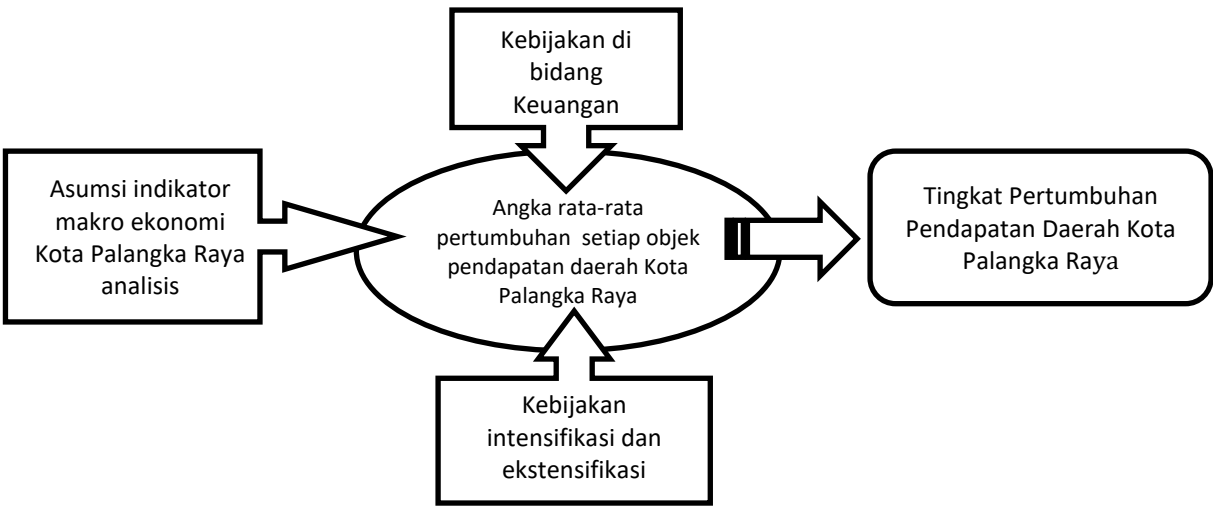


- d. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan mendasar dari Pemerintah Pusat dan, Pemerintah Kota Palangka Raya, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan setiap tahun.

Guna mendukung arah kebijakan pengelolaan keuangan dengan tetap mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal dalam tahun 2018-2023 akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Belanja Rutin diorientasikan pada peningkatan efektifitas Kinerja Aparatur; (2) Lebih berorientasi pada belanja Modal-Produktif; (3) Pemanfaatan pembiayaan pembangunan melalui kemitraan; (4) Memaksimalkan Integrasi potensi unggulan (pertanian arti luas); dan (5) Mensinergikan fokus pembangunan.

Untuk menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersama, meliputi: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Selanjutnya, analisis dilakukan terhadap penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pembiayaan daerah. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Kemudian dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daerah. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 3.2 Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah



Analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki



perilaku atau karakteristik yang berbeda, maka masing masing daerah dapat mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tabel 3.23 berikut:



Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Tabel 3.23 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2018-2023

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2017	Proyeksi					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN		1.103.464.061.616,54	1.168.570.607.391,61	1.150.489.132.400,58	1.220.703.841.518,60	1.098.966.877.887,32	1.147.416.420.621,22	1.196.976.737.235,39
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	0,1499	150.888.509.403,46	194.291.907.111,70	161.666.745.620,67	173.011.638.738,69	174.930.155.963,67	205.994.110.145,69	215.338.376.610,69
1.1.1.	Pajak daerah		87.965.894.034,00	101.414.829.441,00	94.335.450.559,00	101.082.450.559,00	102.864.450.559,00	131.108.447.203,00	139.770.714.656,00
1.1.2.	Retribusi daerah		12.737.916.296,00	17.112.042.974,98	15.612.042.974,98	15.750.000.000,00	15.886.517.224,98	18.706.474.763,00	19.388.473.775,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		3.430.179.688,00	4.471.160.484,00	4.471.160.484,00	5.134.733.934,00	5.134.733.934,00	5.134.733.934,00	5.134.733.934,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah		46.754.519.385,46	71.293.874.211,72	47.248.091.602,69	51.044.454.245,69	51.044.454.245,69	51.044.454.245,69	51.044.454.245,69
	Pendapatan Transfer						882.930.438.923,65	900.316.027.475,53	940.532.077.624,70
	Transfer Pemerintah Pusat						798.290.312.696,97	815.675.901.248,85	855.891.951.398,02
1.2.	Dana Perimbangan	0,1099	889.020.557.740,00	854.046.422.500,00	879.346.408.000,00	905.875.661.000,00	798.290.312.696,97	815.675.901.248,85	855.891.951.398,02
	Dana Transfer Umum						673.337.643.696,97	690.723.232.248,85	708.498.645.347,71
1.2.1.	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak		51.576.710.740,00			45.417.424.000,00	-	-	-
1.2.2.	Dana alokasi umum / Dana Transfer Umum		657.826.439.000,00	698.757.751.500,00	724.114.146.000,00	680.283.100.000,00	-	-	-
	DBH						49.037.970.852,19	50.823.381.061,69	52.608.791.271,18
	DAU						624.299.672.844,78	639.899.851.187,16	655.889.854.076,53
	Dana Transfer Khusus						124.952.669.000,00	124.952.669.000,00	147.393.306.050,31
1.2.3.	Dana alokasi khusus		135.472.291.000,00	155.288.671.000,00	155.232.262.000,00	180.175.137.000,00	-	-	-
	DAK Fisik						35.577.405.000,00	35.577.405.000,00	50.577.405.000,00
	DAK Non Fisik						89.375.264.000,00	89.375.264.000,00	96.815.901.050,31





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Pertumbuhan (%)	2017	Proyeksi					
				2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Transfer Antar Daerah						84.640.126.226,68	84.640.126.226,68	84.640.126.226,68
	Pendapatan Bagi Hasil						84.640.126.226,68	84.640.126.226,68	84.640.126.226,68
	Bantuan Keuangan						-	-	-
1.3.4	Dana insentif daerah		44.145.117.000,00	36.500.000.000,00	-	-	-	-	-
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,07	111.825.164.235,61	120.232.277.779,91	109.475.978.779,91	141.816.541.779,91	41.106.283.000,00	41.106.283.000,00	41.106.283.000,00
1.3.1	Hibah		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
1.3.2	Dana darurat		-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)		109.825.164.235,61	80.082.277.779,91	93.982.277.779,91	93.982.277.779,91	-	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		150.000.000,00	1.650.000.000,00	-	-	-	-	-
1.3.8	Dana Insentif Daerah				13.493.701.000,00	44.834.264.000,00	39.106.283.000,00	39.106.283.000,00	39.106.283.000,00



Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

	BELANJA DAERAH								
A	Belanja Tidak Langsung	0,0346	532.465.661.995,24	590.397.798.997,58	657.902.197.750,75	633.033.186.610,14	-	-	-
	Belanja Operasi		-	-	-	-	956.006.236.163,59	1.003.726.609.457,37	1.054.016.095.511,66
	Belanja Pegawai		492.806.656.984,13	524.379.473.478,48	615.408.714.611,94	579.235.741.471,33	678.725.925.103,57	693.369.029.015,53	708.378.030.613,71
	Belanja Bunga		1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
	Belanja Hibah		26.324.698.267,00	46.518.717.775,00	15.991.717.775,00	19.751.217.775,00	15.868.717.775,00	15.868.717.775,00	25.868.717.775,00
	Belanja bantuan sosial		9.565.262.000,00	11.830.563.000,00	13.255.000.000,00	13.255.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		1.249.044.744,11	1.399.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13			
	Belanja Tidak Terduga			4.750.000.000,00	10.477.720.619,68	18.022.182.619,68			
	Belanja Barang dan Jasa		-	-	-	-	249.611.593.285,02	282.688.862.666,84	307.969.347.122,94
	Belanja Modal						130.211.596.979,60	130.211.596.979,60	130.211.596.979,60
	Belanja Tidak Terduga						10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Belanja Transfer						1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
B	Belanja Langsung	0,1295	607.102.234.982,67	581.880.768.361,05	519.787.447.457,12	613.606.738.719,20	-	-	-
	Belanja Pegawai		77.870.257.607,49	84.838.977.227,31	95.547.361.925,80	99.432.544.225,68	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa		293.465.219.000,26	252.315.152.729,74	224.638.286.137,32	257.156.057.786,92	-	-	-
	Belanja Modal		191.918.311.085,62	244.726.638.404,00	199.601.799.394,00	257.018.136.706,60	-	-	-
C	Pembiayaan	0,2104	93.220.441.238,84	27.394.350.692,08	27.200.512.807,29	25.936.083.810,74	(1.500.000.000,00)	(1.500.000.000,00)	(1.500.000.000,00)
	Penerimaan Pembiayaan		83.596.912.617,92	15.551.155.329,55	33.700.512.807,29	37.436.083.810,74	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan		9.623.528.620,92	11.843.195.362,53	6.500.000.000,00	11.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00





3.3.1 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	1.168.570.607.391,61	1.150.489.132.400,58	1.255.292.487.213,69	1.098.966.877.887,32	1.147.416.420.621,22	1.196.976.737.235,39
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	10.000.000.000,00	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	5.551.155.329,55	33.700.512.807,29	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.184.121.762.721,16	1.184.189.645.207,70	1.260.292.487.213,69	1.103.966.877.887,32	1.152.416.420.621,22	1.201.976.737.235,39
	Dikurangi						
4	Belanja Tidak Langsung	590.397.798.997,58	657.902.197.750,75	668.749.195.621,37	-	-	-
	Belanja Operasi diluar Belanja Barang dan Jasa, Belanja Tak Terduga, Belanja Transfer	-	-	-	676.861.901.289,66	690.326.056.819,12	715.603.384.353,05
5	Pengeluaran Pembiayaan	11.843.195.362,53	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	581.880.768.361,05	651.402.197.750,75	585.043.291.592,32	260.860.638.029,15	294.667.076.851,09	319.218.391.867,08





Tabel 3.25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No.	Uraian	Proyeksi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Kapasitas Keuangan Daerah						
	Prioritas I (Wajib dan Mengikat)						
a.	Belanja Tidak Langsung	590.397.798.997,58	657.902.197.750,75	668.749.195.621,37	-	-	-
b.	Belanja Langsung	581.880.768.361,05	519.787.447.457,12	771.803.773.460,98	-	-	-
c.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11.843.195.362,53	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00
	Belanja Operasi	-	-	-	956.006.236.163,59	1.003.726.609.457,37	1.054.016.095.511,66
	Belanja Modal	-	-	-	130.211.596.979,60	130.211.596.979,60	130.211.596.979,60
	Belanja Tak Terduga	-	-	-	10.000.000.000,00	10.729.169.440,12	10.000.000.000,00
	Belanja Transfer	-	-	-	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13

BAB IV



PALANGKA RAYA
Kota Cantik



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

4.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

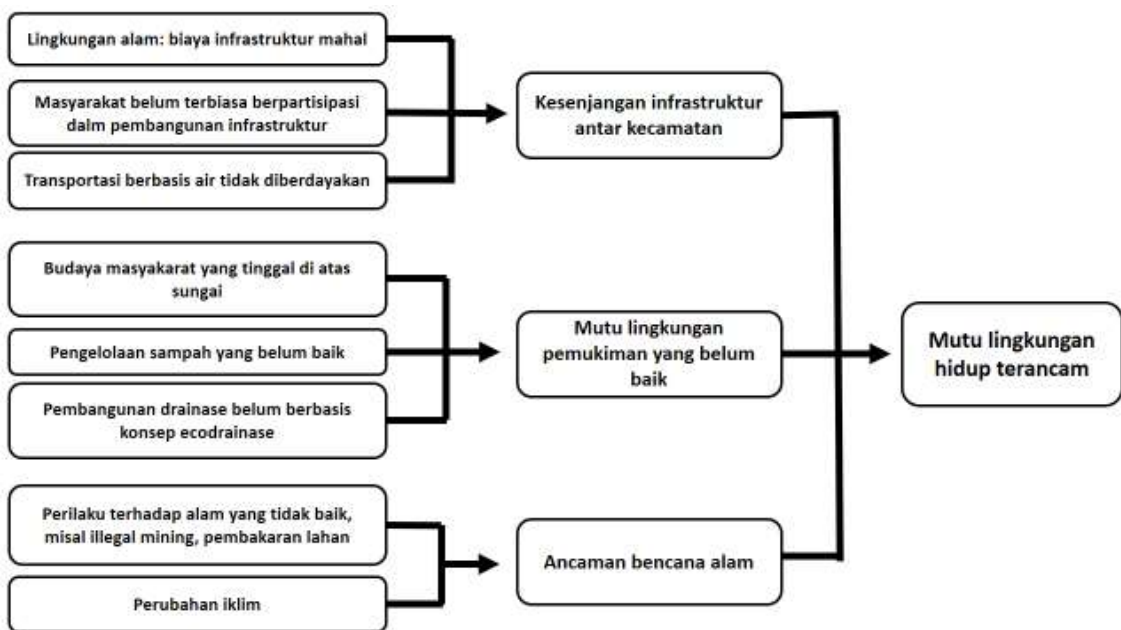
Permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang. Bagian ini menyajikan butir-butir penting isu strategis tentang permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Bagian ini mendiskusikan 2 aspek penting yakni permasalahan dan isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan daerah Kota Palangka Raya disajikan dalam 4 kelompok permasalahan yakni permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan ekonomi. Bagian selanjutnya mendiskusikan isu strategis eksternal baik itu nasional maupun internasional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kota Palangka Raya baik sebagai peluang maupun ancaman.

Infrastruktur dan lingkungan hidup dalam sebuah konsep pembangunan di satu sisi berfungsi sebagai input dan pada sisi lain merupakan output atau bahkan outcome dari proses pembangunan yang dijalankan. Proses pembangunan yang dilakukan secara lestari dan melibatkan seluruh masyarakat akan menghasilkan infrastruktur yang ramah terhadap lingkungan sehingga hasil akhir yang didapat adalah kesejahteraan dengan lingkungan yang tetap lestari.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Palangka Raya, saat ini dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup telah dijalankan sesuai kemampuan pemerintah daerah. Namun demikian dikarenakan rumitnya permasalahan di daerah membuat mutu lingkungan hidup terancam. Ancaman terhadap lingkungan hidup itu bersumber dari beberapa permasalahan sebagaimana disajikan dalam diagram 4.1 berikut ini:



Diagram 4.1 Permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup di Kota Palangka Raya



Sumber: Analisis data yang disajikan pada Bab II

Isu dan permasalahan penting dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Palangka Raya adalah terancamnya kondisi lingkungan hidup. Sungai yang mendangkal dan keruh akibat dari sedimentasi yang dibawa dari hulu, banjir (genangan air) yang selalu terjadi pada musim hujan dan kebakaran lahan pada musim kemarau adalah beberapa indikasi dari semakin terancamnya kondisi lingkungan hidup di Kota Palangka Raya. Terancamnya kondisi lingkungan hidup ini teridentifikasi disebabkan oleh 3 kelompok besar permasalahan yakni ketimpangan ketersediaan infrastruktur antar kecamatan, masih rendahnya kualitas lingkungan pemukiman dan ancaman dari bencana alam.

Ketika ketersediaan infrastruktur terbatas, maka penduduk yang membutuhkan sarana transportasi akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan transportasinya dengan mencari jalan tercepat. Sangat mungkin bahwa jalan cepat itu melalui lingkungan hutan atau rawa yang sesungguhnya adalah kawasan konservasi. Lingkungan pemukiman yang buruk mengancam lingkungan hidup dari berbagai sisi. Sampah yang munumpuk di berbagai sudut kota atau mengapung di kawasan yang berair, tidak hanya membuat pemandangan menjadi buruk, melainkan juga menjadi sumber dari pencemaran lingkungan hidup. Pembuangan limbah baik rumah tangga maupun industri yang dilakukan tanpa pengolahan, menimbulkan pencemaran. Demikian juga dengan genangan air yang terjadi di sudut-sudut pemukiman akan merusakkan fasilitas publik yang telah terbangun. Sementara bencana alam baik kebakaran di musim kemarau maupun banjir di musim hujan dan pencemaran terhadap lingkungan air, sangat jelas menciptakan turunnya kualitas lingkungan hidup.

Ketimpangan infrastruktur itu dapat dilihat dari bidang sarana dan prasarana transportasi, sistem transportasi darat di Kota Palangka Raya belum terintegrasi dengan baik. Permasalahan terkait peningkatan pelayanan





angkutan umum juga menjadi isu yang harus segera ditangani untuk menghindari kemacetan di pusat-pusat kota. Hal tersebut kemudian berdampak pada terhambatnya penyediaan pelayanan publik, khususnya di wilayah seberang sungai, yaitu Kecamatan Rakumpit. Kondisi sarana prasarana komunikasi juga tidak cukup menjangkau banyak wilayah di Kota Palangka Raya. Di Kecamatan Rakumpit, tidak terdapat kantor pos maupun jaringan operator seluler dan telepon. Jaringan operator seluler hanya menjangkau Kecamatan Pahandut, Jekan Raya, Sabangau, dan sebagian wilayah Bukit Batu.

Ketimpangan infrastruktur antar kecamatan jika ditelisik bersumber dari beberapa aspek:

1. Pertama, mahalnya biaya infrastruktur di Kota Palangka Raya. Sebagaimana wilayah Kalimantan lainnya, Palangka Raya adalah wilayah yang berbasis air. Pembangunan infrastruktur apapun di kawasan berbasis air tentu membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan pada wilayah berbasis tanah. Sementara pada sisi lain, kemampuan Negara untuk membiayai infrastruktur tentu terbatas. Kedua, partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan sesungguhnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan hal ini, masyarakat Kalimantan secara umum belum memiliki kebiasaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat masih menggantungkan kebutuhan infrastrukturnya pada pemerintah semata. Di pulau Jawa misalnya, masyarakat sudah terbiasa untuk membangun infrastruktur secara swadaya, artinya masyarakat memiliki ide untuk membangun infrastruktur dengan sedikit anggaran, kemudian pemerintah daerah menambahkan anggaran agar ide pembangunan infrastruktur itu terwujud. Kiranya sangat strategis untuk membangun kesadaran bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Ketiga, transportasi berbasis air. Sebagai daerah dengan basis air, Kota Palangka Raya sesungguhnya memiliki dasar untuk transportasi air, namun demikian transportasi berbasis air ini surut seiring dengan pembangunan infrastruktur yang difokuskan ke infrastruktur darat. Dermaga memang disediakan di sepanjang sungai, namun demikian tidak tersedia alat transportasinya. Sementara itu sesungguhnya sumber daya air kota Cantik ini sangat potensial bahkan untuk transportasi udara. Sungai yang sangat luas adalah potensi untuk pendaratan pesawat perintis amfibi.
2. Permasalahan dan isu strategis kedua adalah masih relatif kurang baiknya lingkungan kawasan pemukiman. Kondisi perumahan di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Rakumpit dan Bukit Batu juga kurang baik. Di wilayah tersebut, masyarakat belum memiliki hunian tetap yang layak. Rumah penduduk dengan kategori permanen dengan kondisi baik dan sedang hanya terdapat di pusat kota, yaitu di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya. Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi sarana prasarana penghubung antar kecamatan yang minim. Di beberapa wilayah *remote*, seperti Kecamatan Rakumpit hanya





dapat ditempuh dengan perjalanan air dengan sarana transportasi yang sangat minim, sehingga jauh dari jangkauan pemerintah. Terdapat tiga penyebab utama yang menjadikan lingkungan pemukiman itu masih buruk. Pertama, budaya masyarakat tinggal di atas air (sungai). Sebagai wilayah berbasis air maka tinggal dan hidup di atas air adalah budaya yang telah ada sejak masyarakat ada. Air adalah basis kehidupan masyarakat, mereka mencari makan dari air, transportasi menggunakan air, segala langkah hidupnya bergantung pada air. Pada masyarakat yang belum berkembang dengan jumlah penduduk yang masih sedikit, budaya ini tidak menimbulkan masalah. Namun demikian budaya ini menjadi bermasalah ketika penduduk semakin bertambah dan perekonomian berkembang. Bertambahnya penduduk membutuhkan area untuk hidup, ketika lingkungan air ini tidak dikelola secara baik, timbul kekumuhan karena pada lokasi yang sempit, tinggal penduduk dalam jumlah banyak. Masalah berikutnya yang mengikuti ketika perekonomian berkembang adalah limbah dari rumah tangga yang tinggal di atas air. Ketika perekonomian berkembang sampah yang dihasilkan berubah dari sampah organik yang larut di air menjadi sampah *unorganic* seperti plastik yang tidak dapat larut dalam air, demikian juga dengan limbah lainnya yang jumlahnya telah melebihi kapasitas lingkungan untuk menyerapnya. Akibatnya kawasan sungai menjadi semakin kumuh. Upaya untuk memindahkan mereka ke kawasan lain tidak selalu berhasil, karena pada dasarnya sumber hidup mereka ada di sekitar sungai, untuk itu maka yang seharusnya dipikirkan adalah membatasi pertumbuhan penduduk yang bermukim di atas air dan mengelola kawasan tersebut agar kawasan bantaran sungai aman dari bahaya baik bahaya teknis banjir maupun kekumuhan yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat. Kedua, pengelolaan sampah. Kota Palangka Raya telah memiliki manajemen untuk mengelola sampah kota, hasil dari manajemen sampah yang dilakukan juga telah terlihat dari relatif bersihnya sampah dari beberapa sudut kota yang ada, namun pada beberapa sudut kota masih ditemukan sampah berserakan dan depo sampah terlihat kumuh. Persoalan pengelolaan sampah ini tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi masyarakat pun harus aktif berpartisipasi. Hingga saat ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat kurang. Bank bank sampah yang dibentuk tidak seluruhnya aktif bekerja, masyarakat tidak patuh dalam jam pembuangan sampah adalah beberapa persoalan pengelolaan sampah dari sisi masyarakat. Pada sisi pemerintah, kurangnya upaya untuk mendekati dan mendidik masyarakat agar bertanggungjawab terhadap sampahnya dan pengelolaan teknis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah beberapa permasalahan yang dirasakan. Adalah sangat strategis bagi Kota Palangka Raya untuk belajar dan mengimplementasikan pola pengelolaan sampah yang tepat sesuai dengan sosial budaya masyarakat kota. Pengelolaan sampah yang masih bermasalah tentu saja membawa masalah pada mutu lingkungan pemukiman. Ketiga, pembangunan drainase. Drainase adalah salah satu





cara untuk mengelola air, agar saat musim hujan tidak banjir dan saat musim kemarau tidak kekeringan. Secara umum prinsip pembangunan drainase adalah mengalirkan air yang berlebih dari kota menuju pembuangan (sungai). Cara dan konsep ini tidak tepat untuk Kota Palangka Raya yang datar dan memang berbasis air. Untuk itu konsep pembangunan drainase harus didasarkan pada konsep *ecodrainase* yakni upaya mengelola air kelebihan dengan cara sebesar-besarnya diresapkan ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah, guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Terdapat beberapa metode drainase ramah lingkungan ini diantaranya adalah metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode *river side polder*, dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah (*ground water protection area*)

3. Permasalahan ketiga yang menyebabkan turunnya mutu lingkungan hidup di Kota Palangka Raya adalah ancaman dari bencana alam. Terdapat setidaknya tiga macam bencana yang selalu mengancam kota ini, yaitu banjir saat musim hujan, kebakaran saat musim kemarau dan ancaman degradasi lingkungan. Banjir dan kebakaran merupakan bencana yang disebabkan oleh iklim yang terjadi. Atas hal ini tentu masyarakat tidak dapat banyak melakukan upaya pengendalian kecuali melakukan adaptasi dan mitigasi. Pada konsep adaptasi ketika daerah memang berbasis air maka manusia harus beradaptasi untuk mengelola dan memanfaatkan air sesuai karakter air tersebut. Ketika manusia berusaha untuk menghilangkan air dari lingkungannya, maka ketika musim kemarau sudah pasti lingkungan menjadi kering dan akibatnya kebakaran menjadi ancaman. Ancaman ke dua yang lebih serius datang dari perilaku manusia dalam memanfaatkan alam. Sumber daya alam yang merupakan *common property* seringkali mengalami degradasi sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karakter dari *common property* adalah tidak ada hak kepemilikan. Menghadapi barang yang seperti ini maka manusia lebih senang berperilaku sebagai *free rider*. Praktek-praktek pertambangan ilegal yang terjadi di sepanjang aliran sungai, praktek penangkapan ikan yang tidak lestari (menggunakan bom atau racun), membuang sampah atau limbah ke sungai adalah beberapa praktek yang terjadi yang berdampak pada kerusakan lingkungan yang nyata. Menjadi sangat strategis bagi kota ini untuk meningkatkan kepedulian semua pihak untuk beraktivitas dan membangun secara berkelanjutan.



Tabel 4.1 Banyaknya Bencana Alam Menurut Jenis Peristiwa di Kota Palangka Raya Tahun 2007 – 2018

Tahun	Banjir	Kebakaran	Tanah Longsor	Angin Puyuh	Disambar Petir	Jumlah
2018	16	-	-	-	-	-
2017	-	-	-	-	-	-
2016	-	16	-	-	-	16
2015	2	124	-	5	-	131
2014	10	23	-	2	-	25
2013	1	21	-	2	-	24
2012	2	31	-	2	-	35
2011	3	13	8	-	-	22
2010	29	16	-	-	1	46
2009	-	42	-	4	-	46
2008	3	33	-	-	-	36
2007	12	15	-	2	-	29

Sumber: BPS. Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2018

4. Banjir yang kerap terjadi di Kota Palangka Raya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti (1) Meluapnya arus Sungai Kahayan dan Sungai Sabangau; (2) Kondisi topografi Kota Palangka Raya yang relatif datar; (3) Jaringan drainase yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan konsep penanganan banjir. Meskipun banjir menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan, namun pembangunan jaringan drainase belum cukup menjadi perhatian. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Palangka Raya belum memiliki kajian dan *masterplan* sistem drainase serta *database* pendukung di bidang pengairan sebagai bahan mengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pengembangan penanggulangan banjir; (4) Belum terdapat upaya pengelolaan kelebihan air, seperti membuat kolam retensi, biopori, maupun sumur- sumur resapan. Adapun bencana kebakaran di Kota Palangka Raya biasanya terjadi di kawasan perkotaan dan kawasan hutan.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan, isu strategis dalam pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- Menciptakan pemerataan infrastruktur di setiap kecamatan. Infrastruktur yang dibangun harus disesuaikan dengan kondisi kecamatan yang bersangkutan. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi isu penting, selain untuk menumbuhkan infrastruktur baru juga agar masyarakat ikut menjaga dan memelihara infrastruktur yang telah dibangun.
- Menciptakan lingkungan pemukiman yang bersih dan sehat. Pelibatan masyarakat dalam upaya pemerintah kota dalam pengelolaan lingkungan sangatlah penting. Pembangunan lingkungan pemukiman hanya dapat dilakukan secara berkelanjutan jika terjadi pelibatan masyarakat. Konsep pembangunan drainase yang ramah lingkungan harus sudah mulai dilakukan.

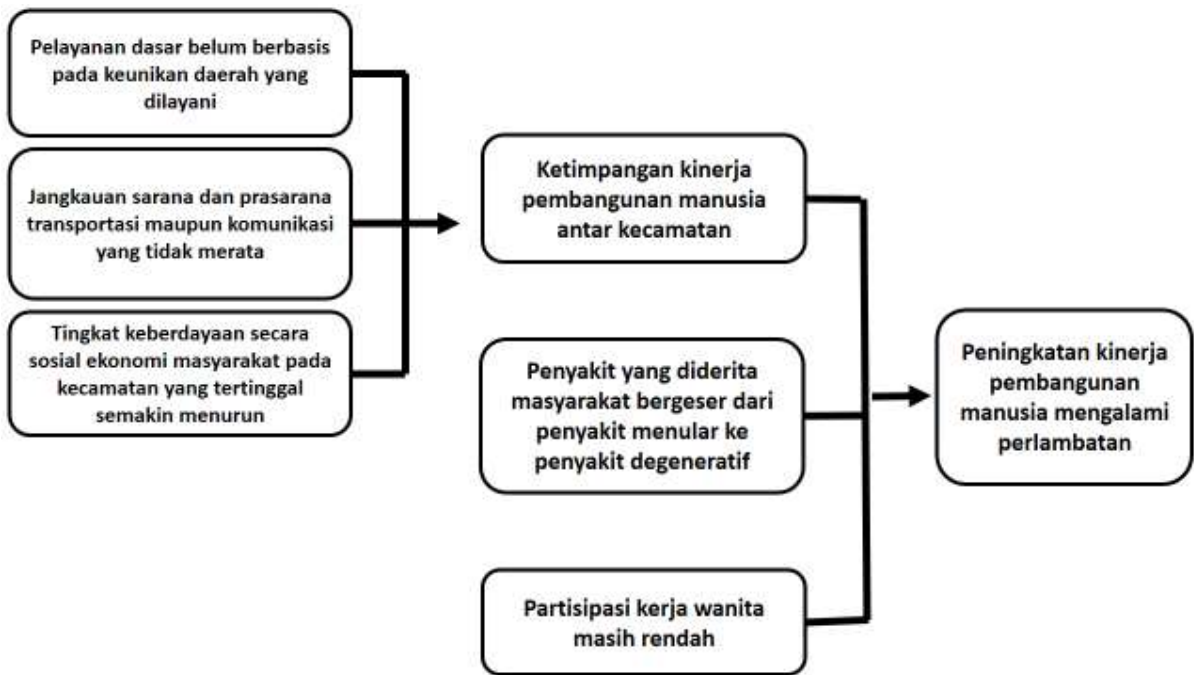


- c) Membangun kepedulian berbagai pihak untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada untuk menghindari terjadinya bencana yang berkepanjangan. Konsep pembangunan yang disesuaikan dengan basis kondisi alam sangat diperlukan, sebab setiap daerah memiliki keunikan sumber dayanya.
- d) Tidak kalah penting, pemerintah daerah melanjutkan proses pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Kota Palangka Raya. Jika tidak dilanjutkan maka seluruh biaya yang telah dimasukkan akan hilang dan menjadi sebuah kesia-siaan.

4.1.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Secara umum pencapaian kinerja pembangunan manusia Kota Palangka Raya jauh lebih baik dari yang dicapai oleh Kalimantan Tengah maupun Nasional. Namun demikian dari analisis yang dilakukan terdapat permasalahan dalam perkembangannya. Capaian kinerja yang telah cukup tinggi itu mengalami perkembangan yang melambat. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang lambat, peningkatan rata rata lama sekolah, juga lambatnya peningkatan angka harapan hidup adalah indikasi dari lambatnya perkembangan pembangunan sumber daya manusia itu. Dari analisis yang dilakukan dapat diidentifikasi beberapa penyebab dari lambatnya pertumbuhan kinerja kesejahteraan yang terjadi. Diagram 4.1.21 menyajikan resume permasalahan pembangunan manusia di kota Palangka Raya.

Diagram 4.2 Analisis Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Palangka Raya



Sumber: Analisis data yang disajikan dalam Bab II



Capaian kinerja yang lambat itu disebabkan oleh karena tidak meratanya capaian kinerja pembangunan manusia antar kecamatan dan bergesernya jenis penyakit masyarakat dari penyakit menular ke penyakit degenerative, serta masih rendahnya partisipasi kerja wanita. Kecamatan Pahandut yang merupakan wilayah pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi memiliki kinerja pembangunan manusia yang sangat tinggi, sebaliknya kecamatan Rakumpit yang memiliki penduduk paling sedikit kinerja pembangunannya justru paling buruk. Ketika pembangunan tidak merata, maka kondisi daerah yang sangat buruk akan menarik angka rata-rata kearah yang rendah. Itulah sebabnya ketika Rakumpit memiliki kinerja yang sangat buruk dan tidak mampu diimbangi oleh daerah lain maka secara keseluruhan rata-rata kinerjanya akan tertekan.

Buruknya kinerja pembangunan manusia di wilayah Rakumpit teridentifikasi disebabkan oleh beberapa faktor yakni proses pelayanan dasar, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan aspek sosial masyarakat. Daerah yang unik seharusnya juga diperlakukan secara unik sesuai dengan karakter daerahnya. Selama ini proses pembangunan di Indonesia kurang memperhatikan aspek yang unik dari daerah, pembangunan dilakukan dengan pendekatan yang seragam. Sebagai contoh jika menggunakan konsep rasio penduduk per penyedia layanan (perawat atau guru) maka wilayah Rakumpit memiliki rasio yang paling bagus, tetapi rasio menjadi tanpa arti ketika penduduk yang dilayani tersebar dan jauh dari jangkauan. Dampak yang lain keberadaan tenaga pelayanan justru tidak efisien. Dalam kasus kesehatan tercatat daya guna petugas pelayanan kesehatan di Pahandut mencapai angka 1.14, sangat tinggi dibandingkan angka yang dicapai Rakumpit yang hanya 0.30 (Dinas Kesehatan, 2016). Anggaran per puskesmas yang lebih tinggi juga tidak akan efektif melayani kesehatan penduduk ketika penduduk yang dilayani tersebar dan tidak terjangkau layanan puskesmas. Untuk itu yang sangat dibutuhkan adalah terobosan untuk mencari metode alternatif pelayanan kesehatan maupun pendidikan dan layanan dasar yang lain agar efektif menjangkau seluruh penduduk.

Penyebab lain dari tidak meratanya pembangunan sumber daya manusia antar kecamatan adalah ketidak merataan ketersediaan infrastruktur. Sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, infrastruktur dasar di daerah Rakumpit sangatlah terbatas. Keterbatasan infrastruktur itu tidak hanya dalam hal jalan, jembatan dan sarana komunikasi, melainkan juga sarana pendidikan dan kesehatan. Jika dilihat dari rasionya ketersediaan sarana pendidikan dan kesehatan telah mencukupi, namun demikian dilihat dari jangkauannya sangatlah terbatas. Keterbatasan sarana dan prasarana dasar membuat seluruh pelayanan yang dibutuhkan juga terbatas, itulah sebabnya maka kinerja yang dicapai Rakumpit pun menjadi rendah.



Pada sisi masyarakat juga terdapat situasi yang menyebabkan capaian kinerja wilayah yang tertinggal ini semakin tertinggal. Secara budaya setiap masyarakat memiliki kearifan lokal untuk bekerjasama membangun kesejahteraan. Namun demikian kearifan ini luntur seiring dengan masuknya pengaruh dari luar. Materialisme yang masuk melalui mekanisme pasar, proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek telah merusak rasa percaya diri masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sehingga terkesan bahwa masyarakat sangat tidak berdaya. Dengan demikian yang terlihat adalah masyarakat yang tingkat kesadarannya untuk hidup bersih dan sehat masih belum optimal. Hal ini berdampak terhadap berkembangnya penyakit menular yang terkait sanitasi lingkungan (DBD, Diare, TB Paru, dll). Pada sisi lain, masyarakat yang semakin sejahtera juga belum mampu menerapkan pola hidup sehat, sehingga berdampak semakin meningkatnya kasus penyakit degeneratif (Hypertensi, Diabetes Melitus, Jantung, dll). Penyakit penyakit tersebut tentunya berkontribusi untuk menekan capaian Angka Harapan Hidup.

Aspek kedua yang menyebabkan lambatnya perkembangan kinerja pembangunan manusia adalah bergesernya jenis penyakit yang diderita masyarakat dari penyakit menular menjadi penyakit degenerative. Penyakit degenerative merupakan penyakit yang membawa penyebab kematian yang cukup tinggi. Selain itu kinerja Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang fluktuatif juga menjadi penyebab tertekannya angka harapan hidup yang pada gilirannya menekan angka IPM.

Tingkat partisipasi kerja wanita yang rendah disatu sisi disebabkan oleh karena budaya patriarkhi yang menempatkan wanita pada ruang kerja yang tidak melewati pasar. Jadi rendahnya partisipasi kerja wanita itu bukan dikarenakan pendidikannya yang rendah. Ketika wanita bekerja dalam ruang yang tidak bersentuhan dengan pasar, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk membantu keluarganya secara ekonomi. Rendahnya kemampuan wanita ini berdampak pada kemampuan seluruh keluarga untuk memenuhi daya belinya. Sebagaimana diketahui daya beli merupakan salah satu komponen dari IPM.

Analisis atas permasalahan yang telah diuraikan membawa pada isu strategis internal kota Palangka Raya yang harus diselesaikan untuk tahun tahun mendatang. Isu itu dapat dielaborasi sebagai berikut:

1. Kinerja pembangunan Sumber daya manusia yang dicapai kota Palangka Raya memang telah mencapai angka yang tinggi, namun demikian tingkat perkembangannya terus melambat. Artinya ditahun tahun mendatang, kota ini harus terus berjuang keras untuk mempertahankan dan meningkatkan angka IPM.
2. IPM yang cenderung tidak beranjak salah satunya berasal dari kinerja pendidikan yang juga mengalami permasalahan, terutama berkaitan dengan terjadinya ketidak merataan kinerja pendidikan antar kecamatan. Program yang dibuat seragam antar kecamatan membuat kinerja kecamatan yang cukup terpencil menjadi sangat lambat. Kiranya perlu kembali dipertimbangkan program program yang lebih spesifik





- untuk kecamatan terpencil agar pelayanan tetap dapat diberikan dan kinerja outcome dapat dicapai.
3. Sejalan dengan kinerja IPM maka kinerja kesehatan terlihat cenderung mengalami perlambatan. Perlambatan ini antara lain disebabkan oleh bergesernya jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat. Sejalan dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, penyakit yang diderita masyarakatpun bergeser dari penyakit menular menjadi penyakit degenerative. Menjadi sangat strategis bagi kota ini untuk mulai memperhatikan upaya preventif pengelolaan kesehatan selain upaya upaya yang telah dilakukan.
 4. Tingkat pengangguran terbuka cenderung fluktuatif. Fluktuasi ini menerminkan bahwa permintaan dan penawaran tenaga kerja yang tersedia tidak seimbang. Salah satu sumber ketidak seimbangan itu adalah kualitas tenaga kerja yang tidak mampu memenuhi permintaan dunia kerja. Disamping itu menurunnya kinerja sektor pertanian juga menjadi penyebab penting bagi terjadinya pengangguran. Untuk itu dim masa mendatang yang dibutuhkan adalah meningkatkan ketrampilan calon tenaga kerja selain terus meningkatkan kinerja sektor pertanian yang sesungguhnya merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja tertinggi.
 5. Kinerja penanggulangan kemiskinan masih ditandai dengan fluktuatifnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Fluktuatifnya indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan menjadi salah satu indikasi dari kurang efektifnya program program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk itu maka diperlukan evaluasi yang serius terhadap program program penanggulangan kemiskinan tersebut.

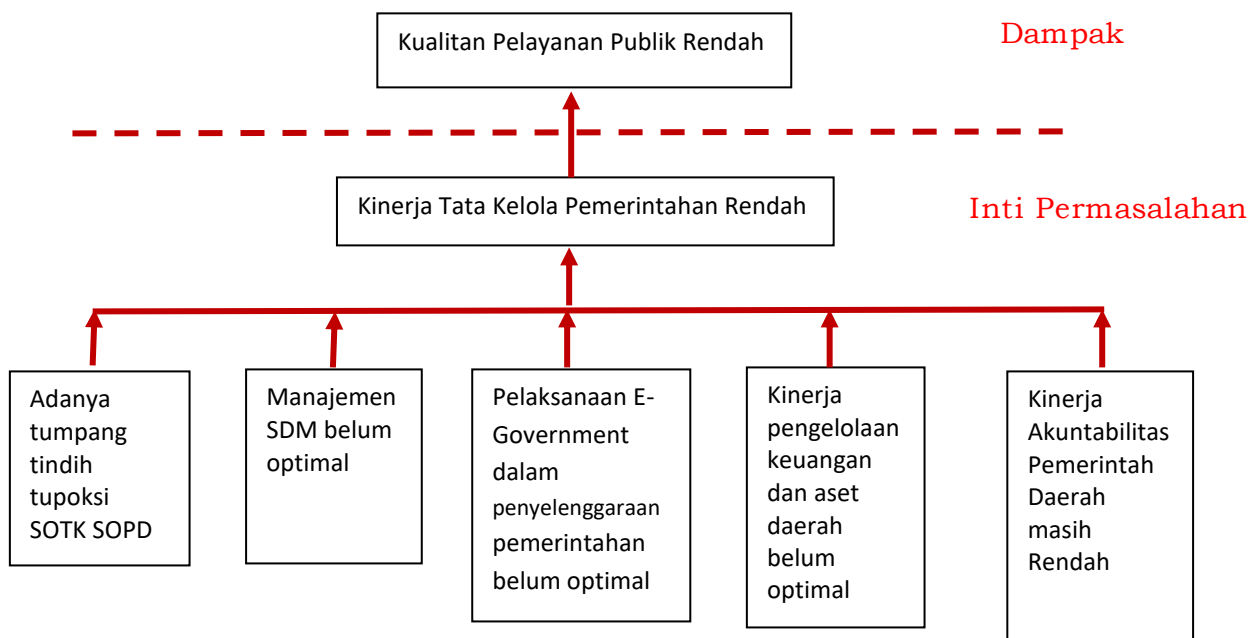
4.1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan uraian pada gambaran kinerja tata kelola pemerintahan dalam Bab II, terlihat bahwa tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari indeks reformasi birokrasi yang masih rendah dengan nilai D dan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang masih pada posisi C. Walaupun tahun 2016 Kota Palangka Raya telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari badan pemeriksa keuangan, namun masih ada beberapa kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Tingkat kemandirian daerah sangat rendah dan tingkat ketergantungan pembiayaan pusat sangat tinggi mencapai 99.75%. Implikasi dari kinerja tata kelola pemerintahan diatas adalah rendahnya kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya. Bahkan Ombudsman pada tahun 2015 menyatakan bahwa Kota Palangka Raya merupakan daerah zona merah bagi pelayanan publik dan memiliki jumlah aduan tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya terangkum pada bagan berikut ini.





Diagram 4.3 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan di Kota Palangka Raya



Sumber: Analisis data yang disajikan dalam Bab II

Kemampuan penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien, efektif dan akuntabel dapat terwujud apabila didukung dengan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik. Ada beberapa hal yang menyebabkan kinerja tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya masih rendah.

Pertama, adanya tumpang tindih tugas dan pokok fungsi srtuktur organisasi dan tata kerja (SOTK) antar Perangkat Daerah (PD). Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, terjadi tumpang tindih tugas dan pokok dan fungsi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman terkait urusan tata ruang. Begitu pula Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait pengelolaan sampah. Kondisi ini menyebabkan beberapa pekerjaan pelayanan publik tidak berjalan dengan lancar. Dokumen RTRW sebagai acuan untuk penataan ruang hingga kini juga belum jadi. Pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya juga belum berjalan dengan baik. Struktur Kelembagaan merupakan kendaraan bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu arsitektur kelembagaan harus sesuai dengan arsitektur kinerja pembangunan. Apabila penataan stuktur organisasi dan tata kerja masih banyak permasalahan, maka akan mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Keluarnya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya belum dapat memberikan bentuk struktur kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*rigt sizing*). *Rigt-Size* bukan berarti perampangan maupun pemekaran namun sesuai dengan yang dibutuhkan. Struktur organisasi yang ada sekarang banyak tumpang tindih fungsi, sehingga kinerja pemerintah menjadi terhambat.



Kedua, Manajemen Sumber Daya Manusia di Kota Palangka Raya belum optimal. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sebagai penyokong utama penyelenggaraan Pemerintahan harus dikelola dengan baik. Secara kuantitas jumlah apartur sipil negara yang ada sekarang masih kurang untuk mengatasi iklim dan beban kerja yang cukup padat di Pemerintah Kota Palangka Raya. Adanya tambahan tenaga kontrak sebesar 24% dari total pegawai yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sudah cukup untuk membantu menyelesaikan beban kerja yang ada. Namun secara kualitas masih harus perlu dikembangkan. Pemerintah Kota Palangka Raya belum banyak memiliki tenaga jabatan fungsional tertentu. Padahal dalam ranah pelayanan publik jabatan fungsional tertentu ini sangat diperlukan seperti penilai barang, pranata komputer, fungsional perencanaan, pustakawan, arsiparis, peneliti dan tenaga fungsional tertentu lainnya. Disamping itu penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki juga masih terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Hal ini akan mengakibatkan banyak pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Misalnya SDM yang ditempatkan di kantor kecamatan seharusnya yang memiliki kompetensi untuk melayani publik secara baik bukan SDM yang sudah mau pensiun atau tidak memiliki kompetensi apapun. Karena kecamatan merupakan lini terdepan dalam memberikan pelayanan langsung ke masyarakat. Begitu pula terlalu cepatnya rotasi pegawai atau mutasi akan mempengaruhi proses penyesuaian pekerjaan. Hal ini akan mempengaruhi kinerja tata kelola pemerintahan. Sementara itu berdasarkan laporan kinerja Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2016, pegawai ASN yang diassesment baru mencapai 184 orang atau sekitar 74% dari target. Padahal assesment pegawai ASN itu merupakan hal yang sangat penting dalam penataan SDM untuk melihat kompetensi masing-masing ASN. Sehingga penempatan ASN akan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Ketiga, pelaksanaan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, pemerintah kota palangka raya telah banyak menerapkan aplikasi *e-government*. Namun masing-masing aplikasi tersebut masih berdiri sendiri belum terintegrasi menjadi satu. Sehingga SOPD masih menginput data di masing-masing aplikasi tersebut. Bahkan ada beberapa aplikasi yang telah ketinggalan artinya tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Hal ini dikarenakan pembangunan aplikasi diserahkan oleh pihak luar sepenuhnya, sehingga kesulitan jika akan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Kota Palangka raya diantaranya keterbatasan sumber daya di bidang layanan teknologi informasi dan minimnya infrastruktur. Bahkan di daerah terpencil seperti kecamatan rakumpit, listrik baru masuk tahun 2017 apalagi jaringan telekomunikasi belum ada, sehingga masih kesulitan untuk melaksanakan berbagai aplikasi *e-government* yang telah ada. Di sisi lain, berbagai aplikasi yang ada masih dalam ranah perencanaan, pengendalian dan evaluasi. Ranah pelayanan publik baru pada perijinan dan pengadaan barang dan jasa. Itu





pun belum semua SKPD terintegrasi. Bahkan untuk proses perizinan online belum satu pintu. Karena tidak semua perizinan ditangani oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Sedangkan untuk pelayanan publik lainnya belum ada. Di samping itu belum ada sistem yang dapat digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat dalam e-government ini. Website dan media center yang ada hanya menyediakan informasi kegiatan pemerintah daerah dan dokumen formal lainnya, namun tidak ada domain yang dapat digunakan masyarakat untuk memberikan aspirasinya.

Keempat, kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal. Berdasarkan hasil kinerja pengelolaan keuangan daerah terlihat bahwa kinerja pendapatan masih rendah. Tingkat ketergantungan pembiayaan pusat masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena penggalan PAD khususnya pajak belum optimal. Banyak potensi Pajak dan retribusi yang belum tergali dikarenakan keterbatasan sumber daya. Begitu pula yang terjadi pada manajemen aset daerah, masih banyak kendala yang dihadapi dalam inventarisasi aset. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya yang ada. Kota Palangka Raya belum memiliki sumber daya yang berkompeten dalam bidang penilai barang. Apabila potensi PAD dapat ditingkatkan khususnya dari pajak dan retribusi akan dapat menciptakan struktur keuangan APBD Kota Palangka Raya yang lebih kuat, sehingga dapat mendorong kinerja tata kelola pemerintahan yang lebih baik terutama pelayanan publik kepada masyarakat.

Kelima, kinerja akuntabilitas pemerintah masih rendah. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penyusunan indikator kinerja masih banyak yang berdimensi output. Disamping itu belum ada ukuran kinerja yang jelas di masing-masing bagian, sehingga tidak dapat melihat capaian kerjanya. Sementara itu, dalam proses perencanaan masih ada beberapa dokumen yang belum konsisten. Misalnya dokumen RPJMD dengan Renstra SOPD dan sebagainya. Disisi lain, belum banyak OPD yang melakukan evaluasi berkala terhadap program yang telah dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan hanya terhadap serapan anggaran namun bukan pada capaian kerjanya. Dari segi tatalaksana, belum banyak OPD yang memiliki standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan fungsinya. Bahkan instansi yang telah memiliki SOP juga belum menjalankan sesuai dengan SOP tersebut. Hal ini mengakibatkan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien.

Dari analisis permasalahan diatas, isu strategis yang dihadapi Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah kinerja tata kelola pemerintahan yang masih rendah. Isu ini dapat diperinci dalam beberapa isu strategis yaitu:

1. Adanya tumpang tindih tupoksi SOTK OPD
2. Manajemen SDM Belum Optimal
3. Pelaksanaan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Belum Optimal
4. Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Belum Optimal
5. Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Masih Rendah





4.1.4 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Ekonomi

Sebagaimana diuraikan dalam Bab II, permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh kota Palangka Raya adalah kesenjangan antar golongan yang semakin meningkat (lihat angka Gini Indeks). Kesenjangan terjadi antara sektor pertanian dan sektor lainnya. Data pada tabel 4.2 mengkonfirmasi tingkat kesenjangan antar sektor tersebut. Sektor sektor industri pengolahan, transportasi pergudangan dan komunikasi serta sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang memiliki tingkat kesejahteraan paling tinggi, diikuti oleh sektor listrik gas dan air. Sementara sektor yang paling terpuruk adalah sektor pertanian dengan pendapatan per capita yang paling rendah. Penduduk yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian memang hanya sekitar 10%, namun pendapatan mereka hanya sekitar 1/12 dari pendapatan tertinggi yakni sektor industri pengolahan.

Tabel 4.2 Pendapatan Per Kapita antar Sektor dalam Perekonomian Kota Palangka Raya Tahun 2017

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian,Kehutanan,dan Perikanan	283,2	320,3	350,2	371,1	407,9
Pertambangan dan Penggalian	120,6	139,7	164,5	192,8	218,1
Industri Pengolahan	1.156,2	1.253,9	1.419,5	1.603,8	1.740,8
Pengadaan Listrik dan Gas	19,3	34,2	40,1	47,9	55,1
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,8	20,1	22,8	25,0	28,3
Konstruksi	1.029,9	1.222,2	1.455,8	1.651,9	1.835,2
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.713,4	1.895,3	2.176,9	2.517,3	2.957,0
Transportasi dan Pergudangan	798,7	939,6	1.091,4	1.267,4	1.505,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	445,2	521,5	626,0	723,9	808,2
Informasi dan Komunikasi	163,3	172,2	184,9	208,0	232,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	755,8	798,8	905,7	1.072,5	1.157,8
Real Estate	280,6	339,2	391,3	436,8	509,6
Jasa Perusahaan	6,5	7,6	8,7	10,1	11,6
Adm. Pemerintahan, Pertanahan & Jaminan Sosial Wajib	2.187,9	2.630,4	2.788,9	3.053,7	3.489,2
Jasa Pendidikan	523,0	606,9	708,9	806,7	933,5





Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016*	2017**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	214,0	255,2	302,5	349,3	405,5
Jasa Lainnya	112,3	132,5	155,0	175,7	201,0
T o t a l	9.829,6	11.289,3	12.792,9	14.514,0	16,496,7

Sumber: BPS Kota Palangka Raya, 2018

Ket.: *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dilihat dari penduduk yang bekerja maupun pangsa dalam pembentukan PDRB, sampai dengan tahun 2016, perekonomian Kota Palangka Raya masih banyak bertumpu pada pengeluaran pemerintah. Pangsa jasa jasa lainnya yang terdiri dari jasa administrasi pemerintahan, jasa pendidikan dan jasa kesehatan, yang menjadi rumah bagi sektor pemerintahan mencapai angka lebih dari 30%. Angka ini dikonfirmasi oleh angka PDRB berdasar pengeluaran yang menyatakan bahwa hingga tahun 2016 pengeluaran pemerintah daerah masih menduduki angka 37.22% (PDRB Pengeluaran, 2017). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang rata rata mencapai angka 8% sampai 10% saja. Namun demikian tingkat pertumbuhan pangsa pengeluaran pemerintah ini dari tahun ke tahun terus berkurang. Berdasar data BPS pula diperoleh informasi bahwa pertumbuhan sektor pemerintahan ini di tahun 2012 mencapai angka 13.23%, turun menjadi 9.05% di tahun 2015 dan pada tahun 2016 bahkan mengalami pertumbuhan negatif sebesar -3.73. Artinya peran pemerintah di Kota Palangka Raya semakin berkurang digantikan oleh peran swasta, sebuah kecenderungan yang membaik.

Sektor kedua yang menjadi tulang punggung perekonomian kota Palangka Raya adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sebagai sebuah kota yang terletak pada persimpangan kabupaten dan kota lain, maka tidak mengherankan jika kota ini menjadi kota perdagangan dan jasa. Sementara tingginya peran sektor konstruksi menunjukkan pembangunan yang terus terjadi dan berlangsung di kota ini. Pada sektor industri pengolahan yang memiliki peran cukup tinggi tetapi penduduk yang terlibat di dalamnya relatif sedikit, dengan pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Lambatnya pertumbuhan sektor industri dapat menjadi indikasi kurang berkelanjutannya perekonomian kota ini pada masa yang akan datang. Sektor industri bagi sebuah wilayah secara umum adalah sektor penarik bagi sektor pertanian dan juga pendorong bagi sektor perdagangan dan jasa. Maka ketika sektor industri tumbuh melambat terancam pula sektor pertanian dan jasanya, kecuali bagi wilayah yang memang hanya memiliki potensi perdagangan.

Ketika sektor pertanian terpuruk, berhadapan dengan sektor industri, jasa dan perdagangan yang cukup baik, secara implisit data ini juga mengirimkan pesan terjadinya kesenjangan antar wilayah, yakni antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Sektor pertanian pada umumnya adalah sektor yang tumbuh di pedesaan dan sektor industri maupun perdagangan adalah sektor yang tumbuh di perkotaan. Itulah sebabnya





ketika terjadi kesenjangan antara sektor pertanian dan sektor lainnya, maka itu artinya terjadi kesenjangan pula antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Kesenjangan antar sektor dan antar wilayah yang cukup tinggi itu bersumber dari persoalan persoalan yang saling terkait sebagaimana digambarkan oleh diagram 4.4 berikut:

Diagram 4.4 Analisis Permasalahan Ekonomi Makro Kota Palangka Raya



Sumber: Analisis data yang disajikan dalam Bab II

Sektor pertanian memang bukan sektor yang dominan di Kota Palangka Raya, namun sektor ini masih menghidupi sekitar 10% penduduk, terutama yang hidup di wilayah pedesaan. Namun demikian sektor pertanian yang bersumber dari tanaman sayur-sayuran, buah, perkebunan, peternakan dan perikanan itu terus mengalami kemerosotan.

Sektor industri yang mestinya menjadi penarik bagi sektor pertanian, mengalami kemunduran, terutama industri yang mengolah produk produk pertanian. Sektor perdagangan, kurang memiliki keterkaitan dengan pertanian maupun industri yang berkembang. Perdagangan kota ini didominasi oleh perdagangan antar daerah, namun produk produk lokal kurang mendapatkan tempat dalam perdagangan tersebut.

Pertumbuhan sebuah sektor ekonomi, sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur, terutama transportasi. Mosher (1991)¹ seorang ahli ekonomi pertanian menyatakan bahwa jika ingin mengembangkan pertanian maka yang harus dibangun adalah jalan, jalan dan jalan, baru berikutnya infrastruktur lainnya. Pertanian yang berbasis subsisten, akan terdorong untuk menciptakan surplus dan dijual ke pasar jika tersedia jalan. Munculnya produk yang dijual ke pasar bermakna munculnya nilai tambah yang itu bermakna pula peningkatan kesejahteraan.





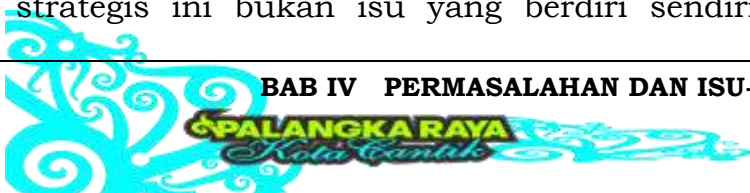
Terkait dengan pengembangan pertanian di Kota Palangka Raya, wilayah pertanian dan pedesaan secara umum memiliki jaringan transportasi yang masih sangat terbatas. Keterbatasan itulah yang menjadi sebab dari tidak berkembangnya pertanian sehingga berdampak pada kesejahteraan yang terjadi. Elaborasi ketersediaan infrastruktur disajikan pada bagian lain dari naskah ini (Bab V. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup).

Penyebab lain dari tertinggalnya sektor pertanian adalah ketidaktepatan tanaman yang dikembangkan. Pemerintah daerah setiap saat diberikan target oleh pemerintah pusat sesuai dengan prioritas pemerintah pusat tetapi sesungguhnya target tersebut tidak sesuai dengan kondisi daerah. Sesuai dengan prioritas pemerintah Pusat, Kota Palangka Raya dan daerah lain di Indonesia ditarget untuk menghasilkan tanaman padi, jagung juga kedelai, namun demikian sesungguhnya lahan di kota ini memang tidak cocok untuk tanaman tersebut. Tetapi karena ditarget oleh pemerintah yang lebih tinggi, maka pemerintah kota berusaha untuk menyediakan lahan, yang bermakna mengeluarkan anggaran. Tetapi karena lahan tidak cocok semua upaya itu hanya menghasilkan ke sia-siaan. Akibatnya upaya untuk mengembangkan komoditas lain yang sesungguhnya cocok untuk kota Palangka Raya menjadi sangat berkurang. Maka jelas bahwa sektor pertanian di kota ini lebih banyak berkembang dan hidup sendiri melawan pasar yang memiliki sifat dan nafasnya sendiri. Pasar tidak akan menolong mereka yang tidak mampu, akhirnya jika sektor pertanian semakin terpuruk, adalah hal yang sangat mudah dihubungkan.

Aspek lain dari penyebab ketimpangan itu adalah bahwa perencanaan dan implementasi dari program dan kegiatan pemerintah dijalankan menggunakan prinsip "*business as usual*". Perencanaan makro telah disusun dengan baik, namun demikian perencanaan ini tidak turun ke dalam perencanaan sektoral. Sebagai contoh teridentifikasi permasalahan pembangunan sub sektor perikanan tangkap adalah *illegal fishing* juga *illegal mining* yang mencemari perairan tetapi program yang diluncurkan oleh Dinas, tetap saja program penebaran bibit ke perairan umum. Program ini tidak keliru, namun tidak menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi.

Akibat dari ketimpangan kesejahteraan ini maka timpang pula aspek pendidikan dan kesehatan untuk penduduk. Disamping itu rendahnya kinerja sektor pertanian juga berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan di daerah pedesaan dan sektor pertanian. Ketika tingkat pendidikan masih lemah dengan kesehatan yang juga lemah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, dampak selanjutnya adalah bahwa aspek sosial maupun budaya tidak berkembang. Kemiskinan dan pendidikan yang buruk ditambah dengan terus bertambahnya jumlah penduduk juga akan mengancam lingkungan hidup.

Analisis lengkap yang telah dilakukan terhadap kinerja dan permasalahan serta isu strategis yang muncul membawa pada rangkaian isu strategis bidang ekonomi yang harus segera dipecahkan. Rangkaian isu strategis ini bukan isu yang berdiri sendiri sendiri, melainkan menjadi





bagian dari isu-isu yang lain dan saling terkait. Isu besar dalam pembangunan ekonomi kota Palangka Raya bukan lagi terletak pada pertumbuhan yang lambat, namun pada isu pemerataan pembangunan ekonomi baik antar sektor maupun antar wilayah.

Terkait dengan berbagai permasalahan dan isu yang melingkupi bidang ekonomi kota Palangka Raya, dalam perencanaan ke depan isu-isu berikut menjadi sangat strategis untuk dipecahkan:

1. Sektor pertanian yang berpusat di wilayah pedesaan terus mengalami kemerosotan. Untuk itu maka pengembangan sektor pertanian yang tepat sesuai dengan kapasitas lokal sangatlah diperlukan. Sektor ini selain sumber kehidupan sebagian penduduk, juga merupakan sumber pangan bagi semua penduduk.
2. Sektor perikanan yang dapat menjadi pemicu pembangunan sektor primer terhadap oleh persoalan turunnya kualitas lingkungan perairan. Sebagai daerah berbasis air, sangat strategis ketika kota ini mengembangkan perikanan darat. Tumbuh dan berkembangnya perikanan akan mampu menjadi pemicu berkembangnya sektor sektor lainnya, misalnya industri pengolah produk pertanian juga pariwisata berbasis air.
3. Sektor industri mengalami penurunan. Sektor perdagangan yang berkinerja baik menghadapi persoalan dalam mengembangkan pasar dunia. Pengembangan industri pengolahan berbasis produk lokal adalah pilihan yang tepat. Industri obat-obatan, industri pengolah produk perikanan juga industri berbasis kayu adalah industri yang potensi permintaannya tidak akan pernah habis. Perkembangan industri ini harus didukung oleh kemampuan sektor perdagangan untuk menembus pasar dunia yang dapat menjadi pembuka permintaan yang tidak terbatas.
4. Sektor pariwisata belum mampu menjadi penghela pertumbuhan bagi sektor lainnya. Pengembangan pariwisata berbasis alam yang dikemas dalam balutan teknologi, tanpa meninggalkan budaya lokal adalah pilihan yang dapat diambil. Mengembangkan pariwisata memerlukan energi yang sangat besar, untuk itu maka fokus pada beberapa destinasi penting adalah pilihan cerdas agar energi tidak terbuang sia-sia.
5. Untuk mendukung pengembangan sektor riil tersebut, maka investasi diarahkan pada sektor riil yang dibutuhkan. Untuk itu maka perencanaan investasi sangatlah strategis. Untuk menarik investasi maka upaya untuk menurunkan ICOR sangat diperlukan.
6. Kemampuan keuangan daerah masih rendah akibat dari pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum optimal. Ke depan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, terutama untuk sumber penerimaan pajak dan retribusi harus mendapatkan prioritas utama.



4.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam menentukan isu strategis, harus disesuaikan dengan jenis dokumen yang akan disusun, apakah itu jangka panjang (20 tahun) jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka isu strategis itu dapat dimasukkan. Namun jika suatu isu strategis berpotensi muncul dalam diluar (lebih dari) kurun waktu sesuai masing-masing jenis dokumen, maka sebaiknya tidak usah dimasukkan ke dalam dokumen.

a. Isu Nasional

1) Dampak Pemindahan Ibukota ke Kalimantan

Dengan ditetapkannya Pemindahan Ibukota Negara oleh Bapak Presiden RI (Republik Indonesia) yaitu ke Provinsi Kalimantan Timur, Maka otomatis Isu Pemberitaan Kota Palangka Raya sebagai Calon Kandidat Ibukota Negara yaitu di Kota Palangka Raya Sebagai Ibukota Negara RI akan berubah sesuai dengan prubahan RPJMD kota Palangka Raya 2018-2023, semula menjadi Isu Nasional Pemidahan Ibukota Negara ke Kota Palangka Raya akan berubah Topik menjadi Isu Nasional nya berupa Dampak Kota Palangka Raya sebagai Penyangga Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung Daerahnya dengan Pemindahan Ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur sebagai, yang perlu diperhatikan yaitu Isu Nasional adalah Dampak Kota Palangka Raya terhadap Pemindahan Ibukota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur akan berdampak dari segi Infrastruktur (Transportasi) , Pusat Bisnis untuk para Investor dari sisi Perkebunan dan Permukiman. Kota Palangka Raya yang memiliki luas 2.853,52 Km² atau 285.351,28 Ha dengan wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut dengan luas wilayah 119,41 Km², Kecamatan Sabangau dengan luas wilayah 641,47 Km², Kecamatan Jekan Raya dengan luas wilayah 387,53 Km², Kecamatan Bukit Batu dengan luas wilayah 603,16 Km² dan Kecamatan Rakumpit dengan dengan luas wilayah 1.101,95 Km² dengan total jumlah penduduk 267.757 jiwa (tahun 2016) telah berkembang menjadi kota yang cukup ramai dan tumbuh pusat-pusat pemukiman dan infrastruktur yang berkembang dengan pesat terutama di dua Kecamatan yaitu Pahandut dan Jekan Raya untuk memenuhi kebutuhan warga dan masyarakat yang berkunjung daerah ini.



Jumlah penduduk Kota Palangka Raya pada 2016 sebanyak 267.757 orang yang terdiri dari 125.000 jiwa (51,12 persen) laki-laki dan 119.500 jiwa (48,88 persen) perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 91 orang tiap Km². Sebaran penduduk Kota Palangka Raya tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya berjumlah masing-masing 93.894 jiwa (786,32/km² dan 139.312 jiwa (359,49 jiwa/km²) dan sisanya tersebar di Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Rakumpit berjumlah masing-masing 17.398 jiwa atau 27,12 jiwa/km², 13.74 jiwa (22,79 jiwa/km²) dan 3.404 jiwa (3,09 jiwa/km²).

Posisi strategis kota ini tidak terlepas dari posisinya sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kemajuan kota akan menjadi barometer bagi kemajuan kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah. Namun demikian, seiring dengan pesatnya pembangunan kota, disaat yang sama terus muncul berbagai persoalan yang menghambat perkembangan kota dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Persoalan itu mulai dari terbatas anggaran pembangunan, lahan dan pembangunan perkantoran, dan persoalan-persoalan kota pada umumnya seperti pelayanan publik, tata ruang kota, pemukiman, persampahan, serta persoalan-persoalan sektoral lainnya seperti ekonomi kota, lingkungan hidup, kependudukan, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, jalan lingkungan, perlindungan sosial, persoalan keamanan dan ketertiban, persoalan penataan kota, dan masalah urban.

Secara nasional Kota Palangka Raya telah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Rencana pembangunan rel kereta api dari Palangka Raya – Banjarmasin – Batulicin telah dibuat kajian Kementerian Perhubungan, Bahkan akan segera di wacana kan Jalur Rel Kereta api menuju Ibukota Baru yaitu Kalimantan Timur dan Jalur Transportasi beserta fasilitas Infrastruktur yang lain antar Provinsi yang ada di Kalimantan guna mendukung Ibukota Negara yang Baru yaitu Provinsi Kalimantan Timur.

2) Trend menuju Kota Cerdas

Perkembangan kota di masa kini dan masa depan telah mengalami perubahan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara perubahan itu adalah pembangunan kota harus menjadi kota cerdas (*smart city*).

Konsep *smart city* bukanlah sekedar kota dengan kecanggihan informasi teknologi namun lebih kepada semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kota tersebut. Jadi, konsep kota cerdas adalah untuk mempercepat layanan publik serta meningkatkan produktivitas agar kota bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi cerdas (*smart economy*).

Kota cerdas diupayakan agar kota menjadi kota yang berkelanjutan dalam hal ekonomi yang cerdas (*smart economy*), sumber daya manusia yang cerdas, pemerintahan yang cerdas, mobilitas cerdas, dan tempat tinggal yang cerdas (*smart living*).



Konsep *smart economy* yang telah diarahkan oleh pemerintah dalam RPJMN (2015-2019) adalah *city branding* (meliputi produk unggulan, SDM, karakter sosial dan budaya), *e-business* (mengembangkan peran layanan sistem informasi industri dalam meningkatkan nilai tambah perekonomian kota), meningkatkan kemampuan inovasi SDM dan kewirausahaan dan elektronifikasi (transaksi manual menuju ke transaksi *online*).

3) Isu Strategis Terkait Kesehatan

Terkait pembangunan kesehatan, ada 4 isu strategis yang menjadi arahan Presiden, yaitu penurunan angka stunting, kematian ibu dan bayi; perbaikan pengelolaan sistem JKN; penguatan pelayanan kesehatan; serta isu terkait obat dan alat kesehatan.

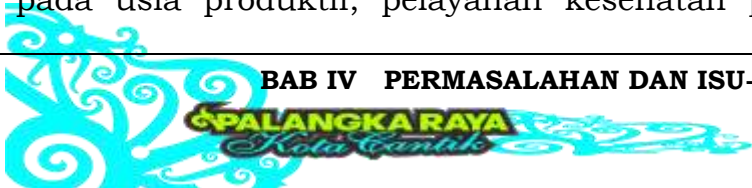
Dalam hal penanganan stunting dan percepatan penurunan AKI AKB, kolaborasi antar lintas sektor sangat berperan penting mengingat intervensi spesifik yang menjadi tanggung jawab bersama. Upaya-upaya kolaborasi antara lain terkait ketersediaan sumber pangan, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak mampu, pemberdayaan perempuan dan wajib belajar 12 tahun. Selain itu peningkatan peran perempuan dalam sosial ekonomi, peningkatan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin serta peningkatan peran tokoh masyarakat dan agama.

Terkait pengelolaan sistem JKN, pemerintah menjamin akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu melalui pemberian bantuan iuran program JKN. Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) mempunyai arti bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan, kapan saja dan dimana saja mereka membutuhkannya tanpa kesulitan finansial. Hal tersebut mencakup berbagai pelayanan kesehatan esensial termasuk pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif.

Terkait obat dan alat kesehatan, diupayakan pengendalian harga obat dan mendorong alat kesehatan produk dalam negeri. Langkah-langkah percepatan yang akan dilakukan adalah mendorong investasi, mempercepat lisensi wajib obat yang sangat dibutuhkan, membuka peluang investasi sebesar-besarnya dan deregulasi perizinan yang menghambat. Langkah-langkah percepatan tersebut diharapkan dapat mengendalikan harga obat dan alat kesehatan.

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya pada Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 298 terdapat 6 urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah. Kesehatan menjadi salah satu dari 6 urusan tersebut.

Untuk tingkat kabupaten/kota, ada 12 jenis SPM yang mencakup pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, pelayanan





kesehatan penderita hipertensi, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Sehingga diperlukan adanya langkah – langkah konkret dan strategis dibidang kesehatan terutama mengembangkan unit layanan kesehatan yang profesional dan fungsional dengan kewenangan – kewenangan yang diperkenankan secara aturan dalam menyediakan pelayanan publik dibidang kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) Pandemi COVID – 19

Pandemi merupakan penyakit yang menyebar secara global meliputi area yang sangat luas, yang telah menyebar di beberapa negara atau benua. Dalam menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 tersebut, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk menyusun kriteria langkah-langkah kesehatan terhadap penyebaran Covid-19, serta menentukan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial. Begitu juga dengan Pemerintah Kota Palangka Raya yang mengambil berbagai kebijakan prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas dan keamanan masyarakat adalah: 1) penggunaan data dan keilmuan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); 2) Penyesuaian PSBB dilakukan melalui beberapa tahapan dan zona; 3) Penerapan protokol kesehatan yang ketat melalui disiplin dan pengawasan oleh aparat; dan 4) Review pelaksanaan penyesuaian PSBB yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dimungkinkan adanya pemberlakuan kembali PSBB secara ketat apabila masyarakat tidak disiplin dalam beraktivitas. Prasyarat ini digunakan untuk menentukan kriteria langkah-langkah kesehatan yang perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan penyesuaian pembatasan sosial.

Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tidak hanya dari sisi kesehatan tetapi juga berpengaruh kepada ekonomi, sosial dan lain – lain. Pemerintah Pusat melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu refofusing anggaran APBN begitu juga dengan Pemerintah Kota Palangka Raya melakukan pencermatan kembali Belanja Pembangunan untuk pembiayaan penanganan Covid – 19 baik untuk kesehatan maupun penyediaan jaring pengaman sosial masyarakat.

Kegiatan ekonomi masyarakat juga terganggu dan ini juga mengakibatkan deflasi di Kota Palangka Raya dan prediksi pendapatan asli daerah (PAD) juga menurun disamping juga penurunan dana transfer dari pusat kepada daerah.

5) Isu atau Kebijakan Strategis Nasional : Telaah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar mempengaruhi arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah pada masa mendatang adalah kebijakan dari Pemerintah. Dokumen perencanaan tingkat nasional



merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada dokumen lain salah satunya yaitu RPJMN

“Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024,” bunyi Pasal 1 ayat 1 Perpres tersebut. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pulau Kalimantan dikenal sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia, maka pembangunan wilayah Pulau Kalimantan dalam lima tahun mendatang diarahkan untuk mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia (Heart of Borneo) dengan menjaga kawasan berfungsi pelestarian lingkungan dan ekologis; meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; mengembangkan pencegahan bencana alam banjir dan kebakaran hutan; mempertahankan peran sebagai lumbung energi nasional melalui pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi wilayah; pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.





Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat membantu mendorong diversifikasi ekonomi dan peningkatan output sektor ekonomi non tradisional seperti jasa, pemerintahan, transportasi, perdagangan, pengolahan akan terpacu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan.

6) Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional adalah kondisi dalam kehidupan nasional yang harus diwujudkan dan dipertahankan secara terus menerus. Untuk mewujudkan ketahanan nasional ini bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu mulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa hingga negara. Modal dasar yang diutamakan dalam mewujudkan ketahanan nasional ini adalah keuletan dan ketangguhan yang dilakukan demi mencapai tujuan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional adalah sebuah gambaran dari kondisi sistem tata kehidupan nasional dalam berbagai aspek di saat-saat tertentu. Tiap aspek tersebut bersifat dinamis atau selalu berubah seiring berjalannya waktu sehingga interaksi aspek-aspek itu pun akan sulit untuk dipantau. Oleh karena itu, dari pemahaman konsep ketahanan nasional, akan muncul pula hubungan antar aspek yang akan mendukung kehidupan nasional. Adapun aspek-aspek ketahanan nasional tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Aspek alamiah – yaitu aspek yang sifatnya statis, mencakup aspek geografis, kependudukan dan sumber daya alam.
2. Aspek sosial – yaitu aspek yang sifatnya lebih dinamis, mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan.

Dari dua kategori di atas, berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing aspek ketahanan nasional serta bagaimana semuanya saling mempengaruhi:

1. Aspek Geografis

Kondisi geografis sebuah negara akan memberi petunjuk mengenai lokasi negara tersebut di atas permukaan bumi. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki posisi geografis di posisi silang dunia antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dengan demikian, Indonesia berada di posisi strategis untuk jalur perdagangan. Kondisi Indonesia yang juga termasuk negara kepulauan, membuat Indonesia memiliki banyak keberagaman, baik dari segi karakteristik daerahnya maupun dari segi kebudayaannya.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki ciri khas, budaya, adat istiadat dan keindahan yang berbeda. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan ketahanan nasional untuk menjaganya. Dari situ, lahirlah geopolitik dan geografis, dimana geopolitik merupakan kebijakan politik suatu negara terkait posisi geografisnya untuk mencapai tujuan geopolitik, sementara





geografis adalah pelaksanaan dari geopolitik tersebut yang dipengaruhi juga oleh kondisi geopolitik Indonesia.

2. Aspek Kependudukan

Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini bisa jadi merupakan kekuatan bagi Indonesia karena penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara, terutama berkaitan dengan pembangunan nasional. Akan tetapi, pernyataan ini baru bisa dibenarkan jika jumlah penduduk yang besar juga diimbangi oleh kualitas penduduk yang baik pula. Oleh karena itu, demi menjaga ketahanan nasional, kita perlu untuk bisa melihat persoalan yang muncul dari aspek kependudukan ini untuk selanjutnya mencari solusi yang tepat untuk mengatasinya.

Jika jumlah penduduk yang besar tidak diimbangi dengan kualitasnya yang baik, bukan tidak mungkin hal tersebut justru akan mengganggu ketahanan nasional. Pada umumnya, masalah-masalah kependudukan yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, kualitas penduduk yang relatif rendah terutama berkaitan dengan pendidikan dan keterampilan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang meningkatkan pengangguran. Jika persoalan-persoalan ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin akan berpengaruh pada ketahanan nasional yang terganggu. Akan ada banyak tindak kejahatan, kemiskinan dan masalah lainnya yang bisa menjadi ancaman untuk ketahanan nasional.

3. Aspek Kekayaan Alam

Kekayaan negara, adalah segala sumber dan potensi alam, baik di darat, laut maupun udara, yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut. Kekayaan alam yang ada di muka bumi ini bisa dibilang tidak tersebar merata. Ada negara yang kaya akan sumber daya tambang, tapi tidak memiliki kekayaan laut. Ada pula negara yang kaya akan hasil pertanian, tapi tidak memiliki kekayaan perikanan. Karena ketidakmerataan kekayaan alam ini, setiap negara perlu mengelola kekayaan alam yang dimiliki agar bisa dimanfaatkan dengan merata dan optimal. Pengelolaan kekayaan alam ini akan mempengaruhi bagaimana ketahanan nasional bisa terwujud. Apabila kekayaan alam bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdaya saing, maka sebuah negara akan bisa memiliki bargaining position yang kuat. Tidak hanya itu, pengelolaan aspek kekayaan ini juga harus lestari, artinya pengelolaan harus dilakukan secara berkesinambungan agar manfaatnya bisa dirasakan juga oleh generasi selanjutnya untuk pembangunan nasional yang akan datang. Dengan demikian, kesejahteraan akan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara dan ketahanan nasional pun akan bisa tercapai.

Pengelolaan kekayaan alam ini akan mempengaruhi bagaimana ketahanan nasional bisa terwujud. Apabila kekayaan alam bisa dimanfaatkan secara maksimal dan berdaya saing, maka sebuah negara akan bisa memiliki bargaining position yang kuat. Tidak hanya itu,





pengelolaan aspek kekayaan ini juga harus lestari, artinya pengelolaan harus dilakukan secara berkesinambungan agar manfaatnya bisa dirasakan juga oleh generasi selanjutnya untuk pembangunan nasional yang akan datang. Dengan demikian, kesejahteraan akan bisa dinikmati oleh seluruh warga negara dan ketahanan nasional pun akan bisa tercapai.

4. Aspek Ekonomi

Ketahanan nasional juga mencakup ketahanan ekonomi, yang bisa diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang ulet dan tangguh dalam menghadapi serta mengatasi segala hambatan, ancaman dan tantangan untuk menjamin kelangsungan perekonomian negara dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, mencakup kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa. Segala usaha perekonomian ini akan berdampak pada taraf hidup masyarakat.

Sistem perekonomian yang dianut oleh sebuah negara akan memberi ciri khas tersendiri pada kehidupan perekonomian sebuah negara. Misalnya, negara dengan sistem perekonomian liberal akan sangat sensitif dengan pengaruh-pengaruh dari luar negaranya. Sebaliknya, negara dengan sistem perekonomian sosialis akan kurang peka dengan pengaruh dari luar karena semua kegiatan ekonomi ada dalam kendali pemerintah. Tingkat kepekaan negara terhadap pengaruh dari luar ini tentu saja akan memiliki andil dalam ketahanan nasionalnya, terutama ketika perekonomian telah menjadi contoh ancaman non-militer.

5. Aspek Sosial-Budaya

Aspek sosial pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas. Sementara itu, hakikat dari budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil dari hubungan manusia dengan cipta, rasa dan karsa yang akan menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta menjadi kekuatan pendukung dalam penggerak kehidupan.

Oleh karena itu, aspek sosial-budaya ini akan menjadi cara hidup suatu masyarakat yang termanifestasi dalam tingkah laku dan cara mereka berinteraksi satu sama lain. Segala bentuk interaksi dengan cara-cara tertentu ini akan menimbulkan toleransi dan rasa persatuan sebagai sebuah bangsa yang akan berpengaruh juga pada ketahanan nasional. Fungsi toleransi dalam kehidupan ini sangat penting, terutama mengingat Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan dengan tradisi, sifat dan corak tersendiri sehingga perlu adanya sikap yang tepat agar tidak menjadi ancaman maupun hambatan bagi ketahanan nasional.



6. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Aspek pertahanan dan keamanan ini berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dalam, baik langsung maupun tidak langsung, berbahaya bagi identitas, integritas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Aspek yang satu ini merupakan upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan, dengan cara menyusun, mengerahkan dan menggerakkan potensi yang dimiliki.

Hal ini termasuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi segala potensi tersebut, dengan TNI dan Polri sebagai pelaksana utama. Namun, untuk itu diperlukan pemenuhan syarat integrasi nasional untuk bisa mewujudkan kemakmuran bangsa. Wujud dari aspek pertahanan dan keamanan ini bisa dicerminkan dari bagaimana bangsa bisa menangkalkan ancaman, dilandasi dengan kesadaran bela negara seluruh rakyatnya. Hal ini terutama untuk memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil dari pembangunan, serta menjaga kedaulatan negara.

7. Aspek Politik

Politik berasal dari kata *policy* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan atau kebijaksanaan. Aspek politik ini berhubungan dengan bagaimana ketahanan nasional menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman pada kehidupan politik bangsa dan negara. Ketahanan nasional dengan aspek politik ini mencakup ketahanan pada aspek politik dalam negeri dan ketahanan pada aspek politik luar negeri.

8. Aspek Ideologi

Aspek yang terakhir adalah aspek ideologi. Ideologi adalah sebuah sistem nilai yang merupakan ajaran yang bulat untuk memberi motivasi bagi warga negara. Di dalam ideologi juga terdapat konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa dan negara. Ideologi bisa dikatakan kuat jika di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bisa memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup yang dimiliki oleh rakyat, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Aspek ideologi dalam ketahanan nasional ini akan menunjukkan bagaimana kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, hambatan dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar berbahaya bagi kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara.

Aspek-aspek di atas semuanya saling mempengaruhi dan tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional merupakan sesuatu yang dinamis dan cenderung terus berubah. Oleh karena itu, kita harus terus berusaha mengarahkan segala aspek ketahanan nasional itu ke arah yang positif untuk menjaga agar ketahanan nasional bisa terwujud tetap kuat dan mendukung tujuan pembangunan nasional.





b. Isu Daerah

1. Pengembangan Kesenjangan Wilayah

Kota Palangka Raya memiliki ciri perkotaan kota dan perdesaan. Dari aspek kesenjangan antar wilayah terlihat, bahwa kondisi prasarana dan sarana penunjang antar wilayah sangat berbeda antara wilayah yang berada di pusat kegiatan dengan ciri perkotaan dengan wilayah yang berciri pedesaan. Implikasi dari kondisi tersebut terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat, yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Untuk wilayah yang memiliki akses terbatas dengan pusat kota, maka tingkat kemiskinan antara kota juga terbatas, dengan dikaitkannya dengan Isu Nasional Kota Palangka Raya sebagai Penyangga/ Pendukung Ibukota Negara di Kalimantan Timur, sangat memungkinkan pengalokasian percepatan pembangunan juga akan di perhatikan oleh Pemerintah Pusat guna mendukung Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang berdekatan dengan Ibukota Negara di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tabel 4.3 di bawah ini, memberikan gambaran kelurahan yang maju, berkembang, dan tertinggal.

Tabel 4.3 Kategori Kelurahan berdasarkan Tipologi Kawasan

Kecamatan	Cepat Tumbuh/Strategis Berkembang	Berkembang	Tertinggal/Miskin
PAHANDUT	Pahandut Langkai Pamarung		Tumbang Rungan Pahandut Seberang Tanjung Pinang
JEKAN RAYA	Menteng Bukit Tunggal Palangka		Petuk Katimpun
SABANGAU		Sabarau Kalampangan Kereng Bangkirai	Bereng Bengkel Kameloh Baru Danau Tundai
BUKIT BATU		Banturung Tangkiling Sei Gohong	Marang Kanarakan Tumbang Tahai Habaring Hurung
RAKUMPIT			Panjehang Mungku Baru Petuk Barunai Petuk Bukit Pager Gaung Baru Bukit Sua

Sumber: diolah dari kondisi lapangan

2. Kemampuan melakukan Inovasi

Kota-kota dimasa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi diperlukan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Data menunjukkan bahwa Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai terobosan inovasi daerah. Namun



dari 99 inovasi pelayanan publik tahun 2017, Kota Palangka Raya memang belum masuk di dalamnya. Oleh karena melalui inovasi daerah, tertuang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan pelayanan publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik;
- c. dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Karena keterbatasan APBD pemerintah daerah, dalam mencukupi kebutuhan perumahan bagi warganya dilakukan dengan mendorong *e-governance*, dimana pelayanan publik dibuka seluas mungkin aksesnya agar semua kebutuhan masyarakat kota dapat terpenuhi. Salah satu yang harus diupayakan adalah konsep *Public Private Partnership* (PPP) atau KPBU (Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha), dimana pihak swasta dan pemerintah daerah berkolaborasi bersama untuk memenuhi kebutuhan warga kota. Contohnya, kebutuhan pemukiman bagi warga dilakukan oleh pihak swasta, namun seturut arahan dari pemerintah kota. Hal ini haruslah dijadikan kebiasaan pemerintah daerah ke depannya, untuk mencapai *smart economy* dan *smart governance*.

Pemerintah Kota Palangka Raya akan banyak memiliki banyak pekerjaan rumah, di antaranya bagaimana mengintegrasikan semua sistem informasi teknologi yang ada di semua unit (SOPD) kota, bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal layanan publik serta membuat regulasi yang baik agar dapat mengantisipasi bisnis *online* yang semakin menjamur, agar semua pelaku berada di level yang sama.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16)



Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan tersebut, maka pembangunan Kota Palangka Raya ke depan mesti memperhatikan komitmen untuk melaksanakan 17 tujuan tersebut, sekalipun tidak memiliki laut seperti tujuan ke empat belas tentang Ekosistem Laut.

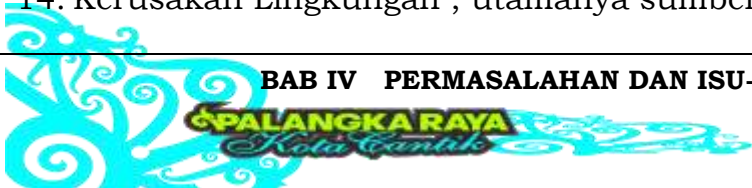
Lebih lanjut tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) dijelaskan lebih lanjut dalam Telaahan KLHS Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya berikut:

3.1. Telaah Terhadap KLHS Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023

Isu-isu strategis dalam kajian KHS seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 9, yaitu : a. Mempertimbangkan karakteristik wilayah b. Tingkat penting potensi dampak c. Keterkaitan antar isu pembangunan berkelanjutan d. Keterkaitan antara materi muatan kebijakan, rencana, dan program e. Muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup f. Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. diintegrasikan menghasilkan 58 daftar isu-isu strategis permasalahan di Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut sebagai daftar Panjang isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan.

Daftar Isu Panjang tersebut yang kemudian dijadikan landasan dalam menyusun akar permasalahan yang kemudian disebut daftar pendek isu-isu strategis prioritas pembangunan berkelanjutan kota Palangka Raya. Daftar isu Panjang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kebakaran Hutan dan lahan (meningkatnya Ispa, Rusaknya aset masyarakat turunnya kualitas hidup akibat pencemaran udara);
2. Penataan Kawasan sesuai zonasi (Pemukiman, perdagangan, pertanian, dll);
3. Masih banyak penduduk miskin;
4. Hidrologi gambut belum tertata dengan baik;
5. Tingginya angka stunting (sehat sejak dalam kandungan);
6. Kawasan kumuh;
7. Pengelolaan kolaboratif di kawasan penyangga;
8. Tumpang tindih perizinan;
9. Kurangnya penciptaan Lapangan Kerja inovatif;
10. Kurangnya rumah murah untuk pemukiman;
11. Pengelolaan limbah dan Persampahan (Pengelolaan limbah cair, padat dan B3 dari kegiatan rumah tangga dan industri masih kurang baik sehingga menyebabkan pencemaran air Permukaan, tanah & udara);
12. Inisiasi & Pengelolaan Perhutanan Sosial kurang;
13. Kepemilikan lahan yang tumpang tindih;
14. Kerusakan Lingkungan , utamanya sumberdaya hutan;





15. Belum Dikenali Inovasi Pengolahan Lahan Tanpa Bakar;
16. Tingginya Penyakit Menular Akibat Pemukiman dan lingkungan yang tidak Sehat;
17. Kegiatan usaha tanpa dilengkapi dokumen lingkungan atau izin lingkungan berakibat merusak lingkungan;
18. Alih Fungsi Lahan
19. Minimnya perlindungan cagar budaya;
20. Kurangnya pemanfaatan lahan tidak produktif;
21. Urbanisasi;
22. Pemanfaatan lahan bekas golongan C untuk ekonomi produktif
23. Pertambangan (Legal dan Illegal);
24. Bencana Banjir;
25. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau untuk green city belum terkelola baik;
26. Pengembangan Ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah;
27. Banyaknya Penggunaan Pestisida dalam pertanian;
28. Orientasi PAD sesuai dengan peraturan;
29. Palangka Raya sebagai Ibukota Pemerintahan;
30. Kemandirian Daerah rendah;
31. Konflik social;
32. Penyebaran Penyakit yang berasal dari Hewan (zoonosis);
33. Peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular yang disebabkan gaya hidup masyarakat;
34. Penyalah gunaan Obat di kalangan Remaja;
35. Kurang koordinasi & integrasi dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata unggulan;
36. Fasilitas pendidikan belum merata;
37. Kesenjangan gender & pemberdayaan perempuan;
38. Sistem Drainase dan sanitasi;
39. Konflik Lahan (didalam kawasan hutan dan tumpang tindih lahan);
40. Pembukaan kanal-kanal di hutan rawa dan gambut;
41. Produksi pangan rendah;
42. Kontribusi sektor industri rendah;
43. Pencagar budaya (dayak) rendah;
44. Aspirasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kurang terealisasi;
45. Tingginya erosi dan Sedimentasi;
46. Perburuan flora dan fauna;
47. Tumpang Tindih Tugas Pokok & Fungsi SOPD;
48. Penyelenggaraan E. Gov (Pemanfaatan jaringan telekomunikasi dan pengembangan TIK sebagai sarana penyelenggaraan e gov menuju smart city);
49. Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Baru;
50. Pelayanan air bersih dan PDAM belum mencakup setiap wilayah dan belum merata;
51. Pengembangan kawasan parkir;
52. Transportasi angkutan barang dan jasa;



53. Pembangunan Jalur Kereta Api (Permasalahan yang timbul dari pembangunan rel kereta api);
54. Pengembangan Perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan;
55. Transportasi dan Industri;
56. Infrastruktur (pengembangan jalan baru);
57. Keterbatasan Irigasi teknis;
58. Infrastruktur (Pelebaran jalan).

Berdasarkan Keterkaitan antara permasalahan / isu-isu strategis yang diidentifikasi tersebut, maka disusunlah pokok permasalahan dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Isu – isu strategis dalam penyusunan KLHS RPJMD mengacu kepada Perpres 59 tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG'S), yang terdiri dari 4 (empat) Pilar, yaitu :

- a. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan (Ekonomi);
 - b. Menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat (Sosial Budaya);
 - c. Menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif (Lingkungan);
 - d. Terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Tata Kelola dan Kelembagaan)
- Isu - isu strategis/ permasalahan yang disusun merupakan pokok permasalahan yang menjadi kendala dan tantangan dalam Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Palangka Raya. Isu-isu strategis prioritas atau pokok permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan ruang);

Penataan ruang merupakan salah satu dari isu strategis prioritas untuk dibahas dalam penyelenggaraan KLHS untuk RPJM Kota Palangka Raya. Kota Palangka Raya sebelumnya pernah memiliki Perda no. 7 tahun 2001 tentang RTRW kota Palangka Raya, dengan terbitnya UU no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan PP 15 tahun 2010 yang memberikan amanah dalam kurun waktu 2 tahun untuk menyesuaikan RTRW, dan apabila lebih dari 2 tahun belum menyesuaikan maka secara otomatis RTRW yang lama tidak berlaku dan sampai saat ini RTRW kota Palangka Raya belum dapat di syahkan. Hal yang menjadi permasalahan dalam penataan ruang sehingga belum ditetapkan antara lain adalah adanya pemanfaatan non hutan di dalam Kawasan hutan, kebutuhan ruang untuk perencanaan yang belum sesuai dengan persetujuan substansi Kawasan hutan yang diperoleh.

Dampak dari belum terselesaikan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Palangka Raya adalah perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang tidak optimal, dikarenakan belum adanya landasan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Dampak turunannya adalah





adanya ancaman terhadap Kawasan yang dilindungi (Kawasan konservasi, cagar budaya, hutan lindung, dan lain-lain), ancaman kebakaran di karenakan penanganan terhadap lahan yang tidak tepat oleh Pemerintah Kota (pembuatan drainase yang mempercepat pengeringan lahan gambut) ataupun oleh masyarakat yang mengolah lahan, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan, dan terhambatnya izin investasi yang tentunya menghambat perekonomian. Selain itu alih fungsi lahan yang tidak terkendali, juga memacu pelepasan karbon ke udara yang dapat meningkatkan resiko perubahan iklim tidak hanya di Kota Palangka Raya, akan tetapi juga secara global.

2. Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu akar masalah penting yang menjadi perhatian di Kota Palangka Raya. Permasalahan terkini yang menjadi penyebab pencemaran terjadi adalah akibat dari permasalahan dalam pengelolaan sampah di Kota Palangka Raya yang belum berjalan dengan optimal sehingga berpotensi untuk menimbulkan pencemaran udara berupa bau yang tidak sedap, mencemari air tanah, dan sungai serta dapat merusak tingkat produktifitas tanah.

Ancaman pencemaran air tidak hanya pada air tanah, akan tetapi juga pada air permukaan yang terdapat pada air sungai sehingga mengancam keaneka ragaman hayati. System hidrologi utama yang terdiri dari 3 (tiga) sungai besar melintasi Kota Palangka Raya, yaitu Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, dan Sungai Rungan. Kondisi sungai tersebut terancam pencemaran akibat aktivitas tambang ilegal yang berada di sepanjang sungai tidak hanya dilakukan diwilayah Kota Palangka Raya, selain itu keberadaan pemukiman yang berada di pinggir sungai, dan aktifitas pertanian dan perikanan disepanjang sungai, serta system drainase perkotaan yang menuju ketiga sungai tersebut turut mengancam meningkatnya tingkat pencemaran air.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pencemaran udara, meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor, pengelolaan sampah yang belum optimal sehingga praktek pengelolaan sampah dengan membakar oleh masyarakat akan meningkatkan pelepasan karbon ke udara. Selain itu ancaman kebakaran hutan dan lahan yang masih tinggi, sehingga meningkatkan pelepasan karbon di udara, yang selain mempengaruhi kualitas udara juga berdampak pada meningkatkan resiko perubahan iklim global.

3. Pembangunan Ekonomi Lokal

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya termasuk ke dalam zona tengah, yang merupakan pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa, pertanian, dan pariwisata. Dalam penyusunan RTRW kota Palangka Raya yang sedang disusun memiliki tujuan "TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, PERDAGANGAN-JASA DAN PARIWISATA BERSKALA



REGIONAL YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”.

Ekonomi Kota Palangka Raya, selama ini masih bergantung kepada Dana Bagi Hasil (DBH) dari APBN dan Dana Alokasi Kabupaten/ Kota (DAK) dari APBD Provinsi, sedangkan Pendapatan Asli Daerah masih minim. Dengan demikian proyeksi keuangan dalam perencanaan pembangunan memiliki ketergantungan yang tinggi, terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang diterima selama ini, hamper 90% berasal dari sektor perdagangan barang dan jasa, sedangkan sektor pertanian yang menunjang daerah pinggiran di Kota Palangka Raya hanya berkontribusi sebesar 10 %. Dengan demikian perlu dilakukan terobosan dan inovasi guna mendorong kontribusi ekonomi lokal di Kota Palangka Raya untuk dapat berkontribusi lebih baik lagi. Selain untuk meningkat Pendapatan Asli Daerah, mendorong kemandirian di Kota Palangka Raya, dan menekan aspek ketimpangan perekonomian masyarakat yang tinggal di Kota dan di pinggiran.

4. **Aspek Sosial Masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, dan Kemanusiaan)**

Pada aspek sosial Kota Palangka Raya memiliki permasalahan di bidang kemiskinan, pendidikan dan kesehatan sehingga dijadikan isu strategis prioritas. Permasalahan kemiskinan meskipun secara kuantitas terus menurun, akan tetapi masih terdapat kantong-kantong kemiskinan di kawasan kumuh dan padat dengan angka pengangguran terselubung yang tinggi (produktivitas tenaga kerja yang rendah).

Pendidikan juga menjadi permasalahan dikarenakan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah, ditambah dengan persebaran tenaga pengajar yang cenderung menumpuk di perkotaan (6 kelurahan kota), namun mengalami kekurangan di daerah pinggiran. Permasalahan lainnya adalah kesehatan terkait dengan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan dikarenakan akses jalan yang sulit dijangkau, selain itu tingginya angka stunting yang merupakan indikator umum masalah gizi di masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian perubahan perilaku gaya hidup masyarakat kearah negatif akibat pengaruh dari media sosial dan elektronik, seperti penyalahgunaan narkoba, seks di bawah umur, dan pergaulan bebas sehingga rentan terhadap penyebaran penyakit. Hal-hal yang disampaikan pada uraian tersebut diatas tidak dapat hanya ditangani oleh pihak atau sektor tertentu saja, akan tetapi memerlukan pendekatan multisektor dan multi stakeholder.

5. **Perlindungan Budaya Lokal**

Masyarakat Dayak merupakan masyarakat adat yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan. Bahasa Dayak yang bisa dijadikan dasar untuk suku yang terdapat di Palangka Raya antara lain bahasa Ngaju,





Ot Danum, Bakumpai, Manyan. Etnis lainnya adalah Banjar, Melayu, Jawa, Sunda, Madura, Batak dan berbagai etnis Indonesia lainnya. Kelembagaan masyarakat adat di Kota Palangka Raya khususnya dan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat pada dasarnya adalah peraturan daerah yang mengatur struktur kelembagaan adat Dayak dari tingkat Kalimantan (Majelis Adat Dayak nasional), tingkat provinsi (Dewan Adat Dayak Provinsi) dan tingkat kabupaten (Dewan Adat Dayak Kabupaten). Upaya kebijakan ini mempunyai tujuan yang mulia untuk menyikapi lemahnya posisi masyarakat adat ketika berhadapan dengan pihak luar dan juga bisa membantu pemerintah dalam pembangunan serta juga melestarikan budaya dan terutama untuk menyelesaikan persoalan masyarakat adat. Keberadaan kekayaan budaya di Kota Palangka Raya yang terancam tersebut perlu mendapatkan perhatian, sehingga tetap terjaga dan Lestari. Keberadaan Hutan, sungai, situs budaya, dan adat istiadat yang merupakan kearifan lokal dan melekat pada masyarakat seiring berjalannya waktu semakin tergerus oleh pengaruh budaya luar baik yang positif dan negatif. Untuk menjaga keberlangsungan budaya, dan kearifan lokal yang melekat di masyarakat setiap kegiatan perencanaan pembangunan perlu memperhatikan w, sehingga tetap.

6. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Menjadi salah isu strategis prioritas dalam pembahasan, terkait dengan masih banyaknya kebutuhan regulasi yang belum disusun, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan non pemerintah, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan guna menghindari tumpang tindih, dan penegakan terhadap peraturan yang sudah ada. Beberapa regulasi penting yang sampai saat ini belum disusun diantaranya Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup amanah UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda RTRW Kota Palangka Raya belum di selesaikan (sejak tahun 2013) sampai saat ini. Banyaknya regulasi yang belum disusun tersebut, mengakibatkan pelaksanaan tugas dari aparatur Pemerintah Kota Palangka Raya terkendala.

Kapasitas kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah serta sumberdaya manusia di Kota Palangka Raya sudah baik. Dalam rangka menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, menghindari tumpang tindih kebijakan sehingga pelaksanaan program berjalan dengan baik, guna mewujudkan hal tersebut maka kualitas sumber daya manusia yang ada perlu ditingkatkan serta dukungan teknologi yang tepat guna mutlak diperlukan. Penegakan terhadap peraturan juga menjadi permasalahan yang perlu di benahi dalam penyelenggaraan tata kelola dan kelembagaan di Kota Palangka Raya. Banyaknya aktifitas penambangan ilegal, perambahan hutan, perburuan terhadap satwa liar yang dilindungi, dan aktifitas yang bertentangan dengan peraturan yang ada belum sepenuhnya dapat ditertibkan. Segala permasalahan di





dalam tata kelola dan kelembagaan ini berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang di canangkan oleh Pemerintah, sehingga perlu di prioritaskan dalam penanganannya.

Adapun isu – isu dalam dokumen KLHS RPJMD Perubahan yang akan diintegrasikan berdasarkan capaian dan upaya dalam mewujudkannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.4 Indikator TPB/SDGs Yang Akan Diintegrasikan Ke Dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023

No	Kode Indikator (PMDN 7 Tahun 2018)	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
Indikator yang akan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD yang terkait langsung DDDT-LH				
1	1.5.1*	Indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Perlu upaya tambahan
2	1.5.1.(e)	Indikator Indeks resiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	Perlu upaya tambahan
3	2.1.1*	Indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	Perlu upaya tambahan
4	2.1.2.(a)	Indikator Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari .	Menurun menjadi 8,5 %	Perlu upaya tambahan



No	Kode Indikator (PMDN 7 Tahun 2018)	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
5	6.1.1.(a)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	Perlu upaya tambahan
6	6.1.1.(b)	Indikator Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	Perlu upaya tambahan
7	6.2.1.(b)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Perlu upaya tambahan
8	6.2.1.(c)	Indikator Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000	Perlu upaya tambahan
9	6.3.2.(a)	Indikator Kualitas air danau.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
10	6.3.2.(b)	Indikator Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
11	11.6.1.(a)	Indikator Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	Perlu upaya tambahan



No	Kode Indikator (PMDN 7 Tahun 2018)	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
12	12.4.2.(a)	Indikator Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Perlu upaya tambahan
13	12.5.1.(a)	Indikator Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Perlu upaya tambahan
14	12.6.1.(a)	Indikator Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	meningkat	Dengan upaya sendiri
15	15.3.1.(a)	Indikator Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	Perlu upaya tambahan
Indikator yang akan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD yang tidak terkait langsung DDDT-LH				
1	1.3.1.(c)	Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	Perlu upaya tambahan
2	1.4.1(g)	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat .	Meningkat menjadi 94,78%	Perlu upaya tambahan
3	1.5.1(b)	Indikator Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Meningkat	Perlu upaya tambahan
4	2.2.1*	Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat	Menurun	Perlu upaya tambahan





No	Kode Indikator (PMDN 7 Tahun 2018)	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
		pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.		
5	2.2.2(b)	Indikator Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	Perlu upaya tambahan
6	3.7.1.(b)	Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	Perlu upaya tambahan
7	4.1.1.(a)	Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	Perlu upaya tambahan
8	4.1.1.(b)	Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	Perlu upaya tambahan
9	4.1.1.(d)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	Perlu upaya tambahan
10	4.1.1.(e)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	Perlu upaya tambahan
11	11.1.1. (a)	Indikator Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	Perlu upaya tambahan
12	11.2.1. (a)	Indikator Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	Perlu upaya tambahan





No	Kode Indikator (PMDN 7 Tahun 2018)	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
13	12.8.1.(a)	Indikator Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	Dengan upaya sendiri
14	15.1.1.(a)	Indikator Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Meningkat	Perlu upaya tambahan
15	17.18.1.(c)	Indikator Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	Perlu upaya tambahan
Indikator yang akan diintegrasikan dalam dokumen RPJMD - Alternatif Program Kebutuhan Daerah				
1	1.4.1.(f)	Indikator Persentase rumah tangga kumuh perkotaan	Meningkat menjadi 18,6 juta	Perlu upaya tambahan
2	1.4.1.(j)	Indikator Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Meningkat menjadi 77,4%.	Perlu upaya tambahan
3	1.4.1.(k)	Indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	Perlu upaya tambahan
4	1.a.1*	Indikator Proporsi sumber daya yang	Meningkat	Perlu upaya tambahan





No	Kode Indikator (PMDN 7 Tahun 2018)	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
		dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.		
5	1.a.2*	Indikator Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
6	2.2.1.(a)	Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	Perlu upaya tambahan
7	3.4.1.(a)	Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	Perlu upaya tambahan
8	3.4.2*	Indikator Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	Perlu upaya tambahan
9	3.5.1.(e)	Indikator Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	Perlu upaya tambahan
10	3.7.2.(a)	Indikator Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	Perlu upaya tambahan
11	3.8.1.(a)	Indikator Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	Perlu upaya tambahan
12	4.1.1.(g)	Indikator rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Perlu upaya tambahan





No	Kode Indikator (PMDN 7 Tahun 2018)	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
13	4.c.1*	Indikator Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
14	8.9.1.(a)	Indikator Jumlah wisatawan mancanegara	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Perlu upaya tambahan
15	8.10.1.(b)	Indikator Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	Meningkat	Perlu upaya tambahan
16	9.c.1.(b)	Indikator Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Perlu upaya tambahan

4. Isu atau Kebijakan Strategis Daerah : Telaah Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

Penataan ruang wilayah provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalimantan Tengah berbasis pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri, serta sebagai lumbung energi dan lumbung pangan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015- 2035, kebijakan penataan ruang Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dalam rangka mendukung pengembangan potensi provinsi;
3. Perwujudan kawasan agribisnis dan agroindustri dalam rangka mendukung pengembangan pertanian; d. perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan;
4. Perwujudan Kalimantan Tengah sebagai lumbung energi;
5. Pencegahan dampak negatif kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama akibat kegiatan pertanian dan energi;



6. Pengembangan potensi perekonomian melalui penetapan kawasan strategis provinsi; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan Tengah, Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi terdiri atas:

- a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan;
- b. Sistem Jaringan Prasarana utama;
- c. Sistem Jaringan Prasarana lainnya.

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi yang berkaitan dengan Kota Palangka Raya meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Jaringan angkutan sungai dan danau sungai sebangau Kereng Bangkirai, sungai kahayan, Sistem jaringan transportasi perkeretaapian, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi serta Jaringan Distribusi Listrik, Jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi, irigrasi daerah rawa, kawasan peternakan, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pemukiman, kawasan peruntukan transmigrasi, kawasan peruntukan tecnopark bidang tertentu, kawasan peruntukan lainnya, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pengembangan sumberdaya energi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas: Kawasan Strategis Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Palangka Raya, Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG), Kawasan Pertanian Berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan DR. Pasang Surut, DR. Non Pasang Surut, DR. Lebak, Kawasan pertanian lahan gambut, Kawasan pengembangan Peternakan berupa kawasan Peternakan ruminansia dan non ruminansia, Kawasan Strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya, meliputi: Kawasan Strategis sekitar Pahewan, Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas: Cagar Alam Bukit Tangkiling di Kota Palangka Raya, Kawasan Strategis Perlindungan Keanekaragaman Hayati terdiri atas: Hutan Monumental Nyaru Menteng, Danau Rawet, Danau Tahai, Pulau Kaja, Pahewan Tabalien, Danau Tundai, Danau Lewu di Kota Palangka Raya.



5. Isu atau Kebijakan Strategis Daerah : Telaah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah 2005-2025 pada RPJMD tahap ketiga.

Pengembangan potensi di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pembagian wilayah atau zonasi dan Kota Palangka Raya termasuk kedalam Zona 2 (Tengah). Dalam Pembagian zonasi kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibagi menjadi 3 Zona. Antara lain Zona 1 (Barat), Zona 2 (Tengah), dan Zona 3 (Timur), dengan rincian potensi dan pengembangannya sebagai berikut:

Tabel 4.5 Pembagian 3 Zona di Provinsi Kalimantan Tengah

No	Zona	Kabupaten/Kota	Potensi	Pengembangan Potensi
	Zona 1 (Barat)	<ul style="list-style-type: none">• Sukamara• Lamandau• Kotawaringin Barat• Seruyan• Kotawaringin Timur	<ul style="list-style-type: none">– Kelapa Sawit (CPO)– Pertambangan (baja, nikel, lumina, dll)– Perikanan tangkap– Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">▪ Industri berbasis sawit▪ Industri berbasis metal▪ Industri berbasis perikanan tangkap▪ Taman Nasional Tanjung Puting
	Zona 2 (Tengah)	<ul style="list-style-type: none">• Katingan• Gunung Mas• Palangka Raya• Pulang Pisau• Kapuas	<ul style="list-style-type: none">– Pertanian (tanaman pangan)– Perikanan darat– Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">▪ Pengembangan kawasan argo industri Batanjung di Kapuas)▪ Budidaya perikanan sungai▪ Taman Nasional Sebangau
	Zona 3 (Timur)	<ul style="list-style-type: none">• Murung Raya• Barito Utara• Barito Selatan• Barito Timur	<ul style="list-style-type: none">– Batubara– Hasil hutan (kayu, rotan, dll)– Karet– HOB (Heart Of Borneo)	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembangkit tenaga listrik▪ Industri berbasis hasil hutan▪ Industri berbasis karet (rubber industry)▪ Konservasi Hayati di pegunungan Muller Schwaner

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016- 2021



Pengembangan Potensi Komoditas Unggulan Daerah di Kalimantan Tengah Pembangunan spasial berdasarkan 3 zona di Provinsi Kalimantan Tengah menjadikan setiap kabupaten/kota memiliki potensi daerah unggulan untuk dikembangkan sesuai dengan kondisi geografisnya. Dari beberapa potensi tersebut kabupaten/kota diarahkan untuk mengembangkan satu komoditi unggulan yang dapat menjadi “icon” bagi kabupaten/kota tersebut.

Kota Palangka Raya merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, sektor yang menjadi potensi daerah Kota Palangka Raya adalah sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan dan pariwisata. Dari beberapa potensi tersebut sektor peternakan menjadi unggulan Kota Palangka Raya dengan komoditi utama sapi pedaging/potong. Komoditi sapi pedaging/potong cukup berkembang di Kota Palangka Raya. Sapi potong merupakan jenis ternak yang mempunyai nilai jual tinggi diantara ternak-ternak lainnya. Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan daging yang juga meningkat, oleh karena itu usaha sapi potong merupakan salah satu usaha yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain itu pangsa pasar sapi pedaging sangat luas sehingga pemasarannya cukup mudah.

Tabel 4.6 Peluang-Tantangan serta Titik Kekuatan-Titik Kritis Komoditi Sapi Pedaging Kota Palangka Raya

Peluang	Tantangan
<ul style="list-style-type: none">Budidaya sapi bisa diintegrasikan dengan kelapa sawit.Permintaan akan daging sapi setiap tahun selalu meningkat.SDM dan luas lahan yang cukup banyak.Pemasaran sangat terbuka, pasar terbuka lebar.Masih sedikit masyarakat yang beternak sapi.	<ul style="list-style-type: none">Terbatasnya modal usaha.Masyarakat lebih meminati daging ikan dibandingkan daging sapi.
Titik Kekuatan	Titik Kritis (Titik Kelemahan)
<ul style="list-style-type: none">Pemasarannya mudah.	<ul style="list-style-type: none">Ketersediaan pakan terbatas.

Prioritas Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah Pembangunan potensi prioritas di kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah akan berhasil jika didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang merata. Pemerataan aksesibilitas wilayah menjadi penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Berikut prioritas pembangunan kewilayahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain Infrastruktur Jalan dan Jembatan, pengembangan pelabuhan Bukit Pinang, Pengembangan Bandara Tjilik Riwut, Infrastruktur/Prasarana Perhubungan Sungai, Infrastruktur Kereta Api, Infrastruktur Komunikasi dan





Informatika, Infrastruktur Pemukiman dan Perkotaan, Pengembangan Kawasan Ekonomi,

6. Isu atau Kebijakan Strategis Daerah : Telaah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028, Visi pembangunan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH BUDAYA BETANG”

Dalam visi tersebut terkandung perikehidupan Kota (nilai-nilai) yang diidam-idamkan bersama, yaitu :

Tertata dan Berwawasan Lingkungan : Bahwa Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi dan sekaligus Wilayah Kota, secara langsung ataupun tidak langsung mencerminkan citra Kalimantan Tengah. karena itu pembangunan kota harus teratur, tertib, menampilkan nilai-nilai budaya lokal yang relevan serta mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Sejahtera : Adalah kondisi, tingkat dan derajat perubahan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya

Masyarakat Sejahtera adalah terciptanya kondisi kehidupan masyarakat dengan rasa aman dan damai sehingga mampu untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membangun kesejahteraannya : Bahwa Kondisi aman yang didambakan adalah semakin berkurangnya perasaan traumatik di kalangan penduduk Kota Palangka Raya pasca konflik etnik, terciptanya rasa tenteram dalam kehidupan masyarakat, tegaknya supremasi hukum karena didukung oleh aparat yang bersih dan berwibawa. Kondisi internal yang demikian akan membangun citra pihak luar, termasuk calon Investor bahwa Kota Palangka Raya sudah aman dan prospektif untuk dikunjungi dan berusaha. Kehidupan sejahtera ditandai dengan sedikitnya 3 hal, yaitu (1) Kecukupan (sustenance); (2) meningkatkan harga diri/martabat (self esteem); dan (3) kebebasan memilih dan berpartisipasi (freedom).

Falsafah Budaya Betang : Falsafah Budaya Betang perlu diangkat diperkenalkan serta dihayati oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Budaya ini digali dan dibangun dari nilai-nilai, norma-norma dan adat istiadat suku Dayak yang berlaku dan masih relevan dengan kehidupan modern (Setelah disaring oleh nilai-nilai Pancasila). Budaya Betang mengandung nilai-nilai peradaban, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung (Belom-Bahadat), kerukunan, toleransi, demokrasi (Penyang hinje simpei), kesatriaian (Mahaga Petak – Danom), kepemimpinan dan kebersamaan.





Guna mencapai visi sebagaimana ditetapkan di depan maka dirumuskan misi pembangunan Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan yang Berkualitas, Berorientasi Global dengan berkearifan lokal, menuju terwujudnya sumberdaya manusia yang berilmu, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat dan terampil;
- 2) Mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan jasa dan wisata yang terencana, tertata dan berwawasan lingkungan;
- 3) Mewujudkan prasarana dan sarana publik yang terencana, tertata dan berkualitas;
- 4) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari, dunia usaha dan investasi yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian yang berkeadilan dan memberdayakan potensi masyarakat, menuju kehidupan sejahtera dan mandiri;
- 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, dinamis, rukun dan damai dengan menjunjung tinggi falsafah budaya betang;
- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) (aparaturnya pemerintah yang berdisiplin tinggi, profesional, bersih dan berwibawa serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

RPJMD Kota Palangka Raya ke-3 (2018-2023) ditujukan “Untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya manusia berkualitas dan kekhasan budaya daerah”.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kota Palangka Raya.

Daya saing perekonomian daerah semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.





Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai masih sangat perlu untuk tetap menjaga jati diri dengan melakukan revitalisasi budaya sehingga masyarakat tetap hidup rukun dan damai dengan memegang teguh falsafah hidup huma betang.

TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2008 – 2028

VISI RPJPD 2008 – 2028 : Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang





7. Isu atau Kebijakan Strategis Daerah : Telaah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2008 – 2028

Pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode / tahap ketiga. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ketiga RPJPD dan sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023, maka disusun visi pembangunan Kabupaten Katingan 2018-2023

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan 2018-2023, adalah: KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.

Pernyataan Katingan BERMARTABAT memiliki makna: a. BERBUDAYA : masyarakat Katingan memiliki akal budi yang luhur sehingga mampu menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur. b. MAJU : Katingan mampu meningkatkan dan mewujudkan capaian pembangunan dengan menyeimbangkan pembangunan fisik maupun non fisik, menyambut tantangan dan peluang untuk bersaing bersama daerah lainnya. c. RELIGIUS : masyarakat Katingan taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta penuh toleransi dan hidup rukun berdampingan dengan pemeluk agama lain. d. TERINTEGRASI : pembangunan dilakukan dengan melihat seluruh aspek dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama membangun Katingan kedepan. e. BEKESINAMBUNGAN : pembangunan dilaksanakan dengan berpijak pada capaian pembangunan saat ini dan bergerak maju dengan mengerahkan seluruh potensi dan memanfaatkan peluang yang ada secara berkesinambungan dan berkelanjutan. f. AMAN : Kabupaten Katingan selalu dalam kondisi yang kondusif dan aman. g. TERBUKA : Katingan memiliki akses transportasi, komunikasi dan informasi yang baik dan lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterisolasian. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Sejahtera adalah : pembangunan dilaksanakan secara inklusif yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing didukung oleh kondisi wilayah yang aman dan tenteram.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Katingan, sebagai berikut:

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum.
2. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan.
3. Memantapkan pembangunan perdesaan.



4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender.
5. Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi.
6. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan.
7. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam heterogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya.

Dalam pencapaian misi dimaksud beberapa arah kebijakan yang diambil Kabupaten Katingan antara lain sebagai berikut:

a) MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM

Arah kebijakan:

- Peningkatan kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel
- Peningkatan kualitas pelaporan keuangan
- Peningkatan inovasi pelayanan publik
- Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam penegakan hukum

b) MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN.

Arah kebijakan:

- Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan.
- Penguatan rantai nilai komoditi pertanian
- Peningkatan kualitas irigasi
- Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau
- Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, termasuk pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara.
- Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
- Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM
- Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembiayaan bagi koperasi

c) MISI 3: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN.

Arah kebijakan:





- Peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
- Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan BUMDes
- Peningkatan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan
- Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
- Peningkatan penerapan jenis pelayanan dasar bidang kesehatan
- Peningkatan kualitas dan cakupan layanan sarana dan prasarana kesehatan
- Peningkatan preventif dan promosi kesehatan
- Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis
- Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu
- Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- Peningkatan kesejahteraan keluarga
- Penguatan kelembagaan pengarusuteraan gender dan anak.
- Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

d) MISI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI.

Arah kebijakan:

- Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten
- Peningkatan kualitas jalan dan Jembatan
- Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan
- Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum
- Peningkatan kualitas sanitasi Lingkungan
- Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
- Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika

e) MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN.

Arah kebijakan:

- Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3.
- Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pengendalian kebakaran hutan.





- Pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam.
- f) MISI 7: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA

Arah kebijakan:

- Pengembangan wawasan kebangsaan.
 - Peningkatan fasilitasi kerukunan Beragama
 - Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
 - Pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang pembangunan.
8. **Isu atau Kebijakan Strategis Daerah : Telaah Terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 – 2028**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pulang Pisau selama lima tahun (2018-2023) adalah sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera“

Visi diatas terdiri atas 4 frase (bagian), yaitu Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Inovatif**

Memiliki makna bahwa pemerintah daerah bersama masyarakat dan dunia usaha maupun melakukan inovasi yang mana daerah di masa kini dan masa depan akan selalu berorientasi pada kemampuan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi diperlukan sebagai bentuk kemampuan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Inovasi Daerah diharapkan berbentuk inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. **Maju**





Memiliki makna bahwa kualitas sumber daya manusia yang terus membaik yang ditandai dengan terus membaiknya angka IPM Kabupaten Pulang Pisau, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta daya saing dan daya Tarik daerah yang terus membaik. Upaya secara terus menerus untuk menciptakan SDM yang berkualitas, baik dari aspek pendidikan maupun aspek kesehatan, berlandaskan iman menjadi hal yang sangat penting. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.

3. Berkeadilan

Diartikan bahwa segala upaya dan hasil berbagi sektor pembangunan dirasakan masyarakat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Pelayanan pemerintah yang prima merupakan syarat penting untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintah berjalan secara demokrasi, tata hukum, transparan, menerapkan system perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan. Membaiknya aksesibilitas masyarakat miskin terhadap sarana dan prasarana publik yang baik serta berkembangnya wilayah-wilayah hilir/pesisir infrastruktur perkotaan dan pedesaan yang baik.

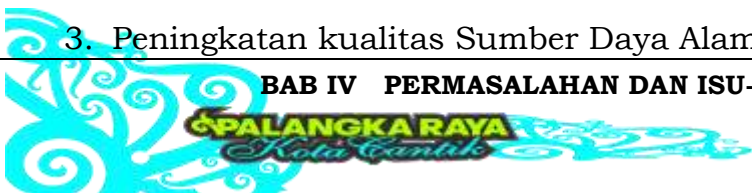
4. Sejahtera

Diartikan segala upaya pemanfaatan potensi daerah oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah memberikan peningkatan taraf kehidupan masyarakat secara ekonomis dan sosial, dan sejahtera lahir dan batin. Sebelum kondisi masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang mampu bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar, meliputi sandang, pangan, papan, memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan secara layak dan memadai, sehingga dapat memacu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pulang Pisau serta menurunkan angka kemiskinan masyarakat.

Untuk pencapaian visi diatas ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu sebagai berikut :

1. Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasaran Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
2. Peningkatan Produktivitas Hasil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan





4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan
6. Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (*Good and Clean Governance*).
7. Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pulang Pisau yaitu Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Adapun Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau antara lain:

- a) Misi 1 : Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.

Arah Kebijakan:

- Meningkatkan kualitas sarana prasarana serta konektivitas jalan dan jembatan
- Pengembangan layanan jaringan kelistrikan
- Meningkatkan layanan air bersih melalui jaringan air minum perkotaan dan perdesaan
- Meningkatkan kualitas sarana prasarana jaringan irigasi
- Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW
- Optimalisasi fungsi pelabuhan laut
- Peningkatan jaringan simpul transportasi
- Pengembangan sistem pembiayaan dan penyediaan perumahan
- Penataan dan peningkatan kualitas permukiman

- b) Misi 2 : Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan

Arah Kebijakan :

- Pengembangan kawasan industri
- Peningkatan kemitraan dengan pelaku ekonomi
- Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pertanian dan perikanan
- Peningkatan penerapan teknologi tepat guna
- Pemberdayaan kelompok tani dan nelayan

- c) Misi 3 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan





Arah Kebijakan :

- Pengendalian pencemaran udara dan air
- Penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan LH
- Restorasi Gambut
- Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dalam mitigasi bencana

d) Misi 4 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Arah Kebijakan :

- Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
- Pemerataan penempatan tenaga pendidik (guru)
- Meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi
- Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
- Pemerataan penempatan tenaga kesehatan

e) Misi 5 : Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan

Arah Kebijakan :

- Pemberdayaan koperasi dan UMKM
- Peningkatan pengelolaan destinasi wisata
- Peningkatan pengelolaan seni budaya
- Peningkatan promosi paket wisata
- Peningkatan sarana dan prasarana layanan PMKS
- Peningkatan pembinaan keterampilan PMKS
- Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan kerja

f) Misi 6 : Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (Good and Clean Governance)

Arah Kebijakan :

- Revolusi Mental Aparatur
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- Penerapan *e-government* pada instansi pemerintah

g) Misi 7 : Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan

Arah Kebijakan :

- Pemberian bantuan kegiatan keagamaan
- Pemberian insentif pada tokoh adat, pemuka agama dan guru agama
- Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- Peningkatan kualitas pembinaan terhadap organisasi kepemudaan
- Peningkatan pembinaan kelembagaan perempuan
- Peningkatan pembinaan perempuan dalam keluarga

BAB V





BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 VISI

Bertitik tolak dari gambaran permasalahan dengan analisis potensi keunggulan Kota Palangka Raya, maka disusunlah visi, misi, dan program pembangunan Kota Palangka Raya untuk periode lima tahun ke depan.

“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” adalah menjadi kota yang teridentifikasi dalam 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam aspek: pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan, dan kesehatan.

Yang dimaksud dengan **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG MAJU** adalah:

1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatnya daya beli masyarakat.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur dan teknologi informasi untuk menjadi kota yang cerdas.
3. Meningkatnya kemandirian ekonomi kota menuju kota jasa yang berkelanjutan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat dan membaiknya mutu lingkungan hidup.

Adapun yang dimaksud dengan **TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA** adalah:

1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.
5. Terwujudnya kesejahteraan lahir dan bahtin melalui upaya pemanfaatan potensi sumberdaya oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dengan membangun kebersamaan dalam semua dimensi kehidupan.





5.2. MISI

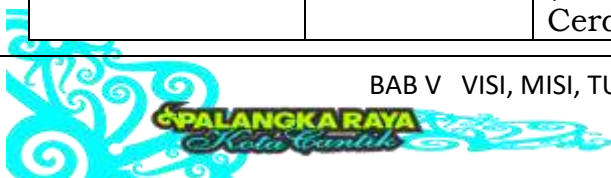
Berdasarkan uraian dari makna Visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 5 (Lima) tahun ke depan disusunlah Misi sebagai berikut.

1. **Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya *Smart Environment* (Lingkungan Cerdas)**
Meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
2. **Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)**
Meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
3. **Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)**
Meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1. berikut:

Tabel 5.1 Keterkaitan antara visi dan misi Kota Palangka Raya Tahun 2018–2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Misi	Arah Misi
Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju	Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)	Pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Rukun	Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat <i>Smart Society</i> (masyarakat Cerdas)	Pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan.
	Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Sejahtera	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)	Pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.





Tabel 5.2 Kesesuaian dan konsistensi antara Misi RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Misi RPJMN 2020-2024

No	MISI RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016-2021	MISI RPJMD KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018-2023
1	Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)
2	Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 4 : Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan	Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
		Misi 8 : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
3	Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 1 : Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi	Misi 1 : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
		Misi 2 : Pengelolaan Infrastruktur	Misi 1 : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
4	Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi 3 : Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai	Misi 1 : Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya <i>Smart Environment</i> (Lingkungan Cerdas)
		Misi 7 : Pengelolaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam	Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
5	Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas) Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
6	Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)
7	Misi 7: Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi 6 : Peningkatan Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata	Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas) Misi 3 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran <i>Smart Economy</i> (Ekonomi Cerdas)
8	Misi 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)
9.	Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 5 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Misi 2 : Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat <i>Smart Society</i> (Masyarakat Cerdas)



5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Hal ini dilakukan mengingat bilamana Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dijabarkan secara teknokratis dan partisipatif kedalam Tujuan dan Sasaran, maka program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan mengalami kesulitan dalam mengoperasionalkannya ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dijelaskan di atas, maka dirumuskan beberapa Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang diuraikan secara umum berdasarkan Visi dan Misi yang ada sebagai berikut:

1. **Misi Satu: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)** meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi. Ditetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan dan 5 (lima) Sasaran Pembangunan adalah:

Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas infrastruktur dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)
2. Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)
3. Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang ((M1S3)
4. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)

Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)





2. **Misi Kedua: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas)** meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan, dan keamanan. Dengan 3 (tiga) Tujuan dan 8 (delapan) Sasaran Pembangunan:

Tujuan 3: Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)
3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)
4. Menurunnya Kemiskinan (M2S4)

Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)

Tujuan 5: Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)

3. **Misi Tiga: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran *Smart Economy* (Ekonomi Cerdas)** meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan. Terdiri dari 1 (satu) Tujuan Pembangunan dengan 2 (dua) Sasaran Pembangunan yaitu:

Tujuan 6: Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Sasaran Pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)
2. Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)



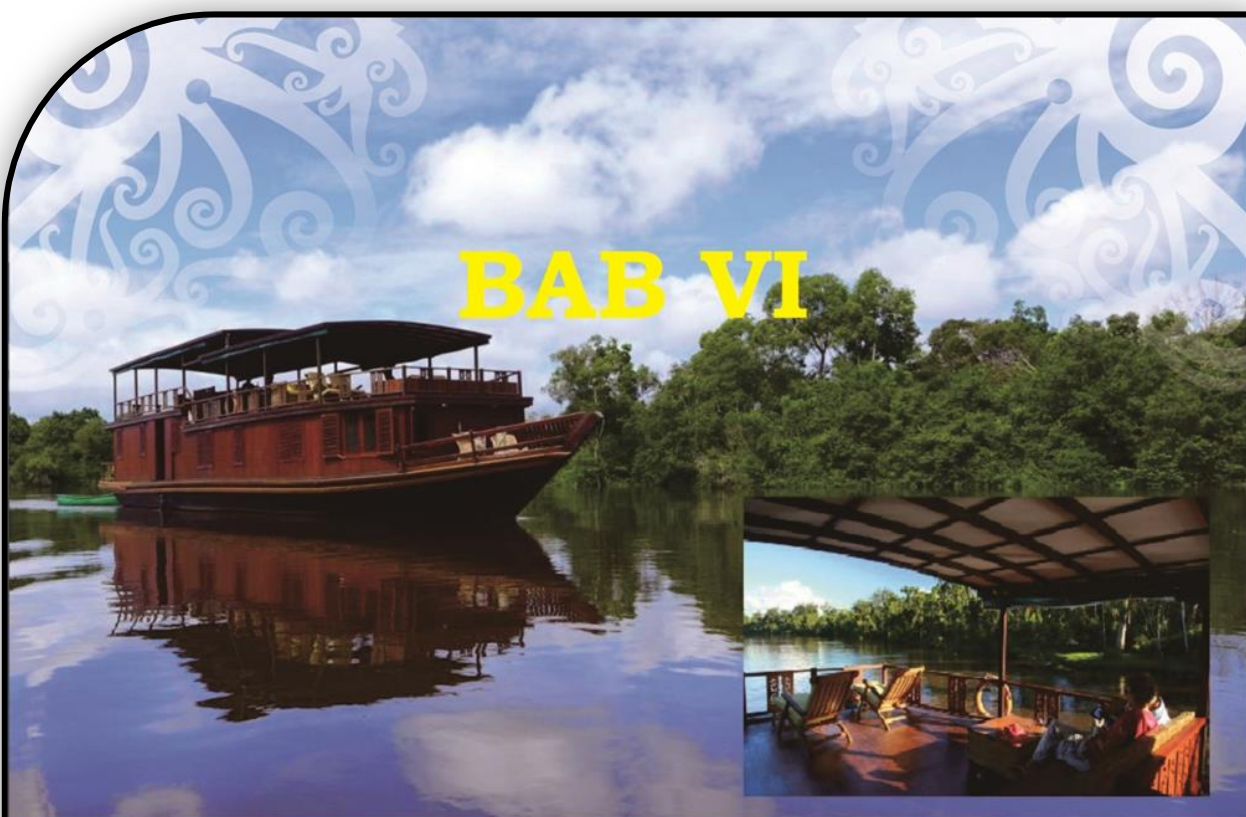
Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator
Visi: Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		FORMULA		KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2018		TARGET TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
												2019	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4		5		6		7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas) (M1)	1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur			Indeks Kualitas Infrastruktur	IKI=25%(IKPU)+25%(IKPR)+25%(TU)+25%(TI)							32.38	33.44	34.55	34.55
				1	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)	40% PJ + 30% PD + 30% PG					63	64	65	65		
				2	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)	(RLH + PSU)/2					65.30	68.46	71.63	71.63		
				3	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)	Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi	(Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum/Total Kecamatan)x100%	60%				60%	60%	80%	80%		
				4	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)	Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI)	(Kelurahan yang terkoneksi Jaringan Internet/Total Kelurahan) x 100%	60%				63%	70%	76%	76%		
		2	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = (Nilai IKA x 30%) + (Nilai IKU x 30%) + (Nilai IKTL x 40%)	67.50				63.50	63.50	63.50	63.50		
				5	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	IKTL = 100 - ((84,3-THx100))x50/54,3					50	50	50	50		
						Indek Kualitas AIR	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{i_{ij}}$ $Rumus\ metode\ IP:$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/i_{ij})^2}{\sum_{i=1}^n (C_i/i_{ij})^2}}$ $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow \text{cemar ringan}$ $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow \text{cemar sedang}$ $PI_j > 10,0 \rightarrow \text{cemar berat}$				70	70	70	70			
			Indeks Kualitas Udara	IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)]					75	75	75	75					

MISI	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	FORMULA	KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2018	TARGET TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) (M2)	3 Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Data Dari BPS	79.70	79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80.20
			6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (M2S1)	Angka Harapan Hidup Berdasarkan Data Dari BPS	73.13	73.20	73.15	73.17	73.19	73.19	73.19
			7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)	Harapan Lama Sekolah	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.10	11.10
					Rata-Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan			11.80	11.84	11.85	11.85
			8	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.00	5.78	5.84	5.84	5.78	5.72	5.72
			9	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)	Menurunnya Angka Kemiskinan berdasarkan Data BPS	9.78%	9.69%	9.69%	9.72%	9.69%	9.66%	9.66%
	4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Indeks RB dari Menpan	C	C	C	CC	CC	B	B
			10	Meningkatnya Kualitas Penerapan RP (M2S5)	Hasil Penilaian Indeks RB dari Menpan	C	C	C	CC	CC	B	B
			11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	CC	CC	CC	CC	CC	B	B
					Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)	IKM <div>IKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsus}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \frac{\text{Nilai penimbang}}{14}$ Dimana: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsus}} = \frac{1}{14} = 0,071$</div>	B	B	B	B	A	A	A
	5 Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di kalangan Masyarakat			Indeks Ketertiban dan Keamanan	IKK=(AK + AP)/2				10.38	10.30	10.28	10.28
			13	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)	(Jumlah Kriminalitas Tahun N) - (Jumlah Kriminalitas Tahun N-1)	6.00	5.90	5.80	5.75	5.60	5.55	5.55
					AK= (Jumlah Konflik Tahun n) - (Jumlah Konflik Tahun n-1)				15	15	15	15

MISI		TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR		FORMULA		KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2018		TARGET TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
												2019	2020	2021	2022	2023	
1		2		3		4		5		6		7	8	9	10	11	12
3	Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi cerdas) (M3)	6	Meningkatkan perekonomian daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Data BPS	6.96	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20	7,20			
				14	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	((PDRB Pertanian Tahun n) - PDRB Pertanian Tahun n-1)/(PDRB Pertanian Tahun n-1))x 100%	1.74	7.15	3.30	4.06	4.05	4.04	4.04			
						Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	((PDRB Sektor Perdagangan Tahun n) - PDRB Sektor Perdagangan Tahun n-1)/PDRB Sektor Perdagangan Tahun n-1))x 100%	10.99	9.43	8.05	8.99	8.86	8.69	8.69			
						Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	((PDRB Sektor Industri Tahun n) - PDRB Sektor Industri Tahun n-1)/(PDRB Sektor Industri Tahun n-1))x 100%	3.52	3.60	7.33	6.16	6.31	6.41	6.41			
				15	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)	Nilai Investasi	Nilai investasi tahun (n) - nilai investasi thn (n-1) / nilai investasi thn (n) × 100% (Milyar)		200	225	255	295	350	350			

BAB VI



PALANGKA RAYA
Kota Cantik





BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Setelah tujuan dan sasaran dan indikator kinerja RPJMD dirumuskan, dibutuhkan metodologi atau teknis dalam menentukan program/kegiatan prioritas apa suatu target kinerja akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Metodologi itu adalah berupa perumusan strategi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi Informasi.



Tabel 6.1 Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi Berada Dalam Kota Palangka Raya

No.	Kawasan Strategis Nasional	Lokasi
1.	Pengembangan/peningkatan kualitas Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan
No.	Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Lokasi
1.	<p>KSP Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>a. kawasan strategis Pusat Kegiatan Nasional (PKN)</p> <p>b. kawasan pengembangan lahan gambut (PLG)</p> <p>c. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi</p> <p>d. pertanian lahan gambut budidaya</p> <p>e. kawasan pengembangan peternakan berupa kawasan peternakan ruminansia dan non ruminansia</p> <p>f. kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao)</p> <p>g. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan</p>	<p>Kota Palangka Raya</p> <p>1. Kecamatan Pahandut</p> <p>2. Kecamatan Jekan Raya</p> <p>3. Kecamatan Sabangau</p> <p>4. Kecamatan Bukit Batu</p> <p>1. Kecamatan Pahandut</p> <p>2. Kecamatan Sabangau</p> <p>Kecamatan Sabangau</p> <p>Kecamatan Bukit Batu</p> <p>1. Kecamatan Bukit Batu</p> <p>2. Kecamatan Rakumpit</p> <p>Kecamatan Bukit Batu</p>
2.	KSP Sosial Budaya Kawasan Pahewan Tabalien	Kecamatan Rakumpit
3.	KSP Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi	Kecamatan Bukit Batu
4.	<p>KSP Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</p> <p>a. DAS Kahayan dan DAS Sebangau</p> <p>b. Cagar Alam Bukit Tangkiling</p> <p>c. Hutan Monumental Nyaru Menteng</p> <p>d. Danau Rawet</p> <p>e. Danau Tundai</p> <p>f. Danau Tahai</p> <p>g. Pulau Kaja</p> <p>h. Danau Lewu</p> <p>h. Pahewan Tabalien</p>	<p>Kota</p> <p>Kecamatan Bukit Batu</p> <p>Kecamatan Bukit Batu</p> <p>Kecamatan Jekan Raya</p> <p>Kecamatan Sabangau</p> <p>Kecamatan Bukit Batu</p> <p>Kecamatan Bukit Batu</p> <p>Kecamatan Bukit Batu</p> <p>Kecamatan Rakumpit</p>



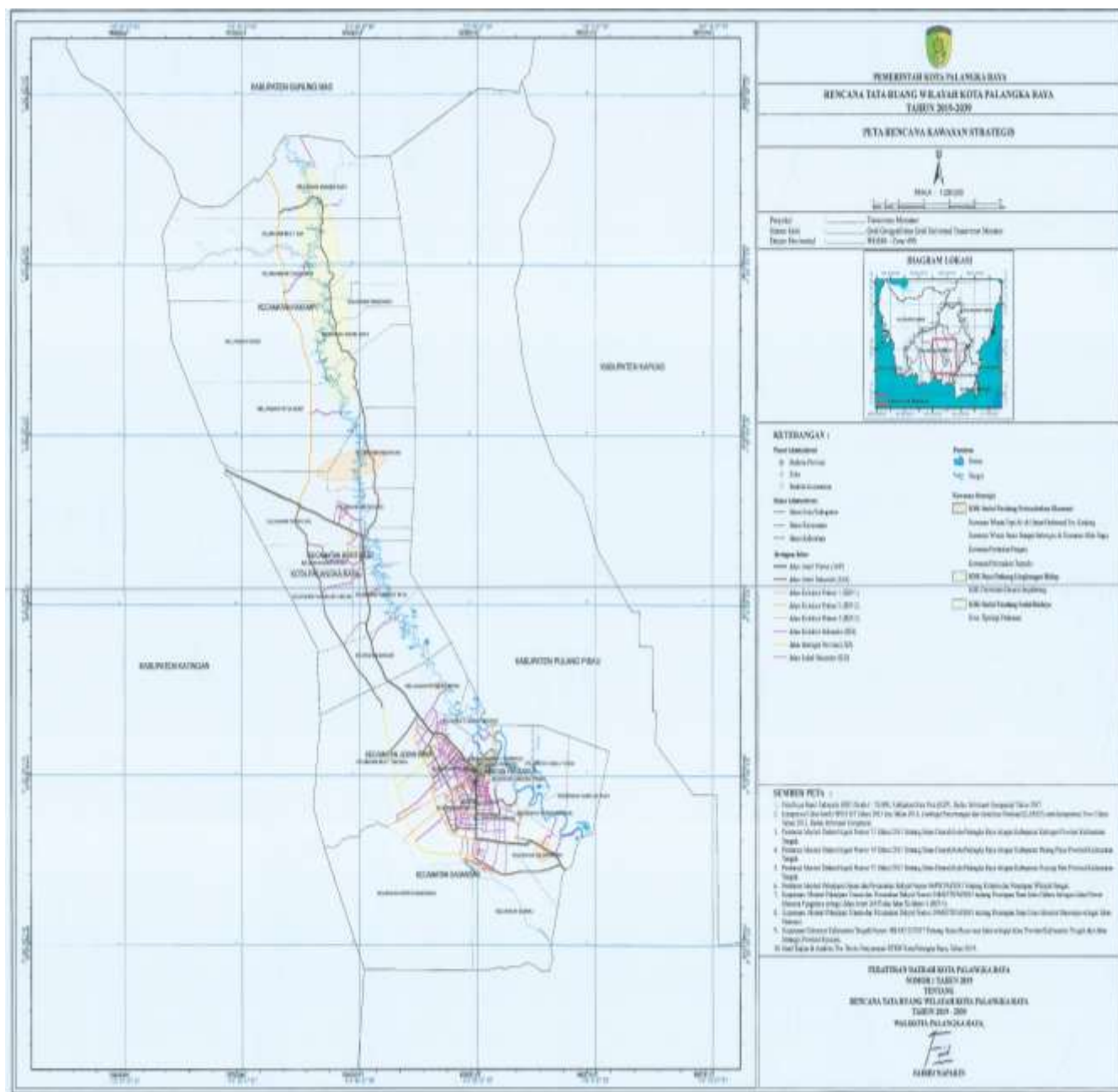


Tabel 6.2 Kawasan Strategis Kota Palangka Raya

No.	Kawasan Strategis Kota (KSK)	Lokasi
1.	<p>KSP Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>a. Kawasan pengembangan wisata tepi air (waterfront city), terintegrasi dengan pengembangan kawasan perikanan budidaya Pahandut Seberang dan pengembangan kawasan wisata hutan dan outbound Terusan Kudung.</p> <p>b. Kawasan pengembangan wisata susur Sungai Sebangau yang dintegrasikan dengan kawasan olahraga terpadu Sabaru.</p> <p>c. Kawasan pengembangan pertanian terpadu</p> <p>d. Kawasan Wisata Sei Gohong dan kawasan pengembangan wisata taman safari yang terintegrasi dengan kawasan peternakan pengembalaan umum dan/atau penangkaran rusa</p>	<p>Kecamatan Pahandut</p> <p>Kecamatan Sabangau</p> <p>Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Bereng Bengkel, Kecamatan Sabangau</p> <p>Kecamatan Bukit Batu</p>
2.	<p>KSK Sosial Budaya meliputi kawasan tipologi perdesaan</p>	<p>Kelurahan Kanarakan, Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Bukit Sua, dan Kelurahan Mungku Baru</p>
3.	<p>KSK Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi Kawasan pengembangan wisata Danau Hanjalutung, Kecamatan Jekan Raya.</p>	<p>Kecamatan Jekan Raya</p>



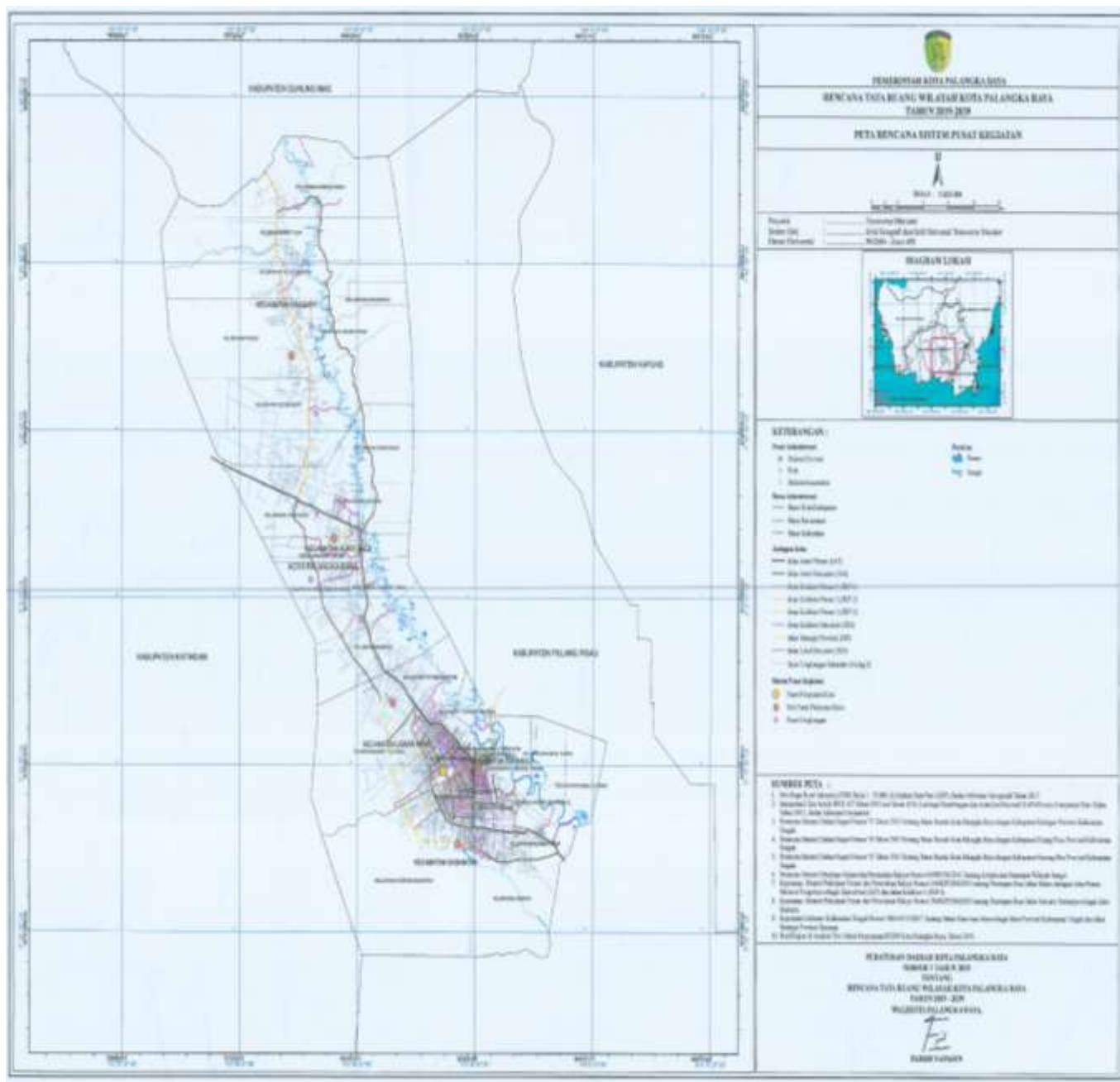
Gambar 6.1 Peta Kawasan Strategis Kota Palangka Raya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, 2019



Gambar 6.2 Peta Pusat Kegiatan Kota Palangka Raya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya, 2019



6.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus merupakan budaya berpikir strategik. Pemahaman strategis dan berpikir strategik timbul sebagai konsekuensi logis arsitektur perencanaan pembangunan daerah yang dibagi menjadi dua, yaitu:

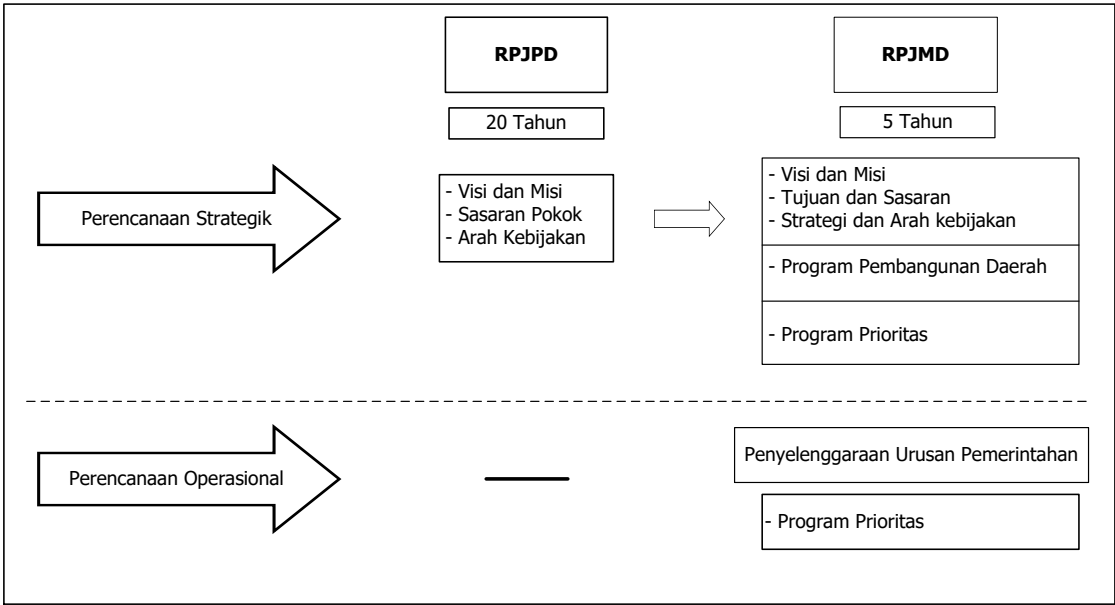
1. Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian Visi dan Misi pembangunan daerah, sekaligus menerjemahkan Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota ke dalam rencana kerja yang dapat diaplikasikan.
2. Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Selain hal tersebut di atas, perencanaan sekaligus dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja yang *actionable*. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis.



Perencanaan strategik didukung oleh keberhasilan kinerja dari implementasi perencanaan operasional dengan kerangka sebagaimana dijelaskan dalam gambar 6.3 berikut ini:

Gambar 6.3 Pemisahan Rencana Strategis dan Operasional



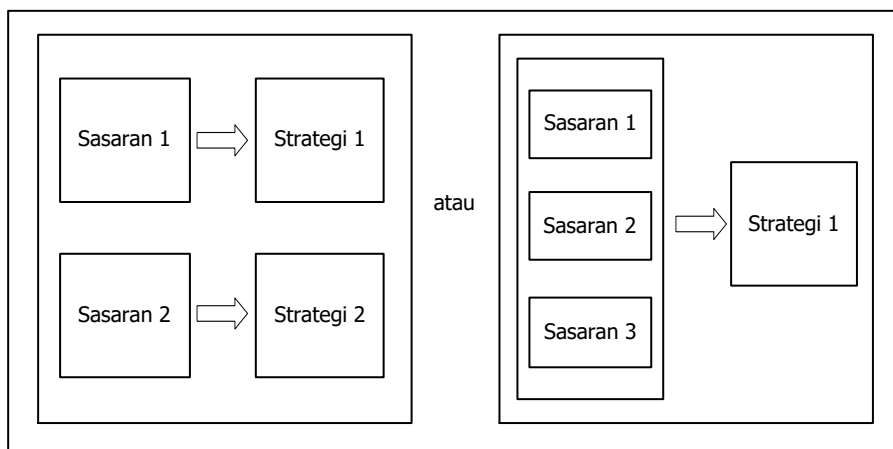
Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

1. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang;
2. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
3. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
4. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.



Suatu strategi, dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana gambar pada 6.4 berikut ini:

Gambar 6.4 Keterkaitan Sasaran Dengan Strategi



Dari gambar di atas, jelas bahwa perumusan strategi membutuhkan kesatuan tujuan untuk mendapatkan kesatuan tindak. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah);
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan (arah kebijakan dan kebijakan umum) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.



Berdasarkan kertas kerja yang telah dikembangkan, beberapa strategi pembangunan jangka menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 yang mungkin dapat dilakukan yaitu terdiri dari 3 (tiga) Strategi, dimana setiap strategi yang ada akan terhubung dengan satu atau lebih sasaran, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.3 Analisis SWOT Kota Palangka Raya

SWOT	Streght (S):	Kelemahan (W):
	<div>1. Sebagai pusat Pemerintah Provinsi dan kota</div> <div>2. Posisi strategis bagi 13 kabupaten di Kalimantan Tengah</div> <div>3. Aksesibilitas ke semua wilayah Kalimantan dan luar Kalimantan</div> <div>4. Di bidang Pendidikan, Kota Palangka Raya memiliki perguruan tinggi negeri dan Perguruan Tinggi Swasta, Sekolah-Sekolah Tinggi, balai pelatihan kerja, dan berbagai komunitas pendidikan</div> <div>5. Tersedianya lahan yang strategis untuk pengembangan industri yang mendorong perekonomian, investasi serta properti.</div> <div>6. Pemerataan Infrastruktur Wilayah (infrastruktur jalan, jembatan, pasar modern dan tradisional, sekolah, kampus, sarana olah raga, sarana transportasi umum, terminal, jaringan pejalan kaki, jaringan listrik, prasarana telematika, dan jaringan air bersih yang memadai, akses cepat menuju bandar udara)</div> <div>7. Memiliki sarana kesehatan yang memadai terdiri dari Rumah Sakit Umum, rumah sakit swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Apotik, Klinik KB, Balai Pengobatan, Rumah Obat, dan Laboratorium Medis yang</div>	<div>1. Tata ruang kota belum disahkan</div> <div>2. Kesenjangan infrastruktur antar kecamatan</div> <div>3. Investasi belum banyak ke sektor padat modal</div> <div>4. Terbatasnya jenis dan jumlah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung wisata</div> <div>5. Kondisi pada daratan luas yang diapit sungai Sabangau, sungai Kahayan dan sungai Rungan serta saluran drainase yang kurang berfungsi menyebabkan banjir mengancam setiap musim hujan</div> <div>6. Lahan tidur belum termanfaatkan dan rentan bahaya kebakaran lahan dan hutan. Kondisi ini seperti di jalan lingkar luar, jalan Tjilik Riwut terus ke arah Kasongan, Jln Mahir Mahar hingga arah menuju Pulang Pisau</div> <div>7. Kota Palangka Raya, belum memiliki produk keunggulan yang dipasarkan ke luar daerah, industri yang ada hanya skala kecil dan mikro dan cenderung lambat berkembang</div>



	<p>didukung tenaga medis yang memadai</p> <p>8. Terdapat media massa yang cukup beragam, seperti koran, media online, radio dan televisi swasta</p> <p>9. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dan meningkat</p> <p>10. Terdapat UMKM dalam jumlah yang cukup besar dan beragam</p> <p>11. Terdapat sarana pendukung pariwisata yang memadai, seperti hotel, restoran/rumah makan, agen atau biro perjalanan, money changer, situs-situs bernilai sejarah/heritage</p> <p>12. Terdapat banyak lembaga swadaya masyarakat, keagamaan, dan pendidikan keagamaan, forum, dan paguyuban masyarakat.</p> <p>13. Tersedianya tokoh-tokoh potensial (agama, seni, budaya, sosial politik)</p> <p>14. Kondisi ketertiban sosial Kota Palangka Raya yang kondusif bagi berjalannya pembangunan</p> <p>15. Rencana Pengalihan Ibu Kota Negara Ke- Provinsi Kalimantan Timur berdampak ke- Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Daerah Penyangga Ibu Kota Negara</p>	
Opportunities (O):	Strategi (S+O)	Strategi (W-O)
<p>1. Akses dari dan menuju ke Kota Palangka Raya melalui darat, sungai, laut (melalui kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau) dan udara</p> <p>2. Kebijakan pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan ruang yang luas dan dinamis bagi Kota</p>	<p>1. Memanfaatkan kebijakan otonomi daerah yang seluasluasnya dengan menggunakan SDM yang memadai</p> <p>3. Peningkatan Peran Tokoh Potensial Daerah dalam percepatan pembangunan.</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan terhadap bidang-bidang minat, bakat, dan ketrampilan khusus masyarakat</p> <p>5. Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial</p>	<p>1. Meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>2. Pemberdayaan masyarakat miskin</p> <p>3. Kerjasama dengan pemerintah daerah atau lembaga lain (akademisi, LSM, swasta) dalam melaksanakan/menjalankan program/kegiatan.</p> <p>4. Peningkatan keindahan kota berbasis pelestarian lingkungan</p> <p>5. Mengadakan kerjasama</p>



<p>Palangka Raya untuk melaksanakan pembangunan</p> <p>3. Adanya berbagai Program Nasional beserta seluruh struktur pendukungnya yang menjangkau Kota Palangka Raya adalah peluang yang baik yang harus dimanfaatkan</p> <p>4. Adanya semangat kepemimpinan dari Walikota dan Wakil Wali Kota Palangka Raya masa jabatan 2018-2023</p> <p>5. Kemajuan kota yang pesat membuat Kota Palangka Raya sebagai tujuan investasi sektor tersier.</p>	<p>6. Meningkatkan peran lembaga keagamaan/tokoh agama, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan keumatan dan kemasyarakatan</p> <p>7. Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam upaya pemberdayaan dan prestasi</p> <p>8. Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan</p> <p>9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan</p> <p>10. Peningkatan kesehatan sosial masyarakat</p> <p>11. Fasilitasi investasi pengembangan destinasi wisata, baik destinasi lama maupun baru</p> <p>12. Optimalisasi sentra wisata kreatif dan yang berbasis lingkungan</p> <p>13. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan revitalisasi pertanian.</p> <p>14. Meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan legitimasi peraturan daerah</p> <p>15. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya local</p>	<p>dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengurus/staff</p> <p>6. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berbasis potensi sumber daya lokal</p> <p>7. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik</p> <p>8. Meningkatkan pelaksanaan</p> <p>9. Meningkatkan pelaksanaan reformasi pelayanan publik</p> <p>10. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi</p> <p>11. Pengarusutamaan gender dan pengendalian pertumbuhan penduduk</p> <p>12. Peningkatan dan optimalisasi investasi skala besar, disertai kajian kemanfaatan dan resiko yang akan ditimbulkan</p>
ANCAMAN	S + T	W + T
<p>1. Arus Urbanisasi dan pendatang yang masuk ke Kota Palangka Raya semakin tinggi.</p> <p>2. Penetrasi kekuatan ekonomi pasar global dan perdagangan bebas.</p> <p>3. Krisis ekonomi global berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi Kota Palangka Raya</p> <p>4. Pertumbuhan sektor properti yang kurang terkendali, mengancam tata ruang kota.</p>	<p>1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan</p> <p>2. Mengembangkan sistem perencanaan daerah integratif, dengan keterlibatan publik yang seluas-luasnya</p> <p>3. Perluasan lapangan kerja</p> <p>4. Penggunaan alokasi dana untuk pogram/kegiatan sesuai kebutuhan pembangunan</p> <p>5. Meningkatkan komunikasi untuk menyamakan persepsi dengan berbagai pelaku</p>	<p>1. Penataan kawasan industri kecil menengah terpadu</p> <p>2. Optimalisasi peran pemerintah dalam perlindungan dan pembinaan UKM</p> <p>3. Pengembangan sistem transportasi terpadu</p> <p>4. Peningkatan akses transportasi guna memperlancar aktivitas ekonomi industri</p> <p>5. Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup</p> <p>6. Peningkatan pembangunan sarana pemukiman dan drainase</p> <p>7. Optimalisasi dan penyempurnaan penataan</p>





<div>5. Semakin berkurangnya jumlah Ruang Terbuka Hijau.</div> <div>6. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang semakin tinggi, berpotensi menimbulkan kemacetan dan menambah polusi udara.</div> <div>7. Pertambahan penduduk yang cukup tinggi, menjadi beban kota dan memicu persoalan sanitasi, serta persoalan sosial</div>	<div>pembangunan di Kota Palangka Raya</div> <div>6. Mengintensifkan promosi pemasaran produk-produk unggulan daerah</div> <div>7. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah</div>	<div>ruang</div> <div>8. Peningkatan pengendalian dan pengawasan program pembangunan terkait tata ruang</div> <div>9. Optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan guna pembangunan</div> <div>10. Pengendalian dampak kewilayahan dari keberadaan industri berskala besar</div> <div>11. Optimalisasi kebudayaan tradisional Palangka Raya sebagai kekayaan daerah untuk menunjang sektor pariwisata</div> <div>12. Optimalisasi fungsi koperasi dalam menunjang keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah</div> <div>13. Peningkatan upaya guna menjamin keberlangsungan usaha yang layak bagi para pelaku usaha mikro</div> <div>14. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja industri</div> <div>15. Revitalisasi pasar tradisional</div>
---	---	---



Tabel 6.4 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 dan Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

SASARAN		STRATEGI					AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
		2019	2020	2021	2022	2023	
1		2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)	Strategi (S1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah					<ul style="list-style-type: none">- Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan- Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar- Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)						
3	Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang ((M1S3)						
4	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)						
5	Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)						
6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)	Strategi (S2) Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan, dan Pelayanan Publik					<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing- Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan- Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
7	Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)						
8	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)						
9	Menurunnya Kemiskinan (M2S4)						
10	Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)						
11	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)						
12	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)						
13	Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)						
14	Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)	Strategi (S3) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah					<ul style="list-style-type: none">- Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
15	Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)						



Berdasarkan tabel 6.4 di atas, terlihat jelas bahwa pencapaian sasaran pembangunan RPJMD ditentukan oleh keberhasilan dalam perumusan strategi yang kemudian ditindaklanjuti dengan realisasi pelaksanaan strategi sebagai prioritas pembangunan (*strategy focused organization*) lima tahun mendatang. Dalam manajemen kinerja, prioritas pembangunan merupakan salah satu teknik dalam mengarahkan perhatian birokrasi terhadap fokus utama pembangunan daerah. Untuk itu, pemerintah daerah telah menyusun strategi pembangunan sebagaimana telah dijelaskan pada tabel 6.3. di atas sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Penjelasan ketujuh prioritas pembangunan dalam RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Strategi (S1) Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Strategi pertama yang akan dilakukan adalah Pemerataan Infrastruktur Wilayah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)
2. Meningkatnya Kualitas Permukiman (M1S2)
3. Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang ((M1S3)
4. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)
5. Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)

Infrastruktur wilayah seperti pembangunan jalan dalam dan luar kota, jalan lingkungan, jembatan, perhubungan, penyediaan air bersih, sarana dan prasarana kesehatan, serta infrastruktur pendidikan merupakan hal pokok dan mendasar sebagai pendukung kehidupan khususnya masyarakat kota Palangka Raya. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah dan aktivitas sosial ekonomi lainnya mengingat infrastruktur dasar merupakan aset penting dalam mendukung seluruh aspek pembangunan daerah.

Koordinasi yang baik dalam meningkatkan infrastruktur dasar menuju pusat-pusat layanan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan merupakan upaya yang tepat dalam mempercepat pelayanan publik sehingga efektifitas pelayanan masyarakat dapat tercapai; khususnya di daerah-daerah terpencil. Suksesnya peningkatan aksesibilitas sangat tergantung pada kuatnya derajat konektivitas ekonomi, baik daerah, nasional, maupun internasional.



Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang terkait dengan upaya untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang termasuk penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang terkait dengan upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program. Diharapkan pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Salah satu cakupan penting dalam penataan ruang wilayah adalah penentuan dan penataan ruang terbuka hijau.

Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, kota yang berkembang cepat sebagai kota transit, perdagangan, jasa, juga penghubung kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Salah satu kebutuhan utama adalah alat transportasi. Transportasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi masyarakat karena terkait dengan aktivitas sosial, ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan sebagainya.

Strategi pembangunan melalui pengelolaan pertanian dalam arti luas dengan berorientasi pasar yang didukung dengan kelembagaan, teknologi dan kemudahan permodalan serta informasi yang didukung oleh prasarana penunjang. Selain itu, Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Pesatnya pembangunan akan mendorong pemanfaatan tambang di Kota Palangka Raya akan lebih besar lagi. Untuk itu dalam pembangunan perlu berorientasi pada kelestarian alam, memperhatikan kerusakan hutan, keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, meningkatkan peluang usaha pertambangan skala kecil di wilayah terpencil, meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah dan menerapkan good mining practice di lokasi tambang yang sudah ada. masih Terdapat pertambangan yang tanpa ijin beroperasi di Kota Palangka Raya. Dengan demikian perusahaan yang ada kurang memiliki kesadaran tentang hukum, terutama untuk mengurus ijin pertambangan.



2. Strategi (S2) adalah Peningkatan pelayanan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, Keamanan, dan Pelayanan Publik.

Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (M2S1)
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan (M2S2)
3. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)
4. Menurunnya Kemiskinan (M2S4)
5. Meningkatnya Kualitas Penerapan RB (M2S5)
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)
7. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)
8. Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)

Pembangunan di bidang kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Peningkatan akses dan mutu di bidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pula pembangunan di bidang ini secara mendasar.

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan jati diri manusia dan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi dan kualitas manusia secara normatif. Dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus yang berkualitas dan mampu bersaing dengan SDM di dalam wilayah maupun di luar wilayah. Fokus utama bidang pendidikan yakni peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara merata. Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang melek huruf dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Untuk mengatasi masalah pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin akan dibantu dalam penyelesaian pendidikan minimal pada jenjang S1, serta pemberian bea siswa pendidikan kepada masyarakat miskin dan siswa berprestasi. Selain itu, guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas aparatur kelurahan, akan dilakukan diklat-diklat teknis dan bimbingan teknis kepada aparatur kelurahan.

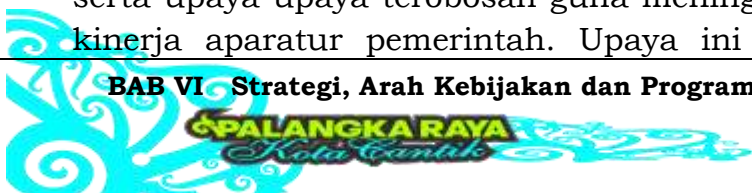


Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas prima diperlukan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya relevansi dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.

Abad 21 disebut sebagai abad perkotaan (*the urban age*) yang menawarkan beragam peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi secara bijak. Kota pada dasarnya adalah permukiman dengan kompleksitas yang berbeda dan beragam, ciri lain dari kota adalah kebebasannya, menjadi global hampir tidak terkontrol oleh pemerintah pusat, terutama dalam kegiatan ekonomi, sehingga menjadikannya *economic city state*. Kota harus dipahami sebagai permukiman yang berkembang lanjut untuk memenuhi kehidupan dan penghidupan warganya. Hanya di kota yang berkembang baik warga dapat memajukan diri karena dukungan sarana dan prasarana yang bermutu. Sebagian besar (dua pertiga) kota adalah perumahan dan permukiman, khususnya melayani penduduk lapis menengah ke bawah yang pada aspek rasa aman harus menjadi bagian penting dalam pembangunan Kota Palangka Raya

Kinerja tata kelola pemerintahan di Kota Palangka Raya direpresentasikan oleh kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, kinerja pelayanan publik, kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Implikasi dari capaian kinerja tata kelola pemerintahan yang digambarkan oleh kinerja reformasi birokrasi, kinerja pemerintah daerah dan kinerja pengelolaan keuangan daerah diatas adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keadilan, transparansi dan akuntabilitas yang diberikan oleh penyelenggara dan pada akhirnya memunculkan opini/penilaian oleh masyarakat menyangkut baik atau buruk suatu pelayanan publik. Kemampuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien, efektif dan akuntabel menjadi ukuran kinerja tata pemerintahan yang baik.

Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kota Palangka Raya juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal





pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Strategi (S3) Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah

Strategi pembangunan ketiga adalah peningkatan kemandirian ekonomi daerah. Strategi ini dilaksanakan dalam rangka merealisasikan sasaran pembangunan yaitu:

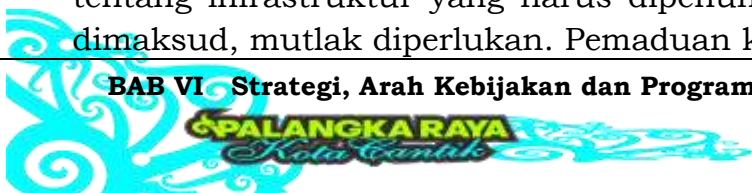
- a. Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)
- b. Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)

Keberlanjutan suatu proses pembangunan ditentukan oleh keterlibatan seluruh *stakeholder*. Untuk itu, pengembangan ekonomi Kota Palangka Raya diarahkan dengan corak ekonomi lokal (ekonomi rakyat dalam arti luas). Perdagangan, industri dan pertanian juga pariwisata dikembangkan dengan bertumpu pada pemberdayaan ekonomi lokal. Penarikan investasi dilakukan untuk sektor-sektor yang memang memiliki kemampuan untuk menjadi pendorong dan penarik pengembangan ekonomi lokal.

Strategi pembangunan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha (UU No 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata). Pembangunan kepariwisataan di Indonesia mencakup 4 pilar pembangunan kepariwisataan yakni: (1) Destinasi; (2) Pemasaran; (3) Industri, dan (4) Kelembagaan. Destinasi pariwisata adalah lokasi atau tontonan atau event yang dapat menjadi obyek pariwisata. Pemasaran adalah upaya yang dilakukan oleh insan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata untuk memperkenalkan pariwisata dan upaya untuk menarik wisatawan datang ke daerah. Industri pariwisata adalah seluruh pendukung agar pariwisata dapat berkembang, mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi hingga akomodasi dan konsumsi yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kelembagaan terkait dengan manusia, aturan dan organisasi yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.

Strategi pembangunan ekonomi rakyat berbasis ekonomi kreatif dan potensi daerah ini dilaksanakan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang berpilar pada ekonomi lokal yang telah ada selama ini yang diselenggarakan oleh masyarakat menengah-bawah, termasuk yang berbasis hasil-hasil pertanian.

Dalam upaya untuk memicu agar ekonomi kerakyatan mendapat porsi yang memadai dalam pembangunan (ekonomi) daerah maka pengembangan kawasan di pedalaman juga harus diprioritaskan. Kajian tentang infrastruktur yang harus dipenuhi di masing-masing kawasan dimaksud, mutlak diperlukan. Pemaduan komponen penggerak ekonomi





lainnya juga perlu diperhatikan. Lembaga-lembaga keuangan, perdagangan, dan lain-lain, perlu difasilitasi kehadirannya. Pada akhirnya, sebagian komoditas yang dihasilkan dari ekonomi kerakyatan dipetakan untuk dapat diarahkan pada orientasi ekspor.

6.2 Arah Kebijakan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholder* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk memberi arah pembangunan tahunan pada RPJMD di buat Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023, untuk masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan sebagaimana table 6.5 berikut ini:

Tabel 6.5 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

Arah Kebijakan				
2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur di Kota Palangka Raya	Optimalisasi pembangunan infrastruktur di Kota Palangka Raya untuk mewujudkan lingkungan cerdas	Peningkatan daya saing berbasis SDM untuk menggerakkan ekonomi untuk terwujudnya masyarakat ekonomi cerdas	Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk terwujudnya masyarakat cerdas	Pemantapan Pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya Palangka Raya yang maju, rukun dan sejahtera



Tabel 6.6
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
KOTA PALANGKA RAYA

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
					Misi 1: Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (Lingkungan Cerdas)															
					Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur															
					Sasaran 1: Meningkatnya Infrastruktur ke PU an (M1S1)															
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan sumber daya air	0	0	0	0	56.00	11,800,000,000	57.00	11,800,000,000	58	11,800,000,000	58.00	11,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengembangan SPAM	0	0	0	0	70.00	3,145,000,000	71.00	3,235,067,310	72.00	4,756,047,326	72	4,756,047,326	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem persampahan	0	0	0	0	60.00	3,900,000,000	61.00	2,700,000,000	62.00	2,700,000,000	62	2,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengembangan sistem air limbah	0	0	0	0	65	3,150,000,000.00	66.00	3,150,000,000	67.00	3,150,000,000	67.00	3,150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	0	0	0	0	57.00	12,875,000,000	58.00	15,925,000,000	59	15,925,000,000	59	15,925,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembangan permukiman	0	0	0	0	58.00	8,915,000,000	59.00	10,305,000,000	60.00	10,305,000,000	60	10,305,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung	0	0	0	0	56	8,550,000,000	57	9,150,067,310	58	10,671,047,326	58	10,671,047,326	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	0	0	0	0	59	23,195,322,799	60	25,185,390,109	61	26,706,330,156	61	26,706,330,156	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	0	0	0	0	73.00	1,500,000,000	74.00	1,550,000,000	75.00	1,550,000,000	75	1,550,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	3	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentaase Ketaatan terhadap Penataan Ruang	0	0	0	0	56.00	2,700,000,000	63.00	2,700,000,000	78.00	2,700,000,000	78.00	2,700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terbangun	56.5	57	50,553,768,575	0	0	0	0	0	0	0	57	50,553,768,575	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara	44.88	45	12,418,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45	12,418,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	Persentase drainase yang terbangun	51	53	21,358,000,000	0	0	0	0	0	0	0	54	21,358,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	74.54	76	4,215,939,000	0	0	0	0	0	0	0	76	4,215,939,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pengendali Banjir	Persentase pengendalian banjir kondisi baik	61.4	62	4,215,000,000	0	0	0	0	0	0	0	62	4,215,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan	49	50	175,224,200	0	0	0	0	0	0	0	50	175,224,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pembangunan lingkungan sehat perumahan	49	50	342,685,925	0	0	0	0	0	0	0	50	342,685,925	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana tata ruang	68	70	2,354,010,850	0	0	0	0	0	0	0	70	2,354,010,850	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penyelenggaraan Jalan	0	0	0	59	78,702,250,000	0	0	0	0	0	65	85,002,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pengelolaan sumber daya air	0	0	0	55	37,609,870,000	0	0	0	0	0	61	55,009,870,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase pengembangan infrastruktur permukiman	0	0	0	51	1,250,000,000	0	0	0	0	0	54	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Persentase rencana dan pemanfaatan ruang	0	0	0	72	6,170,000,000	0	0	0	0	0	78	6,660,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase pelayanan kebinamargaan	70	72	4,840,000,000	74	6,130,000,000	0	0	0	0	0	80	6,240,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	80	81	1,456,566,200	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Program Pembinaan Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	80	0	0	82	1,490,000,000	0	0	0	0	0	85	1,510,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
					Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Permukiman (M1S2)															
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	0	0	0	0	96.62	1,000,000,000.00	96.7	4,075,000,000.00	96.78	7,085,000,000.00	96.78	7,085,000,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	0	0	0	0	33.98	40,164,959,721	40.23	46,177,001,062	46.48	46,470,751,116	46.48	46,470,751,116	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan	0	0	0	0	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0	0	0	0	100	425,000,000.00	100	800,000,000.00	100	900,000,000.00	100	900,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	0	0	0	0	100	458,536,599.00	100	450,000,001.00	100	450,000,000.00	100	450,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
					Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun	15,29	0.9	278,422,625	0	0	0	0	0	0	0	0.90	278,422,625.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Lingkungan Terbangun	38,08	0.85	10,717,496,375	0	0	0	0	0	0	0	0.85	10,717,496,375.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	66,49	85	6,156,613,910	0	0	0	0	0	0	0	85.00	6,156,613,910.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Drainase Dalam Kondisi Baik (km)	0	0.8	2,445,021,250	0	0	0	0	0	0	0	0.80	2,445,021,250.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Peningkatan Pelayanan Pemakaman Yang Dapat Berfungsi Optimal	46,50	0.9	312,867,975	0	0	0	0	0	0	0	0.90	312,867,975.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pelayanan IPLT (%)	65	0.9	1,608,247,375	0	0	0	0	0	0	0	0.90	1,608,247,375.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat Air Bersih	60	0.9	2,278,544,190	0	0	0	0	0	0	0	0.90	2,278,544,190.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	34,45	0.9	458,306,750	0	0	0	0	0	0	0	0.90	458,306,750.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pada Tahun N	24,37	0.95	2,508,546,484	0.95	853,208,531	0	0	0	0	0	0.95	853,208,531	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
					Program Penerangan Jalan Umum	Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n	51,58	0.9	12,626,205,500	0	0	0	0	0	0	0	0.90	12,626,205,500.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH dalam Kondisi Baik	64,52	0.85	5,366,123,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	5,366,123,650.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Fasilitas Umum	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0	0	0	5.20%	30,151,359,332	0	0	0	0	0	0	6%	30,151,359,332	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Kualitas dan Infrastruktur Lingkungan	IKM Pelayanan Pemakaman	0	0	0	0,9	24,531,528,800	0	0	0	0	0	0	0,9	24,531,528,800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n	0	0		0,9		0		0		0		0,9		
						Rasio RTH dalam Kondisi Baik	0	0		0,85		0		0		0		0,85		
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah	Persentase Sampah Yang Tertangani	0	0	0	90%	9,593,500,542	0	0	0	0	0	0	90%	9,593,500,542	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Sasaran 3: Meningkatnya Mobilitas Orang dan Barang (M1S3)															
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Level Keselamatan Transportasi	0	0	0	0	0	0,197	2,149,500,000	0,196	2,149,500,000	0,195	2,349,500,000	0,195	2,349,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	0	0	0	0	0	54,153	482,600,000.00	54,153	482,600,000.00	54,153	482,600,000.00	54,153	3,524,000,000.00	Dinas Perhubungan
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah Pengelolaan Penerbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19,000,000	1	19,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian	0	0	0	0	0	1	77,000,000	1	77,000,000	1	77,000,000	1	77,000,000	Dinas Perhubungan
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	65,770,220	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	65,770,220	Dinas Perhubungan
					Program Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	50,000,000	104,029	1,337,070,000	0	0	0	0	0	0	#####	1,337,070,000	Dinas Perhubungan
						Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10,099	10,099		10,299		0	0	0	0	10,299				
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	(151 x 100.000)/275.667 = 54,77	(151 x 100.000)/275.667 = 54,77	1,768,000,000	(149 x 100.000)/275.667 =54,05	3,337,770,220	0	0	0	0	0	0	(149 x 100.000)/275.667 =54.05	3,337,770,220	Dinas Perhubungan
					Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	(151 x 100.000)/275.667 = 54,77	(151 x 100.000)/275.667 = 54,77	2,632,846,279.49	(149 x 100.000)/275.667 =54,05	3,631,128,879	0	0	0	0	0	0	(149 x 100.000)/275.667 =54.05	3,631,128,879	Dinas Perhubungan
					Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10,099	10,099	345,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	1,017,000,000	104,029	1,248,740,000	0	0	0	0	0	0	#####	1,248,740,000	Dinas Perhubungan	
					Sasaran 4: Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi (M1S4)																
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik	0	0	0	0	0	80%	2,756,572,500	85%	2,822,000,000	90%	2,883,000,000	90%	2,883,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	0	0	0	0	0	1 Aplikasi Data	295,000,000	1 Aplikasi Data	340,600,000	1 Aplikasi Data	345,720,000	1 Aplikasi Data	345,720,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	0	0	0	0	0	45.00%	405,000,000	60%	420,000,000	7000%	430,000,000	7000%	430,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
					Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	27%	40%	168,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40%	168,461,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
						persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	20%	20%		0		0		0		0		20%			
						Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	70%		0		0		0		0		70%			
					Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media	-	20%	120,649,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20%	120,649,500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
						IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	C		0		0		0		0		C			-
					Program Aplikasi dan Informatika	Persentase Sub Domain Yang Dikelola	40%	45%	53,001,700	0	0	0	0	0	0	0	0	45%	53,001,700	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	0	C	3,050,280,000	0	0	0	0	0	0	C	3,050,280,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	0	0	0		60%		0		0		0		100%		
						0	0			40%		0		0		0		100%		
						0	0			75%		0		0		0		100%		
						0	0			40%		0		0		0		100%		
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	0	0	0	45%	9,580,000,000	0	0	0	0	0	45%	9,580,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
					Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Persentase Sub Domain Yang Dikelola	0	0			75%		0		0		0		100%		
						0	0			65%		0		0		0		100%		
					Pengembangan Data/Informasi	Buku Statistik "Kota Palangka Raya "	1 Dokumen	1 Dokumen	101,375,000	0	0	0	0	0	0	0	1 Dokumen	101,375,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
						Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada		0		0		0		0		Tidak ada		
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Data dan statistik Yang Terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	0	Ada	780,500,000	0	0	0	0	0	Ada	780,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
						Buku Statistik "Kota Palangka Raya "	0	0		1 Dokumen		0		0		0		1 Dokumen		
					Program Penguatan Kelembagaan Siber dan Persandian	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	42%	42%	37,100,000	0	0	0	0	0	0	0	42%	37,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
					Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	0	0	0	10%	825,500,000	0	0	0	0	0	10%	825,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
						Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	0		45%		0		0		0		45%		
					Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup															
					Sasaran 5: Menurunnya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan (M1S5)															
2	11	2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah RPPLH dan KLHS kota	0	0	0	0	2 dokume n	174,952,800	2 dokumen	209,943,360	2 dokume n	251,932,032	2 dokume n	251,932,032	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	0	0	0	0	75	965,185,600	75	1,159,222,720	75	1,271,067,264	75	1,271,067,264	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem	0	0	0	0	1 lokasi	875,172,800	1 lokasi	934,207,360	1 lokasi	960,048,832	1 lokasi	960,048,832	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair	0	0	0	0	50 pelaku usaha	200,000,000	50 pelaku usaha	200,000,000	50 pelaku usaha	200,000,000	50 pelaku usaha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH	0	0	0	0	250 Pelaku usaha	287,487,200	250 Pelaku usaha	304,984,640	250 Pelaku usaha	315,981,568	250 Pelaku usaha	315,981,568	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA	0	0	0	0	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	0	0	0	0	6 kegiatan	265,443,826	3 kegiatan	289,521,620	3 kegiatan	252,621,691	3 kegiatan	252,621,691	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	0	0	0	0	7 kegiatan	371,104,000	7 kegiatan	436,324,800	7 kegiatan	484,589,760	7 kegiatan	484,589,760	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase penanganan, pengaduan lingkugan hidup	0	0	0	0	100	85,578,384	100	102,716,160	100	121,259,392	100	121,259,392	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase penanganan dan pengurangan sampah	0	0	0	0	20	2,872,144,000	20	3,186,572,800	20	3,303,887,360	20	3,303,887,360	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Layanan Persampahan Skala Perkotaan	20	20	50,100,000	25	1,485,120,000	0	0	0	0	0	0	25	1,485,120,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak	71.65	75	179,874,375	75	2,147,600,050	0	0	0	0	0	0	75	2,147,600,050	Dinas Lingkungan Hidup
						Persentase suatu usaha / Kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH	0	0				60	0		0		0	60		
						Ketersediaan data sumber - sumber pencemar air	0	0				1 Dok	0		0		0	1 Dok		
						Persentase Kesadaran Masyarakat dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan	0	0		20		0		0		0	20			
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA yang dilakukan	7	6 Lokasi	82,829,000	75	1,106,422,000	0	0	0	0	0	0	75	1,106,422,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Pengendalian Konservasi SDA	Tidak Ada	3 Sungai	50,000,000	0	-	0	0	0	0	0	0	3 Sungai	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tersedianya Kawasan Hutan yang dapat memperbaiki dan mempertahankan kelestarian lingkungan		50 Ha	31,685,000	0	-	0	0	0	0	0	0	50 Ha	31,685,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi SDA dan LH	1	2 Dokumen	156,593,625	70	1,262,508,000	0	0	0	0	0	0	70	2,867,213,824	Dinas Lingkungan Hidup
					Program peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	76.6	75	857,557,000	75	2,210,092,350	0	0	0	0	0	0	75	2,540,239,581	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	4.1	7 Lokasi	114,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Lokasi	114,130,000	Dinas Lingkungan Hidup
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	0	100%	968,000,000	100%	773,000,000	100%	838,000,000	100%	838,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terhindarnya kota Palangka Raya dari Bahaya Bencana	100	100	232,586,250	0	0	0	0	0	0	0	0	100	232,586,250	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Penanggulangan fisik pasca bencana	0	0	0	100	540,000,000	0	0	0	0	0	0	100	540,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana	100	100	346,602,982	100	150,000,000	0	0	0	0	0	0	100	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Terhindarnya Kota Palangka Raya dari bencana kebakaran hutan dan lahan	100	100	860,948,125	0	0	0	0	0	0	0	0	100	860,948,125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana	0	0	0	100	5,000,000,000	0	0	0	0	0	0	100	6,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan penanggulangan kebakaran	0	0	0	0	0	60%	2,815,891,485	65%	3,067,048,889	70%	3,315,601,333	70%	3,315,601,333	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
					Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	0.65	0.65	740,000,125	70	6,585,000,000	0	0	0	0	0	0	100	6,980,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
					Program Peningkatan Penyelamatan (Rescue) dan Evakuasi Korban	Tingkat Layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban dan yang terdampak	0.35	0	0	0.4	1,350,000,000	0	0	0	0	0	0	0.7	1,100,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	persentase jumlah masyarakat yang tanggap pencegahan kebakaran	40%	0	0	45%	750,000,000	0	0	0	0	0	0	70%	835,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan
					Misi 2: Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)															
					Tujuan 3: Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berdaya saing															
					Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (M2S1)															
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	0	0	0	0	0	100%	71,468,669,831	100%	77,524,097,745	100%	81,511,009,396	100%	81,511,009,396	Dinas Kesehatan
						Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)	0	0		0		25%		28%		30%		30%		
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan	0	0	0	0	0	41.00	1,566,513,800	44.20	1,471,956,740	47	1,318,152,414	47	1,318,152,414	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	0	0	0	0	0	24.65	662,000,000	27.65	677,000,000	29.65	737,000,000	29.65	737,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Kelurahan siaga aktif (minimal madya)	0	0	0	0	0	10%	425,000,000	20%	425,000,000	30%	425,000,000	30%	425,000,000	Dinas Kesehatan
					Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Keluarga Sehat	22%	23,5%	165,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,5%	165,475,000.00	Dinas Kesehatan
					Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka gizi buruk	2	0	14,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	14,015,000.00	Dinas Kesehatan

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	88.4%	90%	39,442,250	0	0	0	0	0	0	0	0.90	39,442,250.00	Dinas Kesehatan	
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	27%	92%	87,579,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0.92	87,579,700.00	Dinas Kesehatan	
						Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100%	424,949,000.00	0	0	0	0	0	0	0	1.00	424,949,000.00	Dinas Kesehatan	
					Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	87.16%	88%	24,155,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.88	24,155,000.00	Dinas Kesehatan	
					Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kasus keracunan makanan	N/A	0	9,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	-	9,000,000.00	Dinas Kesehatan	
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Ibu hamil/melahirkan dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91.98%	80%	49,259,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.80	49,259,000.00	Dinas Kesehatan	
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	43.90%	40%	1,004,673,700.00	0	0	0	0	0	0	0	0.40	1,004,673,700.00	Dinas Kesehatan	
						Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	94.37%	100%		0	0	0	0	0	0	0	0		1.00	Dinas Kesehatan
					Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Biaya obat per kapita per tahun (Rp)	7,795	8,000	2,607,912,599.00	0	0	0	0	0	0	0	8,000	2,607,912,599.00	Dinas Kesehatan	
					Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk	3,87	3.80	6,312,545,796.00	0	0	0	0	0	0	0	3.80	6,312,545,796.00	Dinas Kesehatan	
					Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan akses layanan rujukan	36.40%	95%	8,663,303,000.00	0	0	0	0	0	0	0	95%	8,663,303,000.00	Dinas Kesehatan	
					Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk terlindungi Jaminan kesehatan (UHC)	86.71%	95%	217,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	95%	217,000,000.00	Dinas Kesehatan	
					Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	22.49%	23,5%	16,816,822,422.57	25%	13,336,283,390	0	0	0	0	0	25%	13,336,283,390	Dinas Kesehatan	
					Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	43.90%			40%	33,591,039,999	0	0	0	0	0	40%	33,591,039,999	Dinas Kesehatan	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan	94.37%			100%		0		0		0				100%
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan kegawatdaruratan di RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD	N/a		33,337,000,000	100%		0	0	0	0	0	100%	33,337,000,000	Dinas Kesehatan	
						Indikator kinerja pelayanan RS (dirinci dalam RSB-RSUD)	N/a			RSB-RSUD		0		0		0				RSB-RSUD

Kode						Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2	08	02				PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	0	0	0	0	35	45,000,000	45	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	0	0	0	0	100	60,000,000	100	20,000,000	100	48,500,000	100	48,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	04				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	0	0	0	450	40,000,000	550	50,000,000	700	20,000,000	700	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	0	0	0	0	-	550	20,000,000	0	-	550	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	0	0	0	0	-	550	35,000,000	700	75,000,000	700	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0	0	0	0	100	100,000,000	100	105,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode						Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri	0	0	0	0	2	30,000,000	3	45,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH PKK AKTIF					36	1,560,000,000	36	1,580,000,000	36	1,615,000,000	36	340,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						JUMLAH POSYANDU AKTIF	141						143		145		145				
2	14	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB	0	0	0	0	62.00%	105,000,000	80.00%	107,100,000	#####	160,000,000	#####	160,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk					#####		100.00%		#####		#####				
2	14	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TOTAL FERTILITY RATE (TFR)	0	0	0	0	2,20%	1,329,979,000	2,15	1,419,979,000	2,00	1,483,344,000	2,00	1,483,344,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
							CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)	0	0		0		7,60		6,70		6,37		6,37		
							PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	0	0		0		17,15%		17,39		17,56		17,56		

Kode						Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
						ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN	0	0		0		78,86		81,98		85,50		85,50			
2	14		04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri	0	0	0	0	15,5%	44,200,000	17,5%	94,200,000	17,5%	107,200,000	17,5%	107,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	100	124,735,575	100	352,157,575	0	0	0	0	0	100	352,157,575	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu			600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	-	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100	143,531,450	100	439,459,300	0	0	0	0	0	100	439,459,300	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu			25,000,000		0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14.49	14.71	2,248,920,000	15.15	2,361,920,000	0	0	0	0	0	0	15.15	2,361,920,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	
						Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	20	21		21		0		0		0	21				
						Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8	7.82		7.43		0		0		0	7.43				

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
						Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14.3	16.33		16.8		0		0		0	16.8	Anak		
						Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	71.48	73.82		76.16		0		0		0	76.16			
						Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90	90		90		0		0		0	90			
						Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja /Mahasiswa	30	35		40		0		0		0	40			
						Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5.92	5.68		5.44		0		0		0	5.44			
						Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75.5	76.5		77.5		0		0		0	77.5			
						Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75.5	76.5		77.5		0		0		0	77.5			
						Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB Mandiri	10	11.5		12.5		0		0		0	12.5			
						Program Kesehatan Reproduksi Remaja												Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
							10	11.5		14,999,875		0		0	-	0	-	0	0	
						Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang Mandiri												Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
										35,000,125		0		0	-	0	-	0	0	
						Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak												Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
							4.17	10		125,498,225		0		0	-	0	-	0	-	
							1 : 1,43	1 : 1				0		0		0		0	-	
												0		0		0		0	-	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
						Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	1	1		0	0	0		0		0		0	-		
						Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0.6347	1		0	0	0		0		0		0	-		
					Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	4.17	0	0	30	461,376,800	0	0	0	0	0	0	30	461,376,800	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
						Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	0		1 : 1			0		0		0				1 : 1
						Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	1	0		1			0		0		0				1
						Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0.6347	0		1		0		0		0		1			
					Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan (M2S2)																
1	01	2		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Menurunnya Angka Putus Sekolah	0	0	0	0	0.05	55,729,588,940	0.05	58,670,952,496	61,083,281,779	61,083,281,779	Dinas Pendidikan					
					APK SD/MI													120	125	128	
					APM SD/MI													97.2	98	98.1	
					Menurunnya angka putus sekolah SD/MI													0.01	0.01	0.01	
					Angka kelulusan SD/MI													100	100	100	
					Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI													47.77	47.79	47.81	
					Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTs													0.09	0.09	0.08	
					APK SMP/MTs													104.5	104.7	105	
					APM SMP/MTs													95	95.1	95.2	
					APK PAUD													60	60.5	60.75	
					APM PAUD													40	40.2	40.5	
1	01	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru	0	0		0	85		90		95		95		Dinas Pendidikan			
					Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV															96	97

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0	0	0	0	0	31	401,073,027	31	464,978,546	31	524,922,598	31	524,922,598	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
					Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Lapangan Olah Raga dan Sarana Prasarananya	0	1	190,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	190,750,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Program Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Atlet Berprestasi	0	10	526,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10	526,805,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	10	10	1,322,923,835	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1,322,923,835	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Program Pemberdayaan Pemuda Kota Palangka Rava	Cakupan Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Produktif	0	0	0	0.5	2,700,000,000	0	0	0	0	0	0	0.5	2,700,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Cakupan Pemuda yang berperan pada pembangunan	0	0	0	0.5	4,240,000,000	0	0	0	0	0	0	0.5	4,240,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan Peningkatan Pemuda yang berprestasi dalam Olah Raga	0	0	0	0.5	4,560,000,000	0	0	0	0	0	0	0.5	4,560,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Program pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Cakupan Kesadaran Masyarakat pada gaya hidup sehat	0	0	0	0.5	4,900,000,000	0	0	0	0	0	0	0.5	4,900,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
					Sasaran 3: Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja (M2S3)															
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	83	158,927,000	83	170,052,000	83	178,555,000	83	178,555,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0	0	0	75	272,885,000	75	295,135,000	75	305,135,000	75	305,135,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Program Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	75	238,361,000	75	255,049,000	75	267,803,000	75	267,803,000	Dinas Tenaga Kerja
					Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan program kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	859,015,000	0	821,431,650	0	0	0	0	0	0	821,431,650	Dinas Tenaga Kerja	
					Program peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja	0	0	305,444,100	0	1,050,201,600	0	0	0	0	0	0	1,050,201,600	Dinas Tenaga Kerja	
					Program perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	0	0	62,639,000	0	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
					Sasaran 4: Menurunnya Kemiskinan (M2S4)															
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	0	0	0	0	0	80%	136,459,997.00	80%	67,079,997.00	80%	60,983,198.00	80%	60,983,198	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	0	0	0	0	0	50%	292,983,400.00	50%	303,291,600.00	50%	286,833,400.00	50%	286,833,400	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial	0	0	0	0	0	45%	510,000,000	45%	82,000,000	45%	82,000,000	45%	82,000,000	Dinas Sosial

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya	0	0	0	0	80%	1,078,017,500.18	80%	1,063,017,501.74	80%	1,123,447,372.52	80%	1,123,447,372.52	Dinas Sosial	
					Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan PMKS	41115	8223	594,625,000	8223	889,031,072	0	0	0	0	8223	889,031,072	Dinas Sosial		
					Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksanya Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	500	100	13,308,200	0	0	0	0	0	0	100	13,308,200	Dinas Sosial		
					Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya Anak Terlantar	175	35	64,606,000	0	0	0	0	0	0	35	64,606,000	Dinas Sosial		
					Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat & Eks Trauma	250	50	117,693,000	0	0	0	0	0	0	50	117,693,000	Dinas Sosial		
					Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat & Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya	250	50	275,549,200	0	0	0	0	0	0	50	275,549,200	Dinas Sosial		
					Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	26	5	212,449,197	5	145,086,200	0	0	0	0	5	145,086,200	Dinas Sosial		
					Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Terbinanya Anggotan Tagana Kota Palangka Raya	100	100	91,447,500	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial		
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Rehabiliasi dan Rekontruksi	50	10	16,746,000.53	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial		
					Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	0	0	0	235	378,281,500	0	0	0	0	235	378,281,500	Dinas Sosial		
					Program Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial	Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial	0	0	0	100%	222,193,100	0	0	0	0	100%	222,193,100	Dinas Sosial		
					Tujuan 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik															
					Sasaran 5: Meningkatkan Kualitas Penerapan RB (M2S5)															
4	01	0.4			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum	0	0	0	0	100	7,843,149,400	100	8,441,500,000	100	8,879,200,000	100	8,879,200,000	Sekretariat Daerah	
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD	0	0	0	0	90%	19,246,590,000	95%	19,456,318,144	95%	20,056,492,570	95%	20,056,492,570	Sekretariat DPRD	
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	0	0	0	0	90%	14,709,404,000	90%	15,953,850,000	95%	16,546,040,000	95%	16,546,040,000	Sekretariat DPRD	
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Meningkatnya Produk-produk Kebijakan	112%	80%	12,730,904,600	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD		
					Program Pengkajian, Pembentukan Produk	Meningkatnya Produk Hukum Daerah	0	0	0	80%	5,494,071,520	0	0	0	0	0.8	5,494,071,520	Sekretariat DPRD		

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Hukum Daerah, Persidangan dan Humas	Meningkatnya Fasilitas Persidangan, Risalah dan Humas	0	0	0	90%		0		0		0		0,9		
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	0	0	0	80%	10,073,451,064	0	0	0	0	0	0	0,8	10,073,451,064	Sekretariat DPRD
				Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD		0	0	0	90%	0		0		0,9						
				Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat		0	0	0	80%	0		0		0,8						
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1). % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	0	0	0	0%	0	80	1,920,000,000.00	90	567,000,000.00	95	581,750,000.00	95	581,750,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
					2). % Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	0	0		0%		100		100		100		100			
					3). % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	0	0		0%		70		75		80		80			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.) % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	0	0	0	0%	0	70	4,229,269,600.00	80	1,707,896,500.00	90	1,746,061,100.00	90	1,746,061,100.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Assesment sesuai dengan jabatan	50%	55%	1,868,556,150	60%	3,392,720,300	0	0	0	0	0	60%	3,392,720,300	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
					Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	465,090,175	100%	285,000,000	0	0	0	0	0	100%	285,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PD= % Kelengkapan Data Sesuai SIPD	0	0	0	0	0	50	2,117,464,489	75	2,265,687,003	85	2,378,971,353	85	2,378,971,353	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
						PP= % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra	0	0		0		95		95		95		95		
						PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi	0	0		0		90		90		90		90		
						PE = % Capaian Evaluasi	0	0		0		93		93		95		95		
5	01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah Fasilitas dan Movev Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0	0	0	0	6 laporan	719,867,924	6 laporan	770,258,679	6 laporan	808,771,613	6 laporan	808,771,613	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA	0	0	0	0	100	740,000,000	100	833,801,904	100	938,491,999	100	938,491,999	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	0	0	0	0	100	1,964,487,760	100	2,060,000,000	100	2,100,000,000	100	5,513,210,903	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0	100	667,063,697	100	713,758,155	100	749,446,063	100	749,446,063	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	2,187,706,973	100	2,256,557,630	0	0	0	0	0	0	100	2,256,557,630	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100		100		0		0						
						Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	-	-		100		0		0						
					Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	100	100	439,237,300	0	0	0	0	0	0	0	100	439,237,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan lintas sektoral	100	100	844,802,325	0	0	0	0	0	0	0	100	844,802,325	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA	100	100	303,928,125	0	0	0	0	0	0	0	100	303,928,125	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100	100	121,355,000	0	0	0	0	0	0	0	100	121,355,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100	100	611,398,125	0	0	0	0	0	0	0	100	611,398,125	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber	0	0	0	100	1,518,538,120	0	0	0	0	0	100	1,518,538,120	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program perencanaan pembangunan ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pengendalian	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan	0	0	0	100	1,241,384,293	0	0	0	0	0	100	1,241,384,293	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Persentase Capaian Program Pembangunan Daerah Sesuai Target	0	0		100		0		0		0				100
					Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Tercapai Hasil Kajian Penelitian	0	3	800,000,000	3	4,000,000,000	0	0	0	0	0	3	4,000,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
					Program Penguatan Kelitbangan	Hasil Kelitbangan dalam Pelaksanaan Pembangunan	0	1	785,036,925	1	2,812,922,175	0	0	0	0	0	1	2,812,922,175	Badan Penelitian dan Pengembangan	
					Sasaran 6: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah (M2S6)															
4	0	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat	0	0	0	0	0	100	9,774,780,187	100	10,753,830,187	100	10,954,773,135	100	10,954,773,135	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan	0	0	0	0	0	100	1,917,420,781	100	2,322,982,629	100	2,578,277,418	100	2,578,277,418	Sekretariat Daerah
					Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	35 Kegiatan	5,241,060,375	0	0	0	0	0	0	0	35 Kegiata n	5,241,060,375	Sekretariat Daerah	
					Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Administrasi Pimpinan, Manajemen Keuangan, Aset dan Kerumahtangaan	0	32 Kegiatan	1,077,197,800	0	0	0	0	0	0	0	32 Kegiata n	1,077,197,800	Sekretariat Daerah	
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	0	B	216,607,806	B	299,000,000	0	0	0	0	0	B	299,000,000	Sekretariat Daerah	
					Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Informasi	0	100%	1,607,022,550	0	0	0	0	0	0	0	100%	1,607,022,550	Sekretariat Daerah	
					Program peningkatan kerjasama antar daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	0	11 Kegiatan	33,107,100	0	0	0	0	0	0	0	11 Kegiata n	33,107,100	Sekretariat Daerah	
					Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	0	100%	523,326,275	100%	529,000,000	0	0	0	0	0	100%	529,000,000	Sekretariat Daerah	
					Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan Kegiatan Pembinaan Korpri/ASN	0	300 ASN	180,857,225	0	0	0	0	0	0	0	300 ASN	180,857,225	Sekretariat Daerah	
					Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian	Cakupan Administrasi Perekonomian dan SDA	0	100%	663,562,550	0	0	0	0	0	0	0	100%	663,562,550	Sekretariat Daerah	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Pengembangan Data Informasi	Kegiatan Pengembangan Data Informasi	0	100%	194,186,900	0	0	0	0	0	0	0	100%	194,186,900	Sekretariat Daerah	
					Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan	Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD	0	100%	87,550,875	100%	92,000,000	0	0	0	0	0	100%	92,000,000	Sekretariat Daerah	
					Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tata Negara	0	76%	60,500,000	0	0	0	0	0	0	0	76%	60,500,000	Sekretariat Daerah	
					Program Peningkatan Pembinaan Kedadatangan di Kota Palangka Raya	Koordinasi Pembibingan, Supervisi Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi	0	45 Kegiatan	135,776,794	0	0	0	0	0	0	0	45 Kegiatan	135,776,794	Sekretariat Daerah	
					Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	0	24 Kegiatan	11,450,831,337	0	0	0	0	0	0	0	24 Kegiatan	11,450,831,337	Sekretariat Daerah	
					Program Pengembangan Kewadayaan	Kegiatan Pengembangan Keswadayaan	0	12 Kegiatan	286,432,487	0	0	0	0	0	0	0	12 Kegiatan	286,432,487	Sekretariat Daerah	
					Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	0	38 Kegiatan	210,703,525	0	0	0	0	0	0	0	38 Kegiatan	210,703,525	Sekretariat Daerah	
					Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota	Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi dan Teknis Pemerintahan dan Pembangunan	0	100%	480,601,325	0	0	0	0	0	0	0	100%	480,601,325	Sekretariat Daerah	
					Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah	Persentase Koordinasi dan Penguatan Kualitas Regulasi/Kebijakan Pemerintah Daerah	0	100%	1,421,314,525	0	0	0	0	0	0	0	100%	1,421,314,525	Sekretariat Daerah	
					Program Pembakuan Nama Rupa Bumi	Peraturan Walikota Tentang Pembakuan Nama Rupabumi	0	75%	62,500,000	0	0	0	0	0	0	0	75%	62,500,000	Sekretariat Daerah	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	0	0	0	100%	3,645,000,000	0	0	0	0	0	100%	3,645,000,000	Sekretariat Daerah	
					Program Pembinaan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	Data Masyarakat Miskin	0	0	0	100%	1,386,470,400	0	0	0	0	0	100%	1,386,470,400	Sekretariat Daerah	
					Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Pelayanan Keagamaan	0	0	0	100%	13,531,901,100	0	0	0	0	0	100%	13,531,901,100	Sekretariat Daerah	
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Nilai/Skor dan Tingkat/Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	0	0	0	Tinggi (Skor 2.8000)	1,382,650,000	0	0	0	0	0	Tinggi (Skor 2.8000)	1,382,650,000	Sekretariat Daerah	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian dan Pengumpulan Data Informasi	Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya	0	0	0	100%	1,064,000,000	0	0	0	0	100%	1,064,000,000	Sekretariat Daerah		
						Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE	0	0		100%		0		0		100%				
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	0	0	0	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	10000%	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip	0	0	0	60	80,000,000	80	80,000,000	100	80,000,000	10000%	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
					Program Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	22.22%	13.88	147,063,400	13.89	1,048,750,000	0	0	0	0	13.89	1,048,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK)	0	0	0	90	17,551,577,510	90	18,257,986,764	90	17,557,266,534	90	17,557,266,534	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)	0	0	0	90	1,597,770,450	90	1,720,708,475	90	1,987,873,297	90	1,987,873,297	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	6,947,669,475	WTP	7,295,052,949	0	0	0	0	WTP	7,295,052,949	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas	0	0	0	1 Laporan	1,330,000,000.00	1 Laporan	1,330,000,000.00	1 Laporan	1,330,000,000.00	1 Laporan	1,330,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
					Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	85	85	1,638,813,500	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah	75	75	130,800,000	75	482,200,000	0	0	0	0	75.00	482,200,000.00	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
					Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah	75	75	6,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
					Program Penggalan dan Peningkatan sumber-sumber PAD	Terpenuhinya capaian target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	0	0	0	75	2,595,600,000	0	0	0	0	75.00	2,595,600,000.00	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
					Program Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	0	0	0	75	634,600,000	0	0	0	0	75.00	634,600,000.00	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah	0	0	0	75	1,350,000,000	0	0	0	0	0	0	75.00	1,350,000,000.00	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)	0	0	0	0	0	75	1,750,000,000.00	80	1,910,000,000.00	85	2,025,000,000.00	85	2,025,000,000.00	Inspektorat
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%)	0	0	0	0	0	80	62,000,000.00	83	72,000,000.00	85	81,500,000.00	85	81,500,000.00	Inspektorat
					Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B	30%	75%	479,900,000	80%	287,540,000	0	0	0	0	0	0	80%	287,540,000	Inspektorat
					Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Jumlah Tindak Lanjut Temuan	1221	1233	1,136,950,000	1245	1,530,435,000	0	0	0	0	0	0	1245	1,530,435,000	Inspektorat
					Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Terhadap Pengaduan Masyarakat	80%	0.8	185,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	185,000,000	Inspektorat
					Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3 DC	3	0	3	660,000,000	0	0	0	0	0	0	3	660,000,000	Inspektorat
					Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (M2S7)															
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	0	12 bulan	246,102,625	12 bulan	246,102,625	12 bulan	246,102,625	12 bulan	246,102,625	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Data/Dokumen dalam Program Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	7 dokumen	208,700,500	7 dokumen	208,700,500	7 dokumen	208,700,500	7 dokumen	208,700,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	0	17 dokumen	1,336,426,000	17 dokumen	1,336,426,000	17 dokumen	1,336,426,000	17 dokumen	1,336,426,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0	0	0	0	0	14 dokumen	170,836,000	14 dokumen	170,836,000	14 dokumen	170,836,000	14 dokumen	170,836,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dengan Baik	0.50	0.60	1,492,413,085	0.70	1,641,654,394	0	0	0	0	0	0	0.70	1,641,654,394	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Sarana Pencatatan Sipil	0.40	0.50	351,604,050	0.60	386,764,455	0	0	0	0	0	0	0.60	386,764,455	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan E-KTP	75%	80%	470,247,900	85%	517,272,690	0	0	0	0	0	0	85%	517,272,690	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	236,997,200	B	260,696,920	0	0	0	0	0	0	B	260,696,920	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	0	83.95	210,000,000.00	84.95	245,000,000.00	85.96	245,000,000.00	85.96	245,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
					Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	81.98	292,380,000	82.96	270,000,000	0	0	0	0	0	82.96	270,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B / 73,80	2,176,100,000	A / 81,27	2,248,000,000	A / 81,30	2,387,100,000	A / 81,30	2,387,100,000	Kecamatan Pahandut	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	33 Kegiata n	2,539,000,000	33 Kegiatan	2,644,000,000	33 Kegiata n	2,679,000,000	33 Kegiata n	2,679,000,000	Kecamatan Pahandut	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	100%	133,000,000	100%	173,000,000	100%	183,000,000	100%	183,000,000	Kecamatan Pahandut	
					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.72	0.77	316,715,500	0.83	402,180,000	0	0	0	0	0	0	0.83	402,180,000	Kecamatan Pahandut
					Presentase PKK aktif	100%	100%	100%		0		0		100%						
					Persentase Posyandu Aktif	60%	70%	80%		0		0		80%						
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	4,309,361,463	70%	2,389,000,000	0	0	0	0	0	100%	2,535,000,000	Kecamatan Pahandut	
					Program Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Pahandut yang wajib memiliki dokumen kependudukan	80%	83%	40,064,250	86%	60,000,000	0	0	0	0	0	98%	75,000,000	Kecamatan Pahandut	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B (79,76)	1,040,000,000	A (81,26)	1,090,000,000	A (81,30)	1,155,000,000	A (81,30)	1,155,000,000	Kecamatan Bukit Batu	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	0	0	0	100%	2,800,000,000	100%	2,835,000,000	100%	2,880,000,000	100%	2,880,000,000	Kecamatan Bukit Batu	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	100%	126,000,000	100%	152,000,000	100%	173,000,000	100%	173,000,000	Kecamatan Bukit Batu	
					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	3,385,800,000	1	3,724,380,000	0	0	0	0	0	0	0	4,987,149,780	Kecamatan Bukit Batu
					Presentase PKK aktif	100%	100%	100%		0		0		0						
					Persentase Posyandu Aktif	100%	100%	100%		0		0		0						

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	417,279,850	70%	459,007,835	0	0	0	0	0	0	672,033,371	Kecamatan Bukit Batu	
					Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Bukit Batu yang wajib memiliki dokumen kependudukan	65%	75%	55,320,000	85%	60,852,000	0	0	0	0	0	0	80,994,012	Kecamatan Bukit Batu	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B (74,51)	1,998,077,000.00	A (85,26)	2,031,350,000.00	A (85,26)	2,073,977,000.00	A (85,26)	2,073,977,000.00	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	0	0	0	0	64.00%	1,649,400,000.00	66.00%	1,663,700,000.00	68.00%	1,680,100,000.00	68.00%	5,478,300,000.00	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	64%	4,500,000	66.00%	5,000,000	68%	6,000,000	68%	6,000,000	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	64%	47,000,000	66.00%	49,500,000	68%	51,500,000	68%	51,500,000	Kecamatan Jekan Raya	
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.72	0.77	1,777,764,225	0.83	1,777,764,225	0	0	0	0	0	0.83	1,777,764,225	Kecamatan Jekan Raya	
						Presentase PKK aktif	100%	100%		100%		0	0		0		100%			
						Persentase Posyandu Aktif	50%	60%		70%		0	0		0		70%			
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	1,945,718,932	70%	1,978,950,000	0	0	0	0	0	70%	1,978,950,000	Kecamatan Jekan Raya	
					Program Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk di Wilayah Kec. Jekan Raya yang wajib memiliki dokumen kependudukan	94.60%	95%	4,608,750	95.50%	66,500,000	0	0	0	0	0	96%	66,500,000	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B / 80,70	1,075,031,273	A / 81,30	1,152,715,974	A / 81,50	1,228,413,625	A / 81,50	1,228,413,625	Kecamatan Sabangau	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	21 Kegiata n	1,106,649,356	21 Kegiatan	1,656,947,336	21 Kegiata n	1,685,066,132	21 Kegiata n	1,685,066,132	Kecamatan Sabangau	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	100%	100,704,900	100%	118,121,100	100%	112,051,810	100%	112,051,810	Kecamatan Sabangau	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masvarakat (LPM)	0,64	0,71	198,409,850	0,78	305,887,140	0	0	0	0	0	0,78	305,887,140	Kecamatan Sabangau	
						Presentase PKK aktif	100%	100%		0		0		0		100%				
						Persentase Posyandu Aktif	100%	100%		0		0		0		100%				
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	3,099,623,000	70%	1,002,176,000	0	0	0	0	70%	1,002,176,000	Kecamatan Sabangau		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	B / 78,06	372,459,250	A / 81,35	489,617,500	A / 83,03	539,126,750	A / 83,03	539,126,750	Kecamatan Rakumpit		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	0	0	0	100%	2,804,231,500	100%	2,849,923,500	100%	2,944,958,500	100%	2,944,958,500	Kecamatan Rakumpit		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	100%	77,400,000	100%	92,400,000	100%	97,400,000	100%	97,400,000	Kecamatan Rakumpit		
					Program Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sabangau	100%	100%	28,600,000	100%	295,500,000	0	0	0	0	100%	295,500,000	Kecamatan Sabangau		
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	0	70%	10,276,000	0	10,276,000	0	10,276,000	70%	10,276,000	Kecamatan Rakumpit		
					Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masvarakat (LPM)	0.75	0,78	2,785,468,890	0,80	154,779,600	0	0	0	0	0	0,80	154,779,600	Kecamatan Rakumpit	
						Presentase PKK aktif	100%	100%		0		0		0		100%				
						Persentase Posyandu Aktif	50%	60%		0		0		0		70%				
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	917,030,225	70%	1,012,764,000	0	0	0	0	0	1,012,764,000	Kecamatan Rakumpit		
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indaks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	0	0	0	0	2.5	770,000,000	2.5	770,000,000	3	770,000,000	300%	7,355,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara	0	0	0	0	350 Orang	10,000,000	350 Orang	10,000,000	350 Orang	10,000,000	350 Orang	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan	73.11	2	2,248,306,000	2.3	2,600,946,800	0	0	0	0	2.3	2,600,946,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2	16	03			PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)Perangkat Daerah yang terintegrasi	0	0	0	0	60%	2,810,200,000	80%	2,845,200,000	100%	2,969,200,000	100%	2,969,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
					Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	0	0	0	0	75%	80%	90.00%	90.00%							
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	25%	40%	1,410,440,000	0	0	0	0	0	0	40%	1,410,440,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
					Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	56%	56%	0		0	0	0	0	56%						
					Tujuan 5: Meningkatkan Kerukunan dan Ketertiban di kalangan Masyarakat															
					Sasaran 8: Meningkatnya Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat (M2S8)															
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	100	2,337,000,000	100	3,619,000,000	100	7,211,000,000	100	7,211,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Program Peningkatan Keamanan dan Kenvamanan Linekunean	Persentase Penegakan Perda	90%	90%	790,122,500	92%	948,147,000.00	0	0	0	0	0	92%	948,147,000.00	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0.6	1.2	1.8		0		0	0	1.2						
					Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7.84	8.04	8.24		0		0	0	8.04						
					Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90	92	92		0		0	0	92						
					Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Pos Kamling per RT	0,44	0.45	1,537,430,000	0.47	921080123	0	0	0	0	0	0.47	921,080,123	Satuan Polisi Pamong Praja	
					Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	0	1	2		0		0	0	1						
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat	0	0	0	0	1500	690,000,000	3427	690,000,000	3952	740,000,000	3952	740,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
8	01	03	2		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0	0	0	0	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	10,350,000,000	100	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat	0	0	0	0	0	40	70,000,000	50	70,000,000	60	70,000,000	60	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan bdaya	0	0	0	0	24 dokume n	290,000,000.00	45 dokumen	290,000,000.00	45 dokume n	290,000,000.00	45 dokume n	290,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	0	0	0	0	16	740,000,000	16	740,000,000	16	790,000,000	16	790,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya tingkat keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota palangka Raya	0	0	622,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	622,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan	0	0	1,307,938,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,307,938,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tercapainya tingkat pemahaman politik masyarakat	0	0	1,278,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan	380	0	0	2340	1,590,000,000	0	0	0	0	0	2340	1,590,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya	95	0	0	151	1,440,000,000	0	0	0	0	0	151	1,440,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi	0	0	0	53	340,000,000	0	0	0	0	0	53	340,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
					Program Peningkatan Pendidikan Politik	Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi pemilih mengikuti Pemilu	145	0	0	82	170,000,000	0	0	0	0	0	82	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode				Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Misi 3: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi cerdas)														
					Tujuan 6: Meningkatkan perekonomian daerah														
					Sasaran 1: Meningkatnya Perekonomian Sektor Strategis (M3S1)														
2	09	03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein	0	0	0	0	2.167	85,557,500.00	2.192	113,557,500.00	2.217	115,557,500.00	2.217	115,557,500.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan	0	0	0	0	100 %	20,000,000.00	90 %	170,000,000.00	90 %	20,000,000.00	90 %	30,000,000.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80%	0	0	0	0	80	10,000,000.00	90	10,000,000.00	100	10,000,000.00	10000%	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	16	650,268,129.00	16.5	579,398,014.42	17	690,000,000.00	17%	690,000,000.00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	0	0		0	19		19,5		20		20			
					Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0	0		0	12		12,5		13		13%			
3	27	03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	16	104,935,500.00	16,5	104,935,500.00	17	119,935,500.00	17%	354,935,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0	0	0	0	12	287,356,829.00	12.5	287,382,829.00	13	282,356,829.00	13%	40,128,829	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	16	55,000,000.00	16.5	85,000,000.00	17	105,000,000.00	17	105,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan					19		20		20		20			
					Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan					12		12.5		13		13			
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	16	100,550,000.00	16,5	150,550,000.00	17	120,185,048.95	17%	120,185,049	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
					Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan	0	0			0		19		19,5		20			20%
					Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0	0			0		12		12,5		13			13%
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnyaproduktivitas tanaman pertanian	20 Kw/ha	1 Tahun	1,904,418,500	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	1,904,418,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian)	Terpenuhinya dokumen/ data NTP	115	12 Bulan	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	29,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Keterlibatan dalam Kegiatan Pekan Daerah	-	1 kegiatan	101,680,000	0	0	0	0	0	0	0	1 kegiatan	101,680,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Nilai Tukar Petani	115	3 Kelompok Tani	56,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3 Kelompo k Tani	56,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tercapainya Petani/ Pekebun yang Mendapat Pelatihan/ Sosialisasi Perkebunan	-	30 Orang	15,575,000	0	0	0	0	0	0	0	30 Orang	15,575,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Terpenuhinya dokumen/ data NTP	115	3 Dokumen	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3 Dokume n	36,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				-	0	0	0	0	0	0	0		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Perlindungan Kebun dan Tanaman	Meningkatnya luas perkebunan rakyat	115	5 Kecamatan	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5 Kecamat an	13,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan				0	0	0	0	0	0	0	0		-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	1.125 ton	3 Kelompok Tani	35,240,000	0	0	0	0	0	0	0	3 Kelompo k Tani	35,240,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya Skor PPH	90	90.1	164,469,850	90.2	1,144,216,232.50	0	0	0	0	0	90.8	1,604,376,934	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				0		0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Menigkatkan Kompetensi penyuluh	-	17 Penyuluh	36,130,000		-	0	0	0	0	0	17 Penyulu h	36,130,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian				0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan	1.200 Dosis	4 ULIB	76,600,000	0	0	0	0	0	0	0	4 ULIB	76,600,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi (ton)	1.102,2 Ton	Kawasan rusa, RPH, Vaksin Hewan	1,062,800,000	1.215,2 Ton	1,862,662,500	0	0	0	0	0	1.215,2 Ton	1,862,662,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Hewan tervaksin	6.000 dosis	1 Tahun	278,750,000	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	278,750,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Bantuan Kelompok Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peternakan	115	10 Dokumen	22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10 Dokumen	22,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang dibina	0	0	0	80%	5,998,000,000	0	0	0	0	0	80%	5,998,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veterener, Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Hewan tervaksin	0	0	0	7.000 Dosis	953,962,500	0	0	0	0	0	7.000 Dosis	953,962,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani	0	0	0	104.75	3,192,640,275	0	0	0	0	0	104.75	3,192,640,275	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
					Program Pengelolaan, Peningkatan dan Pemasaran Bidang Perkebunan	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	0	0	0	63,282	1,769,384,575	0	0	0	0	0	63,282	1,769,384,575	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	0	0	0	0	0	5244.8	212,500,000	5507.02	282,187,500	5782.4	282,187,500	5782.4	282,187,500	Dinas Perikanan
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	0	0	0	0	0	23531	597,500,000	25784.7	680,562,500	28038	1,137,058,061	28038	1,137,058,061	Dinas Perikanan
3	25	04			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen)	0	0	0	0	0	66.67	270,000,000	83.33	336,000,000	100	336,000,000	100	2,045,000	Dinas Perikanan
3	25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	0	0	0	0	0	40.43	565,000,000	42.87	576,430,885	45.01	290,000,000	45.01	290,000,000	Dinas Perikanan
					Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	16772.79	19025	944,967,500	21278.21	2,005,173,150	0	0	0	0	0	21278	2,005,173,150	Dinas Perikanan	
					Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3150	3200	389,809,250	3250	1,105,000,000	0	0	0	0	0	3250	1,105,000,000	Dinas Perikanan	
					Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan (Perairan Umum)	13	0	0	3	813,773,200	0	0	0	0	0	3	813,773,200	Dinas Perikanan	
					Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	35.27	37.0335	718,498,125	38.885175	807,000,000	0	0	0	0	0	38.885	807,000,000	Dinas Perikanan	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek kebudayaan	0	0	0	0	0	20	460,000,000	20	460,000,000	20	460,000,000	20	140,000,000.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL	Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang)	0	0	0	0	0	45	80,000,000.00	45	80,000,000.00	45	80,000,000.00	45	80,000,000.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cagar Budaya(%) yang di kelola	0	0	0	0	0	80	180,000,000.00	80	180,000,000.00	80	180,000,000.00	80	180,000,000.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata	0	0	0	0	0	2	900,000,000.00	2	1,050,000,000.00	2	1,200,000,000.00	2	1,200,000,000.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)	0	0	0	0	0	1.4	200,000,000.00	1.4	200,000,000.00	1.4	200,000,000.00	1.4	200,000,000.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	50	550,000,000.00	50	565,000,000.00	50	580,000,000.00	50	580,000,000.00	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Nilai dan Kekayaan Budaya	Indeks Pengembangan dan pengelolaan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya	4 Pagelaran / Festival dan 6 BCB	4	1,008,000,000	4	1,008,000,000	0	0	0	0	0	0	4	2,256,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Palangka Raya Wisnus : Wisman :	Wisnus: 197.400 dan Wisman: 2.600	Wisnus: 196.600 dan Wisman: 3.400	467,236,000	Wisnus: 206.500 dan Wisman: 3.500	1,600,000,000	0	0	0	0	0	0	Wisnus: 236.200 dan Wisman: 3.800	1,350,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	0.6	0.7		0.8		0	0	0	0	0	0	1.2		
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	INDEKS PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN DESTINASI PARIWISATA	34 Lokasi	2	3,624,514,000	2	7,500,000,000	0	0	0	0	0	0	2	7,500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pengembangan Kemitraan	INDEKS KEMITRAAN PARIWISATA	341 Orang + 20 lembaga	20 orang + 2 lembaga	418,150,000	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	0	0	0	0	0	0	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pendistribusian Bahan Pokok	0	0	0	0	0	85	100,000,000	90	125,000,000	95	140,000,000	95	140,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Pengendalian Harga Pasar	0	0	0	0	0	85	70,000,000	90	85,000,000	95	100,000,000	95	100,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi	0	0	0	0	0	60	280,000,000	65	299,000,000	70	310,000,000	70	310,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	0	0	0	0	0	11.72	180,060,000	12.12	185,060,000	12.52	190,060,000	12.52	190,060,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	0	0	0	0	0	15 Industri	330,000,000	20 Industri	385,000,000	30 Industri	420,000,000	30 Industri	420,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Program Fasilitas Peningkatan Promosi Bagi IKM	Meningkatnya jumlah IKM yang difasilitasi mengikuti pameran	95	109	138,900,000	0	0	0	0	0	0	0	109	138,900,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya persentase penanganan pengaduan konsumen, Jumlah alat UTTP yang ditera ulang, Jumlah Pasar yang dibangun/Revitalisasi	50	54		58							58		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						200	210	2,138,479,676.61	220	3,685,458,698	0	0	0	0	0	220	3,685,458,698			
						2	-		1						1					
					Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor perdagangan (%) Dan Kontribusi retribusi sektor perdagangan terhadap PAD (jt)	10,52	10,92		11,32							11,32		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
							950	988	406,356,000	1.026	459,600,000	0	0	0	0	1.026	459,600,000			
					Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri	Penurunan tingkat inflasi (%)	6,45	6,25	1,492,621,000	6,05	1,492,621,000	0	0	0	0	0	6,05	1,492,621,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	1	2	70,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2	70,600,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	0.2	0.1	81,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.1	81,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri	4,38	4,55	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,55	9,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	0	0	0	3	1,735,000,000	0	0	0	0	0	3	1,735,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
						Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	0	0		0.1		0		0		0.1				
						Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri	0	0		4,72		0		0		4,72				
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Berkualitas	0	0	0	0	0	39	20,000,000.00	45	30,000,000.00	50	40,000,000.00	50	40,000,000.00	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	0	0	0	0	0	20%	20,000,000	30%	30,000,000	40%	40,000,000	40%	40,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

Kode					Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	0	0	0	0	0	100 Koperasi	145,000,000	140 Koperasi	160,000,000	160 Koperas i	165,000,000	160 Koperasi	165,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	0	0	0	0	0	100 Koperasi	148,000,000	100 Koperasi	170,000,000	100 Koperas i	185,000,000	100 Koperasi	185,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil	0	0	0	0	0	30%	91,000,000	32%	115,000,000	34%	130,000,000	34%	130,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	0	0	0	0	0	70 UMKM	225,000,000	80 UMKM	230,000,000	90 UMKM	235,000,000	90 UMKM	235,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
					Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	22%	24%	389,631,250	28%	579,556,250	0	0	0	0	0	0	28%	579,556,250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Peningkatan perluasan sumber pembiayaan	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,5%	2,7%	42,536,125	3%	118,300,000	0	0	0	0	0	0	3%	118,300,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
						Presentase UKM BPR/LKM Aktif	44,7%	46%		47%		0	0	0	0	0	0	47%		
					Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	94%	95%	402,210,229	96%	629,873,373	0	0	0	0	0	0	96%	629,873,373	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Sasaran 2: Meningkatnya Investasi Daerah (M3S2)															
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	0	0	0	0	0	30	220,000,000.00	40	80,000,000.00	50	80,000,000.00	50	80,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	0	0	0	0	0	15	275,000,000.00	25	200,000,000.00	35	200,000,000.00	35	200,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	0	0	0	0	0	20	60,000,000.00	30	60,000,000.00	45	60,000,000.00	45	60,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0	0	0	100	119,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode						Misi/Tujuan/Sasaran dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome/ouput)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
						Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi (Milyard)	-	585.65	30,000,000	0	0	0	0	0	0	585.65	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
						Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN	303	50	216,306,500	50	745,000,000	0	0	0	0	0	745,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
					Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)		2597.66	200	225		0		0		0		225				
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	16.50%	25%	43,507,000	35%	190,000,000	0	0	0	0	35%	190,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
						Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	7.69%	75%	142,455,000	80%	207,000,000	0	0	0	0	80%	207,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

BAB VII

PALANGKA RAYA
Kota Cantik





BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu urusan menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya. Prioritas pembangunan di Kota Palangka Raya dijalankan dengan kebijakan umum yang berfokus pada upaya mengatasi permasalahan pembangunan, pemerataan pembangunan, fokus pada pendidikan, pariwisata dan jasa, dengan optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah serta berlandaskan pada Budaya Betang dan berwawasan lingkungan hidup.

Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan dalam program-program prioritas dan disesuaikan dengan program yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

Urusan atau program prioritas atau strategis dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding program operasional, sehingga dalam penganggarnya, diprioritaskan terlebih dahulu, mengingat suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan karena pengaruhnya yang sangat luas dan sangat urgent untuk dilaksanakan. Program pendukung (belanja rutin) pada RPJMD Tahun 2018-2023 dicantumkan, hal ini didasarkan bahwa berfungsi belanja rutin sebagai pendukung terhadap program prioritas pembangunan daerah.

Sebagai tahapan awal dalam pembangunan, perencanaan pembangunan perlu disinergikan dengan penganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi serta akuntabilitasnya. Sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan, perencanaan jangka menengah perlu didukung dengan kebijakan program pembangunan untuk pengimplementasiannya. Kebijakan yang dirumuskan dalam bab ini merupakan kebijakan umum dan program pembangunan, meskipun di dalam tindak lanjut penjabaran visi dan misi telah diuraikan strategi dan arah kebijakannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembagian materi tersebut kedalam 4 (empat) bidang urusan, berikut kami tampilkan melalui tabel 7.1 dan tabel 7.2:



Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kota Palangka Raya

	BELANJA DAERAH								
A	Belanja Tidak Langsung	0,0346	532.465.661.995,24	590.397.798.997,58	657.902.197.750,75	633.033.186.610,14	-	-	-
	Belanja Operasi		-	-	-	-	956.006.236.163,59	1.003.726.609.457,37	1.054.016.095.511,66
	Belanja Pegawai		492.806.656.984,13	524.379.473.478,48	615.408.714.611,94	579.235.741.471,33	678.725.925.103,57	693.369.029.015,53	708.378.030.613,71
	Belanja Bunga		1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
	Belanja Hibah		26.324.698.267,00	46.518.717.775,00	15.991.717.775,00	19.751.217.775,00	15.868.717.775,00	15.868.717.775,00	25.868.717.775,00
	Belanja bantuan sosial		9.565.262.000,00	11.830.563.000,00	13.255.000.000,00	13.255.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00	10.280.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		1.249.044.744,11	1.399.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13			
	Belanja Tidak Terduga			4.750.000.000,00	10.477.720.619,68	18.022.182.619,68			
	Belanja Barang dan Jasa		-	-	-	-	249.611.593.285,02	282.688.862.666,84	307.969.347.122,94
	Belanja Modal						130.211.596.979,60	130.211.596.979,60	130.211.596.979,60
	Belanja Tidak Terduga						10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Belanja Transfer						1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
	Belanja Bagi Hasil		-	-	-	-	-	-	-
	Belanja Bantuan Keuangan		-	-	-	-	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13	1.249.044.744,13
B	Belanja Langsung	0,1295	607.102.234.982,67	581.880.768.361,05	519.787.447.457,12	613.606.738.719,20	-	-	-
	Belanja Pegawai		77.870.257.607,49	84.838.977.227,31	95.547.361.925,80	99.432.544.225,68	-	-	-
	Belanja Barang dan Jasa		293.465.219.000,26	252.315.152.729,74	224.638.286.137,32	257.156.057.786,92	-	-	-
	Belanja Modal		191.918.311.085,62	244.726.638.404,00	199.601.799.394,00	257.018.136.706,60	-	-	-
C	Pembiayaan	0,2104	93.220.441.238,84	27.394.350.692,08	27.200.512.807,29	25.936.083.810,74	(1.500.000.000,00)	(1.500.000.000,00)	(1.500.000.000,00)
	Penerimaan Pembiayaan		83.596.912.617,92	15.551.155.329,55	33.700.512.807,29	37.436.083.810,74	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan		9.623.528.620,92	11.843.195.362,53	6.500.000.000,00	11.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00



Tabel 7.2
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100 %	315,215,121,500	100 %	323,461,092,774	100 %	331,590,103,337	100 %	331,590,103,337	Dinas Pendidikan	
1	01	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Menurunnya Angka Putus Sekolah	0	0	0	0	0.05	55,729,588,940.00	0.05	58,670,952,496.00	0.05	61,083,281,779.00	0.05	61,083,281,779.00	Dinas Pendidikan	
				APK SD/MI					120.00		125.00							
				APM SD/MI					97.20		98.10							
				Menurunnya angka putus sekolah SD/MI					0.01		0.01							
				Angka kelulusan SD/MI					100.00		100.00							
				Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI					47.77		47.79							
				Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS					0.09		0.09							
				APK SMP/MTs					104.50		104.70							
				APM SMP/MTs					95.00		95.20							
				APK PAUD					60.00		60.50							
				APM PAUD					40.00		40.20							
1	01	4		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru	0			0		0		0		85.00			449,572,851.00
			Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV				96.00	97.00										
			Rasio guru terhadap murid PAUD				754.90	755.00										
			Rasio guru terhadap murid SD/MI				462.85	462.90										
			Rasio guru terhadap murid SMP/MTS				553.50	553.75										
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	7,522,782,200	0	0	0	0	0	0	100	7,522,782,200	Dinas Pendidikan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	3,917,163,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	3,917,163,000	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	600,211,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	600,211,000	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	1,566,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1,566,890,000	Dinas Pendidikan
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	302,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100	302,000,000	Dinas Pendidikan
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APK SD/MI	111.10	115	36,294,875,500	117	60,786,500,000	0	0	0	0	0	0	117	60,786,500,000	Dinas Pendidikan
				APM SD/MI	97.13	97.15				0		0		0		97.18		
				APS SD/MI	971.30	971.50				0		0		0		971.8		
				Menurunnya angka putus sekolah SD/MI	0.02	0.01				0.01		0		0		0.01		
				Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS	0.11	0.10				0.10		0		0		0.10		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Keluarga Sehat	22%	23,5%	165,475,000	0	0	0	0	0	0	0	23,5%	165,475,000	Dinas Kesehatan		
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Angka gizi buruk	2	0	14,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,015,000	Dinas Kesehatan		
		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Rumah Sehat	88.4%	90%	39,442,250	0	0	0	0	0	0	0	90%	39,442,250	Dinas Kesehatan		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	27%	92%	87,579,700.00	0	0	0	0	0	0	0	92%	87,579,700.00	Dinas Kesehatan		
			Cakupan desa/ kelurahan yang mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%	100%	424,949,000.00	0	0	0	0	0	0	0	100%	424,949,000.00	Dinas Kesehatan		
		Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita	87.16%	88%	24,155,000.00	0	0	0	0	0	0	0	88%	24,155,000.00	Dinas Kesehatan		
		Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Kasus keracunan makanan	N/A	0	9,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000.00	Dinas Kesehatan		
		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Ibu hamil/melahirkan dengan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91.98%	80%	49,259,000.00	0	0	0	0	0	0	0	80%	49,259,000.00	Dinas Kesehatan		
		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	43.90%	40%	1,004,673,700.00	0	0	0	0	0	0	0	40%	1,004,673,700.00	Dinas Kesehatan		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	94.37%	100%		0	0	0	0	0	0	0	100%		Dinas Kesehatan		
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Biaya obat per kapita per tahun (Rp)	7,795	8,000	2,607,912,599.00	0	0	0	0	0	0	0	8,000	2,607,912,599.00	Dinas Kesehatan		
		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas terhadap 100.000 penduduk	3,87	3.80	6,312,545,796.00	0	0	0	0	0	0	0	3.80	6,312,545,796.00	Dinas Kesehatan		
		Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan akses layanan rujukan	36.40%	95%	8,663,303,000.00	0	0	0	0	0	0	0	95%	8,663,303,000.00	Dinas Kesehatan		
		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan penduduk terlindungi Jaminan kesehatan (UHC)	86.71%	95%	217,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	95%	217,000,000.00	Dinas Kesehatan		
		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat	22.49%	23,5%	16,816,822,422.57	25%	13,336,283,390	0	0	0	0	0	25%	13,336,283,390	Dinas Kesehatan		
		Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan	43.90%			40%	33,591,039,999	0	0	0	0	0	40%	33,591,039,999	Dinas Kesehatan		
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan	94.37%	0	100%			0		0	0	0	100%				
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan kegawatdaruratan di RSUD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan RSUD	N/a	0	0	100%	33,337,000,000	0	0	0	0	0	100%	33,337,000,000	Dinas Kesehatan		
			Indikator kinerja pelayanan RS (dirinci dalam RSB-RSUD)	N/a	0		RSB-RSUD		0		0	0	RSB-RSUD	Dinas Kesehatan				
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	0	0	0	0	0	100	11,177,502,236.55	100	11,315,735,196.89	100	11,457,408,656.22	100	11,457,408,656.22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase pengelolaan sumber daya air	0	0	0	0	56.00	11,800,000,000.00	57.00	11,800,000,000.00	58.00	11,800,000,000.00	58.00	11,800,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase pengembangan SPAM	0	0	0	0	70.00	3,145,000,000.00	71.00	3,235,067,310.00	72.00	4,756,047,326.00	72.00	4,756,047,326.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem persampahan	0	0	0	0	60.00	3,900,000,000.00	61.00	2,700,000,000.00	62.00	2,700,000,000.00	62.00	2,700,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase pengembangan sistem air limbah	0	0	0	0	65	3,150,000,000.00	66.00	3,150,000,000.00	67.00	3,150,000,000.00	67.00	3,150,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	0	0	0	0	57.00	12,875,000,000.00	58.00	15,925,000,000.00	59.00	15,925,000,000.00	59.00	15,925,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pengembangan permukiman	0	0	0	0	58.00	8,915,000,000.00	59.00	10,305,000,000.00	60.00	10,305,000,000.00	60.00	10,305,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung	0	0	0	0	56.00	8,550,000,000.00	57.00	9,150,067,310.00	58.00	10,671,047,326.00	58.00	10,671,047,326.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi baik	0	0	0	0	59.00	23,195,322,799.00	60.00	25,185,390,109.00	61.00	26,706,330,156.00	61.00	26,706,330,156.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi	0	0	0	0	73.00	1,500,000,000.00	74.00	1,550,000,000.00	75.00	1,550,000,000.00	75.00	1,550,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan terhadap Penataan Ruang	0	0	0	0	56.00	2,700,000,000.00	63.00	2,700,000,000.00	78.00	2,700,000,000.00	78.00	2,700,000,000.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	6,299,800,000	0	0	0	0	0	100	6,299,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	4,826,142,507	0	0	0	0	0	0	0	100	4,826,142,507	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	2,479,500,000	0	0	0	0	0	0	0	100	2,479,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	217,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	217,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	308,076,000	0	0	0	0	0	0	0	100	308,076,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	29,081,500	0	0	0	0	0	0	0	100	29,081,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terbangun	56.5	57	50,553,768,575	0	0	0	0	0	0	0	57	50,553,768,575	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan yang terpelihara	44.88	45	12,418,000,000	0	0	0	0	0	0	0	45	12,418,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	Persentase drainase yang terbangun	51	53	21,358,000,000	0	0	0	0	0	0	0	53	21,358,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	74.54	76	4,215,939,000	0	0	0	0	0	0	0	76	4,215,939,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Pengendali Banjir	Persentase pengendalian banjir kondisi baik	61.4	62	4,215,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	62	4,215,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan	49	50	175,224,200	0	0	0	0	0	0	0	0	50	175,224,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembangunan Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase pembangunan lingkungan sehat perumahan	49	50	342,685,925	0	0	0	0	0	0	0	50	342,685,925	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase rencana tata ruang	68	70	2,354,010,850	0	0	0	0	0	0	0	70	2,354,010,850	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase penyelenggaraan Jalan	0	0	0	59	78,702,250,000	0	0	0	0	0	59	78,702,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase pengelolaan sumber daya air	0	0	0	55	37,609,870,000	0	0	0	0	0	55	37,609,870,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Persentase pengembangan infrastruktur permukiman	0	0	0	51	1,250,000,000	0	0	0	0	0	51	1,250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	Persentase rencana dan pemanfaatan ruang	0	0	0	72	6,170,000,000	0	0	0	0	0	72	6,170,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase pelayanan kebinarmargaan	70	72	4,840,000,000	74	6,130,000,000	0	0	0	0	0	74	6,130,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	80	81	1,456,566,200	0	0	0	0	0	0	0	81	1,456,566,200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Program Pembinaan Konstruksi	Persentase pelayanan jasa konstruksi	80	0	0	82	1,490,000,000	0	0	0	0	0	82	1,490,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemenrintah Daerah	0	0	0	0	0	100%	29,320,378,213	100%	29,636,423,717	100%	29,960,243,941	100%	29,960,243,941	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni	0	0	0	0	0	96.62%	1,000,000,000	96.70%	4,075,000,000	#####	7,085,000,000	#####	7,085,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1	04	04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU	0	0	0	0	0	33.98%	40,164,959,721	40.23%	46,177,001,062	#####	46,470,751,116	#####	46,470,751,116	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	62,617,647,929	0	0	0	0	0	100	62,617,647,929	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	16,002,492,259	0	0	0	0	0	0	0	100	16,002,492,259	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	36,674,126,743	0	0	0	0	0	0	0	100	36,674,126,743	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	160,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	253,847,192	0	0	0	0	0	0	100	253,847,192	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Jumlah Rumah Layak Huni Terbangun	15,29	0.9	278,422,625	0	0	0	0	0	0	0.9	278,422,625	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan Lingkungan Terbangun	38,08	0.85	10,717,496,375	0	0	0	0	0	0	0.85	10,717,496,375	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Setiap Tahun	100	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang Tertangani	66,49	85	6,156,613,910	0	0	0	0	0	0	85	6,156,613,910	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Drainase Dalam Kondisi Baik (km)	0	0.8	2,445,021,250	0	0	0	0	0	0	0.8	2,445,021,250	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Peningkatan Pelayanan Pemakaman Yang Dapat Berfungsi Optimal	46,50	0.9	312,867,975	0	0	0	0	0	0	0.9	312,867,975	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaanan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pelayanan IPLT (%)	65	0.9	1,608,247,375	0	0	0	0	0	0	0.9	1,608,247,375	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Manfaat Air Bersih	60	0.9	2,278,544,190	0	0	0	0	0	0	0.9	2,278,544,190	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung yang Memiliki IMB	34,45	0.9	458,306,750	0	0	0	0	0	0	0.9	458,306,750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Pada Tahun N	24,37	0.95	2,508,546,484	0.95	853,208,531	0	0	0	0	0.95	853,208,531	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Penerangan Jalan Umum	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n	51,58	0.9	12,626,205,500	0	0	0	0	0	0	0.9	12,626,205,500	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah RTH dalam Kondisi Baik	64,52	0.85	5,366,123,650	0	0	0	0	0	0	0.85	5,366,123,650	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Fasilitas Umum	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0	0	0	5.20%	30,151,359,332	0	0	0	0	0	0	6%	30,151,359,332	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kualitas dan Infrastruktur Lingkungan	IKM Pelayanan Pemakaman	0	0	0,9	24,531,528,800	0	0	0	0	0	0	0,9	24,531,528,800	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
				Rasio Lampu Penerangan Jalan Umum (Titik Lampu) Pada Tahun n	0	0			0	0								0,9
				Rasio RTH dalam Kondisi Baik	0	0			0	0								0,85
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Air Minum dan Air Limbah	Persentase Sampah Yang Tertangani	0	0	0	90%	9,593,500,542	0	0	0	0	0	90%	9,593,500,542	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100	11,833,768,884	100	12,403,393,196	100	12,922,339,622	100	12,922,339,622	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	100	1,035,500,000	100	1,099,875,000	100	1,103,125,000	100	1,103,125,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	7,165,008,169	0	0	0	0	0	100	7,165,008,169	Satuan Polisi Pamong Praja	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	57	100	4,445,564,041	0	0	0	0	0	0	100	4,445,564,041	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	69	90	770,370,000	0	0	0	0	0	0	90	770,370,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	243,663,600	0	0	0	0	0	0	100	243,663,600	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	32.7	32.7	383,050,000	0	0	0	0	0	0	32.7	383,050,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	28	95	128,192,500	0	0	0	0	0	0	95	128,192,500	Satuan Polisi Pamong Praja		
			Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Penegakan Perda	90%	90%	790,122,500	92%	948,147,000	0	0	0	0	92%	948,147,000	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	0.6	1.2		1.8	0	0	0	3						
				Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	7.84	8.04		8.24	0	0	0	8.82						
				Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	90	92		92	0	0	0	96						
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Rasio Pos Kamling per RT	0,44	0.45	1,537,430,000	0.47	921,080,123	0	0	0	0	0.47	921,080,123	Satuan Polisi Pamong Praja		
				Cakupan rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	0	1		2		0	0	0	2					

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100	4,598,085,469	100	5,053,312,965	100	5,205,452,955	100	5,205,453,955	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana	0	0	0	0	100%	968,000,000	100%	773,000,000	100%	838,000,000	100%	838,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,605,894,100	0	0	0	0	0	100	2,605,894,100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	100	100	1,707,326,806	0	0	0	0	0	0	0	100	1,707,326,806	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tercapainya sarana dan prasarana aparatur yg lebih baik	100	100	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	17,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terukuranya kinerja instansi pemerintah dan terarahnya pembangunan kesejahteraan sosial	100	100	34,814,670	0	0	0	0	0	0	0	100	34,814,670	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terhindarnya kota Palangka Raya dari Bahaya Bencana	100	100	232,586,250	0	0	0	0	0	0	0	100	232,586,250	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Penanggulangan fisik pasca bencana	0	0	0	100	540,000,000	0	0	0	0	0	100	540,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan Bencana	100	100	346,602,982	100	150,000,000	0	0	0	0	0	100	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Terhindarnya Kota Palangka Raya dari bencana kebakaran hutan dan lahan	100	100	860,948,125	0	0	0	0	0	0	0	100	860,948,125	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			Program Penanggulangan Bencana	Tersedianya kajian resiko dan kontijensi bencana	0	0	0	100	5,000,000,000	0	0	0	0	0	100	5,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100	7,733,447,390.60	100	8,035,485,096.41	100	8,235,122,229.78	100	8,235,122,229.78	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1	05	04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan penanggulangan kebakaran	0	0	0	0	60	2,815,891,485	65	3,067,048,889	70	3,315,601,333	70	3,315,601,333	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	4,789,864,078	0	0	0	0	0	100	4,789,864,078	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	2,481,357,128	0	0	0	0	0	0	0	100	2,481,357,128	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	32,750,000	0	0	0	0	0	0	0	100	32,750,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	20,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	107,646,251	0	0	0	0	0	0	0	100	107,646,251	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	0.65	0.65	740,000,125	70	6,585,000,000	0	0	0	0	0	70	6,585,000,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Peningkatan Penyelamatan (Rescue) dan Evakuasi Korban	Tingkat Layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban dan yang terdampak	0.35	0	0	0.4	1,350,000,000	0	0	0	0	0	0.4	1,350,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Kebakaran	persentase jumlah masyarakat yang tanggap pencegahan kebakaran	40%	0	0	45%	750,000,000	0	0	0	0	0	45%	750,000,000	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	0	80%	5,428,157,551.00	80%	5,114,827,158.40	80%	5,258,035,029.02	80%	5,258,035,029.02	Dinas Sosial
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS	0	0	0	0	0	80%	136,459,997.00	80%	67,079,997.00	80%	60,983,198.00	80%	60,983,198.00	Dinas Sosial
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	0	0	0	0	0	50%	292,983,400.00	50%	303,291,600.00	50%	286,833,400.00	50%	286,833,400.00	Dinas Sosial
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial	0	0	0	0	0	45%	510,000,000.00	45%	82,000,000.00	45%	82,000,000.00	45%	82,000,000.00	Dinas Sosial
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	0	0	0	0	0	80%	1,078,017,500.18	80%	1,063,017,501.74	80%	1,123,447,372.52	80%	1,123,447,372.52	Dinas Sosial
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	1,380,162,430	0	0	0	0	0	100	1,380,162,430	Dinas Sosial	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	831,014,600	0	0	0	0	0	0	0	100	831,014,600	Dinas Sosial	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	635,610,949	0	0	0	0	0	0	0	100	635,610,949	Dinas Sosial	
			Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	41,867,226	0	0	0	0	0	0	0	100	41,867,226	Dinas Sosial	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	83,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	83,000,000	Dinas Sosial	
			Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	100,350,500	0	0	0	0	0	0	0	100	100,350,500	Dinas Sosial	
			Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penanganan PMKS	41115	8223	594,625,000	8223	889,031,072	0	0	0	0	0	8223	889,031,072	Dinas Sosial	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Terlaksanya Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	500	100	13,308,200	0	0	0	0	0	0	0	100	13,308,200	Dinas Sosial	
			Pembinaan Anak Terlantar	Terbinanya Anak Terlantar	175	35	64,606,000	0	0	0	0	0	0	0	35	64,606,000	Dinas Sosial	
			Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat & Eks Trouma	250	50	117,693,000	0	0	0	0	0	0	0	50	117,693,000	Dinas Sosial	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Terlaksananya Pendayagunaan Penyandang Cacat & Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya	250	50	275,549,200	0	0	0	0	0	0	0	50	275,549,200	Dinas Sosial	
		Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial	26	5	212,449,197	5	145,086,200	0	0	0	0	0	5	145,086,200	Dinas Sosial	
		Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana	Terbinanya Anggota Tagana Kota Palangka Raya	100	100	91,447,500	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Sosial	
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekontruksi	50	10	16,746,000.53	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial	0	0	0	235	378,281,500	0	0	0	0	0	235	378,281,500	Dinas Sosial	
		Program Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial	Terlaksananya Perlindungan Jaminan Sosial	0	0	0	100%	222,193,100	0	0	0	0	0	100%	222,193,100	Dinas Sosial	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	75	5,167,713,855	80	5,333,416,102	85	5,494,272,347	85	5,494,272,347	Dinas Tenaga Kerja
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	0	0	83	158,927,000	83	170,052,000	83	178,555,000	83	178,555,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0	0	75	272,885,000	75	295,135,000	75	305,135,000	75	305,135,000	Dinas Tenaga Kerja
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Cakupan Program Hubungan Industrial	0	0	0	0	75	238,361,000	75	255,049,000	75	267,803,000	75	267,803,000	Dinas Tenaga Kerja
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,203,104,140	0	0	0	0	100	2,203,104,140	Dinas Tenaga Kerja	
			Program Administrasi Perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	100	100	1,256,006,690	0	0	0	0	0	0	100	1,256,006,690	Dinas Tenaga Kerja	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	100	726,727,500	0	0	0	0	0	0	100	726,727,500	Dinas Tenaga Kerja	
			Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan Program arn Peningkatan aparatur	60	100	30,000,000	0	0	0	0	0	0	100	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0		40,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0		30,000,000	Dinas Tenaga Kerja	
			Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan program kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	0	859,015,000		821,431,650	0	0	0	0		859,015,000	Dinas Tenaga Kerja	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program peningkatan Kesempatan Kerja	Cakupan Program Peningkatan Kesempatan Kerja	0	0	305,444,100		1,050,201,600	0	0	0	0	0	0	0	305,444,100	Dinas Tenaga Kerja
			Program perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	Cakupan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga ketenagakerjaan	0	0	62,639,000		300,000,000	0	0	0	0	0	0		62,639,000	Dinas Tenaga Kerja
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	0	100	7,916,988,901	100	8,135,019,403	100	8,339,932,647	100	8,339,932,647	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG	0	0	0	0	0	35	45,000,000	45	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	0	0	0	0	0	100	60,000,000	100	20,000,000	100	48,500,000	100	48,500,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
2	08	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	0	0	0	0	450	40,000,000	550	50,000,000	700	20,000,000	700	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	0	0	0	0	-	550	20,000,000	0	-	550	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat Capaian Kota Layak Anak	0	0	0	0	0	-	550	35,000,000	700	75,000,000	700	75,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	0	0	0	0	100	100,000,000	100	105,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjaraan Gender dalam Pembangunan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu		100	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	25,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu	100	100	124,735,575	100	352,157,575	0	0	0	0	0	100	352,157,575	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Cakupan Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit Palayanan Terpadu		100	600,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100	143,531,450	100	439,459,300	0	0	0	0	0	100	439,459,300	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	85	11,511,256,269.84	90	11,796,707,620.40	95	12,255,176,079.02	95	12,255,176,079.02	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein	0	0	0	0	2.167	85,557,500	2.192	113,557,500	2.217	115,557,500	2.217	115,557,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan	0	0	0	0	100 %	20,000,000	90 %	170,000,000	90 %	20,000,000	90 %	30,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji ≥ 80%	0	0	0	0	80	10,000,000	90	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	3,635,282,500	0	0	0	0	0	100	3,635,282,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	2,240,116,025	0	0	0	0	0	0	0	100	2,240,116,025	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja SOPD	100	100	684,414,800	0	0	0	0	0	0	100	684,414,800	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur SOPD	-	100	56,700,000	0	0	0	0	0	0	100	56,700,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur ASN	-	100	120,000,000	0	0	0	0	0	0	100	120,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	65,812,000	0	0	0	0	0	0	100	65,812,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Tercapainya Skor PPH	90	90.1	164,469,850	90.2	1,144,216,233	0	0	0	0	90.2	1,144,216,233	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2	#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
2	#	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Sengketa Tanah Garapan	0	0	0	0	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	#	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	0	0	0	0	100	425,000,000.00	100	800,000,000.00	100	900,000,000.00	100	900,000,000.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	#	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong	0	0	0	0	100	458,536,599	100	450,000,001	100	450,000,000	100	450,000,000	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100	14,715,872,546	100	15,068,830,834	100	15,612,599,360	100	15,612,599,360	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah RPPLH dan KLHS kota	0	0	0	0	2 dokumen	174,952,800	2 dokumen	209,943,360	2 dokumen	251,932,032	2 dokumen	251,932,032	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	0	0	0	0	75	965,185,600	75	1,159,222,720	75	1,271,067,264	75	1,271,067,264	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem	0	0	0	0	1 lokasi	875,172,800	1 lokasi	934,207,360	1 lokasi	960,048,832	1 lokasi	960,048,832	Dinas Lingkungan Hidup

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair	0	0	0	0	50 pelaku usaha	200,000,000	50 pelaku usaha	200,000,000	50 pelaku usaha	200,000,000	50 pelaku usaha	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH	0	0	0	0	250 Pelaku usaha	287,487,200	250 Pelaku usaha	304,984,640	250 Pelaku usaha	315,981,568	250 Pelaku usaha	315,981,568	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFANLOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA	0	0	0	0	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	100	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota	0	0	0	0	6 kegiatan	265,443,826	3 kegiatan	289,521,620	3 kegiatan	252,621,691	3 kegiatan	252,621,691	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup	0	0	0	0	7 kegiatan	371,104,000	7 kegiatan	436,324,800	7 kegiatan	484,589,760	7 kegiatan	484,589,760	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup	0	0	0	0	100	85,578,384	100	102,716,160	100	121,259,392	100	121,259,392	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Presentase penanganan dan pengurangan sampah	0	0	0	0	20	2,872,144,000	20	3,186,572,800	20	3,303,887,360	20	3,303,887,360	Dinas Lingkungan Hidup	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	1,332,628,316	0	0	0	0	0	100	1,332,628,316	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pelayanan Administrasi perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	873,375,888	0	0	0	0	0	0	0	100	873,375,888	Dinas Lingkungan Hidup	
			Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	76,860,000	0	0	0	0	0	0	0	100	76,860,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pembinaan disiplin aparatur	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
			Program Peningkatan Penembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	114,454,375	0	0	0	0	0	0	0	100	114,454,375	Dinas Lingkungan Hidup	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Layanan Persampahan Skala Perkotaan	20	20	50,100,000	25	1,485,120,000	0	0	0	0	0	25	1,485,120,000	Dinas Lingkungan Hidup	
			Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	persentase kesadaran suatu usaha/ kegiatan dalam mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup	71.65	75	179,874,375	75	2,147,600,050	0	0	0	0	0	75	2,147,600,050	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
			Persentase suatu usaha / Kegiatan yang mendapat pembinaan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan LH	0	0		60		0		0		0		60			
			Ketersediaan data sumber - sumber pencemar air	0	0		1 Dok		0		0		0		4 Dok			
			Persentase Kesadaran Masyarakat dalam pengendalian Pencemaran Lingkungan	0	0		20		0		0		0		20			
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Lokasi Perlindungan dan Konservasi SDA yang dilakukan	7	6 Lokasi	82,829,000	75	1,106,422,000	0	0	0	0	0	0	75	1,260,737,216	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Pengendalian Konservasi SDA	Tidak Ada	3 Sungai	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Sungai	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Tersedianya Kawasan Hutan yang dapat memperbaiki dan mempertahankan kelestarian lingkungan		50 Ha	31,685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 Ha	31,685,000	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data/ Informasi SDA dan LH	1	2 Dokumen	156,593,625	70	1,262,508,000	0	0	0	0	0	0	70	2,867,213,824	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan	76.6	75	857,557,000	75	2,210,092,350	0	0	0	0	0	0	75	2,540,239,581	Dinas Lingkungan Hidup	
		Program Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Peningkatan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	4.1	7 Lokasi	114,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 Lokasi	114,130,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	0	12 bulan	6,977,468,290	12 bulan	7,415,091,210	12 bulan	7,776,098,181	12 bulan	7,776,098,181	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk	0	0	0	0	0	12 bulan	246,102,625	12 bulan	246,102,625	12 bulan	246,102,625	12 bulan	246,102,625	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Jumlah Data/Dokumen dalam Program Pencatatan Sipil	0	0	0	0	0	7 dokumen	208,700,500	7 dokumen	208,700,500	7 dokumen	208,700,500	7 dokumen	208,700,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0	0	0	17 dokumen	1,336,426,000	17 dokumen	1,336,426,000	17 dokumen	1,336,426,000	17 dokumen	1,336,426,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	#	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan	0	0	0	0	0	14 dokumen	170,836,000	14 dokumen	170,836,000	14 dokumen	170,836,000	14 dokumen	170,836,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	4,102,902,306	0	0	0	0	0	0	100	4,102,902,306	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	86,90%	90	2,502,016,725	0	0	0	0	0	0	0	0	90	2,502,016,725	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor	87,54%	90	62,358,300	0	0	0	0	0	0	0	0	90	62,358,300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Prgoram Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Seragam PNS	93,73%	95	94,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95	94,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur	90,58%	93	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	93	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Tahunan	99,54%	70%	116,218,025	0	0	0	0	0	0	0	0	70%	116,218,025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Sarana Pencatatan Sipil	0.40	0.50	229,525,375	0.60	386,764,455	0	0	0	0	0	0	0.60	386,764,455	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Penataan Pengelolaan Informasi Kependudukan	Peningkatan Pelayanan E-KTP	75%	80%	170,213,125	85%	517,272,690	0	0	0	0	0	0	85%	517,272,690	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya	B	B	175,396,000	B	260,696,920	0	0	0	0	0	0	B	260,696,920	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pelayanan Publik dengan Baik	0.50	0.60	1,256,563,048	0.70	1,641,654,394	0	0	0	0	0	0	0.70	1,641,654,394	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase penduduk di Wilayah Kec. Pahandut yang wajib memiliki dokumen kependudukan	80%	83%	40,064,250	86%	60,000,000	0	0	0	0	0	0	98%	75,000,000	Kecamatan Pahandut
				Persentase penduduk di Wilayah Kec. Bukit Batu yang wajib memiliki dokumen kependudukan	65%	75%	55,320,000	85%	60,852,000	0	0	0	0	0	0	100%	80,994,012	Kecamatan Bukit Batu
				Persentase penduduk di Wilayah Kec. Jekan Raya yang wajib memiliki dokumen kependudukan	94.60%	95%	4,608,750	95.50%	66,500,000	0	0	0	0	0	0	97%	75,000,000	Kecamatan Jekan Raya
				Terlaksananya Pendataan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sabangau	100%	100%	28,600,000	100%	295,500,000	0	0	0	0	0	0	100%	32,400,000	Kecamatan Sabangau

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah		Indikator Kinerja Program (outcome)		Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN	Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri	0	0	0	0	0	2	30,000,000	3	45,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat		
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH PKK AKTIF					36	1,560,000,000	36	1,580,000,000	36	1,615,000,000	36	340,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			
				JUMLAH POSYANDU AKTIF					141		143		145		145					
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB	0	0	0	0	62.00%	105,000,000	80.00%	107,100,000	#####	160,000,000	#####	160,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk					100.00%		#####		#####		#####					
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	TOTAL FERTILITY RATE (TFR)	0	0	0	0	2,20%	1,329,979,000	2,15	1,419,979,000	2,00	1,483,344,000	2,00	1,483,344,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat			
				CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Need)	0	0		0	7,60		6,70		6,37		6,37					

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	0	0		0	17,15%		17,39		17,56	17,56				
					ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN	0	0		0	78,86		81,98		85,50	85,50				
2	14	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri	0	0	0	0	15,5%	44,200,000	17,5%	94,200,000	17,5%	107,200,000	17,5%	107,200,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	1,925,993,650	0	0	0	0	100	1,925,993,650	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	85	100	1,335,890,210	0	0	0	0	0	0	100	1,335,890,210	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	85	100	12,000,000	0	0	0	0	0	0	100	12,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	85	100	20,300,000	0	0	0	0	0	0	100	20,300,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	85	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	85	100	62,882,669	0	0	0	0	0	0	0	100	62,882,669	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
				Program Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang istrinya dibawah usia 20 tahun	14.49	14.71	2,248,920,000	15.15	2,361,920,000	0	0	0	0	0	15.15	2,361,920,000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Rata-Rata Usia Kawin pertama wanita	20	21		21		0		0		0	21			
					Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8	7.82		7.43		0		0		0	7.43			
					Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14.3	16.33		16.8		0		0		0	16.8			
					Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	71.48	73.82		76.16		0		0		0	76.16			
					Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan	90	90		90		0		0		0	90			
					Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja	30	35		40		0		0		0	40			
					Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I	5.92	5.68		5.44		0		0		0	5.44			
					Cakupan Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75.5	76.5		77.5		0		0		0	77.5			
					Cakupan Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75.5	76.5		77.5		0		0		0	77.5			

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
					Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	10	11.5		12.5		0		0		0	12.5			
			Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah	4.17	10	125,498,225	0	0	0	0	0	0	0	10	125,498,225	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan		
				Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	1 : 1		0	0	0	0	0	1 : 1						
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang	1	1		0	0	0	0	1							
				Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0.6347	1		0	0	0	0	1							
			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	4.17	0	0	30	461,376,800.00	0	0	0	0	0	30	461,376,800	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
				Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan	1 : 1,43	0	1 : 1	0	0	0	0	1 : 1							
				Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Bidang	1	0	1	0	0	0	1								
				Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	0.6347	1	1	0	0	0	1								
			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	10	11.5	14,999,875	0	0	0	0	0	0	0	11.5	14,999,875	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB KR yang Mandiri	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa		35,000,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,125	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	90	9,616,996,285.88	90	10,242,280,010.77	90	10,534,681,192.76	90	10,534,681,192.76	Dinas Perhubungan	
	2	# 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Level Keselamatan Transportasi	0	0	0	0	0,197	2,149,500,000.00	0,196	2,149,500,000.00	0,195	2,349,500,000.00	0,195	2,349,500,000.00	Dinas Perhubungan	
	2	# 03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	0	0	0	0	54,153	482,600,000.00	54,153	482,600,000.00	54,153	482,600,000.00	54,153	3,524,000,000.00	Dinas Perhubungan	
	2	# 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Jumlah Pengelolaan Penerbangan	0	0	0	0	0	-	0	0	1	19,000,000.00	1	19,000,000.00	Dinas Perhubungan	
	2	# 05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian	0	0	0	0	1	77,000,000.00	1	77,000,000.00	1	77,000,000.00	1	77,000,000.00	Dinas Perhubungan	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	3,542,104,858	0	0	0	0	0	100	3,542,104,858	Dinas Perhubungan	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,619,976,001.02	0	0	0	0	0	0	0	100	1,619,976,001.02	Dinas Perhubungan	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aperatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	996,549,637	0	0	0	0	0	0	0	100	996,549,637	Dinas Perhubungan	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	110,550,000.00	0	0	0	0	0	0	0	100	110,550,000.00	Dinas Perhubungan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aperatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	90,525,500	0	0	0	0	0	0	0	100	90,525,500	Dinas Perhubungan	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	61,516,500	0	0	0	0	0	0	0	100	61,516,500	Dinas Perhubungan	
			Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	65,770,220	0	0	0	0	0	0	0	104,029	-	Dinas Perhubungan	
			Program Peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	50,000,000	104,029	1,337,070,000	0	0	0	0	0	0	1,337,070,000	Dinas Perhubungan	
				Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10,099	10,099	10,299	0		0	0	0	0	0	0			10,299
			Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	(151 x 100.000) /275.667 = 54,77	(151 x 100.000) /275.667 = 54,77	1,768,000,000	(149 x 100.000) /275.667 =54,05	0	0	0	0	0	0	(149 x 100.000) /275.667 =54,05	3,337,770,220	Dinas Perhubungan	
			Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Indeks Angka Kecelakaan Lalu Lintas (Per 100.000 Penduduk)	(151 x 100.000) /275.667 = 54,77	(151 x 100.000) /275.667 = 54,77	2,632,846,279.49	(149 x 100.000) /275.667 =54,05	0	0	0	0	0	0	(149 x 100.000) /275.667 =54,05	3,631,128,879	Dinas Perhubungan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	10,099	10,099	345,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,099	345,000,000	Dinas Perhubungan	
		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	104,029	104,029	1,017,000,000	104,029	1,248,740,000	0	0	0	0	0	0	104,029	1,248,740,000	Dinas Perhubungan	
2	#	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	0	100%	5,387,162,554	100%	5,793,347,305	100%	6,049,161,500	100%	6,049,161,500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	#	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik	0	0	0	0	80%	2,756,572,500	85%	2,822,000,000	90%	2,883,000,000	90%	2,883,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	#	03	PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)Perangkat Daerah yang terintegrasi	0	0	0	0	60%	2,810,200,000	80%	2,845,200,000	100%	2,969,200,000	100%	2,969,200,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya	0	0	0	0	0	75%		80%		90%		90%			
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	1,726,868,043	0	0	0	0	0	100	1,726,868,043	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1,001,382,295	0	0	0	0	0	0	0	100 %	1,001,382,295	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	63,875,000	0	0	0	0	0	0	0	100 %	63,875,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	22,947,000	0	0	0	0	0	0	0	100 %	22,947,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	25%	40%	1,410,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1410440000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
				Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	56%	56%		0	0	0	0	0	0	0	0	0.56		
			Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	27%	40%	168,461,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40%	168461000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	20%	20%		0	0	0	0	0	0	0	0	0.2		
				Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	70%		0	0	0	0	0	0	0	0	0.7		
			Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media	0	20%	120,649,500	0	0	0	0	0	0	0	0	20%	120649500	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	C		0	0	0	0	0	0	0	0	C		
			Program Aplikasi dan Informatika	Persentase Sub Domain Yang Dikelola	40%	45%	53,001,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0.45	53001700	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	IKM Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0	0	0	C	3,050,280,000	0	0	0	0	0	0	C	3,050,280,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Cakupan Pengembangan dan Perberdayaan KIM di Tingkat Kecamatan	0	0		60%		0	0	0	0	0	0	60%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan melalui media	0	0		40%		0	0	0	0	0	0	40%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase Data Informasi dan Publikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	0	0		75%		0	0	0	0	0	0	75%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik	0	0		40%		0	0	0	0	0	0	40%		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SOPD yang terintegrasi	0	0	45%	9,580,000,000	0	0	0	0	0	0	45%	9,580,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan	
				Persentase Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang digunakan Perangkat Daerah untuk mendukung SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	0	0	75%		0	0	0	0	0	0	75%			
				Persentase Sub Domain Yang Dikelola	0	0	65%		0	0	0	0	65%					
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100	11,104,682,921	100	11,423,101,292	100	11,733,843,951	100	11,733,843,951	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2	#	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Presentase Koperasi Berkualitas	0	0	0	0	39%	20,000,000	45%	30,000,000	50%	40,000,000	50%	40,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2	#	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	0	0	0	0	20%	20,000,000	30%	30,000,000	40%	40,000,000	40%	40,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2	#	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian	0	0	0	0	100 Koperasi	145,000,000	140 Koperasi	160,000,000	160 Koperas i	165,000,000	160 Koperas i	165,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2	#	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan	0	0	0	0	100 Koperasi	148,000,000	100 Koperasi	170,000,000	100 Koperas i	185,000,000	100 Koperas i	185,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2	#	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Usaha Mikro Kecil	0	0	0	0	30%	91,000,000	32%	115,000,000	34%	130,000,000	34%	130,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2	#	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha	0	0	0	0	70 UMKM	225,000,000	80 UMKM	230,000,000	90 UMKM	235,000,000	90 UMKM	235,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	0	2,063,294,379	0	0	0	0	100	2,063,294,379	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,152,028,192	0	0	0	0	0	0	0	100	1,152,028,192	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	435,972,705	0	0	0	0	0	0	0	100	435,972,705	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	68,375,000	0	0	0	0	0	0	0	100	68,375,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	79,800,000	0	0	0	0	0	0	0	100	79,800,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	35,930,000	0	0	0	0	0	0	0	100	35,930,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	22%	24%	389,631,250	28%	579,556,250	0	0	0	0	0	0	28%	579,556,250	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
			Program Peningkatan perluasan sumber pembiayaan	Presentase UKM non BPR/LKM Aktif	2,5%	2,7%	42,536,125	3%	118,300,000	0	0	0	0	0	0	3%	118,300,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Presentase UKM BPR/LKM Aktif	44,7%	46%		47%		0		0		0		47%		
			Program peningkatan pengembangan kualitas kelembagaan koperasi dan UKM	Persentase koperasi aktif	94%	95%	402,210,229	96%	629,873,373	0	0	0	0	0	0	96%	629,873,373	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	0	0	0	0	0	12 bulan	5,947,688,949	12 bulan	5,931,586,809	12 bulan	6,159,394,259	12 bulan	6,159,394,259	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	#	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif	0	0	0	0	0	30	220,000,000	40	80,000,000	50	80,000,000	50	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	#	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi PMDN	0	0	0	0	0	15	275,000,000	25	200,000,000	35	200,000,000	35	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	#	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	0	0	0	0	83.95	210,000,000	84.95	245,000,000	85.96	245,000,000	85.96	245,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	#	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	0	0	0	0	0	20	60,000,000	30	60,000,000	45	60,000,000	45	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
2	#	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik	0	0	0	0	0	100	119,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	3,225,000,000	0	0	0	0	0	0	100	3,225,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,557,846,437.34	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1,557,846,437.34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	100%	260,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	260,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100%	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	100%	100%	45,970,200	0	0	0	0	0	0	0	100%	45,970,200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Nilai Investasi (Milyard)	-	585.65	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	585.7	30,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah investor PMDN	303	50	216,306,500	50	0	0	0	0	0	0	50	745,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
				Jumlah Nilai Investasi PMDN (Milyard)	2597.66	200		225							225			
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	16.50%	25%	43,507,000	35%	190,000,000	0	0	0	0	0	35%	190,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase Perizinan yang Memanfaatkan Aplikasi Teknologi Perizinan	7.69%	75%	142,455,000	80%	207,000,000	0	0	0	0	0	80%	207,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.01	81.98	292,380,000	82.96	270,000,000	0	0	0	0	0	82.96	270,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
2	#	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepmudaan	0	0	0	0	0	23	655,000,000	23	655,000,000	23	655,000,000	23	185,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	0	0	0	0	0	59	1,400,500,000	59	1,480,500,000	59	1,480,500,000	59	1,480,500,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0	0	0	0	0	31	401,073,027	31	464,978,546	31	524,922,598	31	524,922,598	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,173,137,500	0	0	0	0	0	100	2,173,137,500	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	25	40	1,145,688,325	0	0	0	0	0	0	0	40	1,145,688,325	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	25	40	290,870,000	0	0	0	0	0	0	0	40	290,870,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	25	40	182,503,414	0	0	0	0	0	0	0	40	182,503,414	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	25	40	95,443,720	0	0	0	0	0	0	0	40	95,443,720	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Pogram Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Lapangan Olah Raga dan Sarana Prasarananya	0	1	190,750,000	0	0	0	0	0	0	0	1	190,750,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Kepemudaan dan Olah Raga	Jumlah Atlet Berprestasi	0	10	526,805,000	0	0	0	0	0	0	0	10	526,805,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	10	10	1,322,923,835	0	0	0	0	0	0	0	10	1,322,923,835	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Pemberdayaan Pemuda Kota Palangka Raya	Cakupan Pemuda yang kreatif, Inovatif dan Produktif	0	0	0	0.5	2,700,000,000	0	0	0	0	0	0.5	2,700,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Cakupan Pemuda yang berperan pada pembangunan	0	0	0	0.5	4,240,000,000	0	0	0	0	0	0.5	4,240,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Peningkatan Prestasi Olah Raga	Cakupan Peningkatan Pemuda yang berprestasi dalam Olah Raga	0	0	0	0.5	4,560,000,000	0	0	0	0	0	0.5	4,560,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Kesadaran Masyarakat pada gaya hidup sehat	0	0	0	0.5	4,900,000,000	0	0	0	0	0	0.5	4,900,000,000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2	#	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	0	0	0	0	0	1 Aplikasi Data	295,000,000	1 Aplikasi Data	340,600,000	1 Aplikasi Data	345,720,000	1 Aplikasi Data	345,720,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tersedianya Sistem Data dan statistik Yang Terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	0	Ada	780,500,000	0	0	0	0	0	Ada	780,500,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
				Buku Statistik "Kota Palangka Raya "	0	0		1 Dokumen		0		0						
			Pengembangan Data/Informasi	Buku Statistik "Kota Palangka Raya "	1 Dokumen	1 Dokumen	101,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	101,375,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
				Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi	Tidak ada	Tidak ada		0		0		0		0	Tidak ada			
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2	#	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	0	0	0	0	0	45%	405,000,000	60%	420,000,000	70	430,000,000	70	430,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Penguatan Kelembagaan Siber dan Persandian	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	42%	42%	37,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42%	37,100,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
			Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	0	0	0	10%	825,500,000	0	0	0	0	0	0	50%	1,774,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
				Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	0	0	45%	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	0	100	10,436,464,155	100	10,694,193,578	100	10,951,967,442	100	10,951,967,442	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek kebudayaan	0	0	0	0	0	20	460,000,000	20	460,000,000	20	460,000,000	20	140,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISONAL	Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang)	0	0	0	0	0	45	80,000,000	45	80,000,000	45	80,000,000	45	80,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	#	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase Cagar Budaya(%) yang di kelola	0	0	0	0	0	80%	180,000,000	80%	180,000,000	80%	180,000,000	80%	180,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	3,065,269,092	0	0	0	0	0	0	100	3,065,269,092	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian tahunan pelayanan perkantoran unit kerja internal SKPD	WTP	WTP	1,702,226,525	0	0	0	0	0	0	0	0	WTP	1,702,226,525	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian tahunan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal	WTP	WTP	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	WTP	72,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Aparatur yang mentaati peraturan pemerintah	WTP	WTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pendidikan	WTP	WTP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase Ketepatan dalam Penyampaian Laporan Kinerja dan Keuangan	WTP	WTP	263,669,000	0	0	0	0	0	0	0	0	WTP	263,669,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Nilai dan Kekayaan Budaya	Indeks Pengembangan dan pengelolaan Nilai Budaya dan Kekayaan Budaya	4 Pagelara n/ Festival dan 6 BCB	4	1,008,000,000	4	1,008,000,000	0	0	0	0	0	0	4	1,008,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100	4,571,314,357	100	4,816,613,242	100	5,024,303,365	100	5,024,303,365	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indaks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan	0	0	0	0	2.5	770,000,000	2.5	770,000,000	3	770,000,000	3	7,355,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#	03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Teraksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Negeri	0	0	0	0	350 Orang	10,000,000	350 Orang	10,000,000	350 Orang	10,000,000	350 Orang	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	1,182,040,790	0	0	0	0	0	100	1,182,040,790	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	780,861,800	0	0	0	0	0	0	0	100	780,861,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	38,850,000	0	0	0	0	0	0	0	100	38,850,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	14,960,000	0	0	0	0	0	0	0	100	14,960,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	24,400,000	0	0	0	0	0	0	0	100	24,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan	73.11	2	2,248,306,000	2.3	2,600,946,800	0	0	0	0	0	2.3	2,600,946,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															
2	#	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip	0	0	0	0	100	120,000,000	100	120,000,000	100	120,000,000	100	200,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2	#	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip	0	0	0	0	60	80,000,000	80	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
			Program Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Pengelolaan Arsip Secara Baku	22.22%	13.88	147,063,400	13.89	1,048,750,000	0	0	0	0	0	13.89	1,048,750,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pemerintahan	0	0	0	0	12	5,994,898,044.570	12	6,113,727,075.450	12	6,236,610,628.000	12	6,236,610,628.000	Dinas Perikanan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
3	25	02	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)	0	0	0	0	5244.78	212,500,000.000	5507.02	282,187,500.000	5782.4	282,187,500.000	5782.4	282,187,500.000	Dinas Perikanan	
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	0	0	0	0	#####	597,500,000.000	25,785	680,562,500.000	28,038	1,137,058,061.390	28,038	1,137,058,061.390	Dinas Perikanan	
3	25	04	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen)	0	0	0	0	66.67	270,000,000.000	83.33	336,000,000.000	100	336,000,000.000	100	2,045,000	Dinas Perikanan	
3	25	05	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)	0	0	0	0	40.43	565,000,000.000	42.87	576,430,885.000	45.01	290,000,000.000	45.01	290,000,000.000	Dinas Perikanan	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	1,831,049,295	0	0	0	0	0	100	1,831,049,295	Dinas Perikanan	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,282,719,375	0	0	0	0	0	0	0	100	1,282,719,375	Dinas Perikanan	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	205,190,000	0	0	0	0	0	0	0	100	205,190,000	Dinas Perikanan	
			Program Peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Dinas Perikanan	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Dinas Perikanan	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	Dinas Perikanan	
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)	16772.8	19025	944,967,500	21278	2,005,173,150	0	0	0	0	0	21278	2,005,173,150	Dinas Perikanan	
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	3150	3200	389,809,250	3250	1,105,000,000	0	0	0	0	0	3250	1,105,000,000	Dinas Perikanan	
			Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Jumlah Perairan Umum yang dilestarikan (Perairan Umum)	13	0	0	3	813,773,200	0	0	0	0	0	3	813,773,200	Dinas Perikanan	
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah Produksi produk olahan rumah tangga perikanan yang dibina (Ton/Tahun)	35.27	37.034	718,498,125	38.89	807,000,000	0	0	0	0	0	38.89	807,000,000	Dinas Perikanan	
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3	#	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata	0	0	0	0	2	900,000,000	2	1,050,000,000	2	1,200,000,000	2	1,200,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3	#	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)	0	0	0	0	1.4	200,000,000	1.4	200,000,000	1.4	200,000,000	1.4	200,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
3	#	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	50	550,000,000	50	565,000,000	50	580,000,000	50	580,000,000	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	
			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Palangka Raya Wisnus : Wisman :	Wisnus: 197.400 dan Wisman: 2.600	Wisnus: 196.600 dan Wisman : 3.400	467,236,000	Wisnus: 206.500 dan Wisman: 3.500	0	0	0	0	0	0	Wisnus: 206.500 dan Wisman: 3.500	1,600,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
				Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	0.6	0.7		0.8	0	0	0	0	0	0	0.8			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	INDEKS PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN DESTINASI PARIWISATA	34 Lokasi	2	3,624,514,000	2	7,500,000,000	0	0	0	0	0	0	2	7,500,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Program Pengembangan Kemitraan	INDEKS KEMITRAAN PARIWISATA	341 Orang + 20 lembaga	20 orang + 2 lembaga	418,150,000	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	0	0	0	0	0	0	20 orang + 2 lembaga	1,265,000,000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															
3	#	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	0	16	650,268,129	16,5	579,398,014	17	690,000,000	17	690,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan	0	0		0		19		19,5		20		20		
				Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0	0		0		12		12,5		13		13		
3	#	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	0	16	104,935,500	16,5	104,935,500	17	119,935,500	17	354,935,500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0	0	0	0	0	12	287,356,829	12,5	287,382,829	13	282,356,829	13	40,128,829	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	0	16	55,000,000	16,5	85,000,000	17	105,000,000	17	105,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan				19		20		20		20				
				Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan				12		12,5		13		13				
3	#	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	0	0	0	0	0	16	100,550,000	16,5	150,550,000	17	120,185,049	17	120,185,049	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan	0	0		0		19		19,5		20		20		
				Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan	0	0		0		12		12,5		13		13		
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnyaproduktivitas tanaman pertanian	20 Kw/ ha	1 Tahun	1,904,418,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	1,904,418,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian)	Terpenuhihnya dokumen/ data NTP	115	12 Bulan	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	29,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Keterlibatan dalam Kegiatan Pekan Daerah	0	1 kegiatan	101,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 kegiatan	101,680,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Nilai Tukar Petani	115	3 Kelompok Tani	56,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Kelompok Tani	56,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Tercapainya Petani/ Pekebun yang Mendapat Pelatihan/ Sosialisasi Perkebunan	0	30 Orang	15,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 Orang	15,575,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	Terpenuhihnya dokumen/ data NTP	115	3 Dokumen	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Dokumen	36,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Perlindungan Kebun Dan Tanaman	Meningkatnya luas perkebunan rakyat	115	5 Kecamatan 13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Kecamatan 13,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Pembangunan Kehutanan Dan Perkebunan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya produksi perkebunan	1.125 ton	3 Kelompok Tani 35,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 Kelompok Tani 35,240,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan	Menigkatkan Kompetensi penyuluh	0	17 Penyuluh 36,130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 Penyuluh 36,130,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pertanian		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Inseminasi Buatan	1.200 Dosis	4 ULIB 76,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi (ton)	1.102,2 Ton	Kawasan rusa, RPH, Vaksin Hewan 1,062,800,000	1.215, 2 Ton	1,862,662,500	0	0	0	0	0	0	1.215, 2 Ton	1,862,662,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Hewan tervaksin	6.000 dosis	1 Tahun 278,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	278,750,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Bantuan Kelompok Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pengolahan Peternakan	115	10 Dokumen 22,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Dokumen	22,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani yang dibina	0	0	80%	5,998,000,000	0	0	0	0	0	0	80%	5,998,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veterener, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Hewan tervaksin	0	0	7.000 Dosis	953,962,500	0	0	0	0	0	0	7.000 Dosis	953,962,500	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Bidang Pertanian	Nilai Tukar Petani	0	0	104.8	3,192,640,275	0	0	0	0	0	0	104.8	3,192,640,275	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Program Pengelolaan, Peningkatan dan Pemasaran Bidang Perkebunan	Produksi sektor perkebunan (Kelapa sawit)	0	0	63,282	1,769,384,575	0	0	0	0	0	0	63,282	1,769,384,575	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3	#	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Presentase pendistribusian Bahan Pokok	0	0	0	0	85	100,000,000	90	125,000,000	95	140,000,000	95	140,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
3	#	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase Pengendalian Harga Pasar	0	0	0	0	85	70,000,000	90	85,000,000	95	100,000,000	95	100,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
3	#	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang sesuai standarisasi	0	0	0	0	60	280,000,000	65	299,000,000	70	310,000,000	70	310,000,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
3	#	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan	0	0	0	0	11.72	180,060,000	12.12	185,060,000	12.52	190,060,000	12.52	190,060,000	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	1,269,159,375	0	0	0	0	0	100	1,269,159,375	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran	60	100	817,929,610	0	0	0	0	0	0	0	100	817,929,610	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	67	100	122,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	122,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	80	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat/Kursus/Bimbingan Teknis	60	100	46,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	46,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya laporan kinerja dan keuangan yang baik	80	100	79,200,000	0	0	0	0	0	0	0	100	79,200,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya persentase penanganan pengaduan konsumen, Jumlah alat UTTP yang ditera ulang, Jumlah Pasar yang dibangun/Revitalisasi	50	54	2,138,479,676.61	58	0	0	0	0	0	0	54	2,138,479,676.61	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					200	210		220							210		
			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor perdagangan (%) Dan Kontribusi retribusi sektor perdagangan terhadap PAD (jt)	10,52	10,92	406,356,000	11,32	0	0	0	0	0	0	10,92	406,356,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Program pengembangan perluasan perdagangan dalam negeri	Penurunan tingkat inflasi (%)	6,45	6,25	1,492,621,000	6,05	1,492,621,000	0	0	0	0	0	6,25	1,492,621,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	#		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN														
3	#	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	-	-	0	15 Industri	330,000,000	20 Industri	385,000,000	30 Industri	420,000,000	30 Industri	420,000,000		Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
			Program Fasilitasi Peningkatan Promosi Bagi IKM	Meningkatnya jumlah IKM yang difasilitasi mengikuti pameran .	95	109	138,900,000	0	0	0	0	0	0	0	109	138,900,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	1	2	70,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2	70,600,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	0.2	0.1	81,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.1	81,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri	4,38	4,55	9,500,000	0	0	0	0	0	0	0	4,55	9,500,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			Program Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya jumlah kelompok usaha IKM pendukung pariwisata dan industri riil (kelompok)	0	0	0	3	1,735,000,000	0	0	0	0	0	3	1,735,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Tumbuhnya Sentra Industri Potensial	0	0	0	0.1		0		0		0	0.1			
				Meningkatnya kontribusi pertumbuhan sektor industri	0	0	0	4,72		0		0		0	4,72			
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	01		SEKRETARIAT DAERAH															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	0	29,003,460,377.70	100	30,835,090,696.74	100	32,179,890,342.00	100	32,179,890,342.00	Sekretariat Daerah	
4	0	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat	0	0	0	0	0	9,774,780,187.00	100	10,753,830,187.00	100	10,954,773,135.00	100	10,954,773,135.00	Sekretariat Daerah	
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan	0	0	0	0	0	1,917,420,781.00	100	2,322,982,629.00	100	2,578,277,418.00	100	2,578,277,418.00	Sekretariat Daerah	
4	01	0.4	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum	0	0	0	0	0	7,843,149,400.00	100	8,441,500,000.00	100	8,879,200,000.00	100	8,879,200,000.00	Sekretariat Daerah	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	28,653,500,000	0	0	0	0	0	-	28,653,500,000	Sekretariat Daerah	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	0	100%	9,234,649,431	0	0	0	0	0	0	0	100%	9,234,649,431	Sekretariat Daerah	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	0	100%	10,324,797,350	0	0	0	0	0	0	0	100%	10,324,797,350	Sekretariat Daerah	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	0	356 ASN	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	356 ASN	50,000,000	Sekretariat Daerah	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	0	100%	452,366,101	0	0	0	0	0	0	0	100%	452,366,101	Sekretariat Daerah	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	0	90%	183,707,080	0	0	0	0	0	0	0	90%	183,707,080	Sekretariat Daerah	
			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	35 Kegiat an	5,241,060,375	0	0	0	0	0	0	0	35 Kegiat an	5,241,060,375	Sekretariat Daerah	
			Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan Administrasi Pimpinan, Manajemen Keuangan, Aset dan Kerumahtanggaan	0	32 Kegiat an	1,077,197,800	0	0	0	0	0	0	0	32 Kegiat an	1,077,197,800	Sekretariat Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Palangka Raya	0	B	216,607,806	B	299,000,000	0	0	0	0	0	0	B	216,607,806	Sekretariat Daerah
			Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan Teknologi Informasi	0	100%	1,607,022,550	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1,607,022,550	Sekretariat Daerah
			Program peningkatan kerjasama antar daerah	Jumlah Kerjasama Daerah	0	11 Kegiatan	33,107,100	0	0	0	0	0	0	0	0	11 Kegiatan	33,107,100	Sekretariat Daerah
			Program penataan peraturan perundang-undangan	Persentase Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi	0	100%	523,326,275	100%	529,000,000	0	0	0	0	0	0	100%	523,326,275	Sekretariat Daerah
			Program pembinaan dan pengembangan aparatur	Cakupan Kegiatan Pembinaan Korpri/ASN	0	300 ASN	180,857,225	0	0	0	0	0	0	0	0	300 ASN	180,857,225	Sekretariat Daerah
			Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian	Cakupan Administrasi Perekonomian dan SDA	0	100%	663,562,550	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	663,562,550	Sekretariat Daerah
			Program Pengembangan Data Informasi	Kegiatan Pengembangan Data Informasi	0	100%	194,186,900	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	194,186,900	Sekretariat Daerah
			Program Perangkat Kelembagaan dan Kewenangan	Persentase Analisis Beban Kerja yang sesuai dengan Tipologi OPD	0	100%	87,550,875	100%	92,000,000	0	0	0	0	0	0	100%	87,550,875	Sekretariat Daerah
			Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus Tata Negara	0	76%	60,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	76%	60,500,000	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Pembinaan Kedatangan di Kota Palangka Raya	Koordinasi Pembibingan, Supervisi Konsultasi, Pendidikan dan Pelatihan, Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Fasilitas, Monitoring dan Evaluasi	0	45 Kegiatan	135,776,794	0	0	0	0	0	0	0	0	45 Kegiatan	135,776,794	Sekretariat Daerah
			Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan	0	24 Kegiatan	11,450,831,337	0	0	0	0	0	0	0	0	24 Kegiatan	11,450,831,337	Sekretariat Daerah
			Program Pengembangan Kewadayaan	Kegiatan Pengembangan Kewadayaan	0	12 Kegiatan	286,432,487	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Kegiatan	286,432,487	Sekretariat Daerah
			Program Pembinaan Kemasyarakatan	Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan	0	38 Kegiatan	210,703,525	0	0	0	0	0	0	0	0	38 Kegiatan	210,703,525	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Kinerja Staf Ahli Walikota	Pelaksanaan dan Pelayanan Administrasi dan Teknis Pemerintahan dan Pembangunan	0	100%	480,601,325	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	480,601,325	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan Kinerja Sekretaris Daerah	Persentase Koordinasi dan Penguatan Kualitas Regulasi/Kebijakan Pemerintah Daerah	0	100%	1,421,314,525	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1,421,314,525	Sekretariat Daerah
			Program Pembakuan Nama Rupa Bumi	Peraturan Walikota Tentang Pembakuan Nama Rupabumi	0	75%	62,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75%	62,500,000	Sekretariat Daerah
			Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah	Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan	0	0	0	100%	3,645,000,000	0	0	0	0	0	0	100%	3,645,000,000	Sekretariat Daerah
			Program Pembinaan Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	Data Masyarakat Miskin	0	0	0	100%	1,386,470,400	0	0	0	0	0	0	100%	1,386,470,400	Sekretariat Daerah
			Program Pembinaan Pelayanan Keagamaan	Persentase ASN Yang Mendapatkan Pembinaan Pelayanan Keagamaan	0	0	0	100%	13,531,901,100	0	0	0	0	0	0	100%	13,531,901,100	Sekretariat Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
			Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama Daerah	Nilai/Skor dan Tingkat/Status Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	0	0	0	1,382,650,000	0	0	0	0	0	0	Tinggi (Skor 2.8000)	1,382,650,000	Sekretariat Daerah	
			Program Perencanaan Pengembangan Perekonomian dan Pengumpulan Data Informasi	Persentase Realisasi Serapan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kota Palangka Raya	0	0	0	1,064,000,000	0	0	0	0	0	0	100%	1,064,000,000	Sekretariat Daerah	
				Persentase pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Palangka Raya yang menggunakan LPSE	0	0			0						0			100%
4 02			SEKRETARIAT DPRD															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	90	12,019,761,725	90	12,859,345,796	90	13,550,476,285	90	13,550,476,285	Sekretariat DPRD	
4	02	02	PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN	Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD	0	0	0	0	90	19,246,590,000	95	19,456,318,144	95	20,056,492,570	95	20,056,492,570	Sekretariat DPRD	
4	02	03	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	0	0	0	0	90	14,709,404,000	90	15,953,850,000	95	16,546,040,000	95	16,546,040,000	Sekretariat DPRD	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	10,685,506,424	0	0	0	0	0	100	10,685,506,424	Sekretariat DPRD	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	80%	85%	9,203,067,000	0	0	0	0	0	0	0	85%	9,203,067,000	Sekretariat DPRD	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	80%	85%	1,558,000,000	0	0	0	0	0	0	0	85%	1,558,000,000	Sekretariat DPRD	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	80%	85%	574,212,000	0	0	0	0	0	0	0	85%	574,212,000	Sekretariat DPRD	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya	80%	85%	632,960,000	0	0	0	0	0	0	0	85%	632,960,000	Sekretariat DPRD	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	80%	85%	78,430,000	0	0	0	0	0	0	0	85%	78,430,000	Sekretariat DPRD	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat	Meningkatnya Produk-produk Kebijakan	112%	80%	12,730,904,600	0	0	0	0	0	0	0	80%	12,730,904,600	Sekretariat DPRD	
			Program Pengkajian, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Persidangan dan Humas	Meningkatnya Produk Hukum Daerah	0	0	0	80%	5,494,071,520	0	0	0	0	0	80%	5,494,071,520	Sekretariat DPRD	
				Meningkatnya Fasilitasi Persidangan, Risalah dan Humas	0	0	0	90%		0		0			90%		Sekretariat DPRD	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat, Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga DPRD	0	0	0	80%	10,073,451,064	0	0	0	0	0	80%	10,073,451,064	Sekretariat DPRD	
				Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pelaksanaan APBD	0	0	0	90%		0		0			90%			
				Meningkatnya Tindak Lanjut Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat	0	0	0	80%		0		0			80%			

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01		PERENCANAAN														
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100	10,562,258,267.89	100	10,948,515,831.17	100	11,293,532,274.29	100	11,293,532,274.29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PD= % Kelengkapan Data Sesuai SIPD	0	0	0	0	50	2,117,464,488.83	75	2,265,687,003.05	85	2,378,971,353.21	85	2,378,971,353.21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
				PP= % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra	0	0		0	95		95		95				
				PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi	0	0		0	90		90		90				
				PE = % Capaian Evaluasi	0	0		0	93		93		95		95		
5	01	03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Jumlah Fasilitasi dan Monev Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0	0	0	6 laporan	719,867,924.43	6 laporan	770,258,679.13	6 laporan	808,771,613.09	6 laporan	808,771,613.09	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA	0	0	0	0	100	740,000,000.30	100	833,801,903.53	100	938,491,998.70	100	938,491,998.70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Wilayahahan	0	0	0	0	100	1,964,487,760.00	100	2,060,000,000.00	100	2,100,000,000.00	100	5,513,210,903	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	4,758,540,560	0	0	0	0	0	100	4,758,540,560	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	2,038,226,016	0	0	0	0	0	0	0	100	2,038,226,016	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	757,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	757,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	80	58,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80	58,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	80	80	411,500,000	0	0	0	0	0	0	0	80	411,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	46,492,675	0	0	0	0	0	0	0	100	46,492,675	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100	100	2,187,706,973	100	2,256,557,630.00	0	0	0	0	0	100	2,256,557,630.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	100		0		0		0		100				
				Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	0	0		0		0		0		0	100			
			Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase capaian data pembangunan Kota Palangka Raya	100	100	439,237,300	0	0	0	0	0	0	0	100	439,237,300	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan lintas sektoral	100	100	844,802,325	0	0	0	0	0	0	0	100	844,802,325	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase Ketersediaan data pendukung perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan SDA	100	100	303,928,125	0	0	0	0	0	0	0	100	303,928,125	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100	100	121,355,000	0	0	0	0	0	0	0	100	121,355,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase Ketersediaan Data pendukung perencanaan pembangunan bidang ekonomi	100	100	611,398,125	0	0	0	0	0	0	0	100	611,398,125	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target Bidang sarana prasarana wilayah dan sumber daya air	0	0	0	100	1,518,538,120	0	0	0	0	0	100	1,518,538,120	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program perencanaan pembangunan ekonomi, Kesejahteraan Rakyat, Sosial Budaya, Pemerintahan dan Pengendalian	Persentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Ekonomi, kesra, Sosial budaya dan Pemerintahan	0	0	0	100	1,241,384,293	0	0	0	0	0	100	1,241,384,293	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase Capaian Program Pembangunan Daerah Sesuai Target	0	0		100		0		0		100				
5	02		KEUANGAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	CAKUPAN LAYANAN URUSAN PENUNJANG KEGIATAN PEMERINTAHAN	0	0	0	0	100	30,435,008,447	100	32,024,523,996	100	33,242,309,146	100	33,242,309,146	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK)	0	0	0	0	90	17,551,577,510	90	18,257,986,764	90	17,557,266,534	90	17,557,266,534	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)	0	0	0	0	90	1,597,770,450	90	1,720,708,475	90	1,987,873,297	90	1,987,873,297	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	5,105,030,044	0	0	0	0	0	0	100	5,105,030,044	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Administ rasi perkantoran berjalan	0.9	4,055,760,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9	4,055,760,875	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	Nyaman	0.85	389,940,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0.85	389,940,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	Baik	Baik	125,397,500	0	0	0	0	0	0	0	0	Baik	125,397,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	Baik	15 orang	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 orang	62,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Tersedia Dokumen LRA, Neraca, CALK, LAKIP, RKA, DPA, RO, RUMAH	9 jenis dokumen	228,835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 jenis dokumen	228,835,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	6,947,669,475	WTP	7,295,052,949	0	0	0	0	0	0	WTP	7,295,052,949	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	12 Bulan	13,444,345,139	12 Bulan	14,076,120,924	12 Bulan	14,615,741,197	12 Bulan	14,615,741,197	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas	0	0	0	1 Laporan	1,330,000,000	1 Laporan	1,330,000,000	1 Laporan	1,330,000,000	1 Laporan	1,330,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	6,030,894,500	0	0	0	0	0	0	100	6,030,894,500	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	4,668,278,250	0	0	0	0	0	0	0	0	12 Bulan	4,668,278,250	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	1 Tahun	1 Tahun	1,443,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 Tahun	1,443,550,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	115 Stell	115 Stell	157,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	115 Stell	157,550,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	10 Orang	10 Orang	210,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Orang	210,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	216,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	216,050,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian target pajak dan retribusi daerah	85	85	1,638,813,500	0	0	0	0	0	0	0	0	85	1,638,813,500	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpenuhinya Pengolahan Data Wajib Pajak Daerah	75	75	130,800,000	75	482,200,000	0	0	0	0	0	0	75	482,200,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kepuasan masyarakat atas pelayanan pajak daerah	75	75	6,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75	6,070,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Penggalian dan Peningkatan sumber-sumber PAD	Terpenuhinya capaian target Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah	0	0	0	75	2,595,600,000	0	0	0	0	0	0	75	2,595,600,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pengawasan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	0	0	0	75	634,600,000	0	0	0	0	0	0	75	634,600,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
			Program Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Terpenuhinya Pelayanan bagi Wajib Pajak Daerah	0	0	0	75	1,350,000,000	0	0	0	0	0	0	75	1,350,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	03		KEPEGAWAIAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	0	90	5,216,732,753	95	4,896,872,839	95	5,102,314,856	100	5,910,127,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1). % OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat	0	0	0	0	0	80	1,920,000,000	90	567,000,000	95	581,750,000	95	581,750,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya
				2). % Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah	0	0				100		100		100		100		
				3). % Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan	0	0				70		75		80		80		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,190,830,510	0	0	0	0	0	0	100	2,190,830,510	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1,759,002,760	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1,759,002,760	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja Aparatur yang memadai	95%	100%	100,775,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	100,775,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	95%	95%	28,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95%	28,180,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis Terkait dengan Tugas dan Fungsi	0	5	1,497,679,375	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1,497,679,375	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) SOPD	BB	BB	53,929,050	0	0	0	0	0	0	0	0	BB	53,929,050	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
			Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	100%	100%	465,090,175	100%	285,000,000	0	0	0	0	0	0	100%	285,000,000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.) % Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat	0	0	0	0	70%	4,229,269,600	80%	1,707,896,500	90%	1,746,061,100	90%	1,746,061,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Assesment sesuai dengan jabatan	50%	55%	1,868,556,150	60%	3,392,720,300	0	0	0	0	0	60%	3,392,720,300	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	0	0	100	667,063,696.69	100	713,758,155.46	100	749,446,063.23	100	749,446,063.23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,387,142,505	0	0	0	0	0	100	2,387,142,505	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,545,593,905	0	0	0	0	0	0	0	100	1,545,593,905	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	87,000,000	0	0	0	0	0	0	0	100	87,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	-	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	125,416,600	0	0	0	0	0	0	0	100	125,416,600	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	244,639,000	0	0	0	0	0	0	0	100	244,639,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Tercapai Hasil Kajian Penelitian	0	3	800,000,000	3	4,000,000,000	0	0	0	0	0	3	4,000,000,000	Badan Penelitian dan Pengembangan	
			Program Penguatan Kelitbangan	Hasil Kelitbangan dalam Pelaksanaan Pembangunan	0	1	785,036,925	1	2,812,922,175	0	0	0	0	0	1	2,812,922,175	Badan Penelitian dan Pengembangan	
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6	01		INSPEKTORAT DAERAH															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan (%)	0	0	0	0	80	6,245,980,318	85	6,455,581,260	90	6,647,222,843	90	6,647,222,843	Inspektorat	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)	0	0	0	0	75	1,750,000,000	80	1,910,000,000	85	2,025,000,000	85	2,025,000,000	Inspektorat	
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%)	0	0	0	0	80	62,000,000	83	72,000,000	85	81,500,000	85	81,500,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,205,179,264	0	0	0	0	0	100	2,987,002,600	Inspektorat	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	70	75	1,932,752,000	0	0	0	0	0	0	0	75	1,932,752,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	60	65	253,880,000	0	0	0	0	0	0	0	65	253,880,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	60	65	39,000,000	0	0	0	0	0	0	0	65	39,000,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	70	75	66,200,000	0	0	0	0	0	0	0	75	66,200,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah	Persentase Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan Nilai B	30%	75%	479,900,000	80%	287,540,000	0	0	0	0	0	80%	287,540,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal	Jumlah Tindak Lanjut Temuan	1221	1233	1,136,950,000	1245	1,530,435,000	0	0	0	0	0	1245	1,530,435,000	Inspektorat	
			Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase Penanganan Terhadap Pengaduan Masyarakat	80%	0.8	185,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0.8	185,000,000	Inspektorat	
			Program Peningkatan Kapabilitas Lembaga Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	3 DC	3	0	3	660,000,000	0	0	0	0	0	3	878,460,000	Inspektorat	
7			UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01		KECAMATAN															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100%	8,703,903,834	100%	9,083,261,262	100%	9,404,576,373	100%	9,404,576,373	Kecamatan Pahandut	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B / 73,80	2,176,100,000	A / 81,27	2,248,000,000	A / 81,30	2,387,100,000	A / 81,30	2,387,100,000	Kecamatan Pahandut	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	33 Kegiatan	2,539,000,000	33 Kegiatan	2,644,000,000	33 Kegiatan	2,679,000,000	33 Kegiatan	2,679,000,000	Kecamatan Pahandut	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	100%	133,000,000	100%	173,000,000	100%	183,000,000	100%	183,000,000	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	3,980,000,000	0	0	0	0	0	100	3,980,000,000	Kecamatan Pahandut	
			Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	674,721,681	0	0	0	0	0	0	0	100%	674,721,681	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	65%	72%	636,400,000	0	0	0	0	0	0	0	72%	636,400,000	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	90%	92%	0	0	0	0	0	0	0	0	92%	0	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kualitas dan Kuantitas SDM	74%	80%	0	0	0	0	0	0	0	0	80%	0	Kecamatan Pahandut	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	50,542,725	0	0	0	0	0	0	0	100%	50,542,725	Kecamatan Pahandut	
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.72	0.77	316,715,500	0.83	0	0	0	0	0	0	0.83	402,180,000	Kecamatan Pahandut	
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%	0	0	0	0	100%					
				Persentase Posyandu Aktif	60%	70%		80%	0	0	0	0	80%					
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa dan Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	4,309,361,463	70%	2,389,000,000	0	0	0	0	0	70%	2,389,000,000	Kecamatan Pahandut	
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	0	0	0	0	0	100	8,621,989,943	100	9,061,868,086	100	9,398,482,985	100	9,398,482,985	Kecamatan Bukit Batu
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B (79,76)	1,040,000,000	A (81,26)	1,090,000,000.00	A (81,30)	1,155,000,000.00	A (81,30)	1,155,000,000.00	Kecamatan Bukit Batu	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	0	0	0	0	0	100	2,800,000,000	100	2,835,000,000.00	100	2,880,000,000.00	100	2,880,000,000.00	Kecamatan Bukit Batu
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	0	100	126,000,000	100	152,000,000.00	100	173,000,000.00	100	173,000,000.00	Kecamatan Bukit Batu
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,097,040,670	0	0	0	0	0	0	100	2,097,040,670	Kecamatan Bukit Batu
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	864,450,150	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	864,450,150	Kecamatan Bukit Batu
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	65%	72%	971,436,400	0	0	0	0	0	0	0	0	72%	971,436,400	Kecamatan Bukit Batu
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	58%	68%	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	68%	34,000,000	Kecamatan Bukit Batu
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	34,000,000	Kecamatan Bukit Batu
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	43,423,150	0	0	0	0	0	0	0	100%	43,423,150	Kecamatan Bukit Batu	
			Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	3,385,800,000	1	0	0	0	0	0	0	1	3,724,380,000	Kecamatan Bukit Batu	
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%	0	0	0	0	100%					
				Persentase Posyandu Aktif	100%	100%		100%	0	0	0	0	100%					
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	417,279,850	70%	459,007,835	0	0	0	0	0	70%	459,007,835	Kecamatan Bukit Batu	
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	0	0	0	0	90%	8,085,828,533	96%	8,541,369,116	100%	8,911,127,885	100%	8,911,127,885	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B (74,51)	1,998,077,000	A (85,26)	2,031,350,000	A (85,26)	2,073,977,000	A (85,26)	2,073,977,000	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	0	0	0	0	64%	1,649,400,000	66%	1,663,700,000	68%	1,680,100,000	68%	5,478,300,000	Kecamatan Jekan Raya	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	64%	4,500,000	66%	5,000,000	68%	6,000,000	68%	6,000,000	Kecamatan Jekan Raya	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	64%	47,000,000	66%	49,500,000	68%	51,500,000	68%	51,500,000	Kecamatan Jekan Raya	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,517,250,000	0	0	0	0	0	100	2,517,250,000	Kecamatan Jekan Raya	
			Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	952,546,997	0	0	0	0	0	0	0	100%	952,546,997	Kecamatan Jekan Raya	
			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	65%	72%	224,625,000	0	0	0	0	0	0	0	72%	224,625,000	Kecamatan Jekan Raya	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	74%	80%	87,130,000	0	0	0	0	0	0	0	80%	87,130,000	Kecamatan Jekan Raya	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	66,781,507	0	0	0	0	0	0	0	100%	66,781,507	Kecamatan Jekan Raya	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat desa	0.72	0.77	1,777,764,225	0.83	0	0	0	0	0	0	0.83	1,777,764,225	Kecamatan Jekan Raya	
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%							100%			
				Persentase Posyandu Aktif	50%	60%		70%							70%			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa /Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	1,945,718,932	70%	1,978,950,000	0	0	0	0	0	70%	1,978,950,000	Kecamatan Jekan Raya	
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100%	7,918,830,888	100%	7,718,959,811	100%	7,999,603,567	100%	7,999,603,567	Kecamatan Sabangau	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B / 80,70	1,075,031,273	A / 81,30	1,152,715,974	A / 81,50	1,228,413,625	A / 81,50	1,228,413,625	Kecamatan Sabangau	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0	0	0	0	21 Kegiatan	1,106,649,356	21 Kegiatan	1,656,947,336	21 Kegiatan	1,685,066,132	21 Kegiatan	1,685,066,132	Kecamatan Sabangau	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	100%	100,704,900	100%	118,121,100	100%	112,051,810	100%	112,051,810	Kecamatan Sabangau	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,417,885,460	0	0	0	0	0	100	2,417,885,460	Kecamatan Sabangau	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	95%	100%	725,154,452	0	0	0	0	0	0	0	100%	725,154,452	Kecamatan Sabangau	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	65%	72%	1,080,975,000	0	0	0	0	0	0	0	72%	1,080,975,000	Kecamatan Sabangau	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur		90%	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	90%	36,000,000	Kecamatan Sabangau	
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Kecamatan Sabangau	
			Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100%	100%	44,527,300	0	0	0	0	0	0	0	100%	44,527,300	Kecamatan Sabangau	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	0,64	0,71	198,409,850	0,78	0	0	0	0	0	0	0,78	305,887,140	Kecamatan Sabangau	
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%							100%			
				Persentase Posyandu Aktif	100%	100%		100%							100%			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50.00	60.00	3,099,623,000.00	0.70	1,002,176,000.00	0	0	0	0	0	0.70	1,002,176,000.00	Kecamatan Sabangau	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Layanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintahan	0	0	0	0	100%	7,552,120,545	100%	7,836,188,221	100%	8,081,223,245	100%	8,081,223,245	Kecamatan Rakumpit	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	0	0	0	0	B / 78,06	372,459,250	A / 81,35	489,617,500	A / 83,03	539,126,750	A / 83,03	539,126,750	Kecamatan Rakumpit	
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah	0	0	0	0	100%	2,804,231,500	100%	2,849,923,500	100%	2,944,958,500	100%	2,944,958,500	Kecamatan Rakumpit	
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0	0	100%	77,400,000	100%	92,400,000	100%	97,400,000	100%	97,400,000	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	2,394,085,400	0	0	0	0	0	100	2,394,085,400	Kecamatan Rakumpit	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kebutuhan Administrasi SOPD Kec. Rakumpit	95%	100%	601,606,785	0	0	0	0	0	0	0	100%	601,606,785	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja	65%	72%	1,331,352,000	0	0	0	0	0	0	0	72%	1,331,352,000	Kecamatan Rakumpit	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang taat terhadap peraturan kerja	75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase ASN yang profesional dibidang tugasnya	75%	80%	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	80%	36,000,000	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Perencanaan, Kinerja, Keuangan, dan Akuntabilitas SOPD	100%	100%	14,643,200	0	0	0	0	0	0	0	100%	14,643,200	Kecamatan Rakumpit	
			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Rata - rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0.75	0,78	2,785,468,890	0,80	154,779,600.00	0	0	0	0	0	1	154,779,600.00	Kecamatan Rakumpit	
				Presentase PKK aktif	100%	100%		100%		0					100%			
				Persentase Posyandu Aktif	50%	60%		70%		0					100%			
			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/ Kelurahan	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	50%	60%	917,030,225	70%	1,023,040,000	0	0	0	0	0	70%	1,023,040,000	Kecamatan Rakumpit	
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM															
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
x	xx	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Pelayanan Urusan Penunjang Kegiatan Pemerintah	0	0	0	0	12 Bulan	4,364,900,181	12 Bulan	4,658,644,052	12 Bulan	4,603,967,355	12 Bulan	4,603,967,355	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat	0	0	0	0	1500	690,000,000	3427	690,000,000	3952	740,000,000	3952	740,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	0	0	0	0	100	150,000,000	100	150,000,000	100	10,350,000,000	100	10,350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat	0	0	0	0	40	70,000,000	50	70,000,000	60	70,000,000	60	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target		Rp
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,SOSIAL DAN BUDAYA	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan bdaya	0	0	0	0	24 dokumen	290,000,000	45 dokume n	290,000,000	45 dokume n	290,000,000	45 dokume n	290,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial	0	0	0	0	16	740,000,000	16	740,000,000	16	790,000,000	16	790,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Cakupan Pelayanan Pemerintah	0	0	0	100	1,871,000,000	0	0	0	0	0	100	1,871,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	1,016,671,200	0	0	0	0	0	0	0	100	1,016,671,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100	100	391,520,000	0	0	0	0	0	0	0	100	391,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program peningkatan disiplin aparatur	Cakupan pembinaan disiplin aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan penyelenggaraan system akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100	100	32,623,750	0	0	0	0	0	0	0	100	32,623,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terciptanya tingkat keamanan dan kenyamanan di wilayah Kota palangka Raya	0	0	622,200,000	0	0	0	0	0	0	0	622,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Program Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan	0	0	1,307,938,000	0	0	0	0	0	0	0	1,307,938,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Tercapainya tingkat pemahaman politik masyarakat	0	0	1,278,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,278,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Program Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Tercapainya ketahanan ideologi pancasila dan pemahaman wawasan kebangsaan	380	0	0	2340	1,590,000,000	0	0	0	0	0	2340	1,590,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Terciptanya Keamanan dan kenyamanan di Wilayah Kota Palangka Raya	95	0	0	151	1,440,000,000	0	0	0	0	0	151	1,440,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Meningkatnya pemahaman mengenai peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi	0	0	0	53	340,000,000	0	0	0	0	0	53	340,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			Program Peningkatan Pendidikan Politik	Pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP serta meningkatnya partisipasi memilih mengikuti Pemilu	145			82	170,000,000	0	0	0	0	0	82	170,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
			JUMLAH				519,787,447,457.14		771,803,773,460.98		1,097,466,877,884.04		1,145,916,420,417.04		1,195,476,737,231.50			

BAB VIII



PALANGKA RAYA
Kota Cantik



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kebijakan umum dan program pembangunan secara nyata harus bisa terukur dan dirasakan keberhasilannya oleh masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan. Tolak ukur tersebut berupa indikator-indikator kinerja pembangunan. Indikator yang ingin dicapai ditetapkan target-target capaiannya. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*).

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, dan merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.



Indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ditampilkan pada Tabel 8.1 dan 8.2 di bawah ini:

Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Ke Pu an (IKPU)			63	64	65
2	Indeks Kualitas Permukiman (IKPR)			65.30	68.46	71.63
3	Persentase Kecamatan yang terlayani Transportasi Umum (TU)			60%	60%	80%
4	Persentase Wilayah (Kelurahan) yang terkoneksi Jaringan Internet (TI)			63%	70%	76%
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan			50	50	50
6	Indek Kualitas AIR			70	70	70
7	Indeks Kualitas Udara			75	75	75
8	Angka Harapan Hidup	73.20	73.15	73.17	73.19	73.19
9	Harapan lama sekolah	11.04	11.05	11.06	11.07	11.10
10	Rata-Rata Lama Sekolah			11.80	11.84	11.85
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.78	5.84	5.84	5.78	5.72
12	Angka Kemiskinan	9,69%	9,69%	9,72%	9,69%	9,66%
13	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	CC	CC	B
14	Nilai sakip	CC	CC	CC	CC	B
15	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Indeks Kepuasan Masyarakat	B	B	B	A	A
17	Angka Kriminalitas	5.90	5.80	5.75	5.60	5.55





No	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
18	Angka Konflik			15	15	15
19	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	7.15	3.30	4.06	4.05	4.04
20	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	9.43	8.05	8.99	8.86	8.69
21	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	3.60	7.33	6.16	6.31	6.41
22	Nilai Investasi	200	225	255	295	350



Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Pertumbuhan Ekonomi	6,96	7,00	7,05	7,10	7,15	7,20	7,20
2	PDRBper Kapita(ADHK)	10.154.1 19.2	10.881. 804.9	11.592. 620,0	12.360. 214,8	13.162. 975,6	14.000. 902,4	14.000.902 ,4
3	PDRBper Kapita(ADHB)	58,17	63,81	69,92	76,42	83,31	90,59	90,59
4	Laju inflasi	4,00	3,90	3,85	3,80	3,7	3,65	3,65
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.00	5.78	5.84	5.84	5.78	5.72	5.72
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	3,47%	3,45%	3,43%	3,40%	3,38%	3,35%	3,35%
7	Jumlah Penduduk Miskin	9,78	9.69	9.69	9.72	9.69	9.66	9.66
9	Indeks Pembangunan Manusia	79,70	79,80	79,90	80,00	80,10	80,20	80,20
10	Angka Harapan Hidup	73.13	73.20	73.15	73.17	73.19	73.19	73.19
11	Harapan Lama Sekolah	11.03	11.04	11.05	11.06	11.07	11.10	11.10
12	Rata-Rata Lama Sekolah				11.80	11.84	11.85	11.85
13	Pengeluaran Per kapita	13.677	14. 091	14.085	15.538	15.584	16.178	16.178
14	Indeks Gini	0,330	0,327	0,325	0,322	0,320	0,318	0,318
15	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90	90,10	90,20	90.20	91.80	93.40	93.40
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							
1	Menurunnya Angka Putus Sekolah				0.05	0.05	0.05	0.05
2	APK SD/MI				120.00	125.00	128.00	128.00
3	APM SD/MI				97.20	98.00	98.10	98.10
4	Menurunnya angka putus sekolah SD/MI				0.01	0.01	0.01	0.01
5	Angka kelulusan SD/MI				100.00	100.00	100.00	100.00
6	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah SD/MI				47.77	90.00	95.00	95.00
7	Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS				0.09	0.09	0.08	0.08
8	APK SMP/MTs				104.5	104.7	105	105
9	APM SMP/MTs				95	95.1	95.2	95.2
10	APK PAUD				60	60.5	60.75	60.75
11	APM PAUD				40	40.2	40.5	40.75
12	Persentasi guru yang telah mengikuti uji kompetensi guru				85.00	97.00	99.00	99.00
13	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV				96.00	755.00	755.00	755.00
14	Rasio guru terhadap murid PAUD				754.90	462.90	463.00	463.00
15	Rasio guru terhadap murid SD/MI				462.85	553.75	554.00	554.00
16	Rasio guru terhadap murid SMP/MTS				553.50	554	554	554
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (%)				100%	100%	100%	100%
2	Indeks Keluarga Sehat (kategori sehat)				25%	28%	30%	30%
3	Indeks peningkatan kapasitas SDM Kesehatan				41	44,2	47	47



4	Indeks pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman				24.65	27.65	29.65	29.65
5	Persentase Kelurahan siaga aktif (minimal madya)				10%	20%	30%	30%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Persentase pengelolaan sumber daya air				56.00	57.00	58.00	58.00
2	Persentase pengembangan SPAM				70.00	71.00	72.00	72.00
3	Persentase pengembangan sistem persampahan				60.00	61.00	62.00	62.00
4	Persentase pengembangan sistem air limbah				65	66.00	67.00	67.00
5	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase				57.00	58.00	59.00	59.00
6	Persentase pengembangan permukiman				58.00	59.00	60.00	60.00
7	Persentase penataan bangunan gedung				56.00	57.00	58.00	58.00
8	Persentase jalan dalam kondisi baik				59.00	60.00	61.00	61.00
9	Persentase pengembangan jasa konstruksi				73.00	74.00	75.00	75.00
10	Persentase Ketaatan terhadap Penataan Ruang				56.00	63.00	78.00	78.00
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Persentase Rumah Layak Huni				96.62%	96.70	97.78	97.78
2	Persentase Kawasan Permukiman Yang Didukung PSU				33.98%	40.23	46.48	46.48
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Cakupan Layanan Urusan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				100	100	100	100
2	Cakupan Layanan Program Penanggulangan Bencana				100	100	100	100
3	Cakupan Penanggulangan Kebakaran				60	65	70	70
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							
1	Presentase PSKS yang berkontribusi dalam Proses Penanganan PPKS				80%	80%	80%	80%
2	Presentase PPKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				50%	50%	50%	50%
3	Persentase Fakir Miskin yang Menerima bantuan sosial				45%	45%	45%	45%
4	Presentase Korban Bencana alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya				80%	80%	80%	80%
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
1	Cakupan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja				83	83	83	83
2	Cakupan Program Penempatan Tenaga Kerja				75	75	75	75
3	Cakupan Program Hubungan Industrial				75	75	75	75
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase Perangkat Daerah yang Melaksanakan PPRG				35	45	50	50





2	Persentase Kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang Aktif				100	100	100	100
3	Tingkat Capaian Kota Layak Anak				450	550	700	700
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Sistem Data Gender dan Anak				0	550	0	0
5	Tingkat Capaian Kota Layak Anak				0	550	700	700
6	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum				100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
1	Meningkatnya Angka Kecukupan Energi dan Protein				2.167	2.192	2.217	2.217
2	Menurunnya Persentase Daerah (Kelurahan) Rawan Pangan				100 %	90 %	90 %	90 %
3	Tingkat keamanan pangan segar yang diuji $\geq 80\%$				80	90	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							
1	Persentase Sengketa Tanah Garapan				100	100	100	100
2	Persentase Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan				100	100	100	100
3	Persentase Pengelolaan Tanah Kosong				100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
1	Jumlah RPPLH dan KLHS kota				2 dokume n	2 dokume n	2 dokume n	2 dokumen
2	Presentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan				75	75	75	75
3	Jumlah keanekaragaman hayati dan ekosistem				1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi
4	Jumlah pelaku usaha/kegiatan dan kesadaran masyarakat yang menghasilkan limbah B3 dan limbah cair				50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha
5	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin PPLH				250 Pelaku usaha	250 Pelaku usaha	250 Pelaku usaha	250 Pelaku usaha
6	Presentase pengakuan keberadaan MHA dan penguatan MHA				100	100	100	100
7	Jumlah pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan kota				6 kegiata n	3 kegiata n	3 kegiata n	3 kegiatan
8	Jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup				7 kegiata n	7 kegiata n	7 kegiata n	7 kegiatan
9	Presentase penanganan, pengaduan lingkungan hidup				100	100	100	100
10	Presentase penanganan dan pengurangan sampah				20	20	20	20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Jumlah Layanan Program Pendaftaran Penduduk				12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
2	Jumlah Data/Dokumen dalam Program Pencatatan Sipil				7 dokume n	7 dokume n	7 dokume n	7 dokumen
3	Jumlah Data/Dokumen Program				17	17	17	17





	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				dokumen	dokumen	dokumen	dokumen
4	Jumlah Data/Dokumen Program Pengelolaan Profil Kependudukan				14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen	14 dokumen
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Jumlah Kelurahan yang termasuk kategori Kelurahan Mandiri				2	3	5	5
2	JUMLAH PKK AKTIF				36	36	36	36
3	JUMLAH POSYANDU AKTIF				141	143	145	145
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KAB				2,20%	2,15	2,00	2,00
2	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk				7,60	6,70	6,37	6,37
3	TOTAL FERTILITY RATE (TFR)				17,15%	17,39	17,56	17,56
4	CAKUPAN PUS YANG INGIN BR-KB TIDAK TERPENUHI (UNMEET Nedd)				78,86	81,98	85,50	85,50
5	PERSENTASE PENGGUNAAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)				15,5%	17,5%	17,5%	17,5%
6	ANGKA PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CPR) BAGI PEREMPUAN MENIKAH USIA 15-49 TAHUN				78,86	81,98	85,50	85,50
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang Ber KB Mandiri				15,5%	17,5	20	20
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							
1	Level Keselamatan Transportasi				0,197	0,196	0,195	0,195
2	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga				54153	54153	54153	54153
3	Jumlah Pengelolaan Penerbangan				0	0	1	1
4	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perkeretaapian				1	1	1	1
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Cakupan pengembangan informasi dan komunikasi publik				80%	85%	90%	90%
2	Persentase Akses Jaringan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Perangkat Daerah yang terintegrasi				60%	80%	100%	100%
3	Persentase pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya				75%	80%	90%	90%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
1	Presentase Koperasi Berkualitas				39%	45%	50%	50%
2	Presentase Koperasi Sehat				20%	30%	40%	40%
3	Jumlah Koperasi yang difasilitasi pelatihan perkoperasian				100 Koperasi	140 Koperasi	160 Koperasi	160 Koperasi
4	Jumlah Koperasi yang mendapatkan				100	100	100	100





	akses pembiayaan				Koperasi	Koperasi	Koperasi	Koperasi
5	Jumlah Usaha Mikro Kecil				30%	32%	34%	34%
6	Jumlah UKM yang difasilitasi dalam pengembangan Usaha				70 UMKM	80 UMKM	90 UMKM	90 UMKM
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							
1	Persentase Peningkatan Iklim Investasi yang Kondusif				30	40	50	50
2	Persentase Peningkatan Investasi PMDN				15	25	35	35
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				83.95	84.95	85.96	85.96
4	Persentase Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)				20	30	45	45
5	Persentase Pengelolaan Data Terintegrasi Secara Elektronik				100	100	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepmudaan				23	23	23	23
2	Cakupan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan				59	59	59	59
3	Cakupan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan				31	31	31	31
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							
1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang terintegrasi				1 Aplikasi Data	1 Aplikasi Data	1 Aplikasi Data	1 Aplikasi Data
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							
1	Persentase PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD				45	60	70	70
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							
1	Jumlah SDM yang melestarikan Kesenian Tradisional dan Objek kebudayaan				20	20	20	20
2	Meningkatnya Pelaku Kesenian Tradisional (Jumlah Orang)				45	45	45	45
3	Persentase Cagar Budaya(%) yang di kelola				80%	80%	80%	80%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perpustakaan				2,5	2,5	3	3
2	Jumlah Terlaksanannya Pelestarian naskah kuno dan koleksi Budaya etnis Nusantara				350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							
1	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Arsip				100	100	100	100
2	Persentase SOPD yang sudah melaksanakan Program perlindungan dan penyelamatan arsip				60	80	100	100
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton/ tahun)				5244.7 8	5507	5782.4	5782.4
2	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton/tahun)				23531. 4	25785	28038	28038
3	Jumlah kelompok masyarakat pengawasan perairan umum (persen)				66.67	83.33	100	100
4	Jumlah produksi produk hasil perikanan yang dibina (ton/tahun)				40.43	42.87	45.01	45.01





	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							
1	Indeks Pengembangan dan Pemeliharaan Destinasi Pariwisata				2	2	2	2
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)				1.4	1.6	1.8	1.8
3	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				500	500	500	500
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							
1	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				16	16,5	17	17
2	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Perkebunan				19	19,5	20	20
3	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan				12	12,5	13	13
4	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				16	16,5	17	17
5	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan				12	12,5	13	13
6	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				16	16,5	17	17
7	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan Perkebunan				19	19,5	20	20
8	Rata - Rata Pertumbuhan Produksi Peternakan				12	12,5	13	13
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
1	Presentase pendistribusian Bahan Pokok				85	90	95	95
2	Presentase Pengendalian Harga Pasar				85	90	95	95
3	Persentase UTP yang sesuai standarisasi				60	65	70	70
4	Presentase Kontribusi PDRB Sektor perdagangan				11.72	12.12	12.52	12.52
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
1	Tumbuhnya Sentra Industri Potensial				15 Industri	20 Industri	30 Industri	30 Industri
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kesejahteraan rakyat				100	100	100	100
2	Persentase peningkatan kinerja urusan perekonomian dan pembangunan				100	100	100	100
3	Cakupan Layanan Urusan Administrasi Umum				100	100	100	100
	SEKRETARIAT DPRD							
1	Cakupan Layanan dan Administrasi Keuangan DPRD				90	95	95	95
2	Cakupan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				90	90	95	95
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	PERENCANAAN							
1	PD= % Kelengkapan Data Sesuai SIPD				50	75	85	85
2	PP= % Konsistensi RPJMD-RKPD-Renstra				95	95	95	95





Perubahan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023

3	PI = % Pelaksanaan RKPD-APBD Ketepatan Pelaksanaan Waktu Implementasi				90	90	90	90
4	PE = % Capaian Evaluasi				93	93	95	95
5	Jumlah Fasilitasi dan Monev Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				6 laporan	6 laporan	6 laporan	6 laporan
6	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Perekonomian dan SDA				100	100	100	100
7	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				100	100	100	100
	KEUANGAN							
1	Indeks Pengelolaan Keuangan (IPK)				90	90	90	90
2	INDEKS PENGELOLAAN ASET (IPA)				90	90	90	90
3	Jumlah Laporan Peningkatan Pendapatan Daerah yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik Berkualitas				1 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	1 Laporan
	KEPEGAWAIAN							
1	Persentase OPD Pemerintah Kota Palangka Raya dengan data pegawai yang akurat				80	90	95	95
2	Persentase Ketepatan Penyelesaian Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. III ke bawah				100	100	100	100
3	Persentase Pejabat sesuai dengan kompetensi dan syarat jabatan				70	75	80	80
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
1	Persentase Pejabat yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Struktural sesuai dengan eselon yang dijabat				70%	80%	90%	90%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
1	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah				100	100	100	100
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
	INSPEKTORAT DAERAH							
1	Progress Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (%)				75	80	85	85
2	Cakupan Pengendalian Intern Pemerintah (%)				80	83	85	85
	UNSUR KEWILAYAHAN							
	KECAMATAN PAHANDUT							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				B / 73,80	A / 81,27	A / 81,30	A / 81,30
2	Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat				33 Kegiata n	33 Kegiata n	33 Kegiata n	33 Kegiatan
3	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%
	KECAMATAN BUKIT BATU							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				B (79,76)	A (81,26)	A (81,30)	A (81,30)
2	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				100	100	100	100
3	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100	100	100	100
	KECAMATAN JEKAN RAYA							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				B (74,51)	A (85,26)	A (85,26)	A (85,26)
2	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah				64%	66%	68%	68%
3	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				64%	66%	68%	68%





4	Persentase pelayanan Urusan Pemerintahan Umum				64%	66%	68%	68%
	KECAMATAN SABANGAU							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				B / 80,70	A / 81,30	A / 81,50	A / 81,50
2	Terpetakan hasil dana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat				21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan	21 Kegiatan
3	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%
	KECAMATAN RAKUMPIT							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				B / 78,06	A / 81,35	A / 83,03	A / 83,03
2	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di perangkat daerah				100%	100%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan Urusan Pemerintahan Umum				100%	100%	100%	100%
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Terbentuknya ideologi pancasila dan karakter kebangsaan di masyarakat				1500	3427	3952	3952
2	Partai Politik yang berperan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik				100	100	100	100
3	Cakupan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan Organisasi masyarakat				40	50	60	60
4	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan bdaya				24 dokumen	45 dokumen	45 dokumen	45 dokumen
5	Cakupan layanan urusan penunjang kegiatan peningkatan kewaspadaan dan penanganan konflik sosial				16	16	16	16

BAB IX





BAB IX PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023. RPJMD Kota Palangka Raya ini disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 menjabarkan perencanaan strategis dalam rangka menentukan arah pembangunan Kota Palangka Raya, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah strategis apa yang dilakukan agar tujuan dapat tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Penyusunan RPJMD ini telah dilakukan melalui pendekatan teknokratik, *top-down bottom-up*, partisipatif, serta pendekatan politis, dengan melibatkan seluruh *stakeholders* atau para pemangku kepentingan di Kota Palangka Raya. Untuk menjamin pencapaian visi, misi, program yang telah disusun, pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Kota Palangka Raya ini berakhir, maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum serta prioritas program Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.





- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- 3) Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masa transisi merupakan tahun pertama RPJMD dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

Untuk terciptanya koordinasi, keberlanjutan program, efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Maka Kaidah pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya;
2. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD ini;
3. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Palangka Raya;
4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Musrenbang Kota;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan pendekatan pencapaian hasil (*outcomes*);
6. Berkaitan dengan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);





7. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Palangka Raya melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota Kota Palangka Raya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah ini tentunya sangat ditentukan oleh kepemimpinan dan tata pemerintahan yang baik, dukungan dari Pemerintah Pusat, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, serta kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha. Dengan pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah, diharapkan Kota Palangka Raya akan menjadi kota yang aman, sejahtera, dan bermartabat.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 ini disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk dipedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.


WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN